

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN KEPAHANG, 2025 – 2029

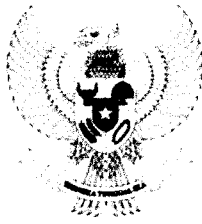


RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN KEPAHANG, 2025 – 2029



BAPPEDA Kabupaten Kepahiang
2025



**BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR 1. TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025- 2029;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Udang-undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2024-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 3);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025 Nomor 4);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 Nomor 41);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2024 Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG
Dan
BUPATI KEPAHIANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kepahiang.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepahiang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan baerbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya di singkat RPJMD adalah dokummen perencanaan 5 (lima) tahunan terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan Pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

12. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan Pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas Nasional adalah penjabaran visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang telah dicanangkan semenjak masa kampanye, dan mempertimbangkan hal penting lainnya.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Bupati serta target Pembangunan Nasional.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Pembangunan Daerah.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
19. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
20. Strategis adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
21. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi Isu Strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategis.
22. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya Pembangunan.
23. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
24. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

25. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah sebagai instrument arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
- (3) RPJMD berpedoman pada RPJMD Nasional dan RPJMD Provinsi.
- (4) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
 - b. pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun Renja Pemerintah Daerah.
- (5) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabarkan visi, misi, dan program pembangunan Bupati.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN.

BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH.

BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB V : PENUTUP.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD

Pasal 4

- (1) Bupati melaksanakan RPJMD melalui Penyusunan RKPD setiap tahunnya.
- (2) Perangkat Daerah melaksanakan RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui Renstra dan Renja.

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan secara berkala.

Pasal 6

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD mencakup program Pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemantuan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD untuk menjamin bahwa:
 - a. program Pembangunan jangka menengah daerah telah dipedomani dalam merumuskan sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah; dan
 - b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Pembangunan jangka menengah daerah telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas Pembangunan tahunan daerah.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk memngevaluasi dan memastikan bahwa program Pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 7

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai Misi, Tujuan dan Sasaran dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan rencana penilaian hasil pelaksanaan RPJMD digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD dengan capaian

- rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD; dan
- b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan sasaran dan prioritas pembangunan jangka menengah Daerah Provinsi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memastikan bahwa Visi, Misi, Tujuan dan sasaran RPJMD dapat dicapai untuk mewujudkan Visi RPJPD.
 - (4) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1(satu) Kali dalam 5 (lima) Tahun dengan menggunakan hasil monitoring dan evaluasi hasil RKPD.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan
 - b. terjadi perubahan kebijakan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik social budaya, gangguan keamanan dan pemekaran daerah.
- (3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi pedoman perubahan RKPD dan Perubahan Renstra.

Pasal 9

- (1) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2030 berpedoman pada:
 - a. arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Tahun 2025-2045;
 - b. program prioritas nasional dalam RKP;
 - c. peraturan daerah tentang Perangkat Daerah.
- (2) RKPD Tahun 2030 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari RPJMD Tahun 2025-2029 yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2030.
- (4) Dokumen perencanaan Pembangunan daerah masih tetap berlaku dan setelah diundangkannya Peraturan

Daerah ini, harus segera menyesuaikan dengan RPJMD Tahun 2025-2029.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 25 Agustus 2025

BUPATI KEPAHIANG,



H. ZURDI NATA

Diundangkan di Kepahiang
pada tanggal 25 Agustus 2025



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,

HARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2025 NOMOR ...
NOREG PERDA KABUPATEN KEPAHIANG, PROVINSI BENGKULU NOMOR:
(2/25/2025).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR 1. TAHUN 2025
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2025-2029

I. KETENTUAN UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahunan yang memuat penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. RPJMD memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Organisasi Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang terpilih, serta merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RPJMD ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan daerah selama lima tahun, yang dimulai dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

RPJMD ini disusun berdasarkan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan atas-bawah (*top-down*) serta bawah-atas (*bottom-up*). Dalam penyusunannya, memperhatikan pula arah kebijakan pembangunan nasional serta mempertimbangkan kondisi, potensi, permasalahan, dan aspirasi masyarakat Kabupaten Kepahiang. Penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah ke dalam

strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. RPJMD menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah serta menjadi acuan dalam pelaksanaan penganggaran tahunan daerah.

Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif adalah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten, Daerah provinsi, hingga nasional.

Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Penyusunan RPJMD dilakukan melalui berbagai tahapan yaitu: persiapan penyusunan; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan; pelaksanaan Musrenbang; perumusan rancangan akhir; dan penetapan, dimana setiap tahapannya dengan melibatkan stakeholders dan pemangku kepentingan.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepahiang

Tahun 2025–2029 sangat tergantung dari komitmen bersama antara pemangku kepentingan di Kabupaten Kepahiang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG NOMOR 56.



BUPATI KEPAHIANG

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029 dapat disusun dan diterbitkan. Dokumen ini menjadi pedoman penting dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Kepahiang selama 5 Tahun mendatang sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Visi Kabupaten Kepahiang “Mewujudkan Kepahiang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”, melalui 5 (lima) misi yaitu: 1. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia dan Penguatan Kohesivitas Sosial untuk Mewujudkan Masyarakat Madani yang Berakhlak, Berbudaya dan Berdaya Saing, 2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Fondasi Perekonomian Daerah dengan Memaksimalkan SDA Berbasis Potensi Unggulan dan Karakteristik Daerah, 3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Prima, 4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Air dan Pangan serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim, dan 5. Mewujudkan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis serta Penguatan Konektivitas Wilayah yang Memadai, Berkualitas dan Berkelanjutan.

Untuk itu dalam mensinergikan gerak langkah pembangunan Kabupaten Kepahiang, diharapkan semua pemangku kepentingan di Kabupaten Kepahiang dapat mempedomani, mendukung dan bekerjasama serta berperan aktif agar Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Kepahiang tersebut dapat terlaksana dan terwujud sesuai dengan harapan kita bersama.

Akhir kata, Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Tim yang telah bekerja keras dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepahiang 2025-2029 ini, semoga melalui dokumen ini kita dapat memberikan pelayanan yang terbaik demi mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Kepahiang. Terimakasih.

Wassalaamu'alaikum Waramatullahi Wabarakatuh

BUPATI KEPAHIANG



H. ZURDI NATA, S.IP

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, sehingga penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Penyusunan RPJMD ini dilakukan melalui pendekatan partisipatif, politik, teknokratik serta *button up* dan *top down* dengan melibatkan masukan dari pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, akademisi masyarakat dan sektor swasta.

RPJMD ini menjadi panduan pembangunan di Kabupaten Kepahiang selama 5 tahun kedepan dan mewujudkan Kabupaten Kepahiang yang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan" merupakan gambaran keadaan yang ingin dicapai pada tahun 2030 mendatang.

Terima kasih saya sampaikan kepada tim penyusun RPJMD serta semua pihak yang terlibat dalam memberikan masukan, saran, ide serta gagasan dalam dokumen ini. Semoga RPJMD Kabupaten Kepahiang 2025-2029 ini dapat menjadi pedoman yang efektif dan inspiratif dalam menentukan arah pembangunan daerah kita menuju masadepan yang lebih cerah dan berkelanjutan.

Wassalaamu'alaikum Waramatullahi Wabarakatuh





DAFTAR ISI

SAMBUTAN ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR GAMBAR..... v

DAFTAR TABEL..... viii

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang.....1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....2

1.3. Hubungan Antar Dokumen 8

1.4. Maksud dan Tujuan.....13

1.5. Sistematika Penulisan 14

BAB II..... 17

GAMBARAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG 17

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI.....17

2.1.1.1.Posisi dan Peran Strategis Daerah.....17

2.1.1.2.Potensi Sumber Daya Alam 24

2.1.1.3.Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup 29

2.1.1.4.Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan 30

2.1.1.5.Lingkungan Hidup Berkualitas 32

2.1.1.6.Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim 35

2.1.1.7.Demografi.....37

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.....42

2.2.1.Kesejahteraan Ekonomi 42

2.2.2.Kesehatan untuk Semua.....49

2.2.3.Pendidikan Berkualitas yang Merata 58

2.2.4.Perlindungan Sosial yang Adaptif 66

2.2.5.Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju.....68

2.2.6.Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif.....69

2.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH 72

2.3.1.Daya Saing Sumber Daya Manusia 72

2.3.2,Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi.....77

2.3.3.Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru 79

2.3.4.Transformasi Digital.....79

2.3.5.Integrasi Ekonomi Domestik dan Global 79



2.3.6.	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	80
2.3.7.	Stabilitas Ekonomi Makro	83
2.4.	ASPEK PELAYANAN UMUM	87
2.4.1.	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif.....	87
2.4.2.	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial	90
2.5.	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....	91
2.5.1.	Kinerja Keuangan Masa Lalu	91
2.5.2.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	111
2.5.3.	Kerangka Pendanaan.....	114
2.6.	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	124
2.6.1.	Permasalahan Daerah	124
2.7.	ISU STRATEGIS DAERAH	127
2.7.1.	Isu Strategis Global	127
2.7.2.	Isu Strategis Nasional.....	128
2.7.3.	Isu Strategis Regional Sumatera	128
2.7.4.	Isu Strategis Provinsi Bengkulu	129
2.7.5.	Isu Strategis Kabupaten Kepahiang.....	129
BAB III		132
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		132
3.1.	VISI	132
3.2.	MISI	134
3.3.	TUJUAN	137
3.4.	SASARAN	137
3.5.	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	149
3.5.1.	Strategi.....	149
3.5.2.	Penahapan Pembangunan RPJMD	155
3.5.3.	Program Prioritas RPJMD.....	155
3.5.4.	Arah Kebijakan.....	248
BAB IV		263
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....		263
4.1.	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG 2026-2030.....	264
4.2.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	346
4.3.	INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	347



BAB V 364

PENUTUP..... 364

5.1. PEDOMAN TRANSISI.....364

5.2. KAIDAH PELAKSANAAN 365



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya 9

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Kepahiang 17

Gambar 2.2 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Pertanian Padi di Kabupaten Kepahiang, 2020-2024 (%) 28

Gambar 2.3 Produksi Telur dan Susu Sapi di Kabupaten Kepahiang, 2020-2024 (Ton) 29

Gambar 2.4 Perkembangan IKD Kabupaten Kepahiang, 2020-2024 31

Gambar 2.5 Perkembangan IKP Kabupaten Kepahiang, 2020-2024 31

Gambar 2.6 Perkembangan Pengeluaran per Kapita Kabupaten Kepahiang, 2020-2024 (ribu rupiah) 32

Gambar 2.7 Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan di Kabupaten Kepahiang, 2020-2024 34

Gambar 2.8 Perkembangan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kepahiang, 2020-2024 37

Gambar 2.9 Perkembangan Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kepahiang, 2020-2024 38

Gambar 2.10 Sebaran Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Kepahiang, 2020-2024 (ribu jiwa) 39

Gambar 2.11 Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Kepahiang, 2020-2024 (jiwa/km2) 39

Gambar 2.12 Perkembangan Struktur Penduduk Kabupaten Kepahiang menurut Usia Penduduk, 2020-2024 (ribu jiwa) 40

Gambar 2.13 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepahiang, 2020-2024..... 42

Gambar 2.14 Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Kepahiang, 2020-2024 (milyar rupiah)..... 42

Gambar 2.15 Laju Inflasi Kota Bengkulu, 2020-2024..... 43

Gambar 2.16 Perkembangan PDRB ADHB Per Kapita Kabupaten Kepahiang 2020-2024 (juta /per kapita/tahun) 44

Gambar 2.17 Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Kepahiang 2020-2024 44

Gambar 2.18 Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita/Bulan Komoditas Makanan dan Non-Makanan Kabupaten Kepahiang, 2020-2024 (rupiah) 46

Gambar 2.19 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kepahiang, 2020-2024 (rupiah) 47

Gambar 2.20 Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Bengkulu, 2020-2024 48

Gambar 2.21 Perkembangan UHH Kabupaten Kepahiang 2020-2024..... 49

Gambar 2.22 Rasio Dokter per Satuan Penduduk Kabupaten Kepahiang, 2020-2024..... 50

Gambar 2.23 Rasio Posyandu per Satuan Balita Kabupaten Kepahiang, 2020-2024..... 51

Gambar 2.24 Perkembangan Indikator AKB, AKBa, AKN, dan AKI Kabupaten Kepahiang, 2020-2024 52

Gambar 2.25 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Kepahiang, 2020-2024 (%) 53



Gambar 2.26	Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan, Komplikasi Kebidanan, dan Komplikasi Neonatus di Kabupaten Kepahiang, 2020-2024 (%)	54
Gambar 2.27	Cakupan Kunjungan Pelayanan Nifas Kabupaten Kepahiang, 2020-2024 (%)	55
Gambar 2.28	Cakupan Pelayanan Anak Balita di Kabupaten Kepahiang, 2020-2024 (%)	55
Gambar 2.29	Cakupan Desa/Kelurahan dengan UCI dan Persentase Anak dengan Imunisasi Campak di Kabupaten Kepahiang, 2020-2024 (%)	56
Gambar 2.30	Perkembangan Tingkat Prevalensi dan Tingkat Kematian karena Tuberkulosis Kabupaten Kepahiang, 2020-2024	57
Gambar 2.31	Proporsi Jumlah Kasus TB yang terdeteksi Program DOTS di Kabupaten Kepahiang, 2020-2024 (%)	59
Gambar 2.32	Perkembangan APS Kabupaten Kepahiang, 2020-2024	60
Gambar 2.33	Perbandingan Jumlah Anak Usia 7-12 tahun dengan Jumlah Siswa SMP/MTs di Kabupaten Kepahiang, 2020-2024	61
Gambar 2.34	Perkembangan APK Kabupaten Kepahiang, 2020-2024.....	62
Gambar 2.35	Perkembangan RLS dan HLS Kabupaten Kepahiang, 2020-2024	62
Gambar 2.36	Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Kepahiang 2020-2024.....	63
Gambar 2.37	Perbandingan Jumlah Anak Usia 7-12 tahun dengan Jumlah Siswa SD/MI di Kabupaten Kepahiang, 2020-2024	63
Gambar 2.38	Perkembangan Rasio SD/MI dan Rasio SMP/MTS Kabupaten Kepahiang, 2019-2023	64
Gambar 2.39	Perkembangan Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun, Rasio SMA/SMK/MA di Kabupaten Kepahiang, 2020-2024.....	64
Gambar 2.40	Perkembangan Rasio Guru-Siswa SD/MI dan SMP/ MTs di Kabupaten Kepahiang, 2019-2023	65
Gambar 2.41	Perkembangan Rasio Guru-Siswa SMA/MA dan SMK di Kabupaten Kepahiang, 2019-2023	66
Gambar 2.42	Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Kabupaten Kepahiang, 2020-2024	69
Gambar 2.43	Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk dan Total Fertility Rate di Kabupaten Kepahiang, 2019-2023	70
Gambar 2.44	Perkembangan Angka Pemakaian Kontrasepsi dan Angka Kelahiran Remaja di Kabupaten Kepahiang, 2020-2024.....	71
Gambar 2.45	Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja menurut Pendidikan Terakhir, 2020-2024	73
Gambar 2.46	Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja dengan Pendidikan Perguruan Tinggi dan Rasionya terhadap Jumlah Penduduk, 2020-2024	73
Gambar 2.47	Perkembangan Jumlah Penduduk Umur 0-14 Tahun, 15-64 Tahun dan 65 Tahun ke Atas, 2020-2024	74
Gambar 2.48	Perkembangan Jumlah Penduduk Usia Produktif dan Non-Produktif serta Angka Ketergantungan Penduduk (AKP), 2020-2024	75
Gambar 2.49	Perkembangan IPM Kabupaten Kepahiang, 2020-2024	76
Gambar 2.50	Perkembangan Jumlah Kendaraan, Panjang Jalan dan Rasio Panjang Jalan	82



Gambar 2.51	Rasio Jalan dalam Kondisi Baik di Kabupaten Kepahiang, 2020-2024	82
Gambar 2.52	Perkembangan Pendapatan dalam APBD Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2019-2023 (dalam rupiah)	95
Gambar 2.53	Perbandingan Rata-rata Pertumbuhan Komponen Pendapatan dalam APBD Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2019-2023	95
Gambar 2.54	Perkembangan Belanja dalam APBD Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2019-2023 (dalam rupiah)	98
Gambar 2.55	Perkembangan Komponen Belanja dalam APBD Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2019-2023 (dalam rupiah)	98
Gambar 2.56	Perkembangan Pembiayaan dalam APBD Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2019-2023 (dalam rupiah)	100
Gambar 2.57	Perkembangan Aset dalam Neraca Daerah Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2019-2023 (dalam rupiah)	103
Gambar 2.58	Perkembangan Kewajiban dalam Neraca Daerah Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2019-2023 (dalam rupiah)	104
Gambar 2.59	Perkembangan Ekuitas dalam Neraca Daerah Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2019-2023 (dalam rupiah)	105
Gambar 2.60	Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah	105
Gambar 2.61	Skala Interval Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah	106
Gambar 2.62	Skala Interval Rasio Desentralisasi Fiskal	107
Gambar 2.63	Perkembangan Rasio Cepat dan Rasio Lancar Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2019-2023	108
Gambar 2.64	Perkembangan Rasio Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2019-2023	108
Gambar 2.65	Perkembangan Rasio Cepat dan Rasio Lancar Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2019-2023	110
Gambar 2.66	Perkembangan Rasio Utang/Aset dan Rasio Utang/Ekuitas Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2019-2023 Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2019-2023	111
Gambar 2.67	Perkembangan Prporosi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2019-2023 (dalam rupiah)	112
Gambar 2.68	Perkembangan Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2019-2023 (dalam rupiah)	113
Gambar 2.69	Perkembangan Realisasi SILPA Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2019-2023 (dalam rupiah)	114
Gambar 2.70	Perkembangan Proyeksi Total Pendapatan, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2025-2029 (dalam rupiah)	118
Gambar 2.71	Perkembangan Proyeksi Total Belanja, Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2025-2029 (dalam rupiah)	121
Gambar 2.72	Perkembangan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2025-2029 (dalam rupiah)	123
Gambar 2.73	Perkembangan Prioritas Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2025-2029 (dalam rupiah)	124



Gambar 2.74 Kriteria dan Pemeringkatan Permasalahan Daerah 126



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Kecamatan, Desa, dan Kelurahan di Kabupaten Kepahiang..... 17

Tabel 2.2 Batas Wilayah Kabupaten Kepahiang..... 18

Tabel 2.3 Persentase Luas Lahan menurut Ketinggian di Kabupaten Kepahiang 19

Tabel 2.4 Persentase Luas Berdasarkan Kemiringan Wilayah Kabupaten Kepahiang 19

Tabel 2.5 Luas Lahan menurut Jenis Tanah di Kabupaten Kepahiang 21

Tabel 2.6 Potensi Tambang dan Energi di Kabupaten Kepahiang..... 21

Tabel 2.7 Aliran Sungai dan Debit Air Sungai di Kab.Kepahiang, 2007 22

Tabel 2.8 Status Mutu Air Sungai di Kabupaten Kepahiang, 2007 23

Tabel 2.9 Curah Hujan Maksimal, Minimal, dan Rerata, 2018-2021..... 24

Tabel 2.10 Luas dan Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Kepahiang, 2007.... 25

Tabel 2.11 Perkembangan Penyusunan Kebijakan Lingkungan Kabupaten Kepahiang,2019-2023 33

Tabel 2.12 Perkembangan Penanganan Sampah di Kabupaten Kepahiang, 2020-2024 34

Tabel 2.13 Potensi Bencana Alam Kabupaten Kepahiang..... 36

Tabel 2.14 Rata-rata dan Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita/Bulan untuk Komoditas Makanan dan Non-Makanan Kabupaten Kepahiang, 2020-2024 47

Tabel 2.15 Perkembangan Produktivitas Total Daerah Kabupaten Kepahiang, 2020-2024 48

Tabel 2.16 Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Kabupaten Kepahiang, 2020-2024 49

Tabel 2.17 Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Kepahiang, 2020-2024 51

Tabel 2.18 Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Kepahiang, 2020-2024 (%)..... 54

Tabel 2.19 Cakupan Penanganan Pneumonia pada Balita di Kabupaten Kepahiang, 2020-2024 (%) 56

Tabel 2.20 Cakupan dan Penemuan Penderita DBD, Malaria, dan Diare Kabupaten Kepahiang, 2020-2024 58

Tabel 2.21 Perkembangan Penanganan Masalah Sosial di Kabupaten Kepahiang, 2020-2024 67

Tabel 2.22 Perkembangan Penanganan Bencana, Kabupaten Kepahiang, 2020-2024.. 67

Tabel 2.23 Perkembangan Penyusunan Kebijakan Lingkungan Kabupaten Kepahiang, 2020-2024 68

Tabel 2.24 Perkembangan Penanganan Sampah di Kabupaten Kepahiang, 2020-2024 68

Tabel 2.25 Perkembangan Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Kepahiang, 2020-2024 (%) 69

Tabel 2.26 Perkembangan Unmeet Need dan Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang di Kabupaten Kepahiang, 2020-2024 71



Tabel 2.27	Tabel Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja, 2020-2024	72
Tabel 2.28	Rasio Industri Pengolahan Kabupaten Kepahiang Tahun 2020-2024	78
Tabel 2.29	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kepahiang Tahun 2020-2024	78
Tabel 2.30	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Kepahiang Tahun 2020-2024	79
Tabel 2.31	Indeks Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	80
Tabel 2.32	Perkembangan Rasio Desentralisasi Fiskal Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2020-2024	81
Tabel 2.33	Rasio Panjang Jalan per 1.000 Penduduk Kabupaten Kepahiang, 2020-2024	83
Tabel 2.34	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kepahiang, 2020-2024 (Miliar Rupiah)	84
Tabel 2.35	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kepahiang, 2020-2024 (Miliar Rupiah)	85
Tabel 2.36	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kepahiang Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (persen)	85
Tabel 2.37	Perkembangan Perencanaan Daerah di Kabupaten Kepahiang Tahun 2020-2024	87
Tabel 2.38	Perkembangan kinerja keuangan di Kabupaten Kepahiang Tahun 2020-2024	87
Tabel 2.39	Perkembangan kinerja urusan Kepegawaian di Kabupaten Kepahiang Tahun 2020-2024	88
Tabel 2.40	Nilai SAKIP Kabupaten Kepahiang Tahun 2020-2024	88
Tabel 2.41	Perkembangan Kinerja Pengawasan Kabupaten Kepahiang Tahun 2020-2024	89
Tabel 2.43	Perkembangan Indikator Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kepahiang Tahun 2020-2024	90
Tabel 2.44	Perkembangan Perkembangan statistik di Kabupaten Kepahiang tahun 2020-2024	90
Tabel 2.45	Perkembangan Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Kepahiang Tahun 2020-2024	91
Tabel 2.46	Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan dalam APBD Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2019-2023	93
Tabel 2.47	Rata-rata Pertumbuhan Belanja APBD Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2019-2023	96
Tabel 2.48	Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan dalam APBD Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2019-2023	99
Tabel 2.49	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2019-2023	101
Tabel 2.50	Perkembangan Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2019-2023	106
Tabel 2.51	Perkembangan Rasio Desentralisasi Fiskal Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2019-2023	107



Tabel 2.52	Perkembangan Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2019-2023	108
Tabel 2.53	Perkembangan Rasio Belanja Modal Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2019-2023Pembiayaan dalam APBD Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2019-2023	109
Tabel 2.54	Perkembangan Rasio Lancar dan Rasio Cepat Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2019-2023	110
Tabel 2.55	Perkembangan Rasio Aset/Utang dan Rasio Utang/Ekuitas Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2019-2023.....	111
Tabel 2.56	Perkembangan Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2019-2023	112
Tabel 2.57	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2019-2023	113
Tabel 2.58	Komposisi Penutupan Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2019-2023	113
Tabel 2.59	Perkembangan Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2019-2023.....	114
Tabel 2.60	Proyeksi Pendapatan Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2025-2029 ...	116
Tabel 2.61	Proyeksi Belanja Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2025-2029	119
Tabel 2.62	Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2025-2029...	122
Tabel 2.63	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2025-2029.	123
Tabel 2.64	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2025-2029	124
Tabel 3.1	Keselarasan Visi RPJMN 2025-2029, Visi RPJMD Provinsi Bengkulu 2025-2029 dan Visi RPJMD Kabupaten Kepahiang 2025-2029.....	133
Tabel 3.2	Keselarasan Misi RPJMN 2025-2029, Misi RPJMD Provinsi Bengkulu 2025-2029 dan Misi RPJMD Kabupaten Kepahiang 2025-2029	135
Tabel 3.3	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Kepahiang (Misi I)	138
Tabel 3.4	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Kepahiang (Misi II)	139
Tabel 3.5	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Kepahiang (Misi III)	140
Tabel 3.6	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Kepahiang (Misi IV)	142
Tabel 3.7	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Kepahiang (Misi V).....	143
Tabel 3.8	Keselarasan Misi dengan Program Prioritas.....	144
Tabel 3.9	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Kepahiang (Misi 1)	149
Tabel 3.10	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Kepahiang (Misi 2)	150
Tabel 3.11	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Kepahiang (Misi 3)	151
Tabel 3.12	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Kepahiang (Misi 4)	152
Tabel 3.13	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Kepahiang (Misi 5)	153
Tabel 3.14	Penahapan Pembangunan RPJMD Tahun 2026-2030.....	155



Tabel 3.15	Teknik Merumuskan Program Prioritas Daerah	155
Tabel 3.16	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029 (Misi I)	242
Tabel 3.17	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029 (Misi II)	244
Tabel 3.18	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029 (Misi III)	247
Tabel 3.19	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029 (Misi IV)	249
Tabel 3.20	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029 (Misi V).....	252
Tabel 4.1	Program Perangkat Daerah.....	258
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama	338
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Daerah.....	339

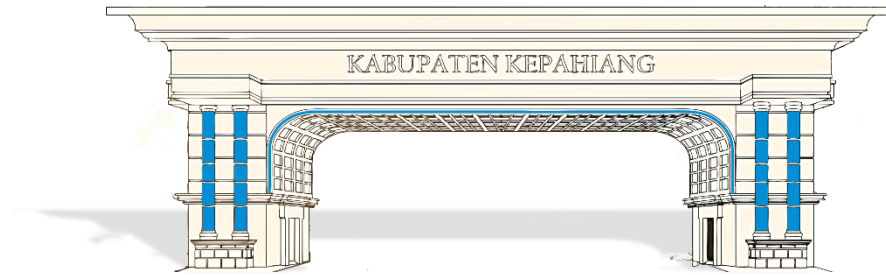


DAFTAR SINGKATAN

3R	: <i>Reduce Reuse Recycle</i>
3T	: Terdepan Terluar Tertinggal
ADHB	: Atas Dasar Harga Berlaku
ADHK	: Atas Dasar Harga Konstan
AKB	: Angka Kematian Bayi
AKBa	: Angka Kematian Balita
AKI	: Angka Kematian Ibu
AKN	: Angka Kematian Neonatal
AKP	: Angka Ketergantungan Penduduk
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
APK	: Angka Partisipasi Kasar
APM	: Angka Partisipasi Murni
APS	: Angka Partisipasi Sekolah
ASFR	: <i>Age Specific Fertility Rate</i>
Balita	: Bawah Lima Tahun
Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BKD	: Badan Keuangan Daerah
BLUD	: Badan Layanan Umum Daerah
BOS	: Bantuan Operasional Sekolah
BPS	: Badan Pusat Statistik
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
CPR	: <i>Contraceptive Prevalence Rate</i>
DBD	: Demam Berdarah Dengue
DOTS	: <i>Directly Observed Treatment Shortcourse</i>
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
EBT	: Energi Baru Terbarukan
FGD	: <i>Focussed Group Discussion</i>
Ha	: Hektar
HLS	: Harapan Lama Sekolah
IDG	: Indeks Pemberdayaan Gender
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
IPP	: Indeks Pemberdayaan Perempuan
IKD	: Indeks Ketahanan Daerah
IKP	: Indeks Ketahanan Pangan
IKU	: Indeks Kualitas Udara
JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KLHS	: Kajian Lingkungan Hidup Strategis
KB	: Keluarga Berencana
Km	: Kilo meter
KUA	: Kebijakan Umum APBD
KUBE	: Kelompok Usaha Bersama Ekonomi
LPP	: Laju Pertumbuhan Penduduk
MA	: Madrasah Aliyah
MI	: Madrasah Ibtidaiyah
MKJP	: Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
MTs	: Madrasah Tsanawiyah
Musrenbang	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan
NTP	: Nilai Tukar Petani
PAD	: Pendapatan Asli Daerah



PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
Pemda	: Pemerintah Daerah
Pemilu	: Pemilihan Umum
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
Pilpres	: Pemilihan Presiden
PMKS	: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Posyandu	: Pos Pelayanan Terpadu
PP	: Peraturan Pemerintah
PPAS	: Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
PUS	: Pasangan Usia Subur
Puskesmas	: Pusat Kesehatan Masyarakat
Pustu	: Puskesmas Pembantu
Renja K/L	: Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
Renja PD	: Rencana Kerja Perangkat Daerah
Renstra PD	: Rencana Strategis Perangkat Daerah
Renstra K/L	: Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RLS	: Rata-rata Lama Sekolah
Rp	: Rupiah
RPD	: Rencana Pembangunan Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJPD	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RPPLH	: Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
RS	: Rumah Sakit
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
SD	: Sekolah Dasar
SDM	: Sumber Daya Manusia
SiLPA	: Selisih Lebih Perhitungan Anggaran
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SPA	: Stasiun Peralihan Antara
SPM	: Standar Pelayanan Minimal
TB	: Tuberkulosis
TFR	: <i>Total Fertility Rate</i>
TPA	: Tempat Pembuangan Akhir
TPB	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TPS	: Tempat Pembuangan Sementara
TPST	: Tempat Pengolahan Sampah Terpadu
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
TWA	: Taman Wisata Alam
UCI	: <i>Universal Child Immunization</i>
UGM	: Universitas Gadjah Mada
UHH	: Usia Harapan Hidup
UMKM	: Usaha Mikro Kecil Menengah



BAB 1

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1, perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya, dalam Bab 3 Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 5, RPJMD adalah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dengan telah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati terpilih di Kabupaten Kepahiang pada tanggal 20 Februari 2025, selanjutnya Bupati dan Wakil Bupati terpilih berkewajiban menyusun RPJMD dan menetapkan dalam Peraturan Daerah. Oleh karena itu, secara substansial RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029 merupakan penerjemahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang terpilih periode tahun 2025-2029 yang dalam penyusunannya mempedomani RPJPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2045 (terutama untuk periode pertama) serta memperhatikan baik RPJMN Tahun 2025-2029 maupun RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029. Dokumen RPJMD 2025-2029 disusun bersamaan dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2025-2029, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dalam konteks penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dokumen RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029 akan dijabarkan secara rinci kedalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode tahun yang sama. Selanjutnya, dokumen RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029 akan dijabarkan secara rinci kedalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten



Kepahiang untuk mewujudkan target dan sasaran jangka menengah setiap tahunnya. Sementara, dokumen Renstra PD akan dijabarkan secara rinci per tahunnya kedalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Dalam konteks implementasi, dokumen RKPD Kabupaten Kepahiang akan menjadi pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS yang selanjutnya akan diterjemahkan kedalam dokumen APBD Kabupaten Kepahiang setiap tahunnya.

Berbeda dengan periode sebelumnya, penyusunan RPJMD Kabupaten Kepahiang 2025-2029 memiliki momentum yang sangat penting, yaitu: a) adanya pemilihan kepala daerah secara serentak; dan b) adanya penyusunan berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah (jangka panjang, jangka menengah dan tahunan) pada saat bersamaan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya (terutama dalam penganggaran) wajar apabila akan banyak terjadi berbagai penyesuaian perencanaan yang diperlukan guna menjaga konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Kepahiang 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang



- Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);



27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
30. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
32. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
33. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
34. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
35. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
36. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);



37. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
39. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan



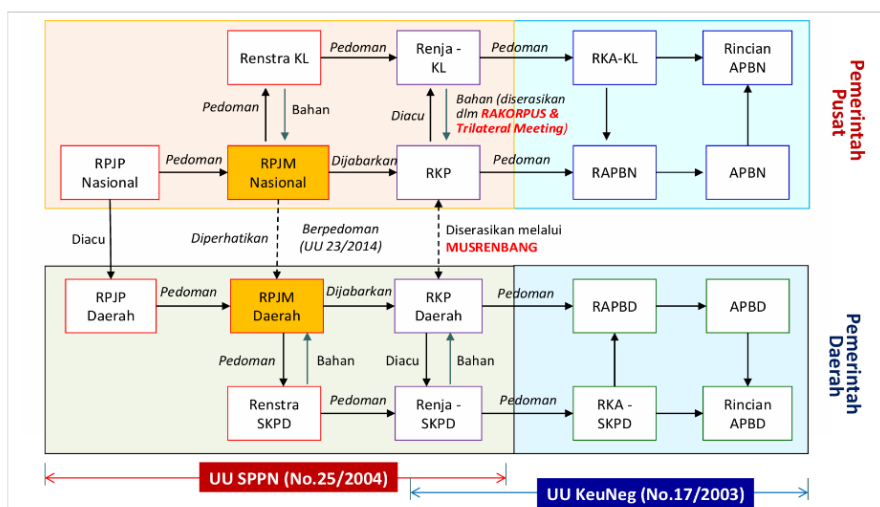
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021);
48. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
49. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6);
50. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025 Nomor 4);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 Nomor 41);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2024 Nomor 53).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Secara substansial, RPJMD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik dalam lingkup kabupaten Kepahiang, provinsi Bengkulu maupun nasional (lihat Gambar 1.1).

Gambar 1.1 Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya



Gambar di atas menunjukkan keterkaitan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya, baik di tingkat nasional maupun daerah, sesuai dengan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

A. Pemerintah Pusat:

1. RPJP Nasional (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) sebagai pedoman utama bagi seluruh perencanaan pembangunan nasional.
2. RPJM Nasional (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) merupakan Dokumen yang menjabarkan RPJP Nasional dan menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan lainnya.

B. Pemerintah Provinsi

1. RPJP Provinsi (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi) sebagai pedoman utama bagi seluruh perencanaan pembangunan daerah, diacu dari RPJP Nasional.
2. RPJM Provinsi (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) merupakan Dokumen yang menjabarkan RPJP Provinsi dan menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan lainnya

C. Pemerintah Daerah:

1. RPJP Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah): Pedoman utama bagi perencanaan pembangunan daerah, diacu dari RPJP Nasional dan Provinsi.
2. RTRW Daerah (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten menjadi salah satu pedoman dalam penyusunan RPJMD.



3. RPJM Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah): Dokumen yang menjabarkan RPJP Daerah dan menjadi dasar penyusunan RKP Daerah.
4. RKP Daerah (Rencana Kerja Pemerintah Daerah): Rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan RPJM Daerah.
5. Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah): Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja-PD.
6. KLHS RPJMD menjadi perhatian dalam penyusunan RPJMD.
7. Rancangan Teknokratik RPJMD menjadi perhatian dalam penyusunan RPJMD.
8. Evaluasi Capaian Pembangunan 5 Tahun Terakhir menjadi perhatian dalam penyusunan RPJMD.
9. Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lain menjadi perhatian dalam penyusunan RPJMD.
10. RPJP Nasional menjadi pedoman bagi RPJP Daerah.
11. RPJM Nasional menjabarkan RPJP Nasional dan memberikan pedoman untuk RPJM Daerah.
12. RPJM Daerah disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional dan dijabarkan dalam RKP Daerah.
13. Renstra PD dan Renja-PD merupakan dasar bagi penyusunan RKA-SKPD yang menjadi bahan untuk RAPBD dan akhirnya APBD. Proses penyelarasan ini dilakukan melalui mekanisme seperti Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) untuk memastikan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dan daerah, serta antara rencana strategis dengan anggaran.

1.3.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Kepahiang dengan RPJMN Tahun 2025-2029

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029 telah memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029 terutama pada agenda pembangunan nasional dan arah pembangunan wilayah sehingga dapat diselaraskan dengan target-target pembangunan RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029.

1.3.2 Hubungan RPJMD Kabupaten Kepahiang dengan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029

Secara regional, penyusunan RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029 juga telah memperhatikan kebijakan prioritas pembangunan jangka menengah Provinsi Bengkulu terutama dengan melakukan penyelarasan terhadap prioritas pembangunan terutama untuk wilayah Kabupaten Kepahiang.



1.3.3 Hubungan RPJMD Kabupaten Kepahiang dengan RPJPD Kabupaten Tahun 2025-2045

RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029 merupakan periode pertama dalam penjabaran kebijakan pembangunan yang terdapat dalam RPJPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2045. Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029 telah menerjemahkan tahapan pembangunan jangka panjang periode pertama, yaitu: Membangun Fondasi dan Struktur Transformasi Pembangunan.

Selanjutnya, RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029 juga telah menerjemahkan berbagai arah kebijakan pembangunan jangka panjang pada periode pertama, yaitu:

1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia, kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, derajat pendidikan dan kesejahteraan sosial;
2. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan penguatan fondasi kemajuan perekonomian daerah;
3. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik;
4. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik;
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, ketahanan air dan pangan serta resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim; dan
6. Percepatan penyediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis yang memadai dan berkualitas.

1.3.3 Hubungan RPJMD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepahiang Tahun 2023-2043

Secara spasial, penyusunan RPJMD Kabupaten Kepahiang tahun 2025-2029 juga memperhatikan dokumen RTRW Kabupaten Kepahiang Tahun 2022-2042. Penyusunan RPJMD memperhatikan dokumen RTRW yang di dalamnya berisi tentang pola pengembangan zonasi kewilayahan. Hal tersebut merupakan pedoman dalam menyusun kebijakan pembangunan untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Kepahiang berdasarkan potensi wilayahnya serta menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Kepahiang.



1.3.4 Hubungan RPJMD dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Kepahiang.

Penyusunan RPJMD juga telah mempertimbangkan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029 berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi serta kompensasi program dan kegiatan. Dengan demikian, rencana pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029 telah berprinsip pada pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan.

1.3.5 Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahun yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan. RPJMD memiliki hubungan erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat nasional, daerah, maupun sektoral.

Penyelarasan ini bertujuan untuk memastikan kesinambungan pembangunan, menghindari tumpang tindih kebijakan, dan mencapai target pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Berikut adalah keterkaitan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya:

1. Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDG's): Menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, pengintegrasian indikator dan target SDGs pada program pembangunan daerah dan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan mendukung pencapaian 17 tujuan/goals Sustainable Development Goals (SDG's) yang mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan, hukum dan tata kelola.
2. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) : Sebagai acuan dalam memberikan arah dan pedoman bagi pemerintah daerah untuk menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai arus utama (mainstreaming) dalam penyusunan program kerja di daerah.
3. Dokumen Sektoral dan Tematik :
 - a. **KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)** : Untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.



- b. **RENSTRA Perangkat Daerah** : Setiap perangkat daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada RPJMD agar kebijakan sektoral selaras dengan visi dan misi kepala daerah.

Dengan memperhitungkan semua aspek tersebut, Ranwal RPJMD Provinsi Bengkulu menciptakan kerangka perencanaan yang terintegrasi, mendukung harmonisasi antara kepentingan lokal dan nasional, serta memperkuat kesiapan daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks.

1.4. Maksud dan Tujuan

Secara substansial, RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk memberikan arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Kepahiang pada periode tahun 2025-2029 serta menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, kalangan dunia usaha, maupun masyarakat secara umum dalam membangun kesepakatan, kesepakatan, dan komitmen bersama dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang secara keseluruhan.

Selanjutnya, tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang terpilih kedalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah, melalui koordinasi, sinkronisasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di kabupaten Kepahiang.
- 2) Menjadi tolok ukur kinerja Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta instrumen bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
- 3) Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran teknis RPJMD pada masing-masing perangkat daerah untuk periode tahun 2025-2029 berdasarkan urusan dan kewenangan yang ada dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- 4) Menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.



1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini secara rinci menjelaskan tentang: 1) latar belakang penyusunan dokumen, 2) dasar hukum penyusunan, 3) maksud dan tujuan penyusunan, 4) hubungan antar dokumen, dan 5) sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini secara rinci menjelaskan tentang gambaran umum kondisi daerah yang mendasari penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan jangka menengah yang meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah, perkembangan dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah untuk menghasilkan perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dalam mendanai kebutuhan pembangunan selama lima tahun ke depan. Permasalahan pembangunan dan isu strategis pembangunan jangka menengah yang akan diselesaikan hingga akhir masa periode RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini secara rinci menguraikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang serta menerjemahkannya kedalam tujuan, sasaran, target, dan indikator kinerja serta strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah yang akan dicapai selama periode lima tahun kedepan.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini secara rinci menjelaskan kerangka pendanaan pembangunan daerah dan program perangkat daerah yang memuat indikasi program serta pagu indikatif program untuk mencapai visi dan misi RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029 dan sebagai acuan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah serta memuat penjelasan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari indikator kinerja utama daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.



BAB V PENUTUP

Bab ini secara rinci memuat pedoman transisi yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan serta kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029.



BAB 2

GAMBARAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG





BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

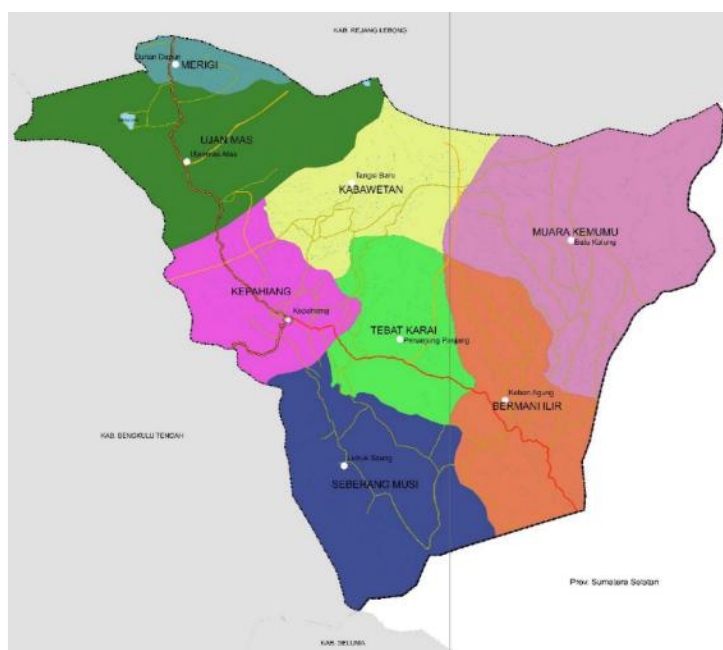
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

a. Wilayah Administratif

Wilayah Kabupaten Kepahiang meliputi delapan kecamatan dengan ibu kota kabupaten berada di Kecamatan Kepahiang. Terdapat sebanyak 117 Desa/Kelurahan, di mana 12 diantaranya merupakan wilayah administrasi berupa kelurahan. Relatif tidak ada perubahan/penambahan wilayah administrasi secara signifikan sejak Kabupaten Kepahiang memisahkan diri dari Kabupaten Rejang Lebong dan berdiri sendiri pada 2004.

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Kepahiang



Tabel 2.1 Jumlah Kecamatan, Desa, dan Kelurahan di Kabupaten Kepahiang

No.	Kecamatan	Jumlah		Luas (Km ²)	Jarak dari Ibukota Kabupaten (Km)
		Desa	Kelurahan		
1	Muara Kemumu	8	-	163,82	17,00
2	Bermani Ilir	18	1	93,51	7,00
3	Seberang Musi	13	-	107,83	8,50
4	Tebat Karai	13	1	66,33	7,00
5	Kepahiang	16	7	63,68	2,70



No.	Kecamatan	Jumlah		Luas (Km ²)	Jarak dari Ibukota Kabupaten (Km)
		Desa	Kelurahan		
6	Kabawetan	14	1	95,40	10,00
7	Ujan Mas	16	1	106,51	8,00
8	Merigi	7	1	13,03	19,00
Jumlah		105	12	710,11	

Sumber: BPS Kabupaten Kepahiang

Dengan luas wilayah Kabupaten Kepahiang mencapai sekitar 710,1 km². Kecamatan Muara Kemumu mempunyai wilayah terbesar seluas, kurang lebih 163 km² atau sekitar 23% dari total luas wilayah. Sementara Merigi merupakan kecamatan dengan wilayah terkecil sekitar 13 km² (1,8%), sekaligus wilayah yang paling jauh dari pusat Kabupaten.

Tabel 2.2 Batas Wilayah Kabupaten Kepahiang

Batas Wilayah	Perbatasan dengan Kecamatan dan Kabupaten/Kota
Utara	Kabupaten Rejang Lebong (Provinsi Bengkulu) di: • Kecamatan Curup Selatan, • Kecamatan Sindang Kelingi, dan • Kecamatan Padang Ulak Tanding
Timur	Kabupaten Empat Lawang (Prov. Sumatera Selatan)
Selatan	Kabupaten Bengkulu Tengah (Provinsi Bengkulu) di Kecamatan Taba Penanjung
Barat	• Kabupaten Bengkulu Tengah (Provinsi Bengkulu) di Kecamatan Pagar Jati. • Kabupaten Rejang Lebong (Provinsi Bengkulu) di Kecamatan Bermani Ulu.

Sumber: BPS Kabupaten Kepahiang

Peluang dan tantangan: Dari gambaran wilayah Kabupaten Kepahiang terlihat bahwa sebagian besar wilayah kecamatan di Kabupaten (kecuali Kecamatan Tebat Karai) berbatasan langsung dengan Kabupaten/Kota lain, baik yang termasuk dalam wilayah di Provinsi Bengkulu maupun Sumatera Selatan. Hal ini menjadikan Kabupaten Kepahiang mempunyai posisi strategis dalam upaya pengembangan ke depan, baik untuk kemajuan Kabupaten Kepahiang sendiri, maupun dalam konteks pengembangan regional di dalam Provinsi Bengkulu maupun dengan antar wilayah. Ditambah lagi, dengan telah terbukanya akses transportasi antar wilayah di Pulau Sumatera bagian selatan



melalui Proyek Nasional Pembangunan jalan Tol Lintas Sumatera yang melewati wilayah Kabupaten Kepahiang, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kemajuan Kabupaten Kepahiang dibanding dengan kabupaen/kota lain.

b. Topografi dan Elevasi

Letak Kabupaten Kepahiang berada dalam bentangan antara 101°55'19"-103°01'29" Bujur Timur dan membujur di antara 02°43'07"-03°46'48" Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Kepahiang berada pada dataran tinggi di sepanjang lintasan pegunungan Bukit Barisan. Hal ini menjadikan wilayah Kabupaten Kepahiang didominasi karakter wilayah berupa perbukitan.

Tabel 2.3 Persentase Luas Lahan menurut Ketinggian di Kabupaten Kepahiang

Ketinggian (mdpl)	Luas Lahan (Ha)
250-500	162,3474
500-750	9.785,04
750-1000	34.769,89
1000-1250	15.739,48
1250-1500	7.086,72
1500-1750	3.550,89
1750-2000	9,426216

Sumber: BPS Kabupaten Kepahiang

Berdasarkan analisa dalam Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023-2043, Wilayah Kabupaten Kepahiang berada pada ketinggian antara 250–2000 meter di atas permukaan laut (mdpl), di mana sebagian besarnya (48,9%) berada pada ketinggian 750–1.000 mdpl.¹ Sementara itu, kondisi elevasi (kemiringan) lahan memperlihatkan bahwa separuh wilayah Kabupaten berada dalam kemiringan lebih dari 15°, bahkan sekitar 37,7% lahan berada di kemiringan lebih dari (>) 40°.

Tabel 2.4 Persentase Luas Berdasarkan Kemiringan Wilayah Kabupaten Kepahiang

Elevasi	Persentase Luas Wilayah
> 40°	37,68%
15° – 40°	31,03%
2° – 15°	24,78%
0° – 2°	6,51%

Sumber: BPS Kabupaten Kepahiang

¹ Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023-2043 (analisa 2020)



Peluang dan tantangan: Kabupaten Kepahiang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai pusat pertanian, perkebunan, industri, dan pariwisata. Namun, pengelolaan risiko bencana, aksesibilitas, dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan harus menjadi prioritas. Zonasi yang tepat akan memastikan pembangunan yang optimal tanpa merusak ekosistem.

Kondisi topografi dan elevasi Kabupaten Kepahiang menunjukkan adanya potensi pengembangan sekaligus menyimpan potensi permasalahan yang perlu diantisipasi dalam lima tahun ke depan. Berdasarkan kondisi topografi, kecamatan-kecamatan yang berada pada wilayah yang lebih tinggi (700–900 mdpl), yang umumnya mempunyai suhu udara lebih sejuk, cocok untuk pengembangan sektor perkebunan teh, kopi, dan hortikultura. Sementara, pada wilayah rendah (400–600 mdpl), yang cenderung lebih panas, lebih mendukung untuk pengembangan sektor pertanian dan perkebunan, khususnya tanaman tropis seperti kelapa sawit dan karet.

Dengan kondisi rupa bumi dan elevasi yang didominasi perbukitan, hal ini memerlukan strategi pengembangan yang lebih terencana. Pada daerah datar dan miring ringan (0° - 15°), dapat dikembangkan untuk pemukiman dan pertanian intensif. Sementara untuk wilayah dengan kemiringan sedang (15° - 40°) bisa digunakan untuk perkebunan atau pertanian dengan metode terasering. Selanjutnya, pada daerah curam ($>40^{\circ}$) sebaiknya digunakan sebagai area konservasi atau hutan lindung. Potensi Risiko Longsor di wilayah tergolong tinggi (hampir 40% dari total wilayah) rawan terhadap erosi dan longsor, terutama saat curah hujan tinggi. Untuk itu, juga diperlukan perencanaan infrastruktur yang lebih baik, khususnya untuk konstruksi mengatasi kondisi yang berlereng curam dan rawan longsor.

c. Geologi

Lapisan tanah di Kabupaten Kepahiang terdiri dari jenis Alluvial, Regosol, Asosiasi PMK/Regosol Andosol, Latosol, Andosol, Komplek PMK/Litosol Andosol dan Komplek Podsolik Coklat/Litosol. Penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Kepahiang mempunyai struktur lapisan tanah berupa terdiri dari lapisan lempung, pasir apung, batuan, pasir berlanau atau campuran pasir-lanau



(mulai dari yang bergradasi buruk hingga tanah berpasir atau berlanau halus mengandung mika.²

Tabel 2.5 Luas Lahan menurut Jenis Tanah di Kabupaten Kepahiang

No	Jenis Tanah	Luas (Ha)
1	Renzina	
2	Alluvial (Al)	1.671
3	Regosol (Re)	9.297
4	Asosiasi PMK/Latosol Andosol	12.250
5	Latosol (L)	8.268
6	Andosol (An)	10.025
7	Komplek PMK/Litosol dan Latosol	9.761
8	komplek Podsolik Coklat dan latosol	21.078

Sumber: RTRW Kabupaten Kepahiang Tahun 2022-2042

Selanjutnya, wilayah Kabupaten Kepahiang mempunyai potensi berupa kandungan tambang, mineral, dan energi dengan cadangan yang besar.³

Tabel 2.6 Potensi Tambang dan Energi di Kabupaten Kepahiang

No.	Kecamatan	Batuan dan mineral
1	Muara Kemumu	Obsidian
2	Bermani Ilir	Andesit dan obsidian
3	Seberang Musi	batubara dan emas
4	Tebat Karai	Energi panas bumi
5	Kepahiang	Andesit
6	Kabawetan	Kaolin, andesit, pasir vulkanik, dan pasir kerakal
7	Ujan Mas	Batubara
8	Merigi	Pasir vulkanik dan pasir kerakal.

Sumber: Bappeda Kabupaten Kepahiang (2021)

Peluang dan tantangan: Upaya pengembangan Kabupaten Kepahiang perlu mempertimbangkan kondisi geologi karena kompleksitas keragaman geologis yang dimiliki Kabupaten ini. Pertimbangan hal ini dalam perencanaan lima tahun ke depan bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan mengurangi risiko bencana.

² Ismulhadi (2019), *Studi Potensi Longsor Daerah Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu Terutama Akibat Gempa Bumi Menggunakan Pendekatan Parameter Elastis*, Disertasi Doktor.

³ Pemda Kabupaten Kepahiang, *Profil Investasi Kabupaten Kepahiang*, paparan tidak diterbitkan.



Mayoritas wilayah Kabupaten memiliki tanah jenis Latosol, Andosol, dan Podsolik Coklat. Tanah Latosol dan Andosol merupakan tanah yang cukup subur, mendukung pertanian dan perkebunan. Sementara, Podsolik Coklat, meskipun luas, bersifat asam, sehingga lebih cocok untuk hutan atau perkebunan spesifik seperti karet atau kelapa sawit. Kehadiran tanah Alluvial, yang meskipun luasnya kecil, tetapi jenis tanah ini sangat subur, biasanya berada di dataran rendah dan cocok untuk pertanian serta pemukiman. Sebaliknya, Regosol, merupakan jenis tanah dengan drainase tanah baik tetapi kurang subur, sering digunakan untuk perkebunan atau kehutanan.

Kompleks PMK/Litosol dan Latosol menjadi tantangan tersendiri dalam konstruksi. Jenis tanah ini sering berada di daerah berbukit dan cenderung rentan terhadap erosi serta longsor, sehingga pembangunan infrastruktur pada wilayah ini perlu perhitungan dan metode khusus, seperti perkuatan lereng dan teknik konservasi tanah. Daerah dengan Kompleks PMK/Litosol dan Latosol sebaiknya dijadikan kawasan hijau atau hutan lindung untuk mencegah erosi dan longsor.

Upaya pengembangan wilayah harus menyesuaikan dengan karakteristik tanah agar efisien, aman, dan berkelanjutan. Tantangan utama ada di daerah berbukit dan tanah asam, sehingga diperlukan strategi pengelolaan tanah dan mitigasi bencana yang baik.

d. Hidrologi dan Klimatologi

Kondisi tata air yang terdapat di Kabupaten Kepahiang pada umumnya terdiri dari sungai-sungai besar berasal dari pegunungan Bukit Barisan. Sumber daya air di Kabupaten Kepahiang dari tahun ke tahun mengalami penurunan, hal ini ditandai dengan penurunan debit air di beberapa sungai seperti Sungai Musi, Sungai Langkap, Sungai Durian, dan Sungai Sempiang. Sungai-sungai tersebut mempunyai debit air yang bervariasi antara 0,1 m³/detik sampai dengan 60 m³/detik.

Tabel 2.7 Aliran Sungai dan Debit Air Sungai di Kab.Kepahiang, 2007

No.	Nama Sungai	Debit (m ³ /dtk)
1	Sungai Musi Hulu	55,61
2	Sungai Musi Hilir	61,30
3	Sungai Sempiang Hulu	1,10



No.	Nama Sungai	Debit (m ³ /dtk)
4	Sungai Sampiang Hilir	4,00
5	Sungai Langkap Hulu	0,65
6	Sungai Langkap Hilir	3,85
7	Sungai Durian Hulu	0,15
8	Sungai Durian Hilir	1,09

Sumber: Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Kepahiang (2007)

Lebih lanjut, Secara kualitas, pada umumnya kondisi airnya masih baik dan masih di bawah ambang batas mutu air daerah Kabupaten Kepahiang berdasarkan, dengan tingkat cemaran ringan sesuai metode Indek Pencemar.⁴

Tabel 2.8 Status Mutu Air Sungai di Kabupaten Kepahiang, 2007

No.	Nama Sungai	Status Mutu Air	Keterangan
1.	Sungai Musi hulu	Cemar ringan	Hulu
2.	Sungai Musi hilir	Cemar ringan	Hilir
7.	Sungai Sempiang hulu	Cemar ringan	Hulu
8.	Sungai Sempiang hilir	Cemar ringan	Hilir
3.	Sungai Langkap hulu	Cemar ringan	Hulu
4.	Sungai Langkap hilir	Cemar ringan	Hilir
5.	Sungai Durian hulu	Cemar ringan	Hulu
6.	Sungai Durian hilir	Cemar ringan	Hilir

Sumber: Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Kepahiang (2007)

Sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia, Kabupaten Kepahiang juga beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 258mm/bulan. Meskipun fluktuatif, namun selama rentang waktu 2018-2021, secara umum terjadi peningkatan rata-rata curah hujan per bulannya. Kondisi curah hujan per bulan per tahun juga berfluktuasi.

⁴ *ibid*



Tabel 2.9 Curah Hujan Maksimal, Minimal, dan Rerata, 2018-2021

Tahun	Curah Hujan (mm)		Bulan
2018	Maks.	506,8	November
	Min.	26,3	Juli
2019	Maks.	521,9	April
	Min.	17,9	September
2020	Maks.	516,7	Januari
	Min.	48,3	Agustus
2021	Maks.	557,1	Desember
	Maks.	143,6	Juli

Sumber: BPS Kabupaten Kepahiang, berbagai tahun (diolah)

Peluang dan tantangan: Potensi hidrologi di Kabupaten Kepahiang cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari tingginya rata-rata curah hujan di Kabupaten Kepahiang, yang hampir sepanjang tahun selalu turun hujan. Potensi sumber daya air yang besar tersebut mulai menunjukkan gejala adanya penurunan, tetapi belum sampai menimbulkan persoalan kekurangan air. Curah hujan akan tinggi pada sekitar bulan Januari sampai dengan Juli dan akan menurun pada bulan-bulan Agustus sampai dengan Oktober dan mulai November curah hujan akan mulai tinggi kembali. Fluktuasi kuantitas air pada perbandingan kondisi maksimum dan kondisi minimum menunjukkan perbedaan yang cukup besar. Walaupun demikian belum sampai pada tahap kekeringan.

2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Sektor pertanian Kabupaten Kepahiang merupakan sektor unggulan daerah, sektor pertanian berperan penting dalam perekonomian Kabupaten Kepahiang karena merupakan sektor utama yang memberikan peranan terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2024 peranan sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Kepahiang adalah 44,31 persen hal ini meningkat dari 41,71 persen pada tahun 2023. Dukungan luas dan kondisi lahan menjadikan Kabupaten Kepahiang banyak dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan, komoditi Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Kepahiang yaitu tanaman Kopi dengan jenis kopi robusta, yang tersebar di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Kepahiang. Produksi kopi di Kabupaten Kepahiang menunjukkan tren positif tiap tahun nya, pada tahun 2024 produksi kopi sebesar 20.211,8 ton hal ini jauh meningkat dari tahun 2023 sebesar 15.877,52 ton dengan produksi



terbesar terdapat di Kecamatan Muara Kemumu sebesar 6.461 ton pada tahun 2024.

a. Potensi Pengembangan Wilayah

1. Penggunaan Lahan

Dari luas wilayah Kabupaten Kepahiang sebesar 66.500 hektar, sebagian besar wilayah Kabupaten Kepahiang adalah hutan dan semak belukar dengan luas 29.562 hektar atau sebesar kurang lebih 45%, sedangkan sisanya digunakan untuk pemukiman, perkampungan, dan lahan pertanian dan perkebunan. Kawasan budi daya seluas 48.393,69 hektar dan kawasan hutan seluas 18.106,31 hektar.

Tabel 2.10 Luas dan Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Kepahiang, 2007

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Hutan dan semak belukar	29.562	44,5
2	Pemukiman, perkampungan, dan sawah	8.425	12,7
3	Tegalan dan perkebunan	16.710	25,2
4	Kebun campuran, semak, dan ilalang	9.227	13,9
5	Kolam, tambak, dan tanah tandus	2.410	3,6
6	Lain-lain	98	0,1

Sumber: Bappeda Kabupaten Kepahiang (2021)

Peruntukan kawasan hutan terbagi atas: i) Cagar Alam seluas 3,20 hektar; ii) Taman Wisata Alam seluas 8.515 hektar; dan iii) Hutan Lindung seluas 9.588,11 hektar. Kawasan lindung meliputi beberapa wilayah, yang tidak hanya antar kecamatan dalam Kabupaten Kepahiang namun juga bersama Kabupaten/Kota lainnya. Kawasan untuk peruntukan perlindungan dan dukungan fungsi alam dan lingkungan, meliputi:

1) Kawasan hutan lindung

- Hutan Lindung Bukit Daun, dengan luas 90.805,07 Ha, yang terletak di wilayah Kabupaten, yaitu Rejang Lebong, Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara;
- Hutan Lindung Konak, dengan luas 11,11Ha, yang terletak di wilayah Kabupaten Kepahiang;
- Hutan Lindung Rimbo Donok, dengan luas 433,00 Ha, yang terletak di wilayah Kabupaten Kepahiang; dan



- d) Hutan Lindung Bukit Balai Rejang, dengan luas 18.069,00 Ha, yang terletak di wilayah 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang.
- 2) Kawasan Resapan Air, meliputi:
 - a) Kawasan hutan lindung Kabupaten Kepahiang, dengan luas 9.588,11 Ha, terdiri dari Hutan Lindung Bukit Dain, Konak, Rimbo Donok dan bukit Balai Rejang; dan
 - b) Kawasan perkebuan yang memiliki struktur tanah mudah meresapkan air/hujan secara besar.
- 3) Kawasan Perlindungan Setempat, yang memberikan perlindungan setempat, mencakup sempadan sungai, sekitar danau atau waduk, sekitar mata air dan hijau kota termasuk di dalamnya hutan kota serta kawasan rawan bencana, di antaranya:
 - a) Kawasan sempadan Sungai Musi, Sungai Sempiang, dan Sungai Air Belimbing.
 - b) Kawasan sekitar mata air.
 - c) Kawasan sekitar danau/waduk seluas 39,69 Ha Danau/waduk Ujan Mas.
- 4) Kawasan ruang terbuka hijau, meliputi:
 - a) Kawasan pusat Kabupaten Kepahiang (Kecamatan Kepahiang);
 - b) Kawasan pusat pemerintahan di masing-masing Kecamatan;
 - c) Kawasan peruntukan pemakaman umum yang di 8 kecamatan; dan
 - d) Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam.
- 5) Cagar Alam Kabupaten Kepahiang seluas 3,20 Ha.
- 6) Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Kaba seluas 8.518 Ha (termasuk wilayah kabupaten) dari total 13.490,00 Ha, yang dikelola oleh Kabupaten Kepahiang dan Rejang Lebong
- 7) Kawasan taman wisata alam di Kecamatan Ujan Mas dan Kabawetan dengan luas kurang lebih 8.518 hektar.

2. Potensi Pengembangan Kawasan

Kawasan-kawasan yang potensial dikembangkan terdistribusi pada beberapa wilayah pengembangan sektoral, yang terdiri dari:



- 1) Kawasan Pertanian, meliputi:
 - a) Pertanian Tanaman Pangan, yang menyebar di seluruh Kecamatan di kabupaten Kepahiang, meliputi komoditas padi dan palawija;
 - b) Pertanian Tanaman Holtikultura yang juga mencakup areal yang menyebar di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Kepahiang.
- 2) Kawasan Perkebunan yang terdistribusi di beberapa kecamatan dengan Kopi dan lada sebagai komoditas yang paling banyak diusahakan di Kabupaten Kepahiang dan menjadi primadona di perkebunan rakyat.
- 3) Kawasan pengembangan peternakan dengan sentra kawasan berada di Kecamatan Kabawetan dan Kecamatan Ujan Mas.
- 4) Kawasan Pertambangan, yang meliputi hampir seluruh kecamatan sesuai dengan komoditas pertambangan yang potensial di masing-masing wilayah.
- 5) Kawasan perikanan, yang meliputi:
 - a) Kawasan budi daya yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kepahiang, terutama Kecamatan Seberang Musi, kepahiang, dan Tebat Karai,
 - b) Kawasan pengolahan ikan di Kecamatan Ujan Mas, dan
 - c) Kawasan Minapolitan berada di Kecamatan Ujan Mas, Bermani Ilir, Tebat Karai dan Merigi.
- 6) Kawasan Industri Industri Peruntukan industri di Kabupaten Kepahiang adalah seluas 25 Ha (0,03% dari luas wilayah Kabupaten) yang terdistribusi di Kecamatan Tebat Karai, Bermani Ilir, Kabawetan, Merigi, Seberang Musi dan Kepahiang.

Kawasan Pengembangan Pariwisata meliputi Kawasan Wisata Alam Kebun Teh (Kecamatan Kabawetan), Wisata dan panas bumi Bukit Kaba.

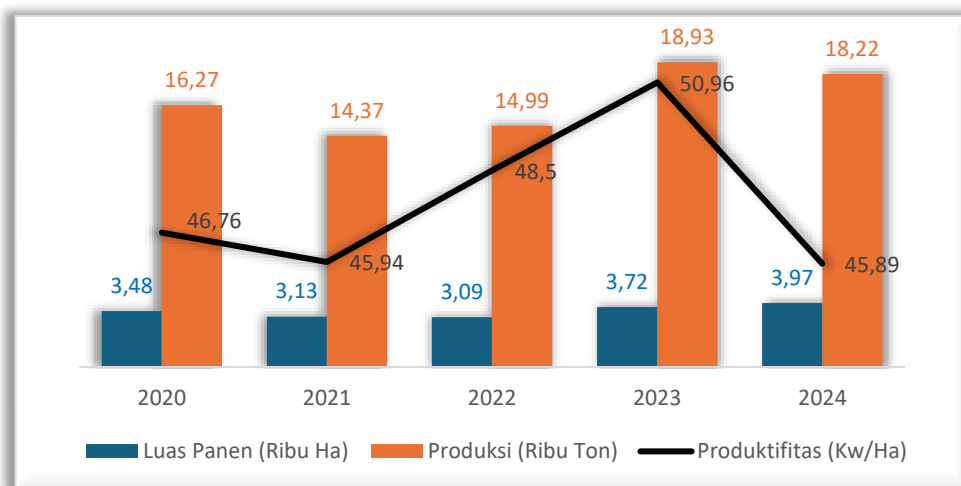
b. Pertanian dan Pangan

Produktivitas Padi. Secara umum, perkembangan data produktivitas padi Kabupaten Kepahiang selama 2020-2024 menunjukkan adanya tren penurunan, yang sempat mengalami fluktuasi antara selama 2020-2022. Meskipun sempat naik, produktivitas secara keseluruhan menunjukkan tren penurunan, yang



menunjukkan bahwa petani kurang efisien dalam menggunakan lahan yang tersedia.

Gambar 2.2 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Pertanian Padi di Kabupaten Kepahiang, 2020-2024 (%)



Sumber: Provinsi Bengkulu Dalam Angka (data diolah)

Luas panen padi sempat mengalami penurunan dengan signifikan pada 2020-2021. Hal ini mencerminkan adanya pengurangan lahan pertanian yang mungkin disebabkan oleh alih fungsi lahan atau faktor ekonomi lainnya. Kondisi ini diikuti oleh penurunan produksi. Namun, juga terlihat adanya peningkatan tajam luas panen padi di 2024 yang melampaui angka 2020. Pada 2023, produksi padi meningkat signifikan menjadi 18,93 ribu ton, namun mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 18,22 ribu ton.

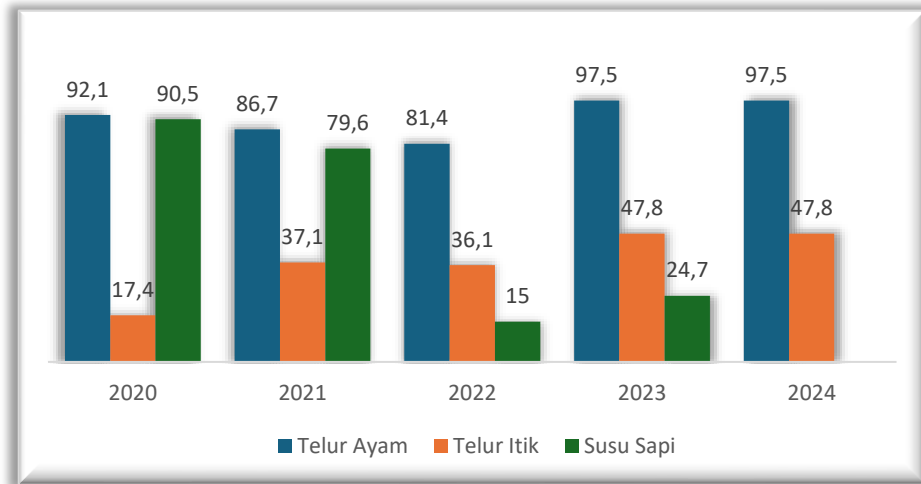
Penurunan luas panen dari 2020 hingga 2021 mencerminkan ancaman serius dari urbanisasi atau konversi lahan pertanian menjadi area non-pertanian (perumahan, industri, dan area lainnya). Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat mengancam ketahanan pangan jangka panjang. Lonjakan luas panen di 2024 hanya bersifat sementara jika tidak didukung oleh kebijakan yang kuat untuk melindungi lahan pertanian. Fluktuasi produktivitas (terutama penurunan di 2021) kemungkinan dipengaruhi oleh perubahan iklim, seperti musim kemarau yang lebih panjang atau curah hujan yang tidak merata. Hal ini dapat memengaruhi stabilitas produksi di masa depan.

Produksi Hasil Peternakan. Perkembangan data hasil peternakan Kabupaten Kepahiang dalam kurun 2020-2024 menunjukkan tren yang beragam. Di satu sisi adanya penurunan signifikan pada susu sapi, stagnasi hingga penurunan pada telur ayam. Sementara, di sisi lain adanya peningkatan pesat pada



produksi telur itik. Krisis susu sapi adalah tantangan terbesar yang perlu segera ditangani, sementara telur itik menawarkan peluang besar untuk pengembangan lebih lanjut.

Gambar 2.3 Produksi Telur dan Susu Sapi di Kabupaten Kepahiang, 2020-2024 (Ton)



Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Peluang dan tantangan: Perkembangan data pertanian dan peternakan Kabupaten Kepahiang selama lima tahun terakhir mengindikasikan perlunya Pemerintah Daerah merumuskan kebijakan yang lebih ketat untuk melindungi lahan pertanian produktif dari alih fungsi lahan. Selain itu, juga harus memperkuat infrastruktur pertanian, seperti sistem irigasi yang lebih tangguh, untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim. Dan yang tak kalah penting, sebagaimana terjadi di wilayah Kabupaten/Kota lain, adalah kondisi sebagian besar petani dan peternak di Indonesia cenderung berusia lanjut. Pemerintah Daerah perlu mendorong generasi muda untuk terlibat dalam sektor pertanian melalui pelatihan, pendanaan, bahkan mungkin teknologi digital.

2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan bahan pangan yakni segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Jenis-jenis pangan di Indonesia sangat bervariasi diantaranya seperti beras, jagung, ketela, gandum, sagu, segala macam buah, ikan, daging, telur dan sebagainya. Penyediaan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian dan perkebunan, hasil pangan peternakan, hasil laut dan termasuk pangan dari hutan.



Jasa ekosistem penyedia pangan tinggi sebagai indikator bahwa wilayah atau daerah tersebut memiliki suatu ekosistem dengan daya dukung serta kemampuan dalam menyediakan pangan yang tinggi. Sebaliknya jika jasa ekosistem atau lingkungan hidup penyedia pangan rendah, indikasi bahwa daerah atau wilayah tersebut memiliki suatu ekosistem dengan daya dukung serta kemampuan dalam menyediakan pangan juga rendah.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan dalam dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Kepahiang periode tahun 2025-2029. Jasa ekosistem penyediaan pangan di Kabupaten Kepahiang kategori rendah sampai sangat rendah meliputi luas 24.728,82 Ha atau 34,52 % dari luas wilayah kabupaten, sementara jasa ekosistem penyediaan pangan terkategori sedang sampai sangat tinggi meliputi luas 50.601,48 Ha atau sekitar 65,49% dari luas wilayah Kabupaten Kepahiang.

Jasa ekosistem pengaturan aliran air dan pengendalian banjir di Kabupaten Kepahiang kategori rendah sampai sangat rendah meliputi luas 20.589,49 Ha atau 27,33 % dari luas wilayah kabupaten, sementara jasa ekosistem pengaturan air terkategori sedang sampai sangat tinggi meliputi luas 54.740,82 Ha atau sekitar 62,67% dari luas wilayah Kabupaten Kepahiang.

Jasa pengaturan air ini merupakan perwujudan bahwa Kabupaten Kepahiang masih memiliki fungsi pengaturan tata air yang baik. Daya dukung lingkungan jasa ekosistem pengaturan iklim di Kabupaten Kepahiang terkategori tinggi sampai sangat tinggi mencakup wilayah 65.254,53 Ha atau 86,63 % dari luas wilayah kabupaten, dan yang terkategori rendah sampai sangat rendah hanya 4.982,45 Ha meliputi 6,62 % dari luas wilayah kabupaten.

2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

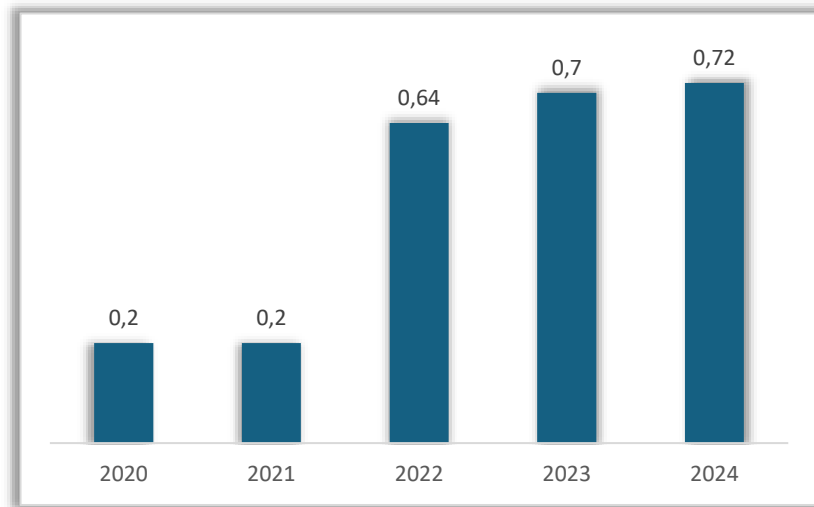
Secara umum, perkembangan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Kepahiang menunjukkan perkembangan positif dari 2020-2024. Meskipun begitu, pada 2020-2021 perkembangan IKD menunjukkan stagnasi dalam ketahanan daerah, yang dimungkinkan karena adanya keterbatasan infrastruktur atau bencana alam.

Pada 2022, terjadi lonjakan signifikan dalam perkembangan ketahanan daerah, yang merupakan hasil dari adanya perbaikan signifikan dalam kebijakan, infrastruktur, atau kesiapan daerah dalam menghadapi risiko. Trend positif ini terlihat pada perkembangan 2024 (IKD naik lagi menjadi 0,72), yang



mengindikasikan bahwa tren perbaikan berlanjut meskipun dengan peningkatan yang lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya.

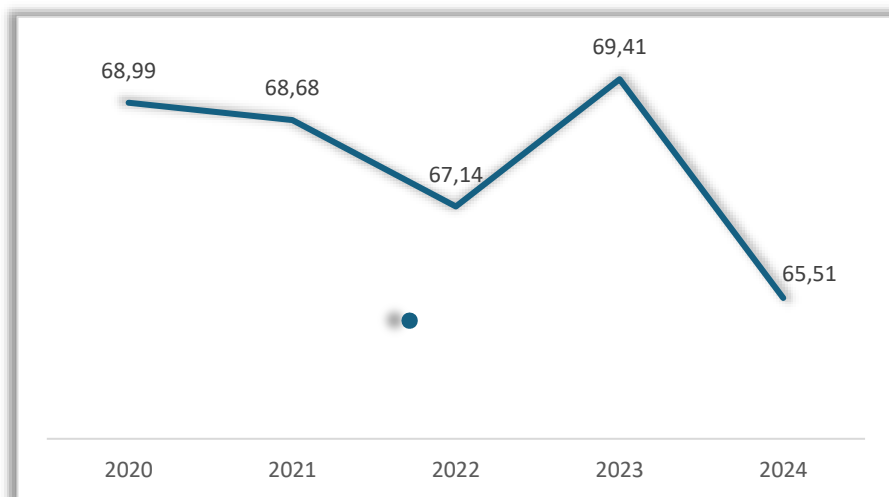
Gambar 2.4 Perkembangan IKD Kabupaten Kepahiang, 2020-2024



Sumber: BNPB (2025)

Sementara itu, perkembangan Indeks Ketahanan Pangan (IKP), menunjukkan bahwa tingkat ketahanan tertinggi terjadi pada 2023, yang menunjukkan kondisi ketahanan pangan yang baik. Kondisi ini mengalami tren penurunan pada 2023-2024, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti gangguan rantai pasokan, penurunan produksi pangan, ataupun bencana.

Gambar 2.5 Perkembangan IKP Kabupaten Kepahiang, 2020-2024



Sumber: Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepahiang

Peluang dan tantangan: Hubungan antara kedua indeks tersebut menunjukkan bahwa pada 2020-2021, perkembangan IKD stagnan, sementara IKP menurun. Ini mengindikasikan bahwa meskipun kondisi daerah tidak berubah, ketahanan pangan mulai terganggu. Sementara memasuki 2024, perkembangan

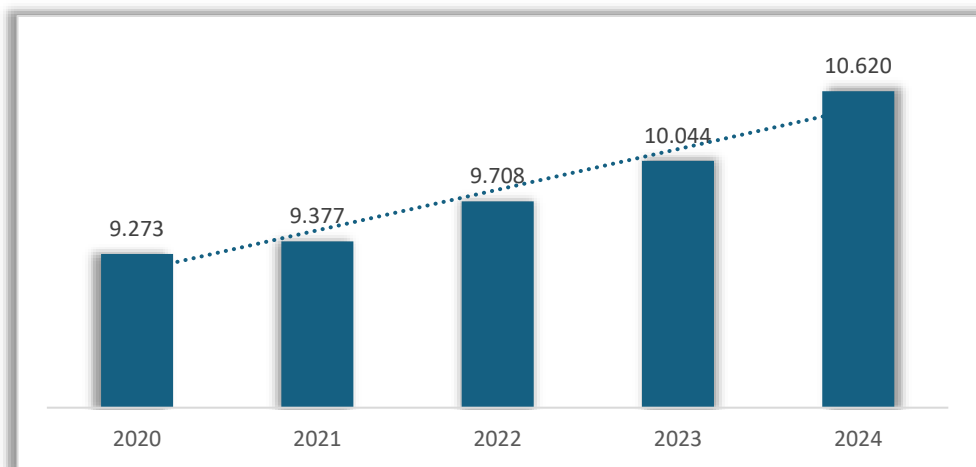


IKD naik signifikan, tetapi IKP justru mencapai titik terendah. Hal ini bisa menunjukkan bahwa meskipun daerah lebih tangguh, faktor lain seperti produksi pangan atau inflasi masih menjadi tantangan. Pada 2023, IKD meningkat namun IKP menurun. Hal ini menandakan perbaikan kondisi. Namun, ketahanan pangan yang mengalami penurunan pada 2023, hal ini juga menunjukkan adanya tantangan yang belum sepenuhnya teratasi.

Untuk itu, diperlukan strategi yang lebih kuat untuk menjaga kestabilan ketahanan pangan agar sejalan dengan peningkatan ketahanan daerah di Kabupaten Kepahiang dalam lima tahun ke depan, yang dapat dilakukan dengan perbaikan dalam aspek infrastruktur, kesiapan daerah, dan penanganan risiko bencana.

Pengeluaran per Kapita: Pertumbuhan pengeluaran per kapita sebesar 14,5 persen dalam 5 tahun menunjukkan adanya peningkatan daya *beli* masyarakat. Hal ini bisa menjadi indikasi positif jika diikuti dengan pertumbuhan pendapatan, namun juga perlu dicermati apakah kenaikan ini akibat inflasi atau adanya tekanan biaya hidup yang meningkat.

Gambar 2.6 Perkembangan Pengeluaran per Kapita Kabupaten Kepahiang, 2020-2024 (ribu rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Bengkulu (data diolah)

2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

Penyusunan, Pelaksanaan, dan Integrasi RPPLH. Data tentang perkembangan penyusunan kebijakan terkait lingkungan hidup di Kabupaten Kepahiang selama 2019-2023 menunjukkan adanya kesadaran pemerintah daerah untuk menjadikan lingkungan sebagai prioritas dalam pembangunan. Meskipun secara umum hal ini sedikit terlambat.



Tabel 2.11 Perkembangan Penyusunan Kebijakan Lingkungan Kabupaten Kepahiang 2019-2023

Kegiatan	2019	2020	2021	2022	2023
Tersusunnya RPPLH	#N/A	#N/A	#N/A	ada	ada
Integrasi RPPLH dalam rencana pembangunan	#N/A	#N/A	#N/A	ada	ada
Pembinaan dan Pengawasan dalam ketaatan terhadap izin lingkungan	#N/A	#N/A	50	80	127
Tersusunnya RPPLH	#N/A	#N/A	#N/A	ada	ada
Integrasi RPPLH dalam rencana pembangunan	#N/A	#N/A	#N/A	ada	ada
Pembinaan dan Pengawasan dalam ketaatan terhadap izin lingkungan	#N/A	#N/A	50	80	127

Sumber: Bappeda Kabupaten Kepahiang

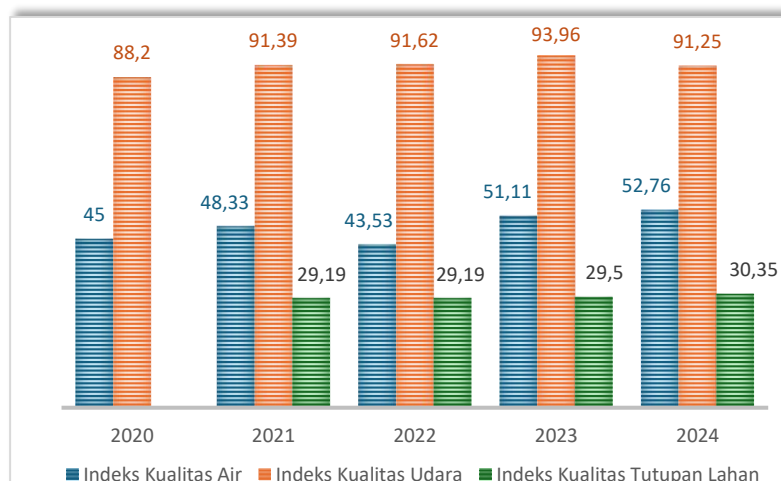
Mulai 2022, Kabupaten mulai menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan mengintegrasikannya ke dalam rencana pembangunan. Integrasi ini menjadi fondasi untuk kebijakan berkelanjutan, seperti pengendalian emisi atau perlindungan lahan. Dari sisi pelaksanaan, hal ini mencerminkan upaya serius pemerintah untuk menegakkan regulasi lingkungan, terutama di sektor industri atau usaha yang berpotensi mencemari lingkungan.

Perkembangan Indeks Lingkungan Hidup. Perkembangan data Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kepahiang selama 2020-2024 menunjukkan tren positif. Peningkatan ini terkait dengan adanya penguatan pengawasan izin lingkungan (127 kasus di 2023) yang memaksa industri mengurangi emisi.

Di sisi lain, perkembangan Indeks Kualitas Air justru menunjukkan fluktuasi dan memunculkan tantangan. Nilai indeks sempat turun drastis pada 2022, sebelum naik kembali. Penurunan ini kemungkinan besar dipicu oleh lemahnya penegakan hukum sebelum 2022, di mana RPPLH belum terintegrasi.



Gambar 2.7 Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan di Kabupaten Kepahiang, 2020-2024



Sumber: Bappeda Kabupaten Kepahiang (diolah)

Sementara itu, perkembangan Indeks Kualitas Tutupan Lahan cenderung menunjukkan stagnasi selama 2021-2024. Hal ini mengindikasikan adanya kegiatan alih fungsi lahan yang masih terjadi (misalnya, untuk perumahan atau industri) serta minimnya program reboisasi atau perlindungan ekosistem yang terukur.

Pengelolaan Sampah. Upaya penanganan sampah di Kabupaten Kepahiang, sebagaimana ditunjukkan oleh data perkembangan 2020-2024, menunjukkan adanya progres yang positif. Volume dan persentase sampah yang ditangani cenderung naik selama kurun waktu tersebut. Hal ini menunjukkan efektivitas operasional TPA/TPST/SPA yang konsisten dan peningkatan kapasitas pengumpulan sampah oleh pemerintah.

Namun, di sisi lain, upaya untuk melakukan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) cenderung lemah. Hanya 4,2 persen sampah berkurang melalui 3R di 2021. Hal ini menunjukkan minimnya sosialisasi program 3R ke masyarakat atau kurang insentifnya masyarakat untuk mengurangi sampah. Selain itu, cakupan layanan juga menunjukkan adanya stagnansi. Persentase cakupan area pelayanan hanya 50 persen (2024), artinya lebih dari separuh wilayah Kabupaten belum terlayani pengelolaan sampah optimal.

Tabel 2.12 Perkembangan Penanganan Sampah di Kabupaten Kepahiang, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	#N/A	4,2%	#N/A	#N/A	#N/A
Persentase cakupan area pelayanan	45%	47%	47%	47%	50%
Persentase jumlah sampah yang tertangani	44%	45%	45%	47%	50%



Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber: Bappeda Kabupaten Kepahiang

Peluang dan tantangan: Mengamati perkembangan lingkungan hidup, diperoleh gambaran tentang tantangan penanganan ke depan. Indeks Kualitas Air, misalnya, cenderung belum stabil. Penurunan drastis di 2022 menunjukkan kerentanan terhadap pencemaran. Perlu sistem pemantauan dan penegakan sanksi tegas bagi pelanggar izin lingkungan.

Sementara itu, terdapat indikasi kuat adanya alih fungsi lahan sehingga perkembangan Indeks tutupan lahan yang stagnan mengindikasikan adanya masalah terhadap biodiversitas dan ketahanan ekosistem. Diperlukan kebijakan alih fungsi lahan yang lebih ketat atau program rehabilitasi hutan.

Selain itu, dalam pengelolaan sampah, masih terdapat wilayah yang tidak terkelola. Dengan adanya sekitar 53 persen sampah masih tidak tertangani pada 2023, hal ini menunjukkan bahwa tanpa peningkatan kapasitas pengolahan sampah, Kabupaten Kepahiang berisiko mengalami krisis sampah ke depannya. Di tambah, upaya ini tidak didukung oleh partisipasi masyarakat yang memadai.

2.1.1.6. Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Wilayah Rawan Bencana

Gambaran geomorfologi Kabupaten Kepahiang menunjukkan tiga karakter utama, yaitu dataran-dataran alluvial dan zona vulkanik yang merupakan bagian dari Pegunungan Bukit Barisan dengan karakter pegunungan yang dikenal dengan Patahan Semangko. Berdasarkan hal tersebut, Kabupaten Kepahiang termasuk wilayah yang berpotensi terjadi bencana, seperti banjir, longsor, kebakaran hutan, gempa tektonik dan vulkanik.⁵

- Potensi Tanah Longsor terjadi di wilayah kecamatan yang berada pada kawasan-kawasan perbukitan dengan struktur geologi dan lapisan tanah yang rentan dengan kemiringan lereng lebih dari 40%, yang meliputi wilayah Kecamatan Seberang musu, Kabawetan, Muara Kemumu, dan Bermani ilir.

⁵ Pemda Kabupaten Kepahiang (2018), *Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Bidang Cipta Karya Kabupaten Kepahiang Tahun 2018 -2022*; tidak diterbitkan.



- b. Potensi Rawan Banjir meliputi wilayah Kecamatan Bermani Ilir dan Kecamatan Muara Kemumu pada kawasan yang dilalui oleh Sungai air Belimbing.
- c. Potensi Letusan Gunung Berapi meliputi wilayah aliran sungai yang bagian hulunya berada di Kecamatan Kabawetan sampai pada radius 15 Km.

Tabel 2.13 Potensi Bencana Alam Kabupaten Kepahiang

No.	Potensi	Kecamatan/Desa	Keterangan
1	Banjir	Kecamatan Muara Kemumu Desa Cinto Mandi	
		Kecamatan Bermani Ilir: • Desa Muara Langkap • Desa Kembang Seri	
2	Tanah longsor	Berdasarkan kondisi topofografi, Kabupaten Kepahiang mempunyai kemiringan di atas 45°, hal ini menyebabkan hampir seluruh wilayah berpotensi terjadi bencana tanah longsor	
3	Gunung Berapi (Bukit Kaba) Lahar, Hujan Abu, awan Panas	Kecamatan Ujan Mas	Berpotensi terlanda lahar hujan, perluasan awan panas, hujan abu dan dapat tertimpa material batu berdimensi kecil
		Kecamatan Kabawetan	berpotensi terlanda lahar hujan, perluasan awan panas, hujan abu dan dapat tertimpa material batu berdimensi kecil
		Kecamatan Tebat Karai	berpotensi terlanda lahar hujan, perluasan awan panas, hujan abu dan dapat tertimpa material batu berdimensi kecil
		Kecamatan Kepahiang	berpotensi terlanda lahar hujan
		Kecamatan Seberang Musi	berpotensi terlanda lahar hujan
4	Gempa bumi	kecamatan Tebat Karai	Hampir diseluruh wilayah Kabupaten Kepahiang berpotensi terhadap bencana gempa bumi, 2 kecamatan ini perlu mendapat perhatian lebih terhadap potensi bencana alam gempa bumi.
		Kecamatan Ujan Mas	

Sumber: Bappeda Kabupaten Kepahiang (2021)

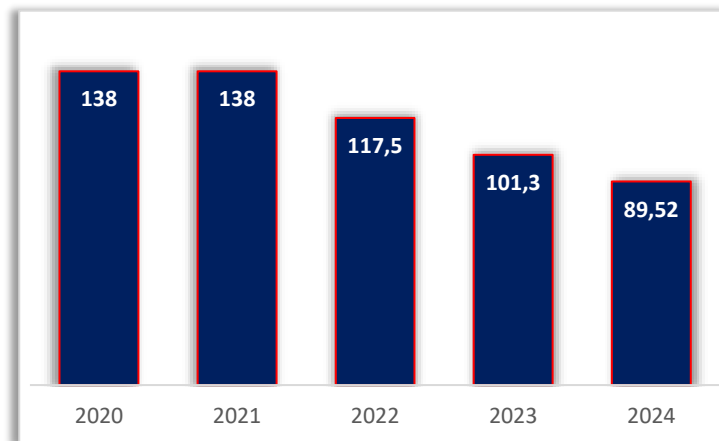
Peluang dan tantangan: Data perkembangan Indeks Risiko Bencana selama 2020-2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Kepahiang telah berhasil menurunkan



indeks risiko bencana secara signifikan dalam 5 tahun terakhir, terutama pada 2023 dan 2024. Keberhasilan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh peningkatan mitigasi, kebijakan tata ruang yang lebih baik, serta berkurangnya kejadian bencana.

Penurunan indeks risiko bencana bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: i) adanya peningkatan kapasitas mitigasi Kabupaten Kepahiang, yang dilakukan melalui peningkatan infrastruktur tahan bencana (misalnya, sistem drainase atau tanggul) atau adanya program edukasi masyarakat terkait kesiapsiagaan bencana dan optimalisasi sistem peringatan dini dan penanganan darurat; ii) Penurunan frekuensi atau intensitas bencana, yang turut menjadi komponen penghitungan indeks; dan iii) adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah yang lebih ketat dalam tata ruang dan pembangunan, khususnya, di daerah rawan bencana.

Gambar 2.8 Perkembangan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kepahiang, 2020-2024



Sumber: BNPB (2024)

Terkait hal tersebut, tantangan ke depan adalah menjaga tren penurunan risiko dengan tetap meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Selain itu, perlu tetap dilakukan upaya untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim yang bisa meningkatkan risiko baru di masa depan dan melakukan evaluasi efektivitas kebijakan dan infrastruktur yang telah diterapkan.

2.1.1.7. Demografi

a. Perkembangan Jumlah Penduduk

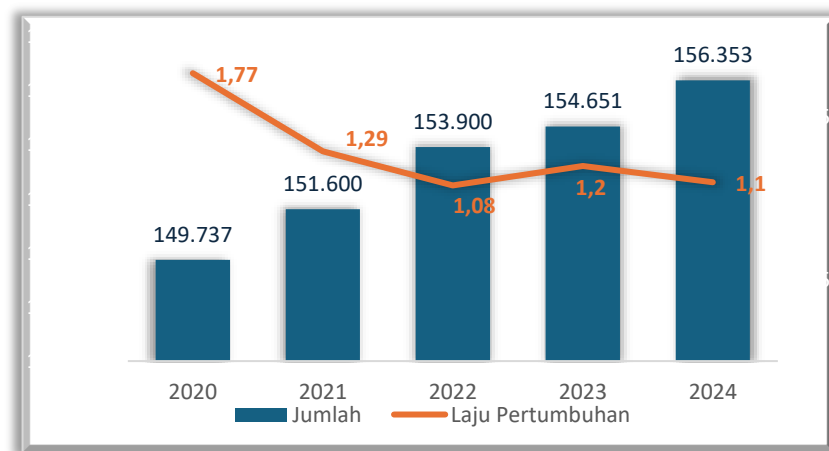
Kabupaten Kepahiang termasuk kabupaten yang heterogen baik secara budaya, agama, maupun suku. Berbagai kelompok agama dan suku hidup berdampingan secara damai. Suku Rejang merupakan penduduk asli dan menjadi kelompok masyarakat terbesar dengan budaya yang dominan. Namun



begitu, berbagai kelompok masyarakat lain, sebagai pendatang, dapat hidup berdampingan di kabupaten ini sejak lama. Tercatat, setidaknya, terdapat masyarakat yang berasal dari Suku Serawai, Jawa, Lembak, Sunda, serta suku lainnya, yang tinggal di wilayah Kabupaten Kepahiang.

Total jumlah Penduduk Kabupaten Kepahiang pada 2024 kurang lebih sebanyak 156,353 ribu jiwa. Terdapat penambahan jumlah penduduk sekitar 6.616 jiwa penduduk selama lima tahun, sejak 2020.

Gambar 2.9 Perkembangan Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kepahiang, 2020-2024



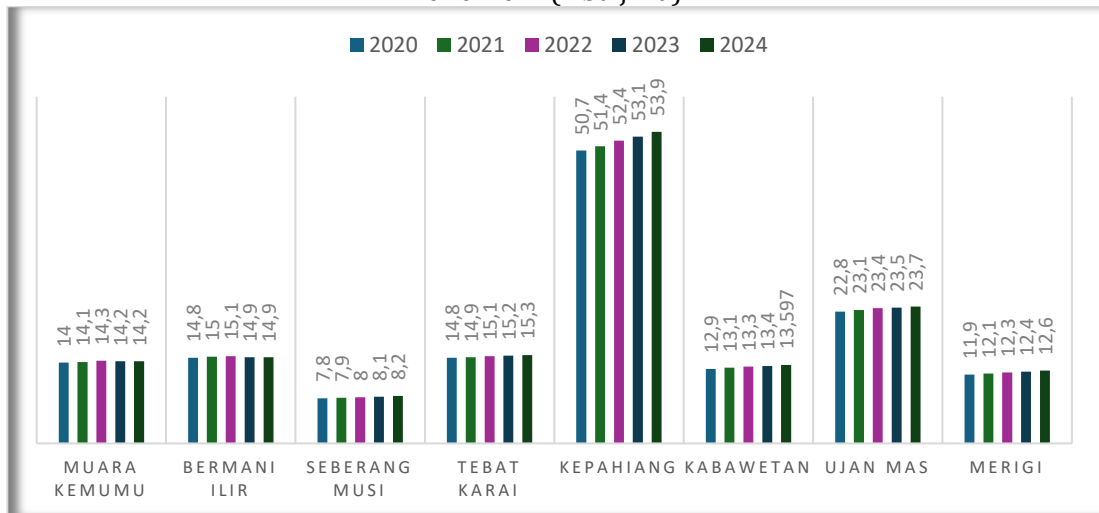
Sumber: Kabupaten Kepahiang Dalam Angka (Data Diolah)

b. Persebaran Penduduk per Kecamatan

Data selama 2020-2024 menunjukkan Kecamatan Kepahiang mempunyai jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Kepahiang, sementara Seberang Musi menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil selama rentang waktu tersebut.



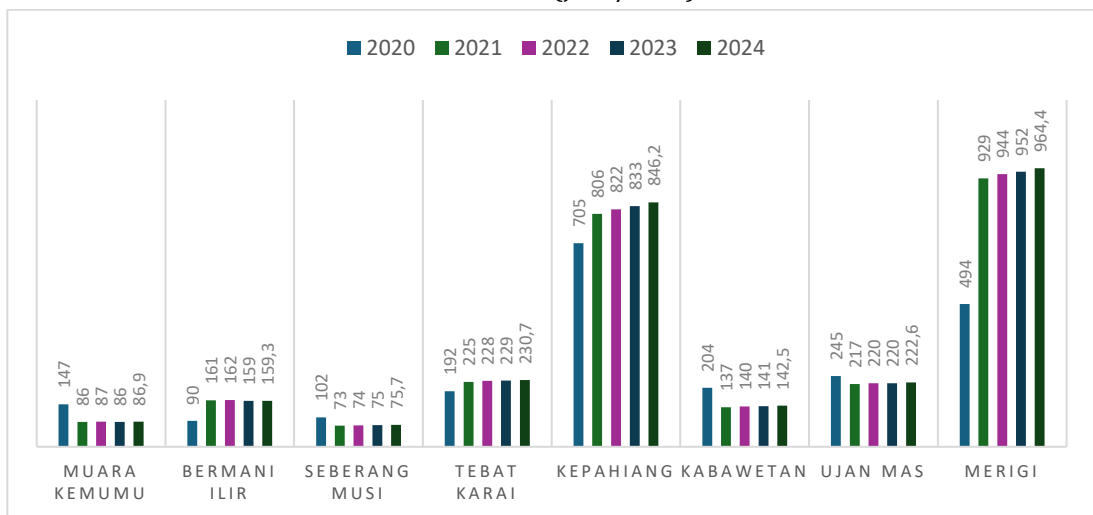
Gambar 2.10 Sebaran Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Kepahiang, 2020-2024(ribu jiwa)



Sumber: Kabupaten Kepahiang Dalam Angka (data diolah)

Data selama 2020-2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Kepahiang mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup stabil di mana beberapa kecamatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah dan kepadatan penduduk.

Gambar 2.11 Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Kepahiang, 2020-2024 (jiwa/km²)



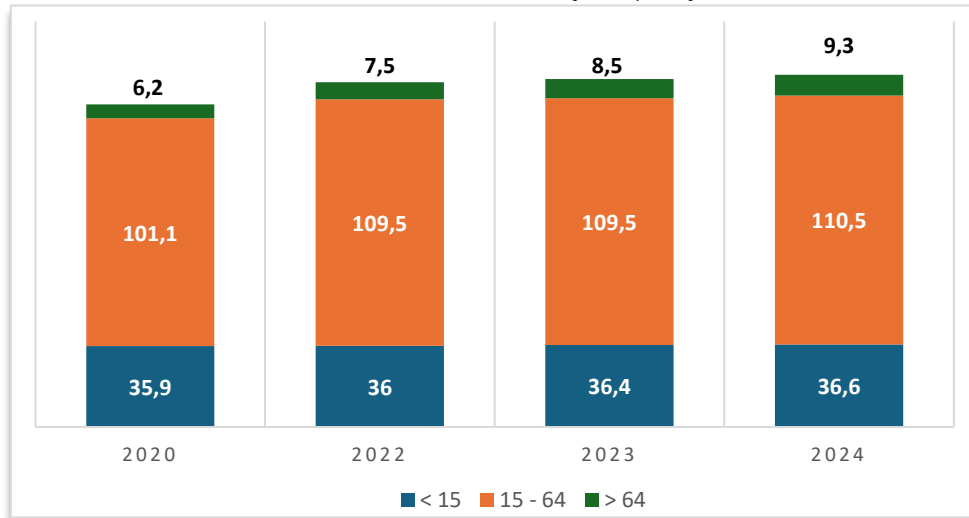
Sumber: Kabupaten Kepahiang Dalam Angka (data diolah)

Selama rentang waktu lima tahun tersebut, terdapat indikasi adanya pola perpindahan yang kuat di Kecamatan Merigi, sedangkan Kecamatan Kepahiang yang merupakan ibu kota Kabupaten Kepahiang tetap menjadi kecamatan dengan penduduk terbanyak dan terpadat kedua dari waktu ke waktu.



c. Struktur Usia Penduduk

Gambar 2.12 Perkembangan Struktur Penduduk Kabupaten Kepahiang menurut Usia Penduduk, 2020-2024 (ribu jiwa)



Sumber: Kepahiang Dalam Angka (data diolah)

Dari data perkembangan struktur penduduk Kabupaten Kepahiang menurut usia selama 2020-2024 didapatkan gambaran bahwa Kabupaten Kepahiang sedang menuju bonus demografi, yang bisa menjadi peluang ekonomi jika dikelola dengan baik. Namun begitu, tren penuaan penduduk mulai terlihat, sehingga perlu kebijakan jangka panjang terkait kesejahteraan lansia. Tantangan utama adalah memastikan kelompok usia produktif mendapatkan peluang kerja agar tidak menjadi beban ekonomi.

Peluang dan tantangan kondisi demografi: Berdasarkan data perkembangan demografi Kepahiang selama 2020-2024, terlihat bahwa Kabupaten Kepahiang sedang mengalami peningkatan jumlah populasi, meskipun masih dalam kategori menengah kepadatan penduduknya. Beberapa kecamatan menunjukkan adanya lonjakan jumlah penduduk yang signifikan, terutama Kecamatan kepahiang, yang menunjukkan kecenderungan adanya urbanisasi makin cepat, dengan lonjakan populasi hampir 10 persen dalam 5 tahun terakhir.

Sementara, di beberapa kecamatan lain mengalami fluktuasi kepadatan bahkan beberapa kecamatan lain, seperti Kecamatan Merigi, justru relatif stagnan. Hal ini dapat terjadi karena adanya kebijakan pembangunan kota yang kurang merata atau dinamika migrasi penduduk secara natural. Kondisi ini perlu memperoleh perhatian. Jika kenaikan ini hanya efek jangka pendek, maka tren ke depan akan kembali stabil atau turun. Namun, jika karena ekspansi ekonomi



permanen, maka kota harus siap dengan lonjakan kebutuhan layanan publik. Kebutuhan perumahan, transportasi, dan fasilitas umum akan meningkat drastis.

Jika pertumbuhan ini terus berlanjut tanpa perencanaan matang, bisa terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan kapasitas infrastruktur tersebut. Berdasarkan data persebaran penduduk per kecamatan, kondisi saat ini berpotensi menjadi masalah urbanisasi yang tak terkendali, khususnya di Ibu Kota Kabupaten. Ketimpangan antar kecamatan harus segera ditangani. Jika tidak, bisa muncul masalah sosial dan ekonomi di wilayah yang stagnan.

Di sisi lain, bonus demografi adalah peluang emas sehingga harus diimbangi kebijakan yang tepat, khususnya, terkait pendidikan dan ketenagakerjaan yang tepat. Peluang yang mungkin tercipta, dengan mayoritas penduduk dalam usia produktif, ekonomi bisa berkembang pesat jika tenaga kerja ini diarahkan dengan baik. Bisa muncul industri kreatif, startup, dan sektor jasa yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, jika tidak, kondisi ini bisa berubah menjadi bencana pengangguran. Sementara itu, data juga menunjukkan adanya kondisi penuaan populasi yang mulai terasa. Dalam 20 tahun ke depan, tantangan *aging population* bisa menjadi masalah serius jika tidak dipersiapkan sejak sekarang.

Untuk itu, perlu strategi untuk melakukan investasi besar dalam bidang pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja, menciptakan lebih banyak lapangan kerja di sektor inovatif (teknologi, jasa, dan industri kreatif), dan menyiapkan kebijakan ketenagakerjaan jangka panjang untuk mencegah pengangguran struktural.

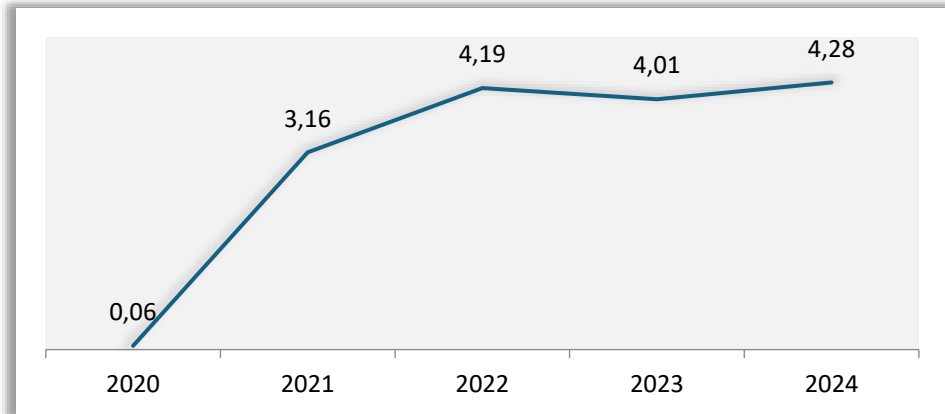


2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Gambar 2.13 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepahiang, 2020-2024

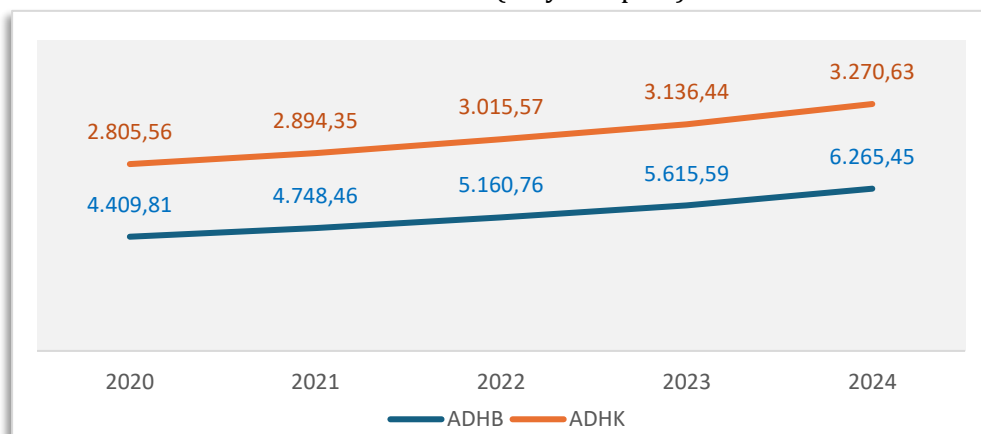


Sumber: BPS Kabupaten Kepahiang (data diolah)

Data perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepahiang, 2020-2024 menunjukkan adanya stagnasi memasuki 2020. Laju pertumbuhan ekonomi hanya 0,06 persen, yang menunjukkan hampir tidak ada pertumbuhan. Hal ini mengindikasikan adanya kontraksi akibat pandemi, yang menekan produksi dan konsumsi masyarakat. Pada tahun berikutnya, menunjukkan mulai adanya pemulihan (2021-2024), yang terus berlanjut hingga akhir 2024.

b. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto

Gambar 2.14 Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Kepahiang, 2020-2024 (milyar rupiah)



Sumber: Kabupaten Kepahiang Dalam Angka (data diolah)

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kepahiang selama 2020-2024 menunjukkan adanya peningkatan selama rentang waktu tersebut. Peningkatan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) lebih tajam

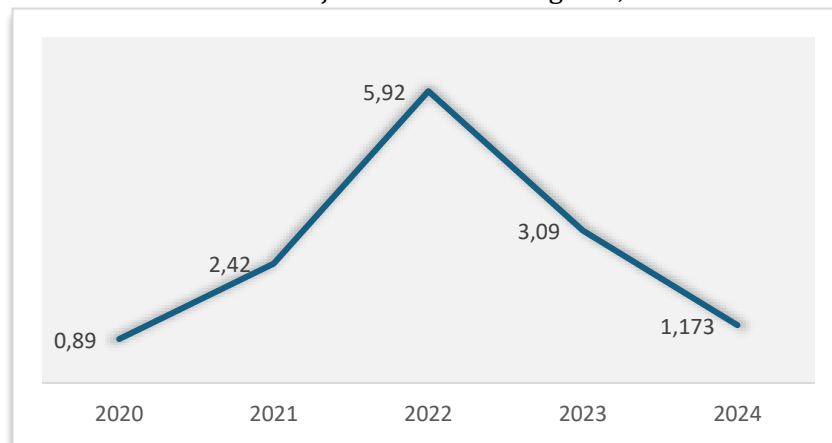


dibandingkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), yang menunjukkan adanya faktor inflasi atau kenaikan harga barang/jasa dalam pertumbuhan ekonomi. Perkembangan tersebut juga menunjukkan tanda adanya inflasi dan kenaikan biaya hidup. Jika ADHB meningkat pesat tetapi ADHK tumbuh lebih lambat, kemungkinan besar terjadi inflasi yang perlu dikendalikan. Kenaikan ADHB bisa disebabkan oleh harga barang dan jasa yang naik, bukan peningkatan output ekonomi sebenarnya.

Sementara itu, perkembangan PDRB ADHK yang tumbuh stabil menandakan adanya pertumbuhan ekonomi riil yang positif, tetapi tidak secepat pertumbuhan nominal. Hal ini, di sisi lain, juga menunjukkan adanya peningkatan kapasitas ekonomi Kabupaten Kepahiang. Kenaikan ADHK menunjukkan bahwa secara riil, ekonomi tetap bertumbuh, meskipun dengan laju yang lebih moderat. Hal ini menandakan bahwa aktivitas produksi dan daya beli masyarakat masih bertahan dan meningkat secara perlahan.

c. Perkembangan Laju Inflasi

Gambar 2.15 Laju Inflasi Kota Bengkulu, 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Bengkulu (2024)

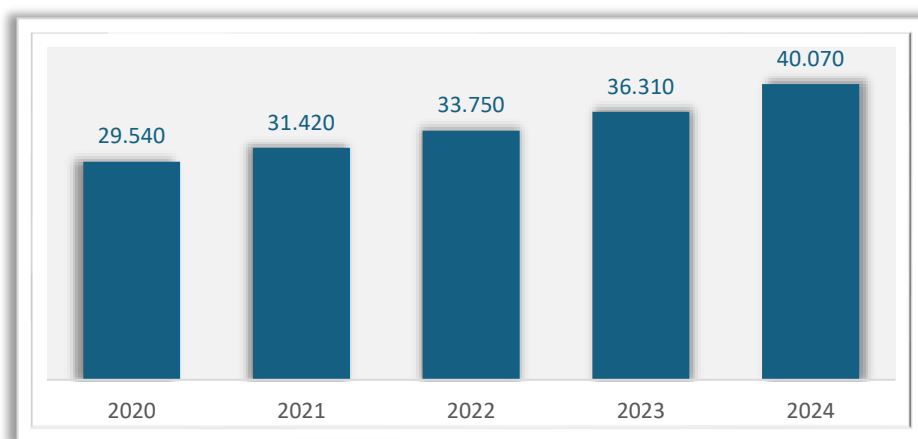
Gambaran tentang perkembangan laju inflasi Kabupaten Kepahiang digunakan data perkembangan Kota Bengkulu karena Pemerintah Kabupaten Kepahiang tidak melakukan penghitungan inflasi sendiri. Data perkembangan inflasi Kota Bengkulu 2020-2024 menunjukkan siklus ekonomi yang terpuruk pada 2020. Untuk selanjutnya, pada 2021, terlihat adanya pemulihan untuk kemudian mengalami tekanan tinggi pada 2022, dan terjadi normalisasi pada 2024.



d. Perkembangan PDRB Perkapita

PDRB per kapita adalah indikator utama kesejahteraan ekonomi masyarakat. Nilai ini menunjukkan berapa besar output ekonomi yang dihasilkan per individu dalam suatu wilayah. Data perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Kepahiang selama 2020-2024 menunjukkan bahwa selama 2020-2021, seiring dengan pemulihan ekonomi akibat pandemi, PDRB Per Kapita Kabupaten Kepahiang mengalami sedikit peningkatan.

Gambar 2.16 Perkembangan PDRB ADHB Per Kapita Kabupaten Kepahiang 2020-2024 (juta/per kapita/tahun)



Sumber: BPS Kabupaten Kepahiang (data diolah)

Hal ini mencerminkan adanya kontraksi ekonomi pada tahun tersebut. Hal ini terjadi seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi yang nyaris stagnan (0,89 persen), yang menunjukkan bahwa hampir seluruh sektor ekonomi terdampak. Daya beli masyarakat anjlok akibat ketidakpastian ekonomi, PHK massal, dan turunnya konsumsi rumah tangga.

Memasuki 2021, terlihat adanya pemulihan ekonomi awal, PDRB Per Kapita bangkit dengan pertumbuhan positif sekitar 7,4 persen. Pada tahun-tahun berikutnya, terjadi akselerasi pemulihan dengan kenaikan 7,6-10,3 persen. Hal ini mencerminkan momentum pemulihan ekonomi yang semakin kuat. Namun, dengan adanya inflasi tinggi pada 2022 (5,92 persen), kondisi ini mengurangi daya beli masyarakat meskipun nominal PDRB per kapita naik.

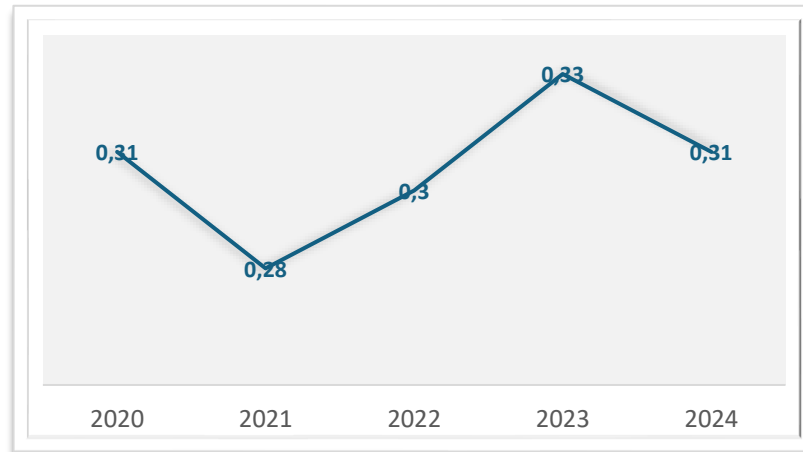
e. Perkembangan Indeks Gini

Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Kepahiang selama 2020-2024, secara umum memperlihatkan adanya kenaikan dalam 5 tahun terakhir. Lonjakan Indeks Gini di 2020 (menjadi 0,31) kemungkinan besar dikarenakan proses pemulihan,



yang menyebabkan penurunan daya beli, dan peningkatan ketimpangan pendapatan. Sementara, adanya penurunan pada 2021 bisa menjadi tanda efektivitas bantuan sosial pemerintah dan kebijakan pemulihan ekonomi.

Gambar 2.17 Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Kepahiang 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Kepahiang (data diolah)

Namun, kenaikan Indeks Gini pada 2022-2024 justru menunjukkan adanya pola kesenjangan pasca-pandemi yang cenderung meningkat. Meskipun pemulihan ekonomi terjadi, namun keuntungan ekonomi tidak dinikmati secara merata. Kelompok rentan mungkin mengalami stagnasi atau keterlambatan pemulihan. Di sisi lain, kenaikan terus-menerus dalam dua tahun terakhir (2022-2024) bisa menunjukkan adanya perubahan struktural dalam ekonomi Kabupaten Kepahiang, seperti konsentrasi kekayaan di sektor tertentu atau melemahnya upah di sektor pekerja informal.

Peluang dan tantangan: Dari data perkembangan indikator-indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Kepahiang selama 2020-2024 menunjukkan gambaran bahwa Kabupaten Kepahiang mengalami pemulihan ekonomi setelah pandemi. Pertumbuhan ekonomi anjlok drastis pada 2020 (0,06 persen) disebabkan pemulihan, yang menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi, investasi, dan konsumsi.

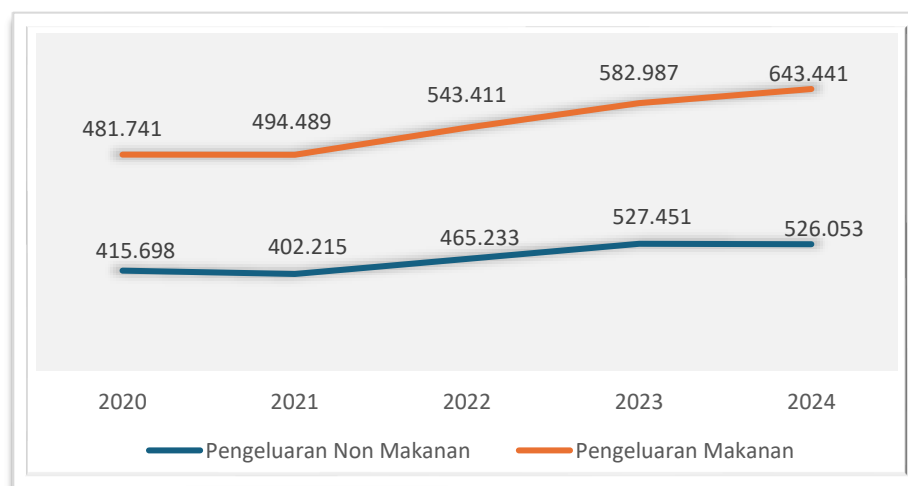
PDRB (ADHB dan ADHK) meningkat secara konsisten sejak 2021, menunjukkan bahwa output ekonomi Kabupaten Kepahiang bertumbuh stabil. Hal ini juga ditunjukkan adanya peningkatan PDRB per kapita -yang sempat turun pada 2020 akibat perlambatan ekonomi, yang naik signifikan sejak 2021-2024. Hal ini menandakan adanya pemulihan daya beli masyarakat.



Di sisi lain, meskipun ekonomi tumbuh, di mana pada 2022 (dengan inflasi 5,92 persen), kemungkinan hal ini akibat kenaikan harga bahan pokok dan dampak pemulihan ekonomi yang mendorong permintaan lebih cepat dibandingkan pasokan. Sementara, pada 2024, dengan turunnya inflasi menjadi 1,17 persen, hal ini menunjukkan adanya stabilisasi harga dan efektivitas kebijakan pengendalian inflasi. Kondisi ini diukung perkembangan PDRB dan PDRB per kapita yang menunjukkan adanya peningkatan. Namun, kondisi ketimpangan justru semakin lebar, yang ditunjukkan oleh kenaikan Indeks Gini naik dari 0,31 (2020) menjadi 0,31 (2024). Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua kelompok masyarakat merasakan manfaat pemulihan secara merata.

Secara umum, perkembangan indikator kemampuan ekonomi Kabupaten Kepahiang selama 2020-2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Kepahiang mengalami pertumbuhan ekonomi moderat (2,8 persen per tahun) dengan adanya peningkatan kesejahteraan yang diindikasikan dari naiknya persentase pengeluaran non-makanan. Namun, produktivitas tenaga kerja cenderung tidak stabil dan menurun akibat ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan ekonomi riil.

Gambar 2.18 Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita/Bulan Komoditas Makanan dan Non-Makanan Kabupaten Kepahiang, 2020-2024 (rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Kepahiang (data diolah)

f. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Dari sisi pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, terlihat adanya peningkatan kesejahteraan karena masyarakat mampu mengalokasikan lebih banyak untuk kebutuhan non-pokok (non-makanan).



Tabel 2.14 Rata-rata dan Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita/Bulan untuk Komoditas Makanan dan Non-Makanan Kabupaten Kepahiang, 2020-2024

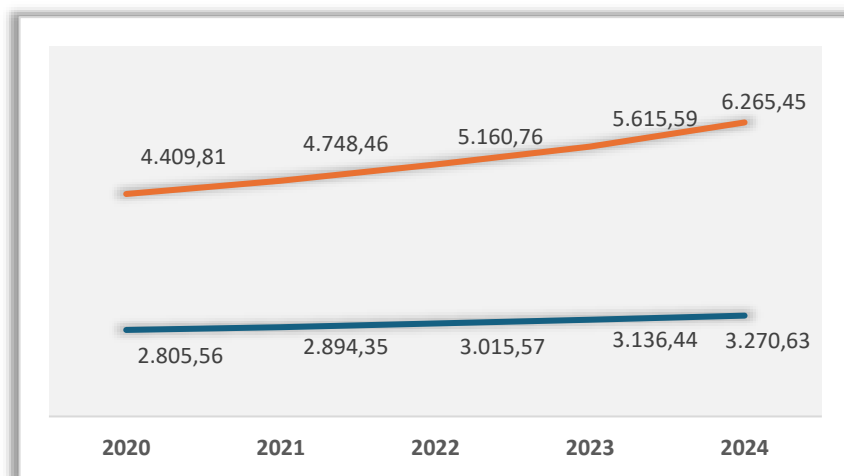
Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Makanan (Rp)	481.741	494.489	543.411	582.987	643.441
Non-Makanan (Rp)	415.698	402.215	465.233	527.451	526.053
% Makanan	54%	55%	54%	53%	55%
% Non-Makanan	46%	45%	46%	48%	45%

Sumber: BPS Kabupaten Kepahiang (data diolah)

g. Produktivitas Total Daerah

Sementara itu, data perkembangan produktivitas daerah Kabupaten Kepahiang selama kurun waktu tersebut terlihat cenderung tidak stabil dan berpotensi menurun dalam jangka panjang. Dari sisi perkembangan PDRB Kabupaten Kepahiang 2020-2024 terlihat adanya pertumbuhan nominal yang tinggi terutama dipicu oleh inflasi, dan hal ini bukan pertumbuhan riil.

Gambar 2.19 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kepahiang, 2020-2024 (rupiah)



Sumber: Kabupaten Kepahiang Dalam Angka (data diolah)

Namun, dari sisi produktivitas daerah terlihat pertumbuhan angkatan kerja (9,7 persen dari 2020-2024) tidak diimbangi oleh peningkatan PDRB riil yang signifikan (+10 persen). Meski pengeluaran per kapita naik, pertumbuhan PDRB riil lemah (2,8 persen per tahun) dan produktivitas tergerus oleh ledakan angkatan kerja. Kabupaten Kepahiang ke depan perlu meningkatkan produktivitas melalui penciptaan lapangan kerja produktif, yang fokus pada sektor bernilai tambah tinggi, misalnya, manufaktur, pariwisata, atau ekonomi kreatif; dan peningkatan keterampilan angkatan kerja, misalnya, melalui program pelatihan vokasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan industri dan kualitas tenaga kerja.



Tabel 2.15 Perkembangan Produktivitas Total Daerah Kabupaten Kepahiang, 2020-2024

Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHK (Miliar)	2805,56	2894,35	3015,57	3136,44	3270,63
Angkatan Kerja (Orang)	83790	81232	81062	89787	91931
Produktivitas (Rp Juta)	33,48	35,63	37,2	34,93	40,07

Sumber: BPS Kabupaten Kepahiang (data diolah)

h. Nilai Tukar Petani

Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Bengkulu (data NTP Kabupaten Kepahiang tidak tersedia) selama 2018-2023 menunjukkan bahwa kondisi ekonomi petani cenderung membaik sebagaimana terlihat dari kenaikan NTP yang konsisten, tetapi perlu dicermati apakah ini akibat inflasi atau peningkatan produktivitas. Peningkatan harga diterima lebih cepat dibanding harga dibayar memberi peluang peningkatan daya beli petani, tetapi harus diwaspadai potensi fluktuasi pasar.

Gambar 2.20 Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Bengkulu, 2018-2023



Sumber: BPS Provinsi Bengkulu

Perkembangan data antara harga yang dibayar dan diterima petani menunjukkan margin atau keuntungan petani cenderung meningkat, karena pertumbuhan pendapatan lebih tinggi daripada pertumbuhan pengeluaran. Hal ini mencerminkan bertambahnya kemampuan petani dalam membeli barang/jasa dari hasil pendapatannya. Dengan NTP di atas 100 dan terus meningkat, petani memiliki daya beli yang makin kuat.

Namun, Pemerintah Kabupaten Kepahiang perlu memperhatikan beberapa potens tantangan ke depan, khususnya terkait volatilitas harga komoditas pertanian

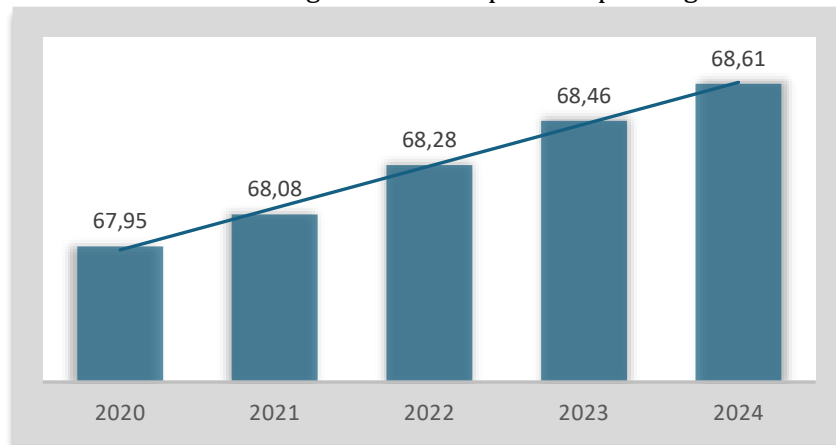


yang cenderung berfluktuasi karena faktor cuaca, permintaan global, dan situasi geopolitik, dan juga kenaikan biaya produksi yang naik tajam yang bisa menggerus harga yang diterima petani.

2.2.2 Kesehatan untuk Semua

Angka Usia Harapan Hidup (UHH): Peningkatan Angka Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Kepahiang selama 2020-2024 relatif lambat (0,66 tahun dalam 5 tahun). Hal ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam sektor kesehatan. Faktor-faktor seperti kualitas layanan kesehatan, akses terhadap fasilitas medis, dan pola hidup sehat masyarakat menjadi kunci utama untuk meningkatkan angka ini lebih signifikan.

Gambar 2.21 Perkembangan UHH Kabupaten Kepahiang 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang (2025)

1. Fasilitas Kesehatan

Rasio Dokter Umum. Perkembangan data Rasio Ketersediaan Dokter per Satuan Penduduk Kabupaten Kepahiang selama 2020-2024 menunjukkan trend fluktuasi yang ekstrem.

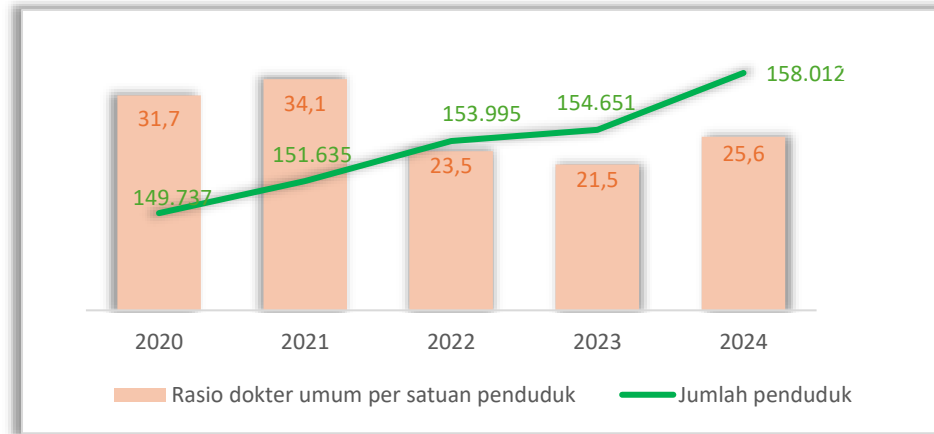
Tabel 2.16 Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Kabupaten Kepahiang, 2020-2024

2020	2021	2022	2023	2024
6,5	N/A	3,9	N/A	N/A

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang, 2025



Gambar 2.22 Rasio Dokter per Satuan Penduduk Kabupaten Kepahiang, 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang, 2024

Rasio Tenaga Kesehatan. Sementara itu, pada perkembangan rasio ketersediaan tenaga medis selama rentang waktu 2020-2024 juga menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif. Terdapat tren naik yang cenderung tajam pada 2020 yang kemudian turun menjadi 3,9 (2022). Sementara penurunan pada 2022 (3,9) mengindikasikan banyak tenaga medis yang tidak diperpanjang pascapandemi, atau pendataan kembali menggunakan definisi yang lebih sempit.

Namun, yang perlu menjadi catatan adalah angka pada 2022 yang di bawah 2020 mengindikasikan potensi *shortage* atau minimal belum pulihnya jumlah tenaga medis. Dengan kondisi ini artinya sistem kesehatan di Kabupaten Kepahiang berpotensi kewalahan jika beban pelayanan meningkat. Hal ini butuh evaluasi dan intervensi kebijakan (misal insentif, distribusi tenaga medis ke daerah, dsb.).

Rasio Rumah Sakit. Di sisi lain, data Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang selama 2020-2024 menunjukkan adanya stagnansi dalam dukungan layanan kesehatan berupa keberadaan rumah sakit. Tercatat hanya ada 1 RS di Kabupaten Kepahiang selama rentang waktu tersebut.⁶

Dengan populasi meningkat dari 149,7 ribu menjadi 156,3 ribu, dengan tetap hanya ada 1 rumah sakit bisa jadi hal ini mengindikasikan minimnya ekspansi infrastruktur kesehatan sekunder/tersier. Meski jumlah RS tampak “cukup” di atas kertas (1 RS untuk 150 ribu penduduk), perlu dipertimbangkan aspek kapasitas RS dan akses geografis penduduk ke RS.

⁶ Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang, 2024.



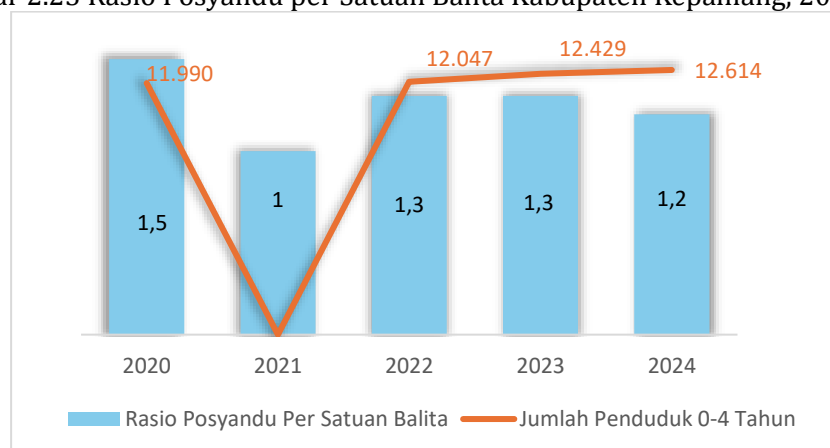
Tabel 2.17 Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Kepahiang, 2020 – 2024

Fasilitas	2020	2021	2022	2023	2024
Puskesmas	14	14	14	14	14
Puskesmas Pembantu	31	31	31	31	31

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang, 2025

Cakupan Puskemas dan Puskesmas Pembantu (Pustu). Puskesmas dan Pustu merupakan kunci layanan kesehatan primer. Data selama 2020-2024 menunjukkan perkembangan yang stagnan terhadap cakupan fasilitas kesehatan ini. Tidak ada perubahan jumlah puskesmas maupun pustu selama 5 tahun terakhir, padahal penduduk meningkat dari 149,7 ribu ke 156,3 ribu. Hal ini bisa berarti bahwa kapasitas puskesmas/pustu mencukupi sehingga belum perlu dilakukan penambahan atau, di sisi lainm belum ada rencana ekspansi, sehingga potensi beban layanan meningkat di fasilitas yang sama.

Gambar 2.23 Rasio Posyandu per Satuan Balita Kabupaten Kepahiang, 2020-2024



Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang, (data diolah)

Untuk itu, ke depannya, Pemerintah Kabupaten Kepahiang perlu melakukan analisa lebih lanjut terhadap cakupan rasio puskesmas/pustu ini, apakah masih ideal seiring pertambahan penduduk karena ketersediaan puskesmas dan pustu yang memadai penting untuk pemerataan layanan kesehatan primer (vaksinasi, pemeriksaan ibu hamil, dan pengobatan dasar).

Rasio Posyandu. Data perkembangan Rasio Posyandu terhadap jumlah balita (penduduk usia 0-4 tahun) selama 2022-2024 menunjukkan kestabilan Rasio Posyandu. Meningkatnya rasio Posyandu per balita menandakan ada perbaikan cakupan layanan kesehatan dasar ibu-anak. Namun, untuk ke depannya,



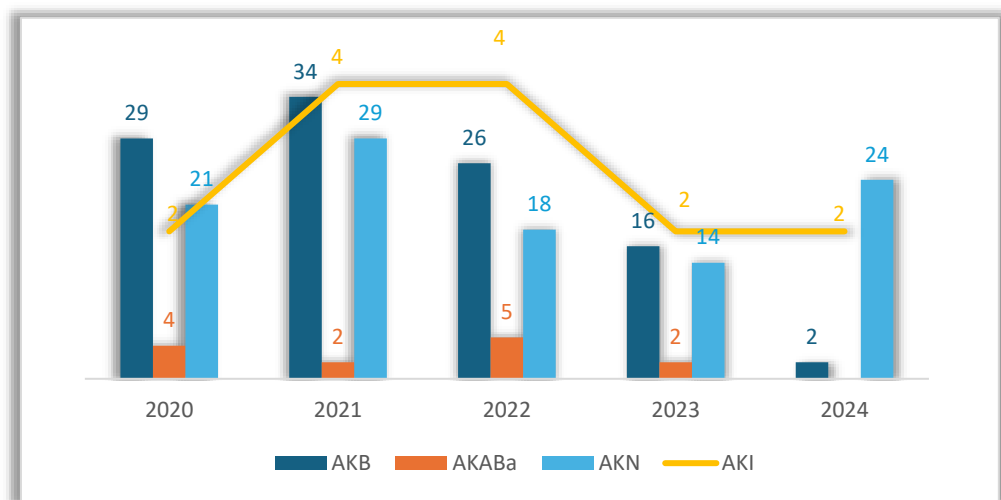
tetap perlu dipastikan bahwa Posyandu benar-benar aktif dan kualitas pelayanannya terjaga (imunisasi, pemantauan gizi, dsb).

2. Cakupan Layanan Kesehatan

Perkembangan Tingkat Kesehatan Ibu dan Anak. Perkembangan tingkat kesehatan masyarakat Kabupaten Kepahiang selama 2020-2024, secara umum, menunjukkan kecenderungan perkembangan yang positif dalam rentang waktu tersebut.

Indikator terkait Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBa), dan Angka Kematian Neonatal (AKN), yang dihitung per 1.000 kelahiran hidup; serta Angka Kematian Ibu (AKI), yang dihitung per 10.000 kelahiran hidup, kesemuanya memperlihatkan adanya keserupaan pola perkembangan, yang cenderung menurun dalam jangka waktu tersebut.

Gambar 2.24 Perkembangan Indikator AKB, AKBa, AKN, dan AKI Kabupaten Kepahiang, 2020-2024

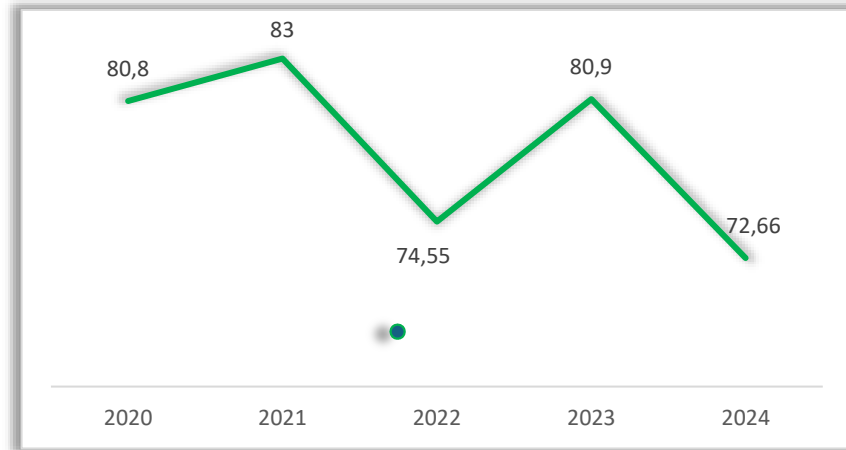


Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2024

Hal ini setidaknya menunjukkan adanya peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak selama ini. Indikator-indikator tersebut juga menunjukkan adanya fluktuasi pada 2021. Hal ini perlu dicermati lebih lanjut karena bisa jadi sebagai akibat pandemi atau faktor lain yang menghambat akses kesehatan.



Gambar 2.25 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Kepahiang, 2020-2024 (%)



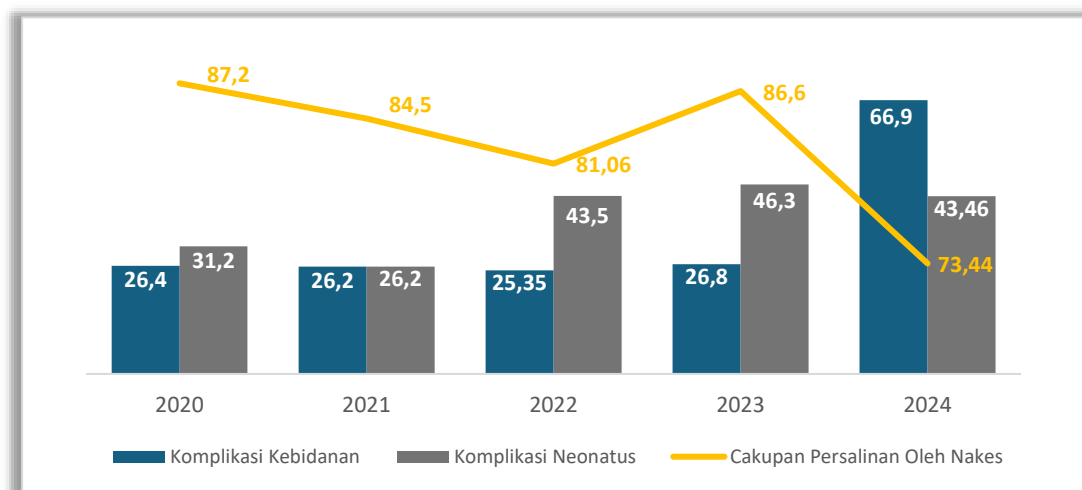
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang, 2024

Layanan Kesehatan Ibu Hamil. Data tentang perkembangan layanan kesehatan ibu di Kabupaten Kepahiang selama 2020-2024, seperti ditunjukkan oleh beberapa indikator, dapat digambarkan bahwa cakupan kunjungan ibu hamil selama masa kehamilan keempat (K4) cenderung mengalami fluktuasi, dengan tren penurunan pada 2022 dan kembali menurun pada 2024. Terkait dengan hal ini, kecenderungan data agaknya menggambarkan adanya masalah akses ibu hamil terhadap fasilitas kesehatan, yang dirasa masih perlu dioptimalkan untuk peningkatan layanan ke depannya.

Selain itu, pada indikator cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, data perkembangan selama 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan kompeten cenderung relatif stabil, tetapi mengalami sedikit penurunan pada 2022.



Gambar 2.26 Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan, Komplikasi Kebidanan, dan Komplikasi Neonatus di Kabupaten Kepahiang, 2020-2024 (%)



Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2024

Selain itu, pada cakupan layanan komplikasi kebidanan yang ditangani dan cakupan neonatus dengan komplikasi menunjukkan kondisi yang sama-sama perlu ditingkatkan. Pada layanan kebidanan dengan komplikasi, data menunjukkan adanya tantangan dalam penanganan kondisi ini, khususnya, dalam penanganan kasus persalinan dengan risiko tinggi. Sementara pada cakupan layanan neonatus dengan komplikasi yang ditangani, meskipun masih di bawah 50%, namun masih perlu ditingkatkan.

Tabel 2.18 Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Kepahiang, 2020-2024 (%)

2020	2021	2022	2023	2024
83,00	82,80	80,02	85,00	73,9

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2024

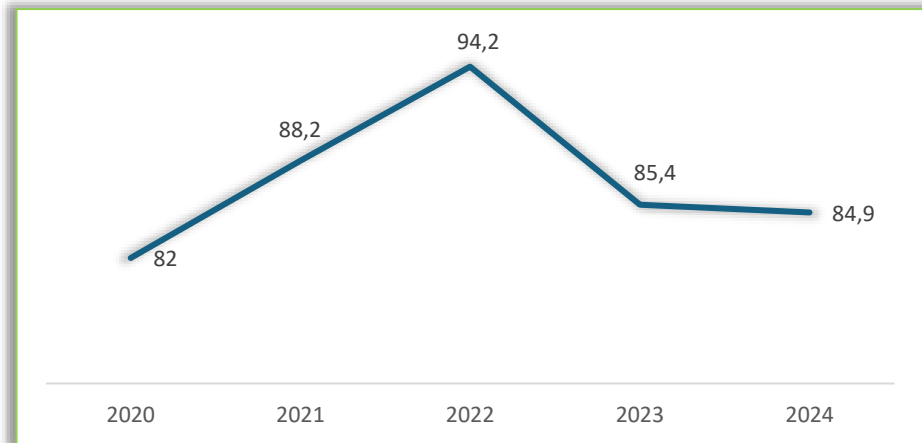
Masih terkait dengan layanan kesehatan ibu hamil, data cakupan pelayanan nifas memberikan gambaran yang relatif serupa. Cakupan pelayanan nifas, yang sempat menurun pada 2022 kembali meningkat pada 2023 namun kembali turun pada tahun 2024. Masalah utama yang terbaca dari perkembangan data ini, setidaknya, mencakup dua masalah, yaitu kurangnya kesadaran ibu untuk melakukan pemeriksaan pasca-persalinan atau masih adanya keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan.

Layanan Kesehatan Bayi. Faktor kesadaran ibu agaknya juga menjadi gambaran terhadap perkembangan cakupan kunjungan Kunjungan Bayi dan Balita. Data Kabupaten Kepahiang selama 2020-2024 menunjukkan adanya fluktuasi penurunan cakupan kunjungan bayi dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan



adanya ketidakpastian dalam tindak lanjut kesehatan bayi pasca lahir. Masalah utama yang bisa muncul adalah kurangnya kesadaran orang tua atau adanya keterbatasan tenaga kesehatan dalam melakukan pemantauan rutin kepada Ibu dan bayi.

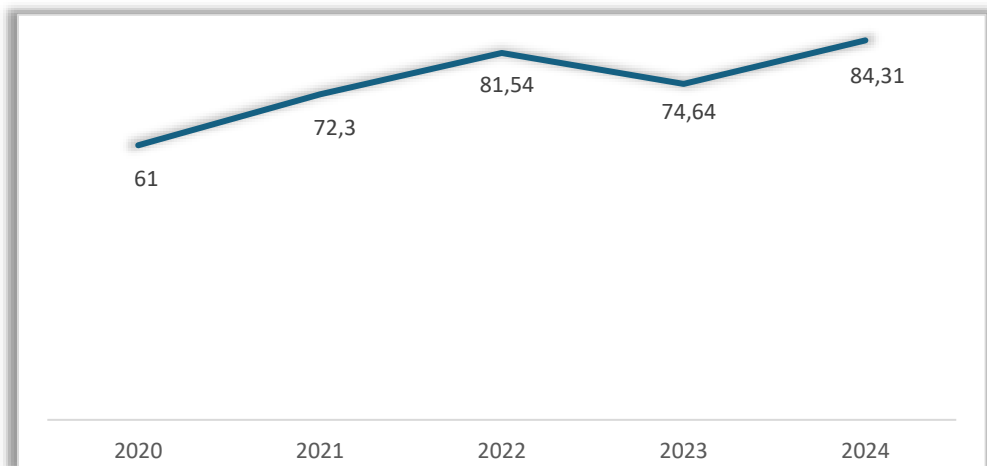
Gambar 2.27 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Kepahiang, 2020-2024 (%)



Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2024

Imunisasi dan Penanganan Penyakit Balita. Secara umum, Pelayanan anak balita mengalami tren naik turun, yang bisa disebabkan oleh gangguan dalam sistem layanan kesehatan.

Gambar 2.28 Cakupan Pelayanan Anak Balita di Kabupaten Kepahiang, 2020-2024 (%)

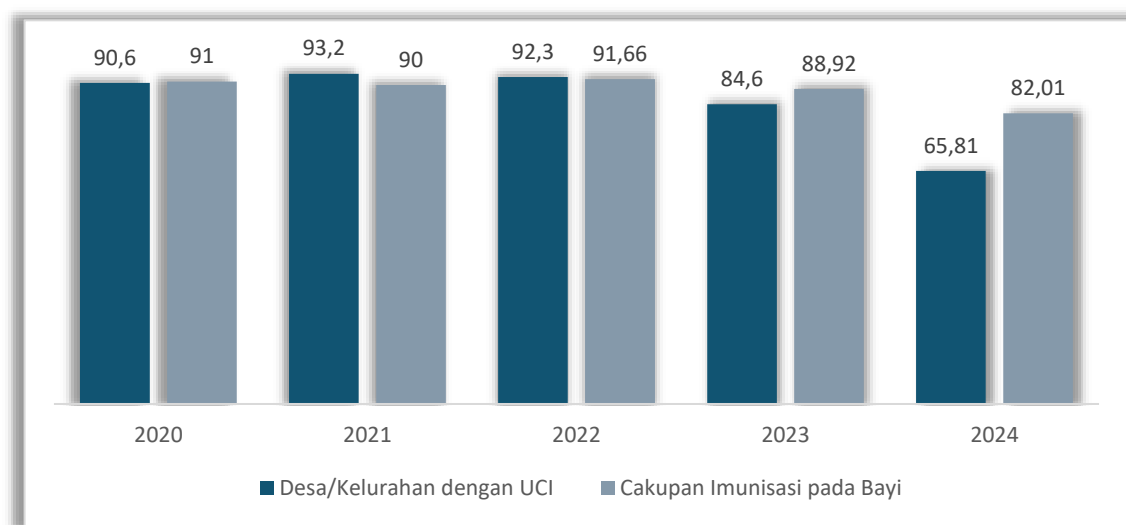


Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2024

Di sisi lain, kondisi ini didukung oleh perkembangan cakupan layanan imunisasi yang juga cenderung fluktuatif. Cakupan Universal Child Immunization (UCI) di tingkat Desa/Kelurahan mengalami tren penurunan signifikan dari 2020 hingga 2024. Hal yang serupa juga ditunjukkan dengan data perkembangan cakupan imunisasi campak yang juga sedikit menurun pada 2024.



Gambar 2.29 Cakupan Desa/Kelurahan dengan UCI dan Persentase Anak dengan Imunisasi Campak di Kabupaten Kepahiang, 2020-2024 (%)



Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2024

Penurunan ini berpotensi meningkatkan risiko penyakit menular akibat cakupan imunisasi yang tidak merata. Upaya penanganan penyakit pada bayi dan anak perlu segera ditingkatkan. Sebagaimana data Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa perkembangan cakupan penanganan balita dengan pneumonia juga mengalami fluktuasi tajam. Hal ini dapat mengindikasikan adanya ketidakkonsistenan dalam layanan kesehatan pada anak.

Tabel 2.19 Cakupan Penanganan Pneumonia pada Balita di Kabupaten Kepahiang, 2020-2024 (%)

2020	2021	2022	2023	2024
64,3	92,9	71,4	92,9	N/A

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang, 2024

Layanan Gizi Anak. Data dari Dinas Kesehatan juga menunjukkan kondisi yang menggembirakan pada upaya penanganan gizi anak. Cakupan perawatan balita gizi buruk tetap tinggi di angka 100 persen. Hal ini mengindikasikan adanya keberhasilan dalam menangani kasus gizi buruk. Namun, sayangnya, belum ada data yang menunjukkan upaya preventif untuk mencegah terjadinya gizi buruk di masa-masa mendatang.

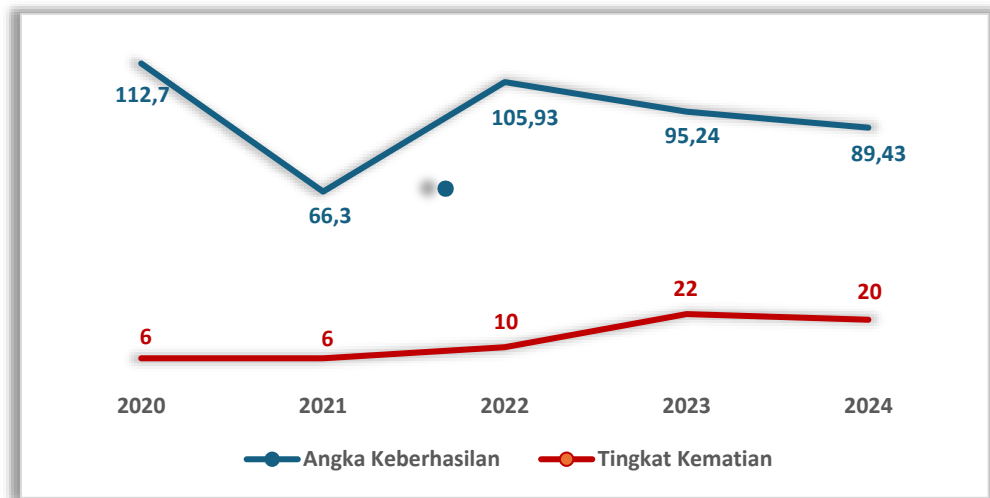
3. Cakupan Penanganan Penyakit Menular

Penanganan Tuberkolosis (TB). Angka keberhasilan TB menunjukkan adanya penurunan drastis selama 2020-2024. Meskipun, sempat terjadi penurunan pada 2021-2024, secara umum tingkat prevalensi TB per 10.000 penduduk menunjukkan penurunan hingga 23,27 dalam 5 tahun tersebut.



Sementara itu, tingkat kematian akibat TB per 10.000 penduduk mengalami kebaikan secara signifikan pada 2024.

Gambar 2.30 Perkembangan Angka Keberhasilan dan Tingkat Kematian karena Tuberkolosis Kabupaten Kepahiang, 2020-2024



Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2024

Peningkatan 2020-2024 bisa jadi akibat pencatatan yang tidak optimal (banyak kasus yang tidak dilaporkan sebagai kematian TB), atau karena prioritas data pandemi. Kenaikan tajam pada 2023, hal ini mengindikasikan adanya kasus-kasus TB yang terlambat terdeteksi, yang mungkin sudah berada pada stadium lanjut atau pelayanan TB belum optimal memutus rantai penularan. Ini menjadi alarm serius bahwa meski deteksi meningkat, keberhasilan pencegahan kematian masih harus ditingkatkan (misalnya melalui pengobatan tepat waktu dan tuntas).

Hal ini perlu menjadi perhatian, karena bisa disebabkan oleh peningkatan deteksi kasus atau penularan yang masih tinggi. Di sisi lain, peningkatan kasus kematian karena TB mengindikasikan adanya kemungkinan resistensi obat atau pasien yang tidak menyelesaikan pengobatan.

4. Penanganan Penyakit Menular Lainnya.

Penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD. Jumlah Kasus DBD di Kabupaten Kepahiang selama rentang 2020-2024 menunjukkan peningkatan cukup signifikan. Hal ini bisa jadi karena *underreporting*, atau definisi cakupan penemuan/ penanganan DBD masih baru dan belum menyeluruh. Untuk itu Pemda Kabupaten Kepahiang masih perlu melakukan pemantapan surveilans dan pelaporan DBD yang lebih sistematis.



Tabel 2.20 Cakupan dan Penemuan Penderita DBD, Malaria, dan Diare Kabupaten Kepahiang, 2020-2024

Penyakit	2020	2021	2022	2023	2024
DBD	88	86	118	131	212
Malaria	8	0	0	1	0
Diare	73,8	100,0	95,3	86,3	N/A

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2024

Penemuan penyakit Malaria. Angka kejadian Malaria menunjukkan adanya penurunan tajam dari 8 ke 0 dalam 5 tahun terakhir. Hal ini bisa menjadi kabar baik, menandakan suksesnya upaya eliminasi malaria di wilayah tersebut.

Penanganan Diare. Angka penanganan Diare di Kabupaten Kepahiang sempat turun pada 2020, yang dimungkinkan karena awal pandemi, sehingga akses layanan berkurang. Dalam perkembangannya penanganan pada penyakit ini tergolong tinggi, seperti adanya lonjakan penanganan pada 2021, yang bisa jadi karena kampanye besar penanganan diare. Kenaikan cakupan penanganan ini menunjukkan upaya puskesmas/layanan kesehatan dasar lebih siap menangani kasus.

Peluang dan tantangan: Tingginya prevalensi dan meningkatnya kematian di Kabupaten Kepahiang pada 2023 menunjukkan masih besarnya beban TB yang harus ditangani. Meskipun deteksi DOTS membaik, namun, tantangan untuk menurunkan mortalitas dan mengoptimalkan pengobatan berkelanjutan masih relatif besar.

2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

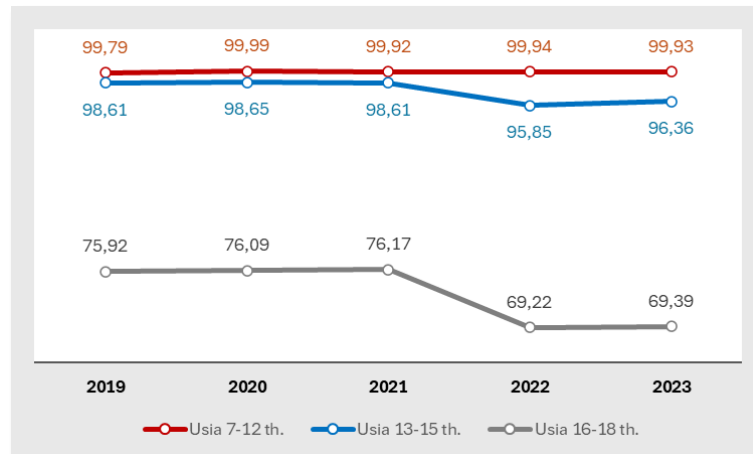
1. Angka Partisipasi Pendidikan

Angka partisipasi dalam bidang pendidikan terdiri atas indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Ketiga indikator tersebut menawarkan sudut pandang berbeda untuk menganalisa perkembangan pendidikan namun saling melengkapi.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah indikator yang digunakan untuk menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tanpa membedakan jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia yang sesuai (dalam persen). Makin tinggi APS berarti makin banyak penduduk usia sekolah yang bersekolah di Kabupaten Kepahiang.



Gambar 2.31 Perkembangan APS Kabupaten Kepahiang, 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Kepahiang (2024)

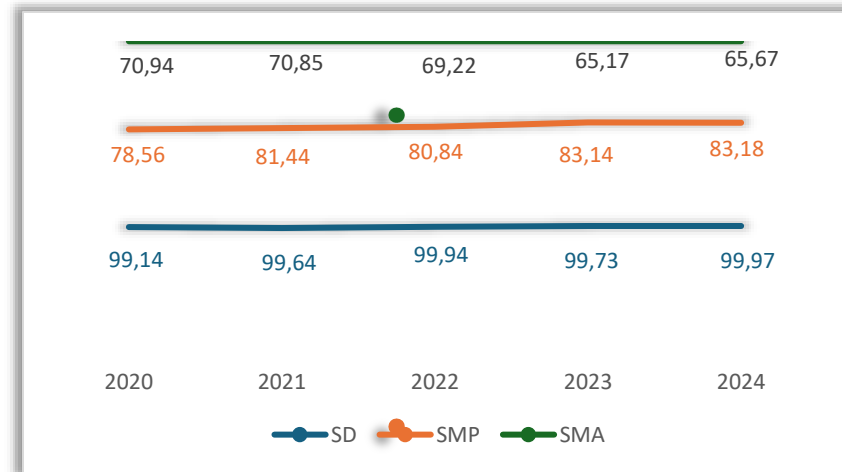
Perkembangan APS Kabupaten Kepahiang selama 2019-2023 menunjukkan bahwa APS usia 7-12 tahun di Kabupaten Kepahiang hampir universal dengan tren yang sangat stabil. Hal ini mengindikasikan adanya keberhasilan di level pendidikan dasar. Pada APS usia 13-15 tahun, meskipun sempat turun cukup signifikan pada 2022, namun APS pada rentang usia ini masih tergolong tinggi. Penurunan yang terjadi dimungkinkan karena dampak pandemi dan faktor ekonomi. Sementara itu, pada APS usia 16-18 tahun terlihat adanya tantangan terbesar karena terjadi penurunan tajam sejak 2022. Indikasi utama adalah hal ini menandakan banyaknya remaja yang tidak melanjutkan sekolah.

Dalam 5 tahun ke depan, tantangan seperti tekanan ekonomi, keterbatasan akses pendidikan menengah, kurikulum yang kurang relevan, serta pola pikir masyarakat bisa memperlambat peningkatan APS, terutama di rentang usia 16-18. Untuk itu, diperlukan strategi komprehensif dalam bidang pendidikan menengah sehingga dapat memastikan kualitas SDM yang berdaya saing dan siap menghadapi tantangan pembangunan di masa mendatang.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui cakupan layanan melalui perbandingan antara jumlah siswa usia sekolah tertentu yang sedang berada dalam jenjang pendidikan SD dan SMP sederajatnya dengan penduduk usia yang sesuai. Data ini menunjukkan ketepatan usia dari siswa yang berada di bangku sekolah. Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yg bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu.



Gambar 2.32 Perkembangan APM Kabupaten Kepahiang, 2020-2024



Sumber: Kabupaten Kepahiang Dalam Angka (data diolah)

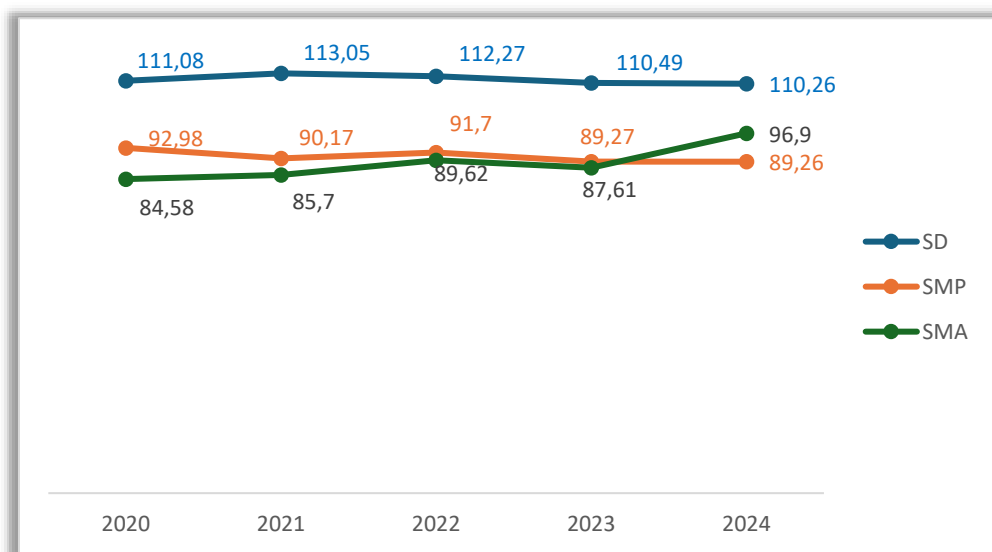
Perkembangan APM Kabupaten Kepahiang selama rentang 2020-2024 menunjukkan kecenderungan yang serupa dengan perkembangan APS di atas. APM SD di Kabupaten Kepahiang nyaris sempurna, yang mana hal ini mencerminkan keberhasilan kebijakan dasar dan kesadaran masyarakat. Kemudian, perkembangan APM SMP juga menunjukkan tren peningkatan, meski masih jauh dari optimal. Ini memberi sinyal positif bahwa lebih banyak remaja tepat usia memilih melanjutkan ke SMP. Namun, pada APM SMA terlihat adanya kondisi yang menurun dengan signifikan. Hal ini menjadi titik rawan yang dapat menurunkan kualitas SDM di masa depan.

Tanpa intervensi terarah, penurunan APM SMA berpotensi berlanjut seiring tekanan ekonomi dan kurangnya relevansi kurikulum. Namun, dengan inovasi pendidikan, dukungan finansial terfokus, dan keterlibatan multipihak, Kabupaten Kepahiang masih memiliki peluang besar untuk membalik tren negatif tersebut dan membangun generasi muda yang lebih siap menghadapi tantangan global.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara banyaknya siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk usia sekolah. APK dapat digunakan untuk mengetahui cakupan layanan, termasuk tingkat inefisiensi layanan dengan mengukur banyaknya siswa yang bersekolah pada suatu jenjang tertentu-tanpa memandang usia, termasuk penduduk yang berada di luar usia sekolah tersebut.



Gambar 2.33 Perkembangan APK Kabupaten Kepahiang, 2020-2024



Sumber: Kabupaten Kepahiang Dalam Angka (data diolah)

Perkembangan data APK Kabupaten Kepahiang 2020-2024 menunjukkan bahwa jenjang pendidikan SD/MI memiliki APK di atas 110 persen, hal ini menandakan akses amat luas dan inklusif. Penurunan kecil akhir-akhir ini bisa merefleksikan normalisasi usia siswa. Sementara itu, pada jenjang SMP/MTs, sempat terjadi lonjakan pada 2022. Namun, penurunan pada 2023 menunjukkan perlunya kewaspadaan.

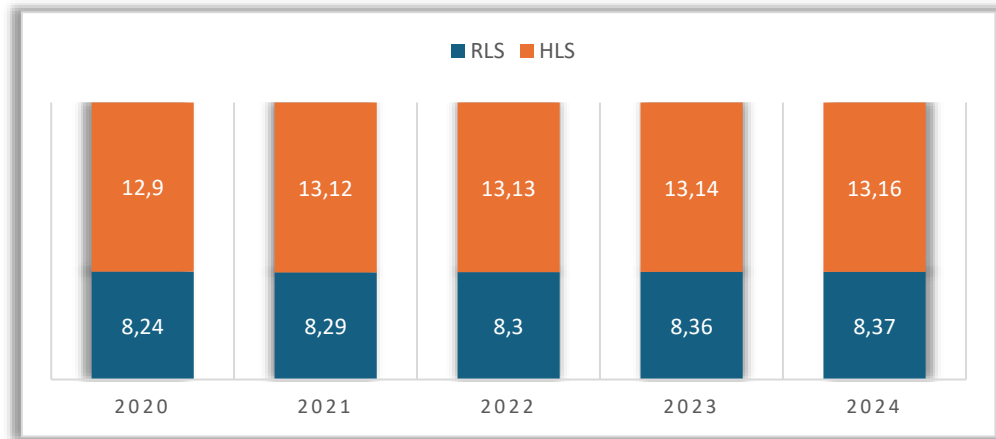
Di sisi lain, pada jenjang SMA/SMK/MA, APK selama rentang waktu 5 tahun tersebut relatif tinggi (96 persen) dengan sedikit penurunan. Hal ini perlu menjadi pemerintah daerah untuk tidak lengah, terutama mengingat tantangan ekonomi dan minimnya relevansi kurikulum.

Peluang dan tantangan: Dari data perkembangan terlihat bahwa rendahnya APS dan APM di usia 16-18 tahun serta menurunnya APK SMA menjadi sinyal kuat perlunya fokus serius pada pendidikan menengah atas. Tantangan lima tahun ke depan - mulai dari tekanan ekonomi, penumpukan siswa *over-aged* di level dasar, hingga relevansi kurikulum dapat menghambat kenaikan angka partisipasi pendidikan. Dengan inovasi kebijakan (wajib belajar 12 tahun, subsidi bagi rentan putus sekolah, perbaikan kurikulum, dan jalur nonformal yang tangguh), Kabupaten Kepahiang berpeluang mengubah tren ini dan membangun sistem pendidikan yang lebih efisien, inklusif, dan berdampak jangka panjang.



Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah merupakan dua indikator Pendidikan yang penting, perkembangan RLS dan HLS Kabupaten Kepahiang Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

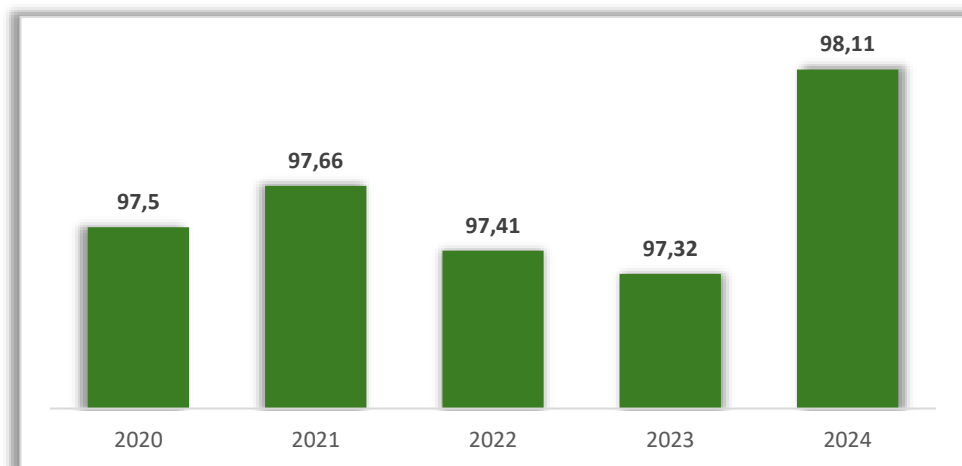
Gambar 2.34 Perkembangan RLS dan HLS Kabupaten Kepahiang, 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Bengkulu (2025)

Angka Melek Huruf: Upaya perbaikan pencapaian dalam bidang pendidikan juga didukung oleh perkembangan angka melek huruf Kabupaten Kepahiang selama 2020-2024. Perkembangan Angka Melek Huruf masyarakat mengalami fluktuasi, turun dari 97,5 persen (2020) menjadi 98,11 persen (2024).

Gambar 2.35 Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Kepahiang 2020-2024



Sumber: Kabupaten Kepahiang Dalam Angka (data diolah)

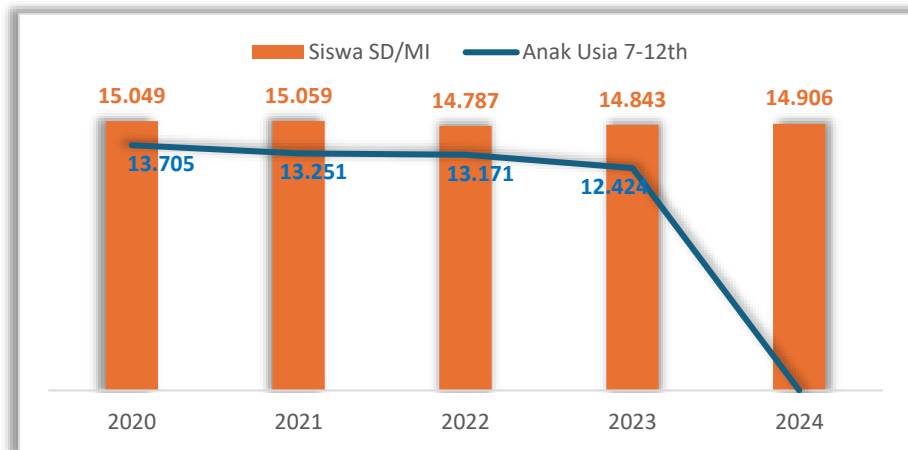
Penurunan ini cukup signifikan, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti migrasi ataupun keterbatasan akses pendidikan bagi kelompok tertentu. Jika tren ini tidak segera diperbaiki bisa berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia dan daya saing tenaga kerja di Kabupaten Kepahiang.



2. Rasio Ketersediaan Sekolah per 10.000 Penduduk Usia Sekolah

Pendidikan Dasar: Rasio SD/MI dan SMP/MTs. Secara umum, perbandingan data populasi penduduk usia pendidikan dasar dengan jumlah siswa sekolah pada jenjang tersebut selama 2020-2024 menunjukkan adanya kesenjangan.

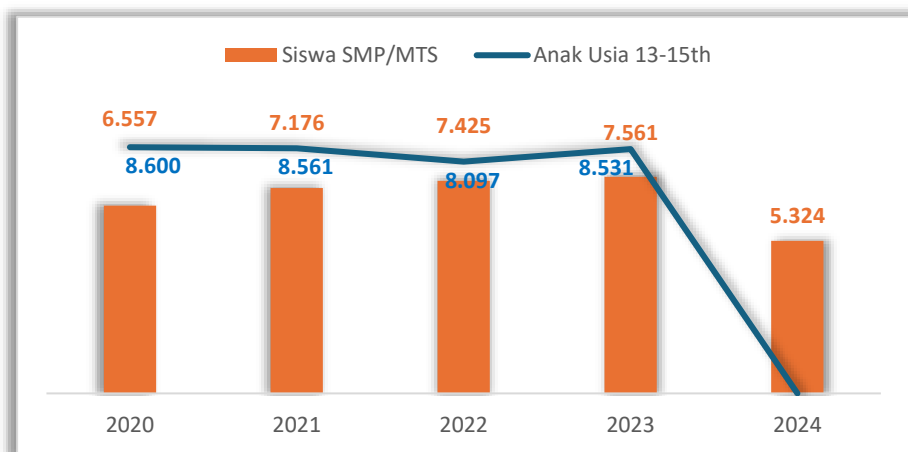
Gambar 2.36 Perbandingan Jumlah Anak Usia 7-12 tahun dengan Jumlah Siswa SD/MI di Kabupaten Kepahiang, 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Kepahiang

Perbandingan jumlah penduduk pada usia 7-12 tahun dengan jumlah siswa pada jenjang SD/MI selama rentang waktu tersebut menunjukkan bahwa jumlah siswa lebih banyak dari pada jumlah penduduk pada usia 7-12 tahun yang tercatat di Kabupaten Kepahiang. Anomali ini mungkin disebabkan oleh adanya migrasi anak dari luar wilayah Kabupaten Kepahiang yang bersekolah di Kabupaten Kepahiang atau adanya kesalahan pendataan.

Gambar 2.37 Perbandingan Jumlah Anak Usia 13-15 tahun dengan Jumlah Siswa SMP/MTs di Kabupaten Kepahiang, 2020-2024

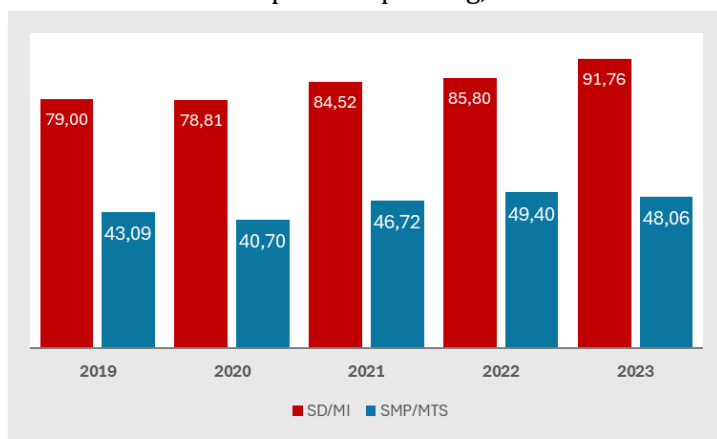


Sumber: BPS Kabupaten Kepahiang



Pada perbandingan jumlah penduduk usia 13-15 tahun dengan jumlah siswa SMP/MTs di Kabupaten Kepahiang pada rentang 2020-2024 juga menunjukkan adanya kesenjangan di mana pada 2020 jumlah siswa lebih sedikit murid lebih sedikit dibanding dengan jumlah penduduk usia tersebut. Namun pada 2021 justru menunjukkan anomali lonjakan jumlah siswa yang tidak sejalan dengan populasi.

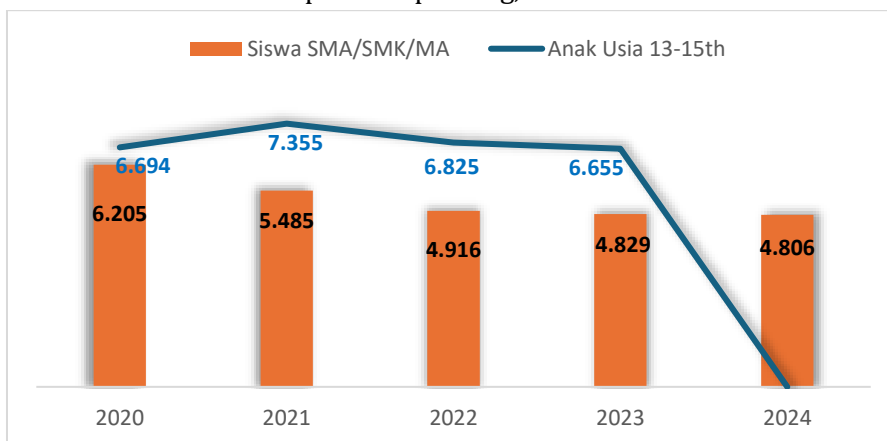
Gambar 2.38 Perkembangan Rasio SD/MI dan Rasio SMP/MTS Kabupaten Kepahiang, 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Kepahiang (2024)

Sementara itu, perkembangan rasio SD/MI per 10.000 penduduk pada usia yang sesuai memperlihatkan bahwa meskipun jumlah siswa berkurang seiring waktu, namun rasio sekolah justru meningkat. Ini mengindikasikan kapasitas sekolah yang tidak optimal, misalnya: banyak sekolah kecil atau tidak efisien. Pada rasio SMP/MTs per 10.000 penduduk usia 13-15 tahun, meskipun perkembangan populasi relatif stabil tetapi rasio sekolah terus meningkat. Hal ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara infrastruktur dan kebutuhan riil pada jenjang tersebut.

Gambar 2.39 Perkembangan Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun, Rasio SMA/SMK/MA di Kabupaten Kepahiang, 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Kepahiang

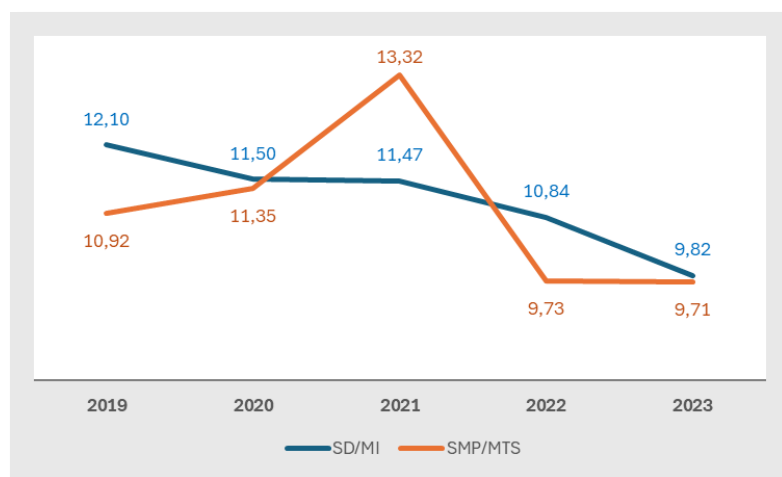


Pendidikan Menengah: Rasio SMA/SMK/MA. Kesenjangan populasi penduduk pada usia 16-18 tahun dengan jumlah siswa jenjang pendidikan menengah (SMA, SMK, dan MA) di Kabupaten Kepahiang menunjukkan bahwa jumlah siswa cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk pada usia tersebut. Selama 2020-2024, tren populasi cenderung naik, sementara jumlah siswa pada jenjang tersebut justru terus menurun. Hal ini mengindikasikan rendahnya partisipasi sekolah menengah, di mana banyak anak usia 16-18 tahun yang tidak melanjutkan ke SMA/SMK/MA baik karena alasan putus sekolah, bekerja, atau lainnya.

3. Rasio Guru-Siswa

Pendidikan Dasar: Rasio Guru-Siswa SD/MI dan SMP/MTs. Perkembangan Rasio Guru-Siswa SD/MI di Kabupaten Kepahiang selama 2019-2023 menunjukkan adanya penurunan rasio dalam arti jumlah siswa per guru semakin sedikit. Sementara itu, pada jenjang SMP/MTs, perkembangan rasio Guru-Siswa cenderung fluktuatif.

Gambar 2.40 Perkembangan Rasio Guru-Siswa SD/MI dan SMP/ MTs di Kabupaten Kepahiang, 2019-2023



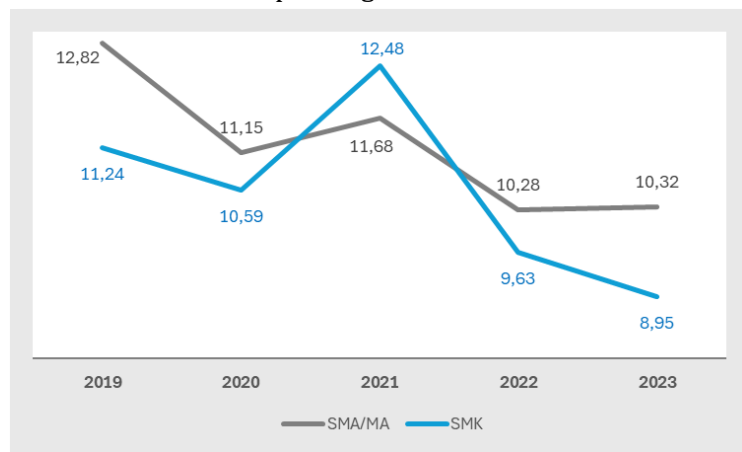
Sumber: BPS Kabupaten Kepahiang (2024)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menetapkan bahwa rasio standar Guru-Siswa sebesar 1:120 untuk jenjang SD, SMP, dan sederajatnya. Terkait dengan ketentuan tersebut, perkembangan rasio di Kabupaten Kepahiang selama 2019-2023 berada di bawah standar nasional. Di satu sisi, hal ini menunjukkan ketersediaan guru di Kabupaten Kepahiang sangat memadai. Namun, pada sisi lain, dengan rasio terlalu rendah, mungkin ada kelebihan guru yang menyebabkan inefisiensi anggaran.



Pendidikan Menengah: Rasio Guru-Siswa SMA/MA dan SMK. Data perkembangan Rasio Guru-Siswa pada jenjang SMA/MA/SMK menunjukkan adanya trend penurunan. Berdasarkan ketentuan PP No. 74 Tahun 2008 di atas, standar rasio Guru-Siswa pada jenjang SMA/MA ditetapkan sebesar 1:20. Terkait dengan hal tersebut, terlihat bahwa rasio jauh di bawah standar. Hal ini menunjukkan ketersediaan guru yang baik. Penurunan rasio mungkin disebabkan oleh peningkatan jumlah guru atau penurunan jumlah siswa. Namun, hal ini perlu dipastikan bahwa penurunan ini tidak mengarah kepada kondisi kelebihan kapasitas guru.

Gambar 2.41 Perkembangan Rasio Guru-Siswa SMA/MA dan SMK di Kabupaten Kepahiang, 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Kepahiang (2024)

Sementara itu, pada jenjang SMK, standar rasio Guru-Siswa adalah sebesar 1:15. Data tentang perkembangan rasio menunjukkan bahwa selama 2019-2022, rasio pada jenjang ini di atas standar. Hal ini berarti terjadi kekurangan guru, meskipun terlihat adanya perbaikan pada 2023, yang menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan.

2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Data sosial ini menunjukkan kombinasi antara stabilitas pada beberapa indikator (tanggap bencana dan pemberdayaan panti sosial) dan fluktuasi pada indikator lainnya (penanganan PMKS). Meskipun terdapat pemulihan besar-besaran pada 2022, masih ada tantangan dalam hal inovasi, inklusivitas, dan efektivitas program. Dengan strategi yang tepat, potensi peningkatan lebih lanjut sangat besar.



Tabel 2.21 Perkembangan Penanganan Masalah Sosial di Kabupaten Kepahiang, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
% PMKS yang memperoleh bantuan sosial	70%	66,4%	76%	70%	80%
% PMKS yang tertangani	67%	66,4%	76%	67%	75%
% PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk kebutuhan dasar	67%	66,4%	76%	67%	75%
% Penyandang cacat fisik, mental, dan lanjut usia telah menerima jaminan sosial	67%	67%	66,4%	76%	N/A
% Panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial KUBE	85%	85%	85%	85%	N/A

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kepahiang

Penurunan pada 2021 (-3.6 persen) mencerminkan tekanan besar pada sistem bantuan sosial. Mungkin ada tantangan logistik, seperti distribusi bantuan yang terhambat dan adanya kesulitan dalam pendataan PMKS akibat pembatasan mobilitas. Lonjakan pada 2022 (+14.5 persen) menunjukkan bahwa pemerintah atau lembaga terkait berhasil merespons tantangan pandemi dengan strategi yang lebih baik.

Tabel 2.22 Perkembangan Penanganan Bencana, Kabupaten Kepahiang, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
% Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	85%	85%	85%	85%	85%
% Korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	85%	85%	85%	85%	75%

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepahiang

Sistem Tanggap Bencana selama 2020-2024 menunjukkan perkembangan yang konsisten dan efektif. Indikator tanggap bencana menunjukkan bahwa sistem ini sangat efektif dalam memberikan bantuan dan evakuasi. Data juga menunjukkan adanya ketimpangan antara pelaksanaan Tanggap Bencana dan Penanganan PMKS. Hal ini menunjukkan bahwa sistem tanggap bencana lebih terorganisir dan memiliki prioritas



lebih tinggi. Sementara, penanganan PMKS memerlukan perhatian lebih besar, karena kelompok ini lebih luas dan membutuhkan dukungan jangka panjang.

2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Terdapat tantangan terutama terkait hak-hak politik, kebebasan sipil, serta penguatan kelembagaan demokrasi. Dalam menghadapi tantangan ini, agama dan kebudayaan berperan penting sebagai elemen perekat sosial dan penguat karakter bangsa. Agama memberikan nilai-nilai moral dan etika yang membentuk kesadaran kolektif dalam menjaga persatuan, sedangkan kebudayaan menjadi medium dalam memperkuat identitas nasional di tengah arus globalisasi. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan harus terus diupayakan untuk memastikan bahwa nilai-nilai luhur bangsa tetap terjaga, sekaligus menjadi inspirasi dalam merancang kebijakan pembangunan yang berbasis kearifan lokal.

Perkembangan kinerja urusan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut:

Tabel 2.23 Perkembangan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepahiang 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	%	-	-	-	85	87,5
Tingkat Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kegiatan	-	-	-	2	2

Sumber : Badan Kesbangpol Kabupaten Kepahiang

Dibidang Kebudayaan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang terus melakukan inventarisasi terhadap capaian-capaian kinerja berikut ini:

Tabel 2.24 Perkembangan Indikator Kebudayaan 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Penyelenggaraan festival seni budaya	Kali	1	0	1	3	4
Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Kali	3	0	1	5	5
Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	0	0	-	9	19

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang

Berdasarkan perkembangan indikator kebudayaan, terjadi peningkatan signifikan dari tahun 2020. Hal ini mengindikasikan semakin meningkatnya kinerja pengembangan kebudayaan daerah sebagai bagian dari pembangunan yang berbasis nilai-nilai lokal.



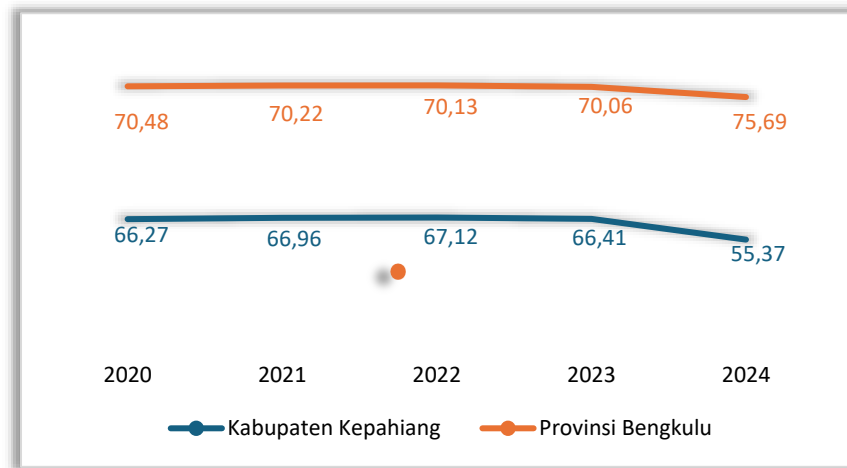
Agama dan kebudayaan berperan penting dalam memperkuat karakter bangsa melalui internalisasi nilai-nilai luhur, baik dalam kehidupan individu maupun dalam tatanan sosial.

2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

a. Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Secara umum, data tentang pemberdayaan perempuan dan anak di Kabupaten Kepahiang selama 2020-2024 menunjukkan progres dalam partisipasi ekonomi perempuan dan pemulihan layanan pengaduan kekerasan. Namun, Kabupaten Kepahiang dihadapkan pada tantangan serius, yaitu minimnya representasi politik, ketidakstabilan sistem penanganan kasus, dan lemahnya penegakan hukum.

Gambar 2.42 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Kabupaten Kepahiang, 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Bengkulu (data diolah)

Terkait Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), perkembangan Indeks selama 2020-2024 menunjukkan tren menurun. Penurunan ini mengindikasikan bahwa upaya pemberdayaan perempuan di Kepahiang memerlukan perhatian ekstra.

Tabel 2.25 Perkembangan Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Kepahiang, 2020-2024 (%)

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	5,33	5	5	12	12
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	12	12	12	12	12
Rasio KDRT	8	3	4	8	0
Partisipasi angkatan kerja perempuan	63,45	64,73	64,73	64,73	64,73
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	100	100	29	93,75	93,75



Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan penegakan hukum atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	#N/A	#N/A	65,04	45,83	45,83

Sumber: Dinas DALDUK,KB, P3A Kabupaten Kepahiang

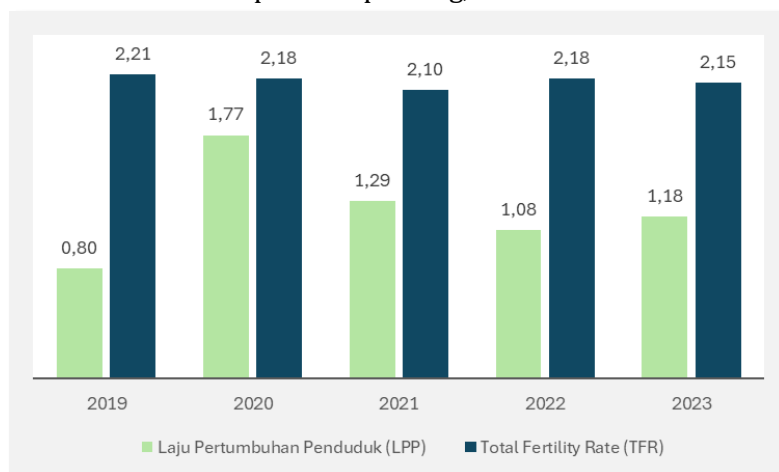
Di satu sisi, perkembangan data menunjukkan adanya peningkatan partisipasi ekonomi perempuan. Hal ini mengindikasikan mulai timbulkan kesadaran akan hak ekonomi dan peluang kerja yang lebih inklusif. Selain itu, adanya peningkatan layanan pengaduan yang lebih baik. Pemerintah Daerah terlihat menunjukkan respons cepat dalam memperbaiki layanan.

Namun, di sisi lain, Kabupaten Kepahiang juga dihadapkan pada kondisi minimnya representasi politik perempuan. Stagnasi kursi perempuan di DPR (12 persen) membatasi pengaruh kebijakan yang pro-perempuan dan anak. Selain itu, juga rendahnya penegakan hukum terhadap kasus kekerasan kepada perempuan. Hanya 45,83 persen kasus kekerasan yang ditindaklanjuti di 2024, menunjukkan impunitas yang mengancam kepercayaan korban pada sistem.

b. Pengendalian Penduduk dan KB

Perkembangan data pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Kepahiang selama 2019-2023, di satu sisi, menunjukkan progres dalam penurunan *total fertility rate* (TFR) dan respons cepat terhadap krisis *unmet need*. Namun, di sisi lain, Kabupaten Kepahiang dihadapkan pada tantangan yang lebih kompleks, yaitu kebangkitan laju pertumbuhan penduduk (LPP), kehamilan remaja yang tidak terkendali, dan preferensi kontrasepsi jangka pendek.

Gambar 2.43 Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk dan Total Fertility Rate di Kabupaten Kepahiang, 2019-2023



Sumber: Bappeda Kabupaten Kepahiang (diolah)



Perkembangan TFR dan LPP. Perkembangan LPP cenderung fluktuasi dan mengkhawatirkan. LPP naik signifikan pada 2019-2020, yang kemudian turun drastis pada 2022, dan naik kembali pada 2023. Lonjakan di 2020 mungkin terkait dengan keterlambatan pendataan atau efek sementara dari kebijakan pembatasan sosial selama pandemi yang mengurangi akses ke layanan KB. Meskipun penurunan di 2021-2022 mencerminkan efektivitas program KB, namun, kenaikan di 2023 menunjukkan risiko kebangkitan pertumbuhan penduduk jika tidak dikendalikan.

Di sisi lain, perkembangan TFR menunjukkan adanya penurunan bertahap tapi stabil. TFR di atas 2,1 (angka pengganti penduduk) menunjukkan Kabupaten Kepahiang masih menghadapi tekanan pertumbuhan penduduk. Penurunan bertahap mencerminkan efektivitas edukasi KB, tetapi perlu percepatan untuk mencapai tingkat penggantian.

Gambar 2.44 Perkembangan Angka Pemakaian Kontrasepsi dan Angka Kelahiran Remaja di Kabupaten Kepahiang, 2020-2024



Sumber: Kabupaten Kepahiang Dalam Angka dan Provinsi Bengkulu Dalam Angka (data diolah)

Perkembangan CPR dan ASFR 15-19. Sementara itu, perkembangan Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR) bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun menunjukkan penurunan signifikan. Implikasinya, penurunan partisipasi KB ini dapat mengancam upaya pengendalian penduduk.

Tabel 2.26 Perkembangan Unmet Need dan Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang di Kabupaten Kepahiang, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	7	N/A	14,9	7,4	N/A



Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	27,3	N/A	21,68	N/A	N/A

Sumber: Bappeda Kabupaten Kepahiang

Perkembangan *Unmet Need* dan MKJP. Perkembangan cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need*) menunjukkan adanya lonjakan krisis di 2022. Hal ini mengindikasikan adanya kegagalan layanan KB selama krisis (misalnya, pandemi atau gangguan logistik). Penurunan di 2023 menunjukkan upaya pemulihan, tetapi angka ini masih lebih tinggi dari 2020.

Sementara itu, perkembangan persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cenderung menurun drastis. Hal ini dapat berdampak pada meningkatnya risiko kehamilan yang tidak direncanakan karena MKJP lebih efektif mencegah kehamilan daripada metode jangka pendek.

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

a. Kualitas tenaga kerja

Perkembangan jumlah angkatan kerja, yaitu jumlah penduduk Kabupaten Kepahiang yang berumur 15 tahun ke atas menurut kegiatan selama seminggu, secara umum meningkat selama 2020-2024. Pada 2020, sebanyak 83,79 ribu penduduk pada kategori tersebut tercatat sebagai angkatan kerja, baik yang termasuk kelompok sedang bekerja ataupun pengangguran. Sementara sekitar 22 persen dari penduduk kategori tersebut termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya).

Tabel 2.27 Tabel Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja, 2020-2024

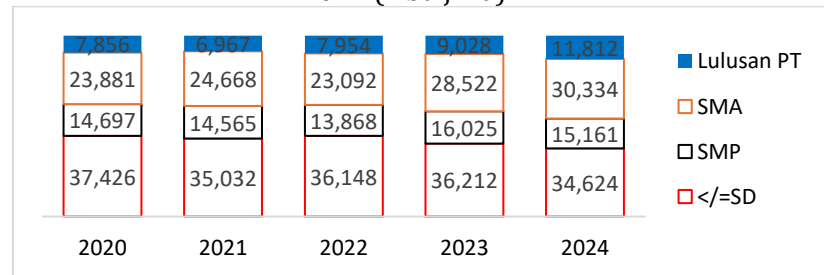
Kategori	2020	2021	2022	2023	2024
Angkatan Kerja	83.790	81.232	81.062	89.787	91.931
Bukan Angkatan Kerja	22.291	26.225	27.790	28.769	28.230
Jumlah	106.081	107.457	108.852	118.556	120.161

Sumber: Kabupaten Kepahiang Dalam Angka 2025

Jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 83.790 penduduk dari kondisi 2020, menjadi sekitar 91,9 ribu orang pada akhir 2024. Peningkatan tertinggi terjadi pada kurun 2022-2024 di mana terdapat penambahan sekitar 10,8 ribu orang angkatan kerja. Namun setelah 2020, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Kepahiang cenderung menurun hingga akhir 2022.



Gambar 2.45 Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja menurut Pendidikan Terakhir, 2020-2024 (ribu jiwa)

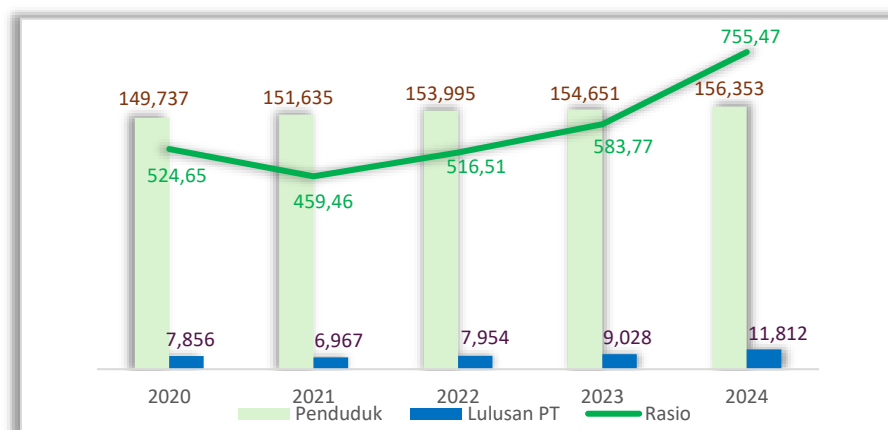


Sumber: BPS Kabupaten Kepahiang

Jika dilihat lebih lanjut, khususnya pada komposisi angkatan kerja berdasarkan pendidikan, maka akan terlihat bahwa angkatan kerja dengan pendidikan SD ke bawah menjadi porsi terbesar jumlah angkatan kerja di Kabupaten Kepahiang selama rentang waktu lima tahun tersebut. Angkatan kerja dengan Jenjang pendidikan SMA menjadi terbanyak kedua, dengan rata-rata sebanyak 22,6 ribu orang per tahunnya. Berikutnya, angkatan kerja dengan jenjang SMP menjadi posisi ketiga terbanyak dalam komposisi angkatan kerja berdasarkan pendidikan.

Sementara itu, tenaga kerja lulusan perguruan tinggi menempati posisi keempat pada komposisi angkatan. Meskipun perkembangan angkatan kerja pada kategori ini sedikit fluktuatif, namun secara umum terdapat penambahan jumlah seiring waktu, dari sebanyak 7,856 ribu orang pada 2020 meningkat menjadi sekitar 11,812 ribu orang pada 2024. Kategori ini meliputi seluruh tenaga kerja dengan latar belakang pendidikan lulus perguruan tinggi (apapun jenjangnya).

Gambar 2.46 Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja dengan Pendidikan Perguruan Tinggi dan Rasionya terhadap Jumlah Penduduk, 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Kepahiang

Rasio jumlah angkatan kerja dengan pendidikan setingkat sarjana ke atas per 10.000 penduduk selama 2020-2024 cenderung fluktuatif, namun secara umum terjadi kenaikan rasio pada 2024 dibandingkan kondisi awal pada 2020. Rasio pada

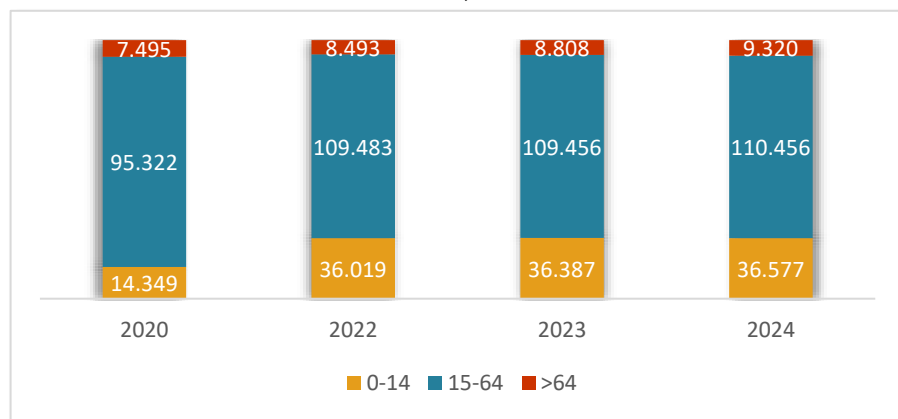


2020 adalah sebesar 524,65 di mana dari setiap 10.000 penduduk pada tahun tersebut terdapat sekitar 524 orang penduduk berusia minimal 15 tahun, yang termasuk dalam angkatan kerja dengan pendidikan sarjana. Penurunan sempat terjadi pada 2021 dimana rasio mencapai sekitar 459,46 per 10.000 penduduk. Setelah 2022, rasio ini meningkat hingga 2024 menjadi sekitar 755,47.

b. Tingkat ketergantungan

Komposisi dan proporsi penduduk menurut usia. Perkembangan demografi Kabupaten Kepahiang selama 2020-2024 menunjukkan gambaran yang sebenarnya cukup menggembirakan, setidaknya, jika melihat komposisi penduduk berdasarkan usia. Perkembangan selama rentang waktu tersebut menggambarkan komposisi di mana dari jumlah penduduk keseluruhan, sebagian besar merupakan penduduk dengan usia 15-64 tahun (atau biasa disebut sebagai usia produktif).

Gambar 2.47 Perkembangan Jumlah Penduduk Umur 0-14 Tahun, 15-64 Tahun dan 65 Tahun ke Atas, 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Kepahiang

Tidak hanya dari sisi jumlah, perkembangan proporsi kategori penduduk ini dibanding kategori usia lainnya juga menunjukkan trend yang positif dan terjaga selama lima tahun. Pada 2020, jumlah penduduk usia produktif adalah sebanyak kurang lebih 95 ribu jiwa atau mencapai sekitar 81,36 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Kepahiang secara keseluruhan. Sementara untuk penduduk usia kurang dari 15 tahun dan lebih dari 64 tahun, masing-masing jumlahnya sebesar kurang lebih 14,3 ribu (<15 tahun) dan 7,5 ribu jiwa (65 tahun ke atas) pada 2020.

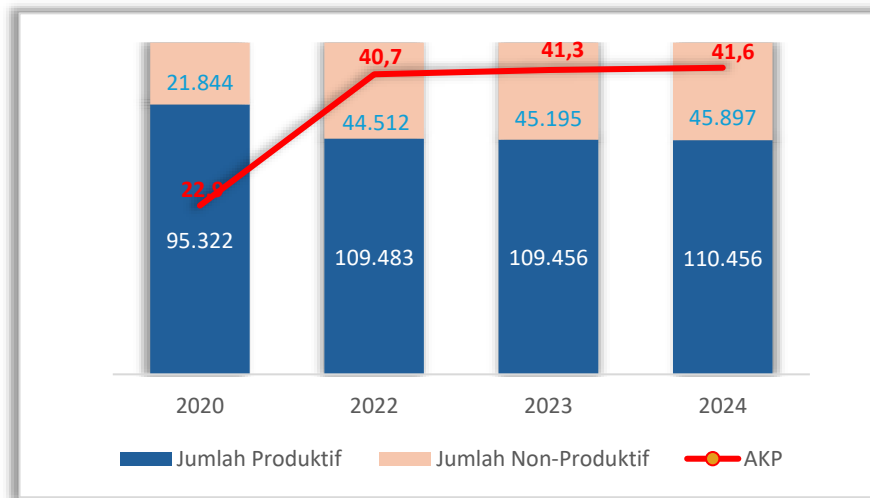
Pada tahun-tahun berikutnya, proporsi penduduk pada kategori ini relatif tidak mengalami berubah yang ekstrim, dalam arti proporsinya cenderung tetap hingga 2024. Proporsi jumlah penduduk usia produktif justru menunjukkan perkembangan yang terus meningkat. Pada akhir periode, 2024, jumlah penduduk Kabupaten



Kepahiang terdiri dari komposisi penduduk usia produktif sebanyak 110,5 ribu jiwa (70,6 persen), penduduk usia 65 tahun ke atas sebanyak 9,3 ribu jiwa (5,9 persen), dan penduduk usia <15 tahun sebanyak 36 ribu jiwa (23,4 persen).

Angka beban ketergantungan. Gambaran tentang perkembangan proporsi jumlah penduduk sebagaimana disampaikan di atas, sekaligus dapat digunakan untuk menggambarkan perkembangan angka ketergantungan penduduk di Kabupaten Kepahiang selama rentang waktu 2020-2024.

Gambar 2.48 Perkembangan Jumlah Penduduk Usia Produktif dan Non-Produktif serta Angka Ketergantungan Penduduk (AKP), 2020-2024



Angka ketergantungan penduduk (AKP) atau juga disebut rasio beban ketergantungan (dependency ratio) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non-produktif, kategori penduduk, yang meliputi: Penduduk usia <15 tahun (penduduk muda) dan penduduk usia >64 tahun (penduduk tua) dengan banyaknya penduduk usia produktif (berusia antara 15-64 tahun). Tingginya rasio beban ketergantungan dapat mengurangi pertumbuhan produktivitas suatu daerah. Artinya penduduk yang bukan usia angkatan kerja dapat memengaruhi tingkat produktivitas penduduk angkatan kerja. Makin tinggi AKP makin besar jumlah penduduk yang menjadi tanggungan penduduk lainya sesuai kategori.

Dari data AKP Kabupaten Kepahiang selama 2020-2024 dapat digambarkan adanya perkembangan yang cenderung menurun selama rentang waktu tersebut. Hal ini utamanya disebabkan dengan adanya penambahan jumlah dan proporsi penduduk usia produktif yang cenderung terus meningkat sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Pada 2018, AKP Kabupaten Kepahiang adalah

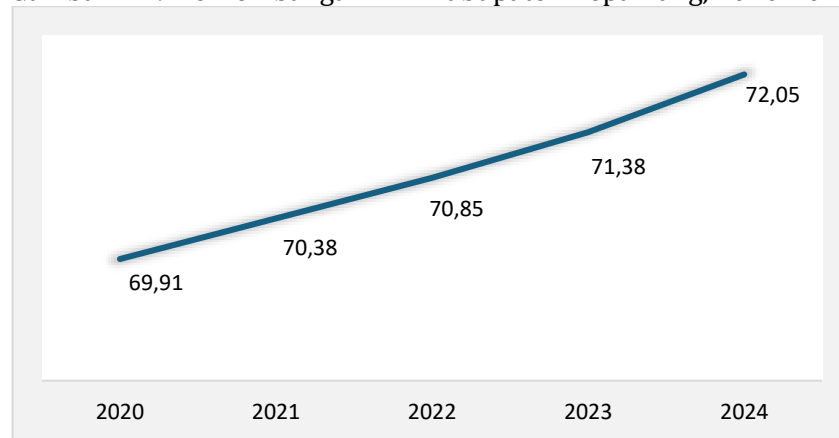


sebesar 46,7 persen, dimana secara ekonomi hal ini berarti, sebanyak 100 orang penduduk usia kerja (usia produktif) menanggung 47 orang penduduk yang belum atau tidak lagi bekerja (non-produktif). Dalam perkembangannya, mengikuti pertambahan jumlah penduduk, rasio ketergantungan ini semakin menurun. Rasio terkecil terjadi pada 2020, sebesar 40,5 persen, di mana jumlah penduduk produktif pada saat itu mencapai sekitar 101 ribu jiwa atau sekitar 70 persen dari jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Kepahiang. Sementara jumlah penduduk usia non-produktif secara keseluruhan mencapai sekitar 43,4 ribu jiwa. Pada akhir 2022, tercatat AKP Kab Kepahiang adalah sebesar 40,7 persen.

c. Perkembangan Dimensi IPM

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kepahiang 2020-2024 dengan pertumbuhan sebesar 3,06 persen dalam waktu rentang waktu tersebut, hal ini menunjukkan adanya tren peningkatan. Perkembangan positif perlu dianalisis lebih lanjut apakah pertumbuhan ini merata di seluruh sektor atau ada faktor dominan yang mendorongnya.

Gambar 2.49 Perkembangan IPM Kabupaten Kepahiang, 2020-2024



Sumber: Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2025

Namun, di sisi lain, terlihat juga bahwa laju pertumbuhan IPM melambat setelah 2020. Hal ini juga menandakan perlunya strategi baru untuk mempertahankan momentum peningkatan kesejahteraan. Jika tren kenaikan IPM yang melambat ini terus berlangsung dikhawatirkan target pembangunan manusia jangka panjang bisa terhambat.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS):

Perkembangan RLS Kabupaten Kepahiang dalam kurun 2020-2024 menunjukkan peningkatan yang lambat (sekitar 0,13 tahun dalam 5 tahun), yang



mengindikasikan tantangan dalam memastikan siswa bertahan lebih lama di bangku sekolah.

Meskipun begitu, harapan untuk tetap bersekolah (yang ditunjukkan oleh perkembangan HLS) relatif stabil. Hal ini menunjukkan ekspektasi pendidikan masyarakat masih tinggi, meskipun realisasi (RLS) belum sejalan dengan harapan. Untuk itu, isu terkait *dropout* dan akses pendidikan berkualitas masih perlu diperhatikan untuk meningkatkan pencapaian pendidikan secara nyata.

Peluang dan Tantangan: Secara umum IPM Kabupaten Kepahiang selama 2020-2024 meningkat secara konsisten, tetapi perbaikannya belum optimal di sektor kesehatan dan pendidikan. Dengan lambatnya pertumbuhan angka usia harapan hidup selama rentang waktu tersebut, hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan layanan kesehatan yang lebih efektif.

Di sisi lain, rata-rata lama sekolah masih di bawah target, hal ini menunjukkan tantangan dalam keberlanjutan pendidikan. Kondisi ini dipertegas dengan perkembangan angka melek huruf yang cenderung turun selama rentang waktu 2020-2022, yang menjadi tanda peringatan yang harus segera ditindaklanjuti. Meskipun begitu, adanya peningkatan pengeluaran per kapita adalah sinyal positif, tetapi perlu dipastikan bahwa ini mencerminkan peningkatan kesejahteraan, bukan tekanan biaya hidup. Untuk itu, ke depannya Kabupaten Kepahiang perlu lebih fokus pada pendidikan, kesehatan, dan strategi ekonomi yang lebih inklusif untuk mempercepat pertumbuhan IPM dan kesejahteraan masyarakat.

2.3.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) serta inovasi memiliki peran krusial dalam meningkatkan produktivitas ekonomi di daerah. Iptek memungkinkan efisiensi dalam berbagai sektor, seperti pertanian, industri, dan jasa, dengan menghadirkan metode produksi yang lebih canggih dan hemat biaya.

Indeks Inovasi Daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bentuk kebaruan didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya. Dari hasil indeks inovasi daerah, didapatkan peringkat dari inovasi daerah pada sebuah pemerintahan daerah. Pemeringkatan inovasi daerah dapat memberikan informasi mengenai



pemetaan inovasi daerah, pemberian penghargaan dan pembinaan bagi pemerintahan daerah.

Adopsi Iptek tidak hanya mampu meningkatkan rasio PDRB sektor industri pengolahan, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan melalui peningkatan produktivitas dan daya saing industri. Capaian Rasio PDRB Industri Pengolahan di Kabupaten Kepahiang tahun 2020-2024 mempunyai tren yang menurun, angka capaian tertinggi sebesar 7,47% di tahun 2020 kemudian turun menjadi 6,65% pada tahun 2024. Rasio ini menggambarkan sejauh mana sektor industri pengolahan berkontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Kepahiang. Semakin rendah rasio ini, semakin kecil peran industri pengolahan dalam menciptakan nilai tambah, meningkatkan produktivitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Perkembangan Rasio Industri Pengolahan Kabupaten Kepahiang, sebagai berikut:

Tabel 2.28 Rasio Industri Pengolahan Kabupaten Kepahiang Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	7,47	7,33	7,32	7,05	6,65

Sumber: Kabupaten Kepahiang Dalam Angka (data diolah)

Jika produktivitas ekonomi meningkat, biasanya diikuti dengan peningkatan investasi dan pertumbuhan usaha, yang mendorong lebih banyak orang masuk ke pasar tenaga kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. TPAK Kabupaten Kepahiang mengalami penurunan selama tahun 2020-2024, di mana capaian pada tahun 2024 yaitu sebesar 76,51%. Hal ini berarti bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja, sekitar 76 orang termasuk angkatan kerja, atau dapat diartikan dari 1.000 orang penduduk usia kerja sekitar 760 orang di antaranya aktif secara ekonomi. Perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Kepahiang sebagai berikut:

Tabel 2.29 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kepahiang Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	79,00	75,59	74,50	76,73	76,51

Sumber: Keadaan Angkatan Kerja Kabupaten Kepahiang (data diolah)

Sebagai lapangan usaha pendukung pariwisata, perkembangan sektor ini sangat bergantung dengan kemajuan pariwisata daerah. Semakin terkenal pariwisata pada suatu daerah, maka semakin banyak jumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang berkunjung. Hal ini tentunya akan ikut mendorong peningkatan



kinerja pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Perkembangan Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Kepahiang, sebagai berikut:

Table 2.30 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Kepahiang Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,03	1,96	2,01	2,05	2,05

Sumber: Kabupaten Kepahiang Dalam Angka (data diolah)

Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum di Kabupaten Kepahiang tahun 2020-2024 menunjukkan adanya peningkatan, pada tahun 2020 sebesar 2,03% dan meningkat 0,02% menjadi 2,05% pada tahun 2024.

2.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan ekonomi hijau di Kabupaten Kepahiang menjadi langkah strategis untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Ekonomi hijau berfokus pada pengelolaan sumber daya alam secara efisien dan ramah lingkungan, Kabupaten Kepahiang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi hijau dalam berbagai kebijakan pembangunan. Salah satu contohnya adalah pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang dengan menjaga dan mengurangi dampak negative terhadap lingkungan alam.

2.3.4 Transformasi Digital

Transformasi digital bukan lagi sebuah opsi, melainkan keharusan bila ingin tetap relevan di era yang terus berkembang, memastikan dapat beradaptasi dan berkembang dalam lingkungan yang terus berubah, penerapan teknologi digital menjadi kunci untuk bertahan dan tumbuh. Transformasi digital bertujuan untuk efisiensi proses bisnis, transparansi dan akuntabilitas, partisipasi publik yang lebih luas dan inovasi kebijakan berbasis data. Dengan adanya transformasi digital menghasilkan data lake yang sangat besar dari berbagai aplikasi dan layanan. Data tersebut dapat digunakan untuk menganalisis tren pelayanan, kebutuhan masyarakat, efektivitas kebijakan, hingga prediksi masalah sosial.

2.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dengan ekonomi global memiliki dampak signifikan terhadap pembentukan modal tetap bruto (PMTB) di daerah. Ketika suatu daerah semakin terhubung dengan pasar global, arus investasi asing langsung (FDI) cenderung meningkat, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan infrastruktur, industri, dan sektor produktif lainnya. Keterbukaan ekonomi memungkinkan daerah



untuk mengakses teknologi, modal, dan tenaga kerja terampil dari luar, sehingga meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing. Selain itu, perdagangan internasional yang lebih aktif menciptakan peluang bagi sektor bisnis lokal untuk berkembang, mendorong investasi dalam aset tetap seperti mesin, bangunan, dan peralatan, yang menjadi bagian utama dalam PMTB.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah indikator ekonomi yang mencerminkan investasi dalam aset tetap yang digunakan untuk produksi barang dan jasa dalam jangka panjang. Aset tetap ini mencakup bangunan, infrastruktur, mesin, peralatan, kendaraan, serta investasi dalam perbaikan dan peningkatan kapasitas produksi. PMTB merupakan komponen utama dalam Produk Domestik Bruto (PDB) yang menunjukkan tingkat investasi suatu negara atau daerah dalam membangun dan meningkatkan kapasitas ekonominya. Peningkatan PMTB menandakan bahwa suatu daerah atau negara sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sehat, karena lebih banyak sumber daya dialokasikan untuk pengembangan kapasitas produksi. Sebaliknya, rendahnya PMTB dapat mengindikasikan kurangnya investasi, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Perkembangan PMTB Kabupaten Kepahiang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.31 Indeks Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	44,09	44,71	44,96	43,99	41,22

Sumber: Kabupaten Kepahiang Dalam Angka (data diolah)

PMTB di Kabupaten Kepahiang selama tahun 2020-2024 fluktuatif cenderung mengalami penurunan. PMTB Kabupaten Kepahiang tahun 2024 sebesar 41,22%. Penurunan ini dikarenakan berkurangnya investasi tetap di Kabupaten Kepahiang, yang mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan kondisi ekonomi, penurunan daya tarik investasi, atau pengaruh kebijakan pemerintah terkait investasi di daerah tersebut.

2.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Perkotaan sering kali menjadi pusat ekonomi dengan infrastruktur yang lebih maju, menciptakan peluang kerja dan layanan publik yang lebih baik dibandingkan perdesaan. Namun, pesatnya urbanisasi sering menyebabkan tekanan terhadap ketersediaan hunian layak, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Permintaan yang tinggi terhadap perumahan di kota-kota besar mendorong kenaikan harga properti dan penyebaran kawasan permukiman informal, yang sering kali



memiliki akses terbatas terhadap air bersih, sanitasi, dan fasilitas dasar lainnya. Sebaliknya, di perdesaan, meskipun tekanan terhadap harga lahan lebih rendah, akses terhadap infrastruktur perumahan dan layanan dasar sering kali masih terbatas, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Integrasi antara perkotaan dan perdesaan sangat penting untuk menciptakan pemerataan akses terhadap hunian layak dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Peningkatan konektivitas antara kedua wilayah melalui infrastruktur transportasi dan digital dapat mempercepat distribusi sumber daya, membuka peluang ekonomi baru, serta mengurangi kesenjangan hunian antara perkotaan dan perdesaan. Hubungan yang seimbang antara perkotaan dan perdesaan tidak hanya memperkuat pertumbuhan ekonomi tetapi juga memastikan bahwa setiap rumah tangga memiliki tempat tinggal yang layak dan mendukung kualitas hidup yang lebih baik.

Pada Sektor Industri merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pembangunan nasional. Kontribusi sektor Industri terhadap pembangunan nasional dari tahun ke tahun menunjukkan kontribusi yang signifikan. Perkembangan kinerja urusan Perindustrian di Kabupaten Kepahiang Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Table 2.32 Perkembangan kinerja urusan Perindustrian di Kabupaten Kepahiang Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	7,47	7,33	7,32	7,05	6,65
2	Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan	%	9,29	9,41	9,72	9,55	8,98

Sumber : Kabupaten Kepahiang Dalam Angka (data diolah)

Kinerja pelayanan umum wajib pelayanan dasar urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Kepahiang Tahun 2020-2024 dapat dilihat melalui beberapa indikator sebagai berikut:

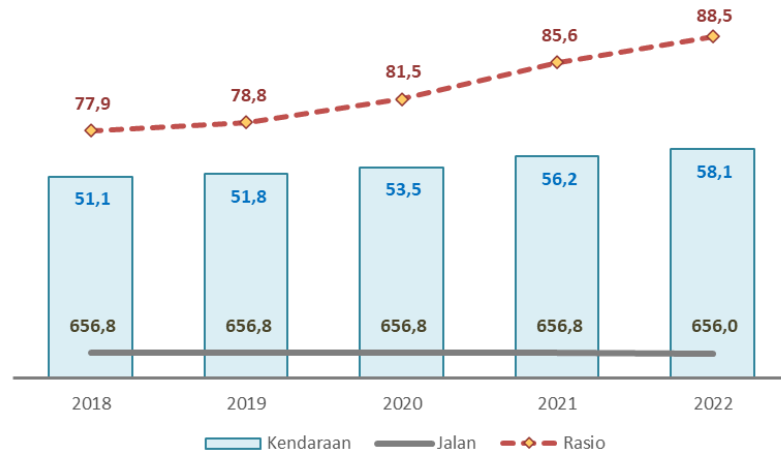
Rasio panjang jalan – kendaraan

Secara umum, panjang jalan di Kabupaten Kepahiang relatif tidak bertambah sejak 2018, dengan total panjang sekitar 656,8km untuk semua jenis jalan dan kewenangan. Sementara di sisi lain, jumlah kendaraan bertambah dengan signifikan seiring waktu. Terdapat penambahan sekitar 5.092 kendaraan dari 2018 hingga 2022 pada semua jenis kendaraan.



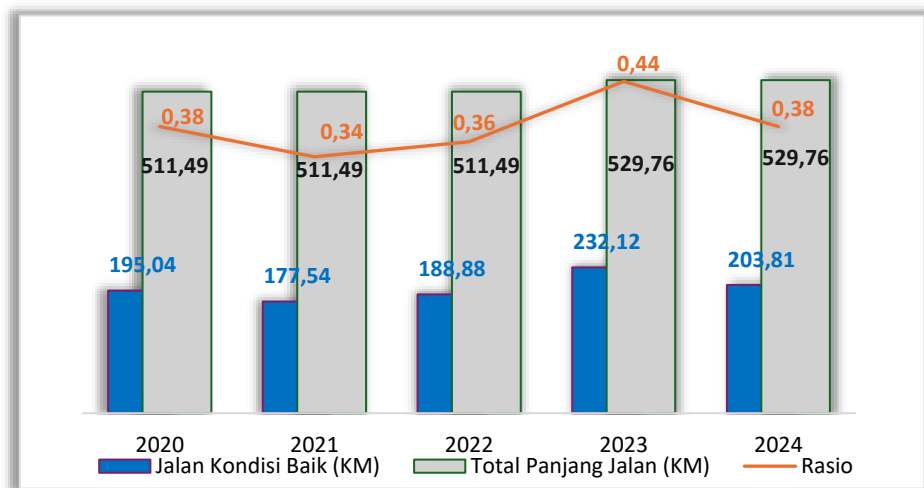
Perkembangan rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan cenderung bertambah dari sekitar 77,9 poin pada 2018 naik menjadi 88,5 poin pada 2022. Hal ini berarti, pada 2018, dari sepanjang 1km jalan (tanpa memandang kelas jalan) melayani sekitar 78 unit kendaraan (tanpa memandang jenis). Pada akhir 2022, jumlah kendaraan yang dilayani bertambah menjadi 89 unit kendaraan untuk sepanjang 1km jalan.

Gambar 2.50 Perkembangan Jumlah Kendaraan, Panjang Jalan dan Rasio Panjang Jalan



Sumber: BPS Kabupaten Kepahiang

Gambar 2.51 Rasio Jalan dalam Kondisi Baik di Kabupaten Kepahiang, 2020-2024



Sumber: Kabupaten Kepahiang Dalam Angka (data diolah)

Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik.

Data perkembangan panjang jalan di Kabupaten Kepahiang selama 2020-2024 menunjukkan tren positif dalam hal total panjang jalan, tetapi kondisi jalan mengalami tantangan signifikan selama pandemi. Meskipun terjadi pemulihan pada 2024, rasio kondisi baik terhadap panjang jalan masih belum sepenuhnya mencapai level pra-pandemi. Perkembangan data mengindikasikan perlunya prioritas pembangunan Baru.



Peningkatan total panjang jalan pada 2024 (+3.57 persen) menunjukkan fokus pada pembangunan baru daripada pemeliharaan.

1. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Penduduk.

Perkembangan rasio panjang jalan per seribu penduduk Kabupaten Kepahiang selama 2020-2024 cenderung stabil (4.24–4.61km/ribu jiwa). Namun, terjadi penurunan tajam pada 2020-2021, yang menunjukkan bahwa kualitas jalan tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk.

Tabel 2.33 Rasio Panjang Jalan per 1.000 Penduduk Kabupaten Kepahiang, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penduduk (ribu jiwa)	149,74	151,60	153,90	154,65	156,35
Rasio jalan/penduduk	4,24	4,33	4,26	4,36	N/A

Sumber: BPS Kabupaten Kepahiang (diolah)

2.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

Data perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepahiang, 2020-2024 menunjukkan adanya stagnasi memasuki 2020. Laju pertumbuhan ekonomi hanya 0,06 persen, yang menunjukkan hampir tidak ada pertumbuhan. Hal ini mengindikasikan adanya kontraksi akibat pandemi, yang menekan produksi dan konsumsi masyarakat. Pada tahun berikutnya, menunjukkan mulai adanya pemulihan (2021-2022), yang terus berlanjut hingga akhir 2024.

Perkembangan laju inflasi Kabupaten Kepahiang digunakan data perkembangan Kota Bengkulu karena Pemerintah Kabupaten Kepahiang tidak melakukan penghitungan inflasi sendiri. Data perkembangan inflasi Kota Bengkulu 2020-2024 menunjukkan siklus ekonomi yang bergerak dari kondisi turun pada 2020 0,89%. Untuk selanjutnya, pada 2021 sebesar 2,42, terlihat adanya kenaikan untuk kemudian mengalami tekanan tinggi pada 2022 sebesar 5,92%, dan terjadi normalisasi pada 2024 sebesar 1,17 %.

Pertumbuhan ekonomi pada umumnya diukur dengan menggunakan pertumbuhan PDRB. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun bersangkutan terhadap tahun sebelumnya, merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian riil suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua sektor kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.



Salah satu indikator ekonomi makro yang sering digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi, dengan tolak ukur pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besarnya nilai PDRB yang berhasil dicapai dan perkembangannya merupakan refleksi dari kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia. Berikut disajikan data PDRB Kabupaten Kepahiang.

Tabel 2.34 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kepahiang, 2020-2024 (Miliar Rupiah)

N O	SEKTOR	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.748,52	1.933,77	2.152,35	2.376,24	2.776,35
2	Pertambangan dan Penggalian	95,29	98,74	101,96	109,80	114,26
3	Industri Pengolahan	329,29	347,92	377,63	396,07	416,35
4	Pengadaan Listrik, Gas	7,53	8,34	9,21	9,81	10,31
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,93	7,18	7,68	8,09	9,05
6	Konstruksi	271,2	287,84	310,95	337,03	356,35
7	Perdagangan Besar & Eceran, dan Reparasi Mobil & Sepeda Motor	409,45	446,96	501,49	536,41	562,75
8	Transportasi dan Pergudangan	108,51	117,68	134,98	157,04	168,16
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	89,58	93,26	103,68	115,20	128,64
10	Informasi dan Komunikasi	89,43	96,44	107,25	119,61	132,10
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	52,99	59,87	63,99	62,49	66,44
12	Real Estate	137,32	139,39	147,63	158,30	166,61
13	Jasa Perusahaan	5,85	6,11	7,05	7,86	8,79
14	Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	742,01	769,26	769,93	823,54	900,30
15	Jasa Pendidikan	219,49	228,9	249,59	267,85	302,96
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	67,88	76,37	80,90	91,28	102,19
17	Jasa lainnya	28,38	30,48	34,48	38,99	43,86
	PDRB	4.409,81	4.748,46	5.160,76	5.615,59	6.265,45

Sumber: Kabupaten Kepahiang Dalam Angka (data diolah)



Tabel 2.35 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kepahiang, 2020-2024 (Miliar Rupiah)

N O	SEKTOR	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.165,2	1.197,5	1.261,24	1.291,62	1.323,81
2	Pertambangan dan Penggalian	66,45	67,65	68,05	71,41	74,56
3	Industri Pengolahan	207,46	212,83	221,39	228,09	234,16
4	Pengadaan Listrik, Gas	4,6	5,06	5,50	5,79	6,03
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,83	4,92	5,21	5,44	5,76
6	Konstruksi	152,26	155,03	157,03	165,20	173,57
7	Perdagangan Besar & Eceran, dan Reparasi Mobil & Sepeda Motor	275,75	293,14	307,42	316,97	326,16
8	Transportasi dan Pergudangan	80,28	83,93	90,32	96,92	102,10
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	55,75	56,64	61,75	67,90	74,36
10	Informasi dan Komunikasi	62,25	66,26	72,05	78,95	86,09
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	33,51	36,26	35,72	34,24	36,04
12	Real Estate	97,46	97,55	101,40	106,68	111,01
13	Jasa Perusahaan	3,93	3,91	4,33	4,69	5,07
14	Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	393,75	403,85	403,78	428,81	461,77
15	Jasa Pendidikan	144,65	148,10	155,49	163,11	173,18
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan social	39,45	43,35	44,90	48,63	53,01
17	Jasa lainnya	18,03	18,34	20,00	22,00	23,97
	PDRB	2.805,56	2.894,35	3.015,57	3.136,44	3.270,63

Sumber: Kabupaten Kepahiang Dalam Angka (data diolah)

Tabel 2.36 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kepahiang Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (persen)

NO	SEKTOR	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-0,10	2,78	5,32	2,41	2,49
2	Pertambangan dan Penggalian	-1,87	1,81	0,60	4,94	4,40
3	Industri Pengolahan	-2,92	2,59	4,02	3,03	2,66
4	Pengadaan Listrik, Gas	11,6	9,88	8,69	5,35	4,06
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,58	1,7	6,05	4,33	5,89
6	Konstruksi	-0,07	1,82	1,29	5,21	5,07



7	Perdagangan Besar & Eceran, dan Reparasi Mobil & Sepeda Motor	-3,27	6,31	4,87	3,10	2,90
8	Transportasi dan Pergudangan	1,17	4,54	7,62	7,30	5,34
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,64	1,6	9,01	9,96	9,51
10	Informasi dan Komunikasi	3,89	6,45	8,73	9,58	9,04
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	13,4	8,2	-1,48	-4,17	5,26
12	Real Estate	0,62	0,09	3,95	5,21	4,05
13	Jasa Perusahaan	-2,21	-0,48	10,97	8,08	8,28
14	Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,98	2,56	-0,02	6,20	7,69
15	Jasa Pendidikan	1,29	2,56	4,99	4,90	6,17
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	6,47	2,39	3,56	8,32	9,02
17	Jasa lainnya	-0,21	1,68	9,05	10,01	8,98
	PDRB	0,06	3,16	4,19	4,01	4,28

Sumber: Kabupaten Kepahiang Dalam Angka (data diolah)

Tabel 2.2 Distribusi PDRB Kabupaten Kepahiang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

NO	Lapangan Usaha	Distribusi PDRB menurut Lapangan usaha (Persen)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	39,65	40,72	41,71	42,32	44,32
2	Pertambangan dan Penggalian	2,16	2,08	1,98	1,96	1,82
3	Industri Pengolahan	7,47	7,22	7,32	7,05	6,65
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,17	0,18	0,18	0,17	0,16
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,16	0,15	0,15	0,14	0,14
6	Konstruksi	6,15	6,06	6,03	6,00	5,69
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,29	9,41	9,72	9,55	8,98
8	Transportasi dan Pergudangan	2,46	2,48	2,62	2,80	2,68
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,03	1,96	2,01	2,05	2,05
10	Informasi dan Komunikasi	2,03	2,03	2,08	2,13	2,11
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,20	1,26	1,24	1,11	1,06
12	Real Estate	3,11	2,94	2,86	2,82	2,66
13	Jasa Perusahaan	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	16,83	16,2	14,92	14,67	14,37
15	Jasa Pendidikan	4,98	4,82	4,84	4,77	4,84
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,54	1,61	1,57	1,63	1,63
17	Jasa lainnya	0,64	0,64	0,67	0,69	0,70
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100

Sumber: Kabupaten Kepahiang Dalam Angka (data diolah)



2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

a. Perencanaan

Keberhasilan dari pencapaian kinerja perencanaan pembangunan tidak terlepas dari pelaksanaan proses perencanaan pembangunan secara berkualitas dan aspiratif melalui optimalisasi dan sinergitas seluruh *stakeholder* dan sektor pembangunan dengan mengedepankan perencanaan pembangunan menggunakan pendekatan holistik – tematik, integratif dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja mengacu pada *money follow* program dengan tahapan-tahapan yang dilaksanakan melalui Musrenbang desa/ kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten. Perkembangan kinerja urusan Perencanaan Daerah di Kabupaten Kepahiang Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.37 Perkembangan Perencanaan Daerah di Kabupaten Kepahiang Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	18,99	19,86	19,20	20,26	20,32
2	Pengukuran Kinerja	11,76	72,74	17,55	18,24	18,33

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

b. Keuangan

Opini audit keuangan adalah salah satu tahap dalam proses audit, di mana auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan yang telah disusun. Tujuan utama dari seluruh proses audit laporan keuangan adalah untuk meningkatkan kredibilitas, transparansi, dan efisiensi operasional. Perkembangan kinerja keuangan di Kabupaten Kepahiang Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.38 Perkembangan kinerja keuangan di Kabupaten Kepahiang Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Opini BPK terhadap laporan keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang

c. Kepegawaian

Profesionalitas dalam birokrasi adalah sesuatu hal yang sudah tidak bisa ditawar lagi. Karena dengan profesional, birokrasi dapat menciptakan kinerja yg efektif dan efisiensi menuju layanan pemerintahan yg semakin berkualitas. Indeks Pengukuran Profesionalitas (IPP) ASN yang saat ini digunakan oleh Badan



Kepegawaian Negara sebagai pembina dan penyelenggara manajemen kepegawaian adalah dengan metode composite index.

Indikator yang digunakan, antara lain: kompetensi, kompensasi, disiplin dan kinerja. Adapun premis indikator profesionalitas ASN adalah (individu) pegawai akan semakin profesional apabila kompetensinya semakin tinggi, kinerjanya semakin baik, organisasinya semakin modern dan pegawai yang semakin bersih. Perkembangan kinerja urusan Kepegawaian di Kabupaten Kepahiang Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.39 Perkembangan kinerja urusan Kepegawaian di Kabupaten Kepahiang Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Profesionalitas ASN	46,35	47,94	48,98	63,87	73,34

Sumber: Badan Kepegawaian, Pengembangan SDM Kabupaten Kepahiang

d. Akuntabilitas

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bentuk rangkaian upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Selain itu, laporan ini juga merupakan wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepahiang diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Adapun hasil penilaian dari laporan LKIP Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang umumnya disebut SAKIP beberapa tahun terakhir disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 2.40 Nilai SAKIP Kabupaten Kepahiang Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nilai SAKIP	Predikat	CC	CC	CC	B	B

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang

Fungsi penunjang terkait pengawasan akan mempunyai kewenangan antara lain: pengawasan terhadap pemerintah daerah dan aparatur, pengawasan atas keuangan dan kekayaan daerah, pengawasan atas pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial. Realisasi indikator kinerja pengawasan Kabupaten Kepahiang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 2.41 Perkembangan Kinerja Pengawasan Kabupaten Kepahiang Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Level 3 Maturitas SPIP	Level	2	2	3	3	3
2	Level 3 Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	3
3	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang tuntas ditindaklanjuti	%	70	67,5	82	82,2	81,69

Sumber : Inspektorat Kabupaten Kepahiang

e. Pemanfaatan teknologi

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia. Karena manfaat Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat.

Sehingga dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang terbuka, tidak hanya membutuhkan perubahan karakter, mentalitas, atau pola pikir di kalangan birokrasi pemerintahan dan badan publik, tapi juga membutuhkan reformasi sistem dan pola kerja. Reformasi birokrasi ini dapat diwujudkan salah satunya dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Perkembangan Komunikasi dan Informasi di Kabupaten Kepahiang Tahun 2020-2024

Table 2.42 Perkembangan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kepahiang Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Indeks SPBE	N/A	1,94	2,14	2,28	2,47

Sumber: Buku Profil Daerah Kabupaten Kepahiang

Evaluasi SPBE menghasilkan indeks yang diperoleh secara inkremental, yakni akan terus dilakukan pemutakhiran dari proses peningkatan hasil penilaian dan populasi dalam pelaksanaannya, sehingga memastikan progres kemajuan penerapan SPBE. Indeks SPBE untuk Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada tahun 2021 sebesar 1,94 dan terus menampakkan tren positif hingga tahun 2024 sebesar 2,47. Hal ini menunjukkan semakin banyak implementasi aplikasi-aplikasi e-government yang digunakan oleh OPD dan kemudahan layanan pemerintah kepada pengguna sesuai dengan fungsi masing-masing.



2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

a. Penanganan kasus pelanggaran perda dan ketertiban umum

Globalisasi dan teknologi informasi membawa perkembangan positif dalam meningkatkan kualitas pembangunan secara umum, namun terdapat beberapa hal negatif yang harus diberikan perhatian khusus. Sehingga, Penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan kewajiban pemerintah.

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan manifestasi dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja dengan penduduk di Kabupaten Kepahiang periode tahun 2020-2024 secara umum mengalami kenaikan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 2.43 Perkembangan Indikator Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kepahiang Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penanganan unjuk Rasa	Kali	1	1	1	2	0
Jumlah kegiatan pengamanan dalam setahun	Kali	8	9	40	12	225
Persentase penegakan perda	%	90	85	90	90	100

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kepahiang

b. Angka Kriminalitas

Rasa aman merupakan variabel yang sangat luas karena mencakup berbagai aspek dan dimensi, mulai dari dimensi politik, hukum, pertahanan, keamanan, sosial, dan ekonomi. Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu aspek strategis yang perlu dijaga untuk mewujudkan stabilitas daerah. Iklim investasi juga salah satunya dipengaruhi oleh tingkat keamanan dan ketertiban yang ada. Jumlah crime total Kabupaten Kepahiang menunjukkan tren negative, dengan terus bertambahnya jumlah kejahatan pada setiap tahunnya. Perkembangan statistik di Kabupaten Kepahiang tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.44 Perkembangan Perkembangan statistik di Kabupaten Kepahiang tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kejahatan	229	252	267	340	N/A
Jumlah Kejahatan yang diselesaikan	171	193	194	221	N/A

Sumber: Statistik Kriminalitas Provinsi Bengkulu (data diolah)



c. Risiko Bencana

Indeks Resiko Bencana Kajian Risiko Bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya (hazard), kerentanan (vulnerabilities), dan kapasitas (capacities) di masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota. Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) Ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana.

Sementara komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kelembagaan, kapasitas mitigasi, pencegahan, dan lainnya. Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap-tiap Kabupaten/Kota di Indonesia. Perhitungan tingkat risiko di tiap Kabupaten/Kota dilakukan dengan memperhatikan faktor Hazard, Vulnerability, dan Capacity. Selanjutnya, disajikan tingkat risiko bencana di Kabupaten/Kota sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya tersebut. Tingkat bahaya dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan dari suatu fenomena alam, seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api dan ancaman lainnya. Perkembangan Indeks Risiko Bencana di Kabupaten sebagai berikut:

Tabel 2.45 Perkembangan Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Kepahiang Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Risiko Bencana	N/A	138,00	117,49	101,31	89,52

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Selama periode 2020-2024, Indeks Risiko Bencana menunjukkan tren menurun yang signifikan. Pada tahun 2021 IRB sebesar 138,00 dan pada tahun 2024 sebesar 89,52, penurunan ini mengindikasikan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam mengimplementasikan strategi mitigasi bencana.

2.5 Gambaran Keuangan Daerah

2.5.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Dalam sub-bab ini akan diuraikan tentang kinerja pelaksanaan APBD, perkembangan neraca daerah dan beberapa analisis keuangan daerah yang relevan dan signifikan dalam menggambarkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kepahiang pada periode tahun 2019-2023.

a. Kinerja Pelaksanaan APBD

Selama periode tahun 2019-2023 perkembangan pendapatan dalam APBD Kabupaten Kepahiang mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dengan rata-rata



pertumbuhan selama periode tersebut tercatat negatif (lihat Tabel 2.46 dan Gambar 2.53). Dapat disimpulkan pula bahwa selama periode tersebut perkembangan pendapatan telah mengalami tren penurunan hingga di akhir periode. Berdasarkan komponennya, lain-lain pendapatan yang sah mencatatkan rata-rata pertumbuhan tertinggi (lebih dari 10 persen), sedangkan pendapatan asli daerah tercatat memiliki rata-rata pertumbuhan yang rendah (dibawah 3 persen) dan pendapatan transfer tercatat memiliki pertumbuhan negatif.



Tabel 2.46 Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan dalam APBD Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2019-2023

No	Uraian	(n-5) 2019	(n-4) 2020	(n-3) 2021 (Rp)	(n-2) 2022 (Rp)	(n-1) 2023 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan
4	Pendapatan Daerah						
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)						
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	5.954.003.739,20	7.694.649.000,00	7.213.924.703,00	6.652.500.000,00	7.499.500.000,00	6,98%
4.1.02	Pendapatan retribusi Daerah	1.214.249.000,00	1.230.465.000,00	702.165.750,00	702.165.750,00	727.165.750,00	-9,51%
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3.881.073.606,47	3.881.073.606,47	3.083.579.733,00	2.457.034.929,00	2.179.880.872,00	-13,04%
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	28.593.816.390,00	32.094.222.746,00	27.684.912.823,00	29.072.639.973,00	30.198.723.795,00	1,85%
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	39.643.142.735,67	44.900.410.352,47	38.684.583.009,00	38.884.340.652,00	40.605.270.417,00	1,09%
4.2	Pendapatan Transfer						
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	693.932.991.000,00	717.923.199.000,00	693.511.467.300,00	642.114.509.000,00	645.079.973.225,00	-1,72%
4.2.01.01	Dana Perimbangan	608.196.051.000,00	630.097.389.000,00	576.737.050.300,00	556.391.436.000,00	546.566.307.225,00	-2,54%
4.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil	16.139.035.000,00	13.312.040.000,00	13.270.694.000,00	19.063.269.000,00	21.122.001.225,00	9,16%
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	439.415.102.000,00	444.880.631.000,00	408.396.965.000,00	395.317.091.000,00	410.273.186.000,00	-1,59%
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	77.228.173.000,00	99.387.033.000,00	95.305.759.000,00	65.607.449.000,00	38.286.034.000,00	-12,05%
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	75.413.741.000,00	72.517.685.000,00	59.763.632.300,00	76.403.627.000,00	76.885.086.000,00	1,76%
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	-		30.083.342.000,00	7.499.292.000,00	13.289.870.000,00	0,00%
4.2.01.02.01	DID	-		30.083.342.000,00	7.499.292.000,00	13.289.870.000,00	1,07%
4.2.01.05	Dana Desa	85.736.940.000,00	87.825.810.000,00	86.691.075.000,00	78.223.781.000,00	85.223.796.000,00	0,08%

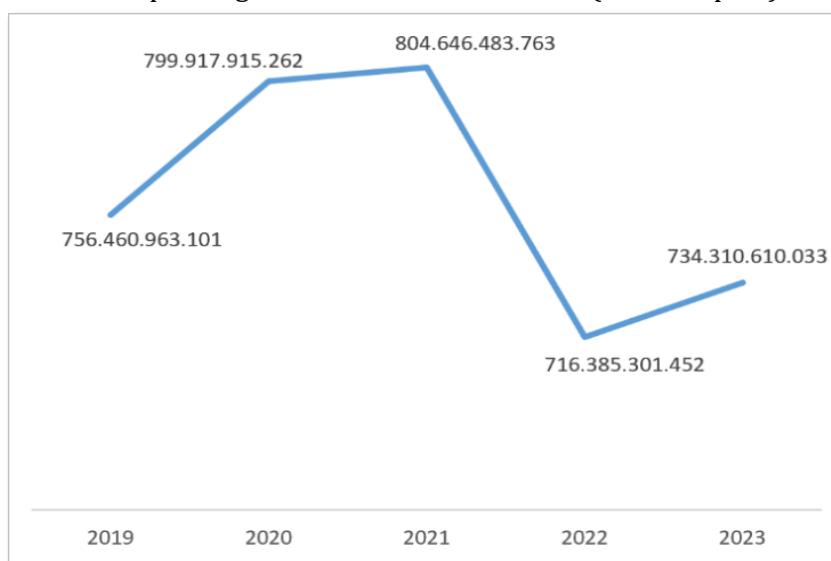


No	Uraian	(n-5) 2019	(n-4) 2020	(n-3) 2021 (Rp)	(n-2) 2022 (Rp)	(n-1) 2023 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan
4.2.01.05.01	Dana Desa	85.736.940.000,00	87.825.810.000,00	86.691.075.000,00	78.223.781.000,00	85.223.796.000,00	0,08%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	22.884.829.365,04	27.123.412.909,04	50.250.747.459,00	35.386.451.800,00	41.246.892.472,00	22,69%
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	22.884.829.365,04	27.123.412.909,04	50.250.747.459,00	35.386.451.800,00	41.246.892.472,00	22,69%
4.2.02.01.01	Bagi Hasil Pajak	22.884.829.365,04	27.123.412.909,04	50.250.747.459,00	35.386.451.800,00	41.246.892.472,00	22,69%
	Jumlah Pendapatan Transfer	716.817.820.365,04	745.046.611.909,04	743.762.214.759,00	677.500.960.800,00	686.326.865.697,00	-0,96%
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah						
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		9.970.893.000,00	22.199.685.995,00	-	7.378.473.919,00	0,00%
4.3.03.02	Lain-lain Pendapatan Kapitasi JKN		9.970.893.000,00	22.199.685.995,00		7.378.473.919,00	11,32%
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah		9.970.893.000,00	22.199.685.995,00	-	7.378.473.919,00	11,32%
	Jumlah Pendapatan	756.460.963.100,71	799.917.915.261,51	804.646.483.763,00	716.385.301.452,00	734.310.610.033,00	-0,53%

Sumber: BKD Kabupaten Kepahiang

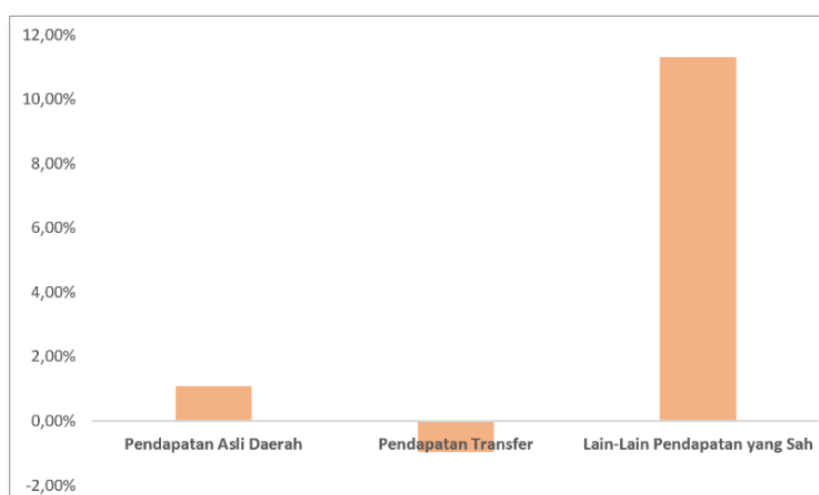


Gambar 2.52 Perkembangan Pendapatan dalam APBD Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2019-2023 (dalam rupiah)



Sumber: BKD Kabupaten Kepahiang (diolah)

Gambar 2.53 Perbandingan Rata-rata Pertumbuhan Komponen Pendapatan dalam APBD Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2019-2023



Sumber: BKD Kabupaten Kepahiang (diolah)

Selanjutnya, pos belanja dalam APBD Kabupaten Kepahiang periode tahun 2019-2023 juga mengalami fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan selama periode yang sama tercatat juga negatif (lihat Tabel 2.47 dan Gambar 2.53). Dapat disimpulkan pula bahwa pada periode tersebut perkembangan belanja mengalami tren yang menurun hingga di akhir periode. Berdasarkan komponennya, pendapatan tidak terduga memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi (lebih dari 10 persen) dan diikuti belanja operasi dengan rata-rata pertumbuhan masih positif (kurang dari 2 persen). Sementara, belanja modal memiliki rata-rata pertumbuhan paling rendah (dibawah minus 15 persen) dan belanja transfer juga memiliki pertumbuhan negatif meskipun masih dibawah 3 persen.



Tabel 2.47 Rata-rata Pertumbuhan Belanja APBD Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2019-2023

No	Uraian	(n-5) 2019	(n-4) 2020	(n-3) 2021 (Rp)	(n-2) 2022 (Rp)	(n-1) 2023 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan
5	Belanja						
5.1	Belanja Operasi						
5.1.01	Belanja Pegawai	328.687.611.441,71	318.230.297.025,31	282.034.195.221,00	284.812.565.479,00	303.976.041.425,00	-1,71
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.996.775.299,00	205.637.469.927,20	204.763.831.305,00	225.940.394.665,00	229.974.000.645,00	6,33
5.1.03	Belanja Bunga	4.000.000.000,00	930.000.000,00	700.000.000,00	76.452.304,00		-72,64
5.1.05	Belanja Hibah	7.735.180.000,00	40.239.370.000,00	26.835.180.000,00	6.691.633.360,00	19.428.840.000,00	125,55
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	500.000.000,00	-	500.000.000,00			
5.1.2.1	Jumlah Belanja Operasi	521.919.566.740,71	565.037.136.952,51	514.833.206.526,00	517.521.045.808,00	553.378.882.070,00	1,71
5.2	Belanja Modal						
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.772.520.000,00	47.000.000,00		830.000.000,00		-99,43
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.292.657.182,00	36.791.393.759,00	39.682.908.167,00	21.821.762.969,00	8.612.618.383,00	-18,02
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.825.761.878,00	23.712.856.110,00	56.897.125.028,00	21.883.955.033,00	20.692.334.750,00	23,14
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	95.172.493.520,00	93.822.153.400,00	64.922.292.100,00	36.720.251.846,00	41.529.140.000,00	-15,64
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.122.300.000,00	14.328.565.000,00		553.000.000,00		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya				50.000.000,00	70.000.000	0,00
	Jumlah Belanja Modal	158.185.732.580,00	168.701.968.269,00	161.502.325.295,00	81.858.969.848,00	70.904.093.133,00	-15,08
5.3	Belanja Tak Terduga						
5.3.01	Belanja Tak Terduga	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	3.000.000.000,00	2.200.000.000,00	500.000.000	11,52

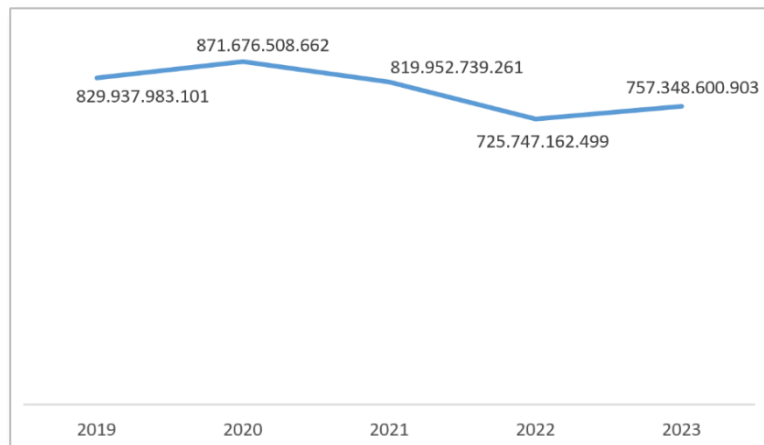


No	Uraian	(n-5) 2019	(n-4) 2020	(n-3) 2021 (Rp)	(n-2) 2022 (Rp)	(n-1) 2023 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	3.000.000.000,00	2.200.000.000,00	500.000.000,00	11,52
5.4	Belanja Transfer						
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	147.832.683.780,00	136.937.403.440,00	140.617.207.440,00	124.167.146.843,00	132.565.625.700,00	-2,40
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota kepada Desa	147.832.683.780,00	136.937.403.440,00	140.617.207.440,00	124.167.146.843,00	132.565.625.700,00	-2,40
	Jumlah Belanja Transfer	147.832.683.780,00	136.937.403.440,00	140.617.207.440,00	124.167.146.843,00	132.565.625.700,00	-2,40
	Jumlah Belanja dan Transfer	829.937.983.100,71	871.676.508.661,51	819.952.739.261,00	725.747.162.499,00	757.348.600.903,00	-2,01

Sumber: BKD Kabupaten Kepahiang

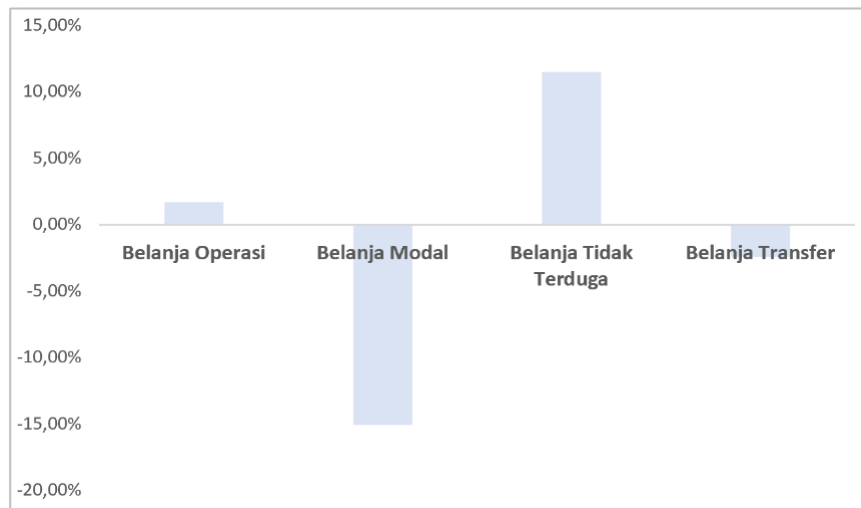


Gambar 2.54 Perkembangan Belanja dalam APBD Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2019-2023 (dalam rupiah)



Sumber: BKD Kabupaten Kepahiang (diolah)

Gambar 2.55 Perbandingan Perkembangan Komponen Belanja dalam APBD Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2019-2023



Sumber: BKD Kabupaten Kepahiang (diolah)

Perkembangan pembiayaan (atau pembiayaan netto) dalam APBD Kabupaten Kepahiang periode tahun 2019-2023 menunjukkan pola yang hampir sama dengan pendapatan dan belanja, yaitu berfluktuasi dengan tren menurun hingga di akhir periode. Namun demikian, rata-rata pertumbuhannya positif, yang tercatat lebih dari 50 persen (lihat Tabel 2.48 dan Gambar 2.55). Apabila dilihat per komponen, tercatat bahwa penerimaan pembiayaan memiliki fluktuasi dan tren menurun dengan rata-rata pertumbuhan negatif, sedangkan pengeluaran pembiayaan masih berfluktuasi dengan tren meningkat hingga di akhir periode serta memiliki rata-rata pertumbuhan positif yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 100 persen.



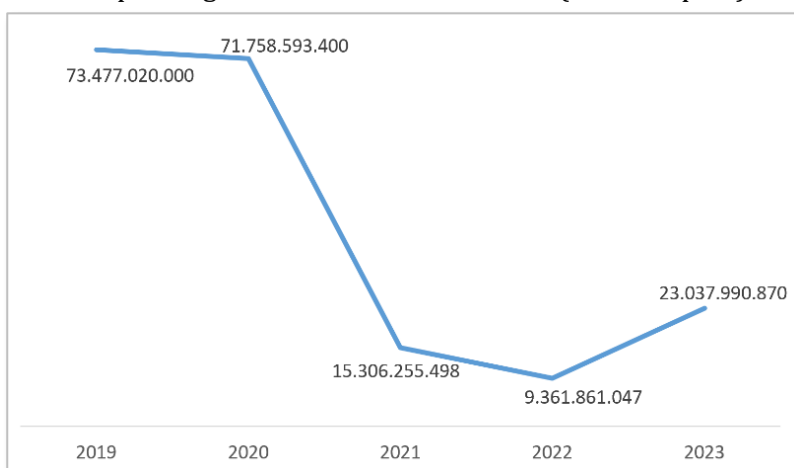
Tabel 2.48 Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan dalam APBD Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2019-2023

No	Uraian	(n-5) 2019	(n-4) 2020	(n-3) 2021 (Rp)	(n-2) 2022 (Rp)	(n-1) 2023 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan
6	Pembiayaan						
6.1	Penerimaan Pembiayaan						
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	14.500.000.000,00	20.000.000.000,00	2.583.833.498,00	20.600.256.047,00	25.037.990.870,00	167,42%
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	59.977.020.000,00	51.758.593.400,00	14.327.907.000,00		-	0,00%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	74.477.020.000,00	71.758.593.400,00	16.911.740.498,00	20.600.256.047,00	25.037.990.870,00	-9,18%
6.2	Pengeluaran Pembiayaan						
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Pemberian Pinjaman Daerah			1.605.485.000,00	11.238.395.000,00		0,00%
6.2.0.....	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00				2.000.000.000,00	-100,00%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	-	1.605.485.000,00	11.238.395.000,00	2.000.000.000,00	139,27%
	Pembiayaan Netto	73.477.020.000,00	71.758.593.400,00	15.306.255.498,00	9.361.861.047,00	23.037.990.870,00	57,14%

Sumber: BKD Kabupaten Kepahiang



Gambar 2.56 Perkembangan Pembiayaan dalam APBD Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2019-2023 (dalam rupiah)



Sumber: BKD Kabupaten Kepahiang (diolah)

Kesimpulan yang dapat ditarik dari data-data tersebut diatas adalah bahwa pelaksanaan APBD Kabupaten Kepahiang selama periode tahun 2019-2023 masih belum menunjukkan kinerja yang bagus. Hal ini ditandai dengan: 1) masih berfluktuasinya serta terlalu rendahnya rata-rata pertumbuhan pendapatan asli daerah; dan 2) masih berfluktuasinya serta masih negatifnya rata-rata pertumbuhan belanja modal.

b. Neraca Daerah

Selama periode tahun 2019-2023 perkembangan jumlah aset dalam neraca Kabupaten Kepahiang menunjukkan tren peningkatan hingga pada akhir periode namun selama periode tahun yang sama juga sedikit mengalami fluktuasi. Tercatat selama periode tahun tersebut rata-rata pertumbuhan aset Kabupaten Kepahiang relatif rendah atau dengan kata lain jauh dibawah 5 persen (lihat Tabel 2.49)



Tabel 2.49 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata Pertumbuhan
1	Aset	1.281.086.977.233,48	1.232.341.727.562,73	1.356.520.814.001,90	1.371.436.728.857,07	1.403.050.063.102,66	2,42%
1.1.	Aset lancar	81.317.769.462,25	46.052.932.566,14	64.702.800.673,56	82.807.837.552,71	86.692.516.503,84	7,45%
1.1.1.	Kas	35.639.202.531,24	2.962.442.525,56	20.789.209.529,97	25.365.623.566,36	23.568.202.482,24	131,25%
	Investasi jangka pendek	0,00	0,00	0,00	2.179.092.225,00	0,00	-25,00%
1.1.2.	Piutang	27.044.229.652,35	31.815.298.294,58	25.471.516.139,59	21.210.687.828,35	27.186.468.726,70	2,29%
1.1.3.	Persediaan	18.634.337.278,66	11.275.191.746,00	18.442.075.004,00	34.052.433.933,00	40.101.879.026,00	31,62%
1.2.	Aset tetap	1.143.006.537.472,90	1.137.872.387.085,58	1.247.375.302.937,81	1.245.690.867.617,98	1.245.997.956.687,25	2,27%
1.2.1.	Tanah	102.662.291.438,00	99.615.025.842,00	146.585.685.931,00	147.182.925.931,00	147.811.300.527,00	11,25%
1.2.2.	Peralatan dan mesin	268.017.158.584,88	298.927.615.224,04	330.600.871.503,83	345.755.769.735,09	353.277.983.072,60	7,22%
1.2.3.	Gudang dan bangunan	525.942.051.403,01	534.766.687.119,80	576.175.633.916,52	598.975.012.454,61	640.416.662.154,95	5,07%
1.2.4.	Jalan, irigasi, dan jaringan	1.030.206.049.308,25	1.034.920.192.555,81	1.083.227.702.069,04	1.114.647.895.360,81	1.153.726.608.816,81	2,88%
1.2.5.	Aset tetap lainnya	38.336.620.498,00	39.286.650.308,00	39.921.157.294,78	40.134.625.604,78	40.678.349.104,78	1,50%
1.2.6.	Konstruksi dalam pengerjaan	2.917.317.000,00	23.733.236.955,33	37.310.304.227,84	37.146.209.018,84	18.742.886.604,51	180,19%
1.2.7.	Akumulasi penyusutan	-825.074.950.759,24	-893.377.020.919,40	-966.446.052.005,20	-1.038.151.570.487,15	-1.108.655.833.593,40	7,67%
1.3.	Aset lainnya	1.281.086.977.233,48	1.232.341.727.562,73	1.356.520.814.001,90	1.371.436.728.857,07	1.403.050.063.102,66	2,42%
1.3.1.	Tagihan penjualan angsuran						
1.3.2.	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah						
1.3.3.	Kemitraan dengan pihak kedua						
1.3.4.	Aset tak berwujud	129.245.000,00	129.245.000,00	463.295.000,00	1.019.301.000,00	1.303.544.500,00	101,59%
1.3.5.	Aset lain-lain	34.466.293.567,19	18.498.184.843,63	16.458.699.746,00	17.338.605.528,00	37.167.767.681,83	15,59%
1.3.6.	Akumulasi penyusutan	-14.454.961.702,45	-5.614.116.093,12	-8.116.516.766,40	-8.927.170.283,98	-8.905.555.125,00	-1,71%

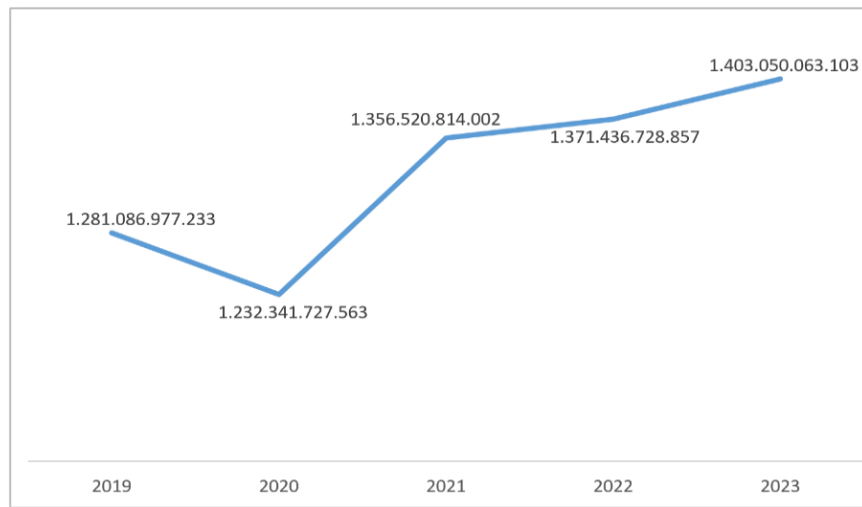


No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata Pertumbuhan
	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)					5.510.767.000,00	100%
	Jumlah aset daerah						
2	Kewajiban	7.103.495.441,95	25.517.074.206,85	30.348.514.194,11	6.608.136.214,99	7.918.533.217,36	54,94%
2.1.	Kewajiban jangka pendek						
2.1.1.	Utang perhitungan pihak ketiga	689.082.190,00	636.138.571,00	371.215.863,00	585.162.240,00	345.680.468,00	-8,31%
2.1.2.	Uang muka dari kas daerah						
2.1.3.	Pendapatan diterima dimuka						
2.1.4.	Utang beban	6.123.377.816,00	4.079.667.177,57	5.477.185.559,29	5.779.938.539,04	7.329.817.313,41	8,31%
2.1.5.	Utang jangka pendek lainnya	291.035.435,95	13.745.066.003,28	10.574.435.316,82	243.035.435,95	243.035.435,95	1125,51%
3	Ekuitas dana						
3.1.	Ekuitas dana lancar						
3.1.1.	Silpa						
3.1.2.	Cadangan piutang						
3.1.3.	Cadangan persediaan						
3.1.4.	Ekuitas	1.273.983.481.791,53	1.206.824.653.355,88	1.326.172.299.807,87	1.364.828.592.642,08	1.395.131.529.885,30	2,44%
3.2.	Ekuitas dan investasi						
3.2.1.	Diinvestasikan dalam aset tetap						
3.2.2.	Diinvestasikan dalam aset lainnya						
3.2.3.	dst.....						
	Jumlah kewajiban dan ekuitas dana	1.281.086.977.233,48	1.232.341.727.562,73	1.356.520.814.001,90	1.371.436.728.857,07	1.403.050.063.102,66	2,42%

Sumber: BKD Kabupaten Kepahiang



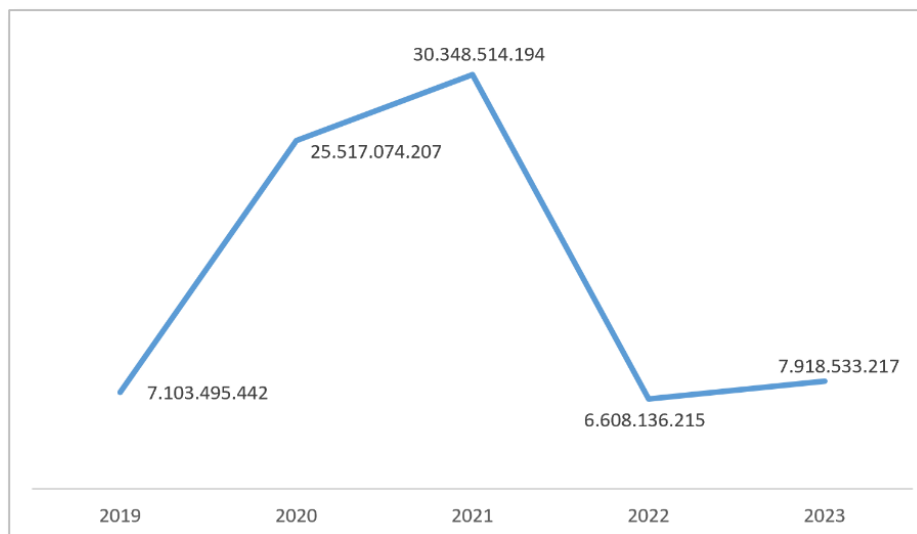
Gambar 2.57 Perkembangan Aset dalam Neraca Daerah Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2019-2023 (dalam rupiah)



Sumber: BKD Kabupaten Kepahiang (diolah)

Selanjutnya, perkembangan jumlah kewajiban dalam neraca Kabupaten Kepahiang selama periode tahun 2019-2023 justru sangat fluktuatif meskipun terjadi sedikit tren peningkatan pada akhir periode (lihat Gambar 2.58). Apabila dibandingkan dengan aset maka rata-rata pertumbuhan kewajiban dalam neraca Kabupaten Kepahiang dalam periode tahun tersebut justru jauh lebih besar, yaitu rata-rata tumbuh lebih dari 50 persen. Secara akuntansi, rata-rata pertumbuhan jumlah kewajiban yang jauh melebihi jumlah aset dalam neraca pemerintah daerah harus diwaspadai dengan sangat serius mengingat hal ini akan menurunkan baik rasio likuiditas maupun rasio solvabilitas yang pada gilirannya akan memperburuk kondisi neraca daerah tersebut.

Gambar 2.58 Perkembangan Kewajiban dalam Neraca Daerah Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2019-2023 (dalam rupiah)

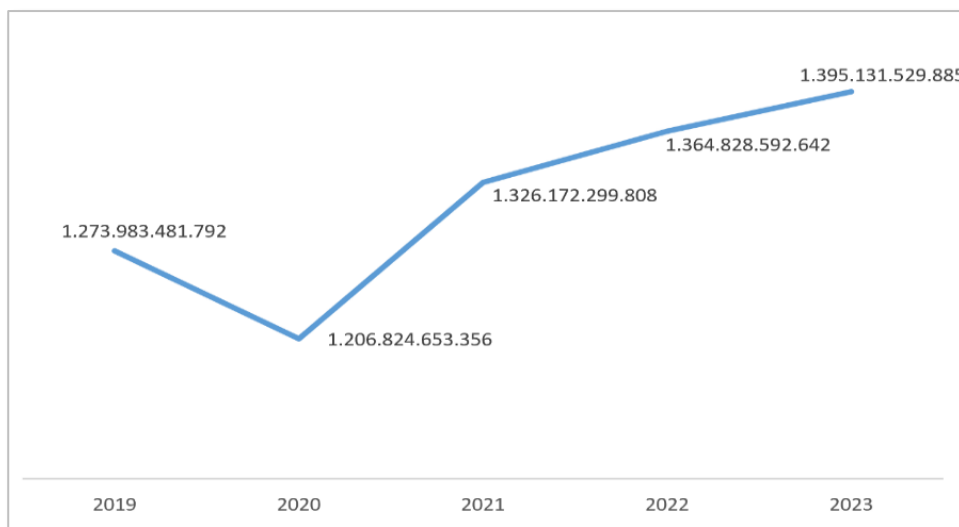


Sumber: BKD Kabupaten Kepahiang (diolah)



Sementara, selama periode tahun yang sama tercatat bahwa perkembangan jumlah ekuitas Kabupaten Kepahiang menunjukkan adanya tren peningkatan hingga pada akhir periode meskipun terjadi sedikit fluktuasi di awal periode (lihat Gambar 2.58). Dari data yang ada terlihat pula rata-rata pertumbuhan jumlah ekuitas dalam neraca Kabupaten Kepahiang hampir sama dengan rata-rata pertumbuhan jumlah aset atau dengan kata lain pertumbuhannya relatif rendah, yaitu jauh dibawah 5 persen.

Gambar 2.59 Perkembangan Ekuitas dalam Neraca Daerah Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2019-2023 (dalam rupiah)



Sumber: BKD Kabupaten Kepahiang (diolah)

c. Analisis Keuangan Daerah

Dalam sub-bagian ini akan diuraikan beberapa hasil analisis keuangan daerah yang meliputi antara lain: 1) rasio kemandirian; 2) rasio ketergantungan keuangan pemerintah daerah; 3) rasio desentralisasi fiskal; 4) rasio efektivitas PAD; 5) rasio belanja modal; 6) rasio likuiditas; dan 7) rasio solvabilitas. Dengan mengetahui perkembangan kelima jenis rasio tersebut diharapkan secara representatif dapat menggambarkan kualitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Kepahiang selama periode tahun 2019-2023.

Rasio Kemandirian.

Menurut Halim (2017), Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal, yaitu yang bersumber dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah lain. Secara substansial, kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan daerahnya sendiri. Selanjutnya, Mahmudi (2019) memformulasikan pola hubungan dan tingkat kemandirian daerah sebagai berikut:



Gambar 2.60 Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	26 – 50	Konsultatif
Sedang	51 – 75	Partisipatif
Tinggi	76 – 100	Delegatif

Sumber : Mahmudi (2019:140)

Gambar 6160 Perkembangan Rasio Kemandirian Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2019-2023

Tahun	Rasio Kemandirian	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
2019	5,53%	Rendah Sekali	Instruktif
2020	6,03%	Rendah Sekali	Instruktif
2021	5,20%	Rendah Sekali	Instruktif
2022	5,74%	Rendah Sekali	Instruktif
2023	5,92%	Rendah Sekali	Instruktif

Dari data-data diatas dapat disimpulkan bahwa selama periode tahun 2019-2023, tingkat kemandirian keuangan (sesuai rasio kemandirian) Kabupaten Kepahiang rendah sekali serta adanya pola hubungan yang bersifat instruktif antara pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Kepahiang. Apabila dilihat dari perkembangannya, dapat disimpulkan pula bahwa selama periode tahun yang sama tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Kepahiang cenderung fluktuatif yang disertai dengan adanya tren yang sedikit meningkat hingga di akhir periode.

Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah.

Menurut Mahmudi (2016), Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan proporsi jumlah realisasi Pendapatan Transfer pada tahun berjalan terhadap total realisasi Pendapatan Daerah pada tahun berjalan secara keseluruhan. Pendapatan Transfer merupakan bagian Pendapatan Daerah yang diterima dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah. Ada empat jenis transfer pemerintah pusat kepada daerah yaitu, (1) Dana Perimbangan, (2) Dana Otonomi Khusus, (3) Dana Keistimewaan, dan (4) Dana Desa.

Secara substansial, Indramawan (2018) menyebutkan bahwa semakin tinggi Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah mengindikasikan semakin tingginya ketergantungan pemerintah daerah pada pendanaan dari pusat. Selanjutnya, Tim Peneliti UGM (1991) dalam Laporan Akhir Penelitian Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab telah



memformulasikan skala interval rasio ketergantungan keuangan pemerintah daerah sebagai berikut:

Gambar 2.61 Skala Interval Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah

Rasio Ketergantungan (%)	Ketergantungan Keuangan PD
0 – 25	Sangat Rendah
25 – 50	Rendah
50 – 75	Sedang
75 – 100	Tinggi
Sumber: (UGM, 1991)	

Tabel 2.50 Perkembangan Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2019-2023

Tahun	Rasio Ketergantungan	Ketergantungan Keuangan
2019	93%	Tinggi
2020	88%	Tinggi
2021	89%	Tinggi
2022	95%	Tinggi
2023	93%	Tinggi

Dari data-data diatas, dapat disimpulkan bahwa selama periode tahun 2019-2023 tingkat ketergantungan keuangan Kabupaten Kepahiang terhadap pemerintah pusat masih relatif tinggi (sesuai rasio ketergantungan). Disamping itu, selama periode tahun yang sama tercatat pula bahwa perkembangan rasio ketergantungan Kabupaten Kepahiang cenderung berfluktuasi.

Rasio Desentralisasi Fiskal.

Menurut Mahmudi (2016), Rasio Desentralisasi Fiskal merupakan proporsi jumlah realisasi PAD pada tahun berjalan terhadap total realisasi Pendapatan Daerah pada tahun berjalan secara keseluruhan. PAD merupakan bagian Pendapatan Daerah yang diterima dari hasil pemungutan (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (laba dari BUMD), dan (4) Lain-lain PAD yang Sah. Rasio ini menunjukkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak daerah dan retribusi, serta bagi hasil dari BUMD untuk menunjang pendapatan daerah secara keseluruhan.

Secara substansial, Indramawan (2018) menunjukkan bahwa semakin tinggi Rasio Desentralisasi Fiskal mengindikasikan semakin rendah ketergantungan suatu



pemerintahan daerah terhadap pendanaan dari pusat. (Indramawan, 2018). Selanjutnya, Tim Peneliti UGM (1991) dalam Laporan Akhir Penelitian Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab telah memformulasikan skala interval rasio desentralisasi fiskal sebagai berikut:

Gambar 2.62 Skala Interval Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio Desentralisasi Fiskal (%)	Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah
0 – 10	Sangat Kurang
10 – 20	Kurang
20 – 30	Cukup
30 – 40	Sedang
40 – 50	Baik
> 50	Sangat Baik

Sumber: (UGM, 1991)

Tabel 2.51 Perkembangan Rasio Desentralisasi Fiskal Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2019-2023

Tahun	Rasio Desentralisasi Fiskal	Kemampuan Keuangan
2019	5%	Sangat Kurang
2020	5%	Sangat Kurang
2021	4%	Sangat Kurang
2022	5%	Sangat Kurang
2023	6%	Sangat Kurang

Dari data-data diatas dapat disimpulkan bahwa selama periode tahun 2019-2023 tingkat desentralisasi fiskal Kabupaten Kepahiang relatif rendah atau dapat diartikan pula bahwa kemampuan keuangan Kabupaten Kepahiang sangat kurang. Selanjutnya, dapat disimpulkan pula bahwa selama periode tahun yang sama tercatat perkembangan rasio desentralisasi fiskal Kabupaten Kepahiang sedikit berfluktuasi meski terlihat adanya tren yang sedikit meningkat hingga di akhir periode.

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Mahmudi (2016), Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk merealisasikan target anggaran PAD. Rasio ini dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan PAD dan anggaran PAD. Selanjutnya, Tim Peneliti UGM (1991) dalam Laporan Akhir Penelitian Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab telah memformulasikan skala interval rasio efektivitas PAD sebagai berikut:



Gambar 2.63 Skala Interval Rasio Efektivitas PAD

Kemampuan Keuangan	Rasio Efektivitas (%)
Sangat efektif	> 100
Efektif	100
Cukup efektif	90 – 99
Kurang efektif	75 – 89
Tidak efektif	< 75

Sumber: Mahmudi (2010: 142)

Tabel 2.52 Perkembangan Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2019-2023

Tahun	Rasio Efektivitas	Kemampuan Keuangan
2019	92%	Cukup Efektif
2020	83%	Kurang Efektif
2021	89%	Kurang Efektif
2022	95%	Cukup Efektif
2023	103%	Sangat Efektif

Dari data-data diatas, dapat disimpulkan bahwa selama periode tahun 2019-2023 kemampuan keuangan Kabupaten Kepahiang cenderung berfluktuasi meskipun di akhir periode tercatat sangat efektif (sesuai rasio efektivitas PAD). Namun demikian, selama periode tahun tersebut tercatat pula adanya tren peningkatan kemampuan keuangan hingga di akhir periode.

Rasio Belanja Modal

Mahmudi (2016) menyebutkan bahwa Rasio Belanja Modal dihitung dari perbandingan total Belanja Modal tahun berjalan dengan Belanja Daerah pada tahun berjalan secara keseluruhan. Secara finansial, Belanja Modal merupakan bagian dari Belanja Daerah yang dikeluarkan untuk perolehan (pengadaan) aset tetap atau aset lainnya yang dapat digunakan atau memberi manfaat melebihi jangka waktu satu tahun anggaran. Selanjutnya, dalam rasio Belanja Modal tidak dikenal skala interval untuk mengukur baik dan buruknya alokasi. Namun menurut catatan Mahmudi (2016), rata-rata Belanja Modal di pemerintahan daerah di kisaran angka sekitar 5 persen.

Tabel 2.53 Perkembangan Rasio Belanja Modal
Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2019-2023

Tahun	Rasio Belanja Modal
2019	13,48%
2020	11,01%
2021	18,76%
2022	11,42%
2023	9,52%

Dari data-data diatas dapat disimpulkan bahwa selama periode tahun 2019-2023 angka rasio belanja modal Kabupaten Kepahiang berada diatas rata-rata belanja modal pemerintah daerah secara nasional (menurut kesimpulan Mahmudi diatas) di mana secara proporsional cukup bagus meskipun selama periode tahun tersebut perkembangannya relatif masih berfluktuasi dan adanya tren perkembangan yang relatif menurun hingga di akhir periode. Dalam jangka panjang, seiring dengan peningkatan pendapatan daerah (terutama PAD) maka rasio belanja modal harus terus ditingkatkan dan dijaga konsistensinya agar tidak terlalu berfluktuasi.

Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar lainnya dari sebuah entitas dengan kewajiban lancarnya untuk melihat kemampuan entitas dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas yang akan digunakan dalam analisis keuangan daerah Kabupaten Kepahiang terdiri dari: 1) Rasio Lancar (*Current Ratio*); dan 2) Rasio Cepat (*Quick Ratio*).

Rasio Lancar merupakan perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban lancar atau kewajiban jangka pendek. Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi utangnya. Sementara, Rasio Cepat merupakan perbandingan antara aset lancar yang dikurangi oleh persediaan dengan kewajiban lancar atau utang jangka pendek. Rasio ini bermanfaat untuk Pemerintah daerah dalam membayar utangnya dengan cepat. Rasio ini juga menunjukkan berapa alat likuiditas yang digunakan untuk melunasi utang lancar.

Selama periode tahun 2019-2023 tercatat bahwa rata-rata rasio likuiditas Kabupaten Kepahiang baik yang ditunjukkan oleh rasio lancar maupun rasio cepat jauh diatas 100

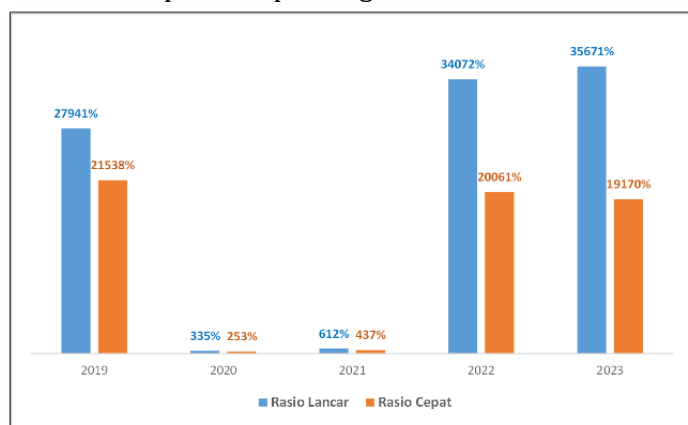


persen. Hal ini berarti bahwa tingkat kemampuan keuangan Kabupaten Kepahiang untuk membayar utang dalam jangka pendek sangat bagus meskipun selama periode tahun tersebut nilai rasionya sangat fluktuatif (lihat Tabel 2.54 dan Gambar 2.63).

Tabel 2.54 Perkembangan Rasio Lancar dan Rasio Cepat Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2019-2023

Tahun	Rasio Lancar	Rasio Cepat
2019	27941%	21538%
2020	335%	253%
2021	612%	437%
2022	34072%	20061%
2023	35671%	19170%

Gambar 2.65 Perkembangan Rasio Cepat dan Rasio Lancar Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2019-2023



Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas dilakukan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Suatu pemerintah daerah dikatakan *solvable* apabila pemerintah daerah tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya, sebaliknya apabila jumlah aktiva tidak cukup atau lebih kecil daripada jumlah hutang, berarti pemerintah daerah tersebut dalam keadaan *insolvable*. Rasio solvabilitas yang digunakan disini ada 2 (dua) jenis, yaitu: 1) rasio utang terhadap aset (*total debt to asset ratio*); dan 2) rasio utang terhadap ekuitas (*total debt to equity ratio*).

Selama periode tahun 2019-2023 tercatat bahwa rasio solvabilitas Kabupaten Kepahiang baik yang ditunjukkan oleh rasio utang terhadap aset maupun rasio utang

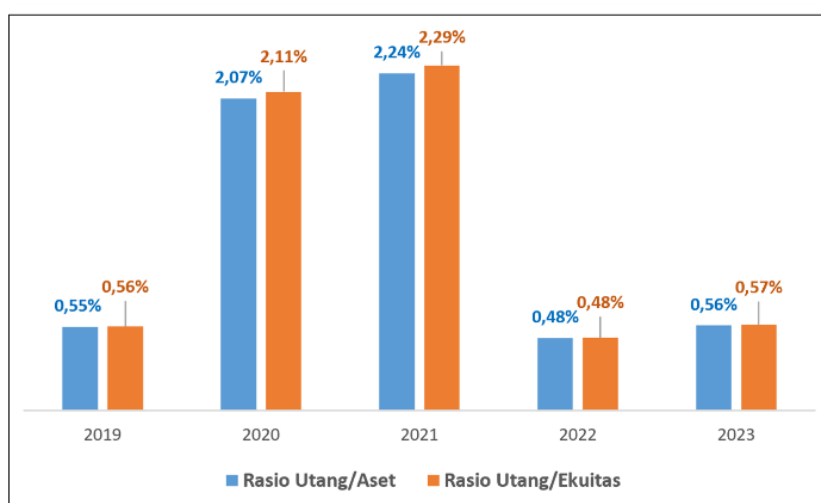


terhadap ekuitas cukup rendah. Hal ini berarti bahwa tingkat kemampuan keuangan Kabupaten Kepahiang cukup bagus dalam membayar utang dalam jangka panjang meskipun selama periode tahun tersebut nilai rasionya cukup fluktuatif (lihat Tabel 2.55 dan Gambar 2.66).

Tabel 2.55 Perkembangan Rasio Aset/Utang dan Rasio Utang/Ekuitas Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2019-2023

Tahun	Rasio Utang/Aset	Rasio Utang/Ekuitas
2019	0,55%	0,56%
2020	2,07%	2,11%
2021	2,24%	2,29%
2022	0,48%	0,48%
2023	0,56%	0,57%

Gambar 2.66 Perkembangan Rasio Utang/Aset dan Rasio Utang/Ekuitas Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2019-2023



2.5.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

a. Proporsi Penggunaan Anggaran

Selama periode tahun 2019-2023 tercatat rata-rata persentase total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran sekitar 49 persen. Namun demikian, apabila dilihat perkembangannya maka selama periode tahun yang sama terlihat adanya peningkatan tren persentase total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran serta adanya fluktuasi perkembangan persentase tersebut (lihat Tabel 2.56 dan Gambar 2.67).

Dalam konteks pelayanan publik dan pemerintahan daerah diharapkan proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Kepahiang dalam jangka panjang akan



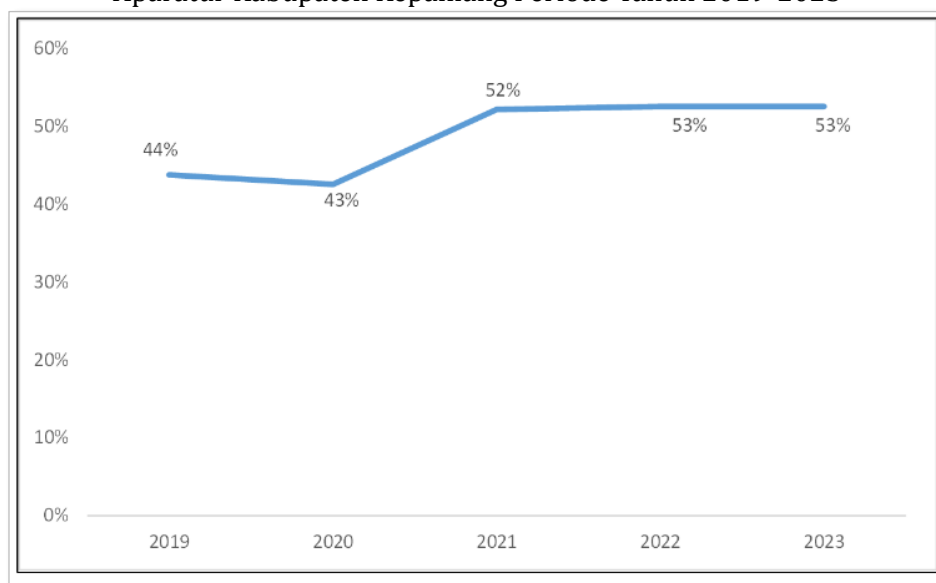
semakin menurun hingga dibawah 40 persen. Dengan demikian, proporsi terbesar belanja akan lebih banyak mendanai kebutuhan pelayanan publik dan pembangunan sarana dan prasarana publik sehingga secara signifikan belanja daerah akan mampu memberikan dampak positif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepahiang sebesar-besarnya.

Tabel 2.56 Perkembangan Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2019-2023

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (belanja+pembiayaan pengeluaran (Rp)	Persentase
		a	b	(a)/(b) x 100%
1	Tahun anggaran n-5 (2019)	395.273.591.508,00	903.415.003.100,71	44%
2	Tahun anggaran n-4 (2020)	401.249.151.073,00	943.435.102.061,51	43%
3	Tahun anggaran n-3 (2021)	428.377.677.038,00	821.558.224.261,00	52%
4	Tahun anggaran n-2 (2022)	387.091.428.913,00	736.985.557.499,00	53%
5	Tahun anggaran n-1 (2023)	398.927.768.812,00	759.348.600.903,00	53%

Sumber: BKD Kabupaten Kepahiang

Gambar 2.67 Perkembangan Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2019-2023



Sumber: BKD Kabupaten Kepahiang (diolah)

b. Analisis Pembiayaan

Selama periode tahun 2019-2023 tercatat bahwa defisit riil anggaran Kabupaten Kepahiang mengalami perkembangan yang sangat fluktuatif yang disertai adanya tren penurunan pada akhir periode (lihat Tabel 2.57 dan Gambar 2.68). Dalam konteks pengelolaan keuangan yang baik maka dalam jangka menengah atau lima tahun kedepan diharapkan pemerintah Kabupaten Kepahiang diharapkan dapat mengelola keuangan



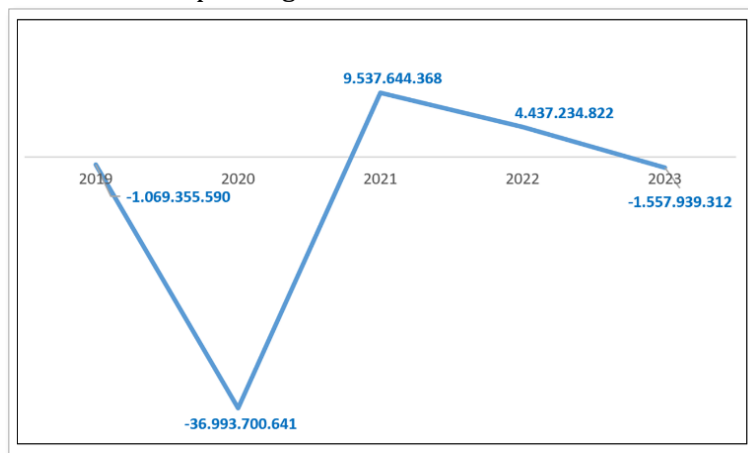
dengan lebih baik lagi terutama dengan menjaga proporsi belanja daerah agar sinkron dengan kemampuan mewujudkan realisasi pendapatan daerah sehingga tidak menimbulkan defisit anggaran serta mampu menghindari terjadinya fluktuasi defisit riil anggaran yang sangat tajam.

Tabel 2.57 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
1	Realisasi pendapatan daerah Dikurangi realisasi	730.847.819.159,57	723.525.660.820,14	771.892.237.402,82	712.265.700.914,87	725.630.511.571,46
2	Belanja daerah	730.917.174.749,43	760.519.361.461,23	760.749.108.034,41	696.590.071.092,48	725.188.450.883,58
3	Pengeluaran pembiayaan daerah	1.000.000.000,00	-	1.605.485.000,00	11.238.395.000,00	2.000.000.000,00
	Defisit riil	- 1.069.355.589,86	- 36.993.700.641,09	9.537.644.368,41	4.437.234.822,39	- 1.557.939.312,12

Sumber: BKD Kabupaten Kepahiang

Gambar 2.68 Perkembangan Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2019-2023



Sumber: BKD Kabupaten Kepahiang (diolah)

Selanjutnya, dari komponen yang ada terlihat bahwa hanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) satu-satunya yang mampu menutupi defisit riil anggaran Kabupaten Kepahiang selama periode tahun 2019-2023. Namun demikian, hal tersebut hanya terjadi satu tahun saja yaitu pada tahun 2021 (lihat Tabel 2.58).

Tabel 2.58 Komposisi Penutupan Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2019-2023

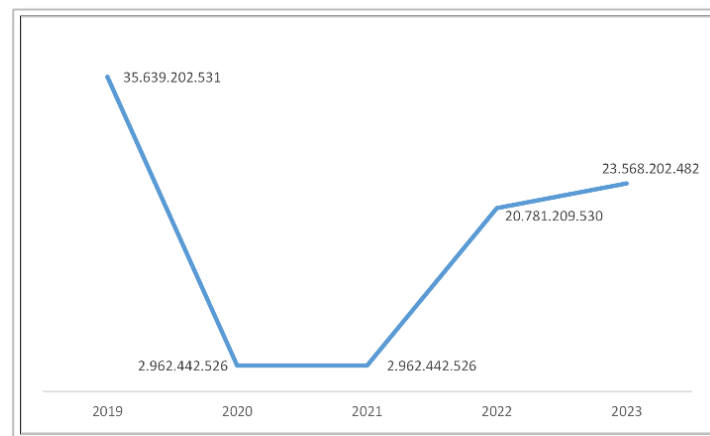
No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil				
		(n-5) 2019 (%)	(n-4) 2020 (%)	(n-3) 2021 (%)	(n-2) 2022 (%)	(n-1) 2023 (%)
1	Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya	-2,95%	-105,07%	369,13%	21,54%	-6,22%
2	Pencairan dana cadangan					
3	Hasil penjualan keaayaan daerah yang dipisahkan					
4	Penerimaan pinjaman daerah		-846,75%			
5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	-2320,25%	-3836508,32%			
6	Penerimaan piutang daerah					

Sumber: BKD Kabupaten Kepahiang



Selama periode tahun 2019-2023 tercatat bahwa perkembangan realisasi SILPA Kabupaten Kepahiang menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam dengan tren yang semakin menurun pada akhir periode (lihat Gambar 2.69). Selanjutnya, pada periode tahun yang sama, mayoritas jumlah SILPA berada di Kas Daerah, yaitu selama 3 (tiga) tahun anggaran, kecuali untuk tahun anggaran 2020 dan 2021 yang berada di Kas BLUD (lihat Tabel 2.59)

Gambar 2.69 Perkembangan Realisasi SILPA Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2019-2023 (dalam rupiah)



Sumber: BKD Kabupaten Kepahiang (diolah)

Tabel 2.59 Perkembangan Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2019-2023

No	Uraian	(n-5) 2019		(n-4) 2020		(n-3) 2021		(n-2) 2022		(n-1) 2023	
		Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA
1	Jumlah SILPA	35.639.202.531	100,00%	2.962.442.526	100,00%	2.962.442.526	100%	20.781.209.530	100%	23.568.202.482	100%
2	Kas Daerah	33.165.295.977	93,06%	18.489.884	0,62%	18.489.884	0,62%	15.940.234.553	76,71%	17.784.071.298	75,46%
3	Kas Bendahara	612.975.815	1,72%	563.846.894	19,03%	563.846.894	19,03%	85.460.167	0,41%	10.504.209	0,04%
4	Kas BLUD	966.529.116	2,71%	1.558.730.623	52,62%	1.558.730.623	52,62%	4.456.534.553	21,45%	2.838.481.751	12,04%
5	JKN	329.907.863	0,93%	340.840.700	11,51%	340.840.700	11,51%	96.919.417	0,47%	270.472.472	1,15%
6	Dana BOS	132.941.113	0,37%	101.925.397	3,44%	101.925.397	3,44%	88.374.520	0,43%	2.576.521.827	10,93%
7	Kas Lainnya	431.552.647	1,21%	378.609.028	12,78%	378.609.028	12,78%	113.686.320	0,55%	88.150.925	0,37%

Sumber: BKD Kabupaten Kepahiang

2.5.3 Kerangka Pendanaan

a. Proyeksi Pendapatan

Dalam periode tahun 2025-2029 pemerintah Kabupaten Kepahiang memproyeksikan bahwa pertumbuhan rata-rata total pendapatan negatif dengan perkembangan yang fluktuatif serta adanya tren penurunan pada akhir periode (lihat Tabel 2.60 dan Gambar 2.70). Hal ini juga diikuti dengan proyeksi pendapatan transfer di mana pada periode tahun yang sama tercatat rata-rata pertumbuhannya negatif dan fluktuatif serta memiliki tren penurunan pada akhir periode.

Selanjutnya, dari tabel dan gambar yang sama juga terlihat bahwa hanya pendapatan asli daerah yang diproyeksikan memiliki rata-rata pertumbuhan positif yang disertai dengan tren yang meningkat hingga akhir periode. Dari angkanya dapat disimpulkan bahwa



proyeksi pendapatan asli daerah Kabupaten Kepahiang pada periode tahun 2025-2029 relatif masih tergolong pesimis. Artinya, selama 5 (lima) tahun kedepan pemerintah Kabupaten Kepahiang belum menerapkan kebijakan ekspansi fiskal baik melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi pendapatan asli daerah.



Tabel 2.60 Proyeksi Pendapatan Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2025-2029

No	Uraian	Pertumbuhan %	2025 (Rp)	2026 (Rp)	2027 (Rp)	2028 (Rp)	2029 (Rp)
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)						
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	1,53%	17.415.902.737,00	16.509.179.239,43	17.128.784.025,34	17.776.062.993,00	18.452.438.411,13
4.1.02	Pendapatan retribusi Daerah	8,51%	728.382.325,00	722.005.541,25	792.447.568,31	896.404.761,73	1.004.410.133,01
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	18,87%	2.000.000.000,00	2.767.740.563,36	3.138.186.972,60	3.266.127.374,00	3.262.546.127,00
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	2,00%	48.883.262.062,00	49.860.927.303,24	50.858.145.849,30	51.875.308.766,29	52.912.814.941,62
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	2,44%	69.027.547.124,00	69.859.852.647,28	71.917.564.415,56	73.813.903.895,02	75.996.209.612,76
4.2	Pendapatan Transfer						
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-4,93%	773.662.867.000,00	574.541.806.620,00	586.032.642.752,40	597.753.295.607,45	609.708.361.519,60
4.2.01.01	Dana Perimbangan	-5,74%	693.120.717.000,00	492.388.813.620,00	502.236.589.892,40	512.281.321.690,25	522.526.948.124,05
4.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil	2,00%	15.719.884.000,00	16.034.281.680,00	16.354.967.313,60	16.682.066.659,87	17.015.707.993,07
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	2,00%	467.014.247.000,00	476.354.531.940,00	485.881.622.578,80	495.599.255.030,38	505.511.240.130,98
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	-25,00%	121.687.806.000,00	-	-	-	-
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	-25,00%	88.698.780.000,00	-	-	-	-
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)		-	-	-	-	-
4.2.01.02.01	DID		-				
4.2.01.05	Dana Desa	2,00%	80.542.150.000,00	82.152.993.000,00	83.796.052.860,00	85.471.973.917,20	87.181.413.395,54
4.2.01.05.01	Dana Desa	2,00%	80.542.150.000,00	82.152.993.000,00	83.796.052.860,00	85.471.973.917,20	87.181.413.395,54

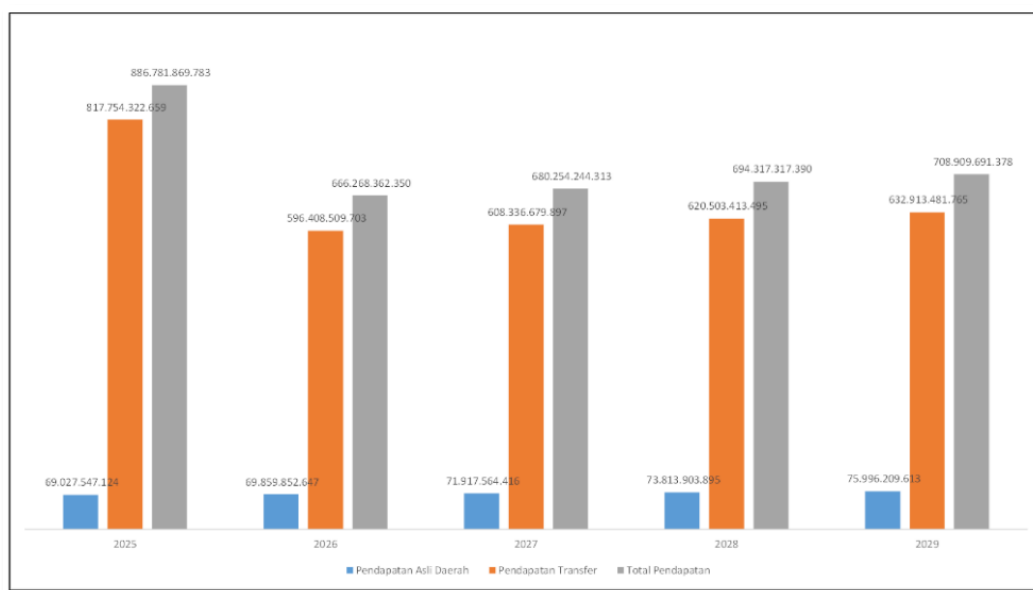


No	Uraian	Pertumbuhan %	2025 (Rp)	2026 (Rp)	2027 (Rp)	2028 (Rp)	2029 (Rp)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-11,10%	44.091.455.659,00	21.866.703.082,98	22.304.037.144,64	22.750.117.887,53	23.205.120.245,28
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	-11,10%	44.091.455.659,00	21.866.703.082,98	22.304.037.144,64	22.750.117.887,53	23.205.120.245,28
4.2.02.01.01	Bagi Hasil Pajak	-11,10%	44.091.455.659,00	21.866.703.082,98	22.304.037.144,64	22.750.117.887,53	23.205.120.245,28
	Jumlah Pendapatan Transfer	-5,27%	817.754.322.659,00	596.408.509.702,98	608.336.679.897,04	620.503.413.494,98	632.913.481.764,88
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah						
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-	-	-	-
4.3.03.02	Lain-lain Pendapatan Kapitasi JKN		-	-			
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah		-	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	-6,74%	886.781.869.783,00	666.268.362.350,26	680.254.244.312,60	694.317.317.390,00	708.909.691.377,64

Sumber: BKD Kabupaten Kepahiang



Gambar 2.70 Perkembangan Proyeksi Total Pendapatan, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2025-2029 (dalam rupiah)



Sumber: BKD Kabupaten Kepahiang (diolah)

b. Proyeksi Belanja

Dalam periode tahun 2025-2029 pemerintah Kabupaten Kepahiang memproyeksikan bahwa pertumbuhan rata-rata total pendapatan negatif dengan perkembangan yang fluktuatif serta adanya tren penurunan pada akhir periode (lihat Tabel 2.61 dan Gambar 2.71). Pertumbuhan rata-rata negatif juga diproyeksikan untuk belanja operasi dan belanja modal serta kedua jenis belanja tersebut juga diproyeksikan berfluktuasi dan memiliki tren penurunan pada akhir periode. Sementara, pertumbuhan rata-rata positif diproyeksikan untuk belanja tak terduga dan belanja bantuan keuangan yang disertai dengan tren yang semakin meningkat hingga pada akhir periode.



Tabel 2.61 Proyeksi Belanja Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2025-2029

No	Uraian	Pertumbuhan %	2025 (Rp)	2026 (Rp)	2027 (Rp)	2028 (Rp)	2029 (Rp)
5	Belanja						
5.1	Belanja Operasi						
5.1.01	Belanja Pegawai	-1,55%	376.866.325.620,00	336.191.987.132,40	342.915.826.875,05	349.774.143.412,55	356.809.626.280,80
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	-5,40%	233.737.278.596,00	180.463.304.239,52	184.818.085.039,64	191.043.934.931,59	195.547.221.270,06
5.1.03	Belanja Bunga		-	-			
5.1.05	Belanja Hibah	1,96%	5.117.394.840,00	5.219.742.736,80	5.324.137.591,54	5.430.620.343,37	5.539.232.750,23
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial						
5.1.2.1	Jumlah Belanja Operasi	-2,85%	615.720.999.056,00	521.875.034.108,72	533.058.049.506,23	546.248.698.687,50	557.896.080.301,09
5.2	Belanja Modal						
5.2.01	Belanja Modal Tanah		800.000.000,00	816.000.000,00	823.320.000,00	848.966.400,00	865.945.728,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-209,36%	38.979.876.838,00	4.132.218.814,76	4.214.863.191,06	4.299.160.454,88	4.385.143.663,97
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-345,20%	42.642.698.950,00	2.868.297.369,00	2.925.663.316,38	2.984.176.582,71	3.043.860.114,36
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	670,28%	84.854.742.839,00	3.044.675.695,78	3.105.569.209,70	3.167.680.593,89	3.231.034.205,77
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		-	-			
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1,96%	608.100.000,00	620.262.000,00	632.667.240,00	645.320.584,80	658.226.996,50
	Jumlah Belanja Modal	-339,09%	167.885.418.627,00	11.481.453.879,54	11.711.082.957,13	11.945.304.616,27	12.184.210.708,60

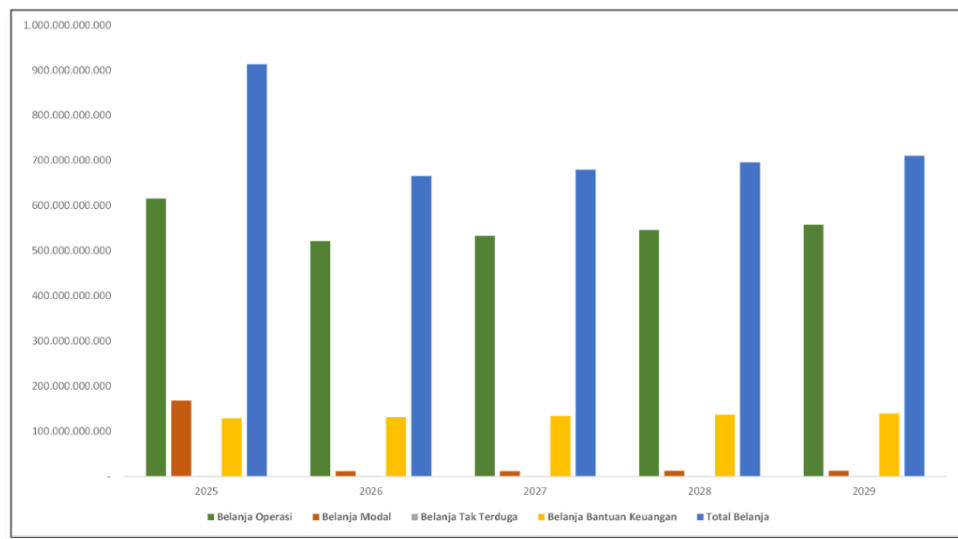


No	Uraian	Pertumbuhan %	2025 (Rp)	2026 (Rp)	2027 (Rp)	2028 (Rp)	2029 (Rp)
5.3	Belanja Tak Terduga						
5.3.01	Belanja Tak Terduga	1,96%	1.000.000.000,00	1.020.000.000,00	1.040.400.000,00	1.061.208.000,00	1.082.432.160,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	1,96%	1.000.000.000,00	1.020.000.000,00	1.040.400.000,00	1.061.208.000,00	1.082.432.160,00
5.4	Belanja Transfer						
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	1,96%	128.815.563.100,00	131.391.874.362,00	134.019.711.849,24	136.700.106.086,23	139.434.108.207,95
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota kepada Desa	1,96%	128.815.563.100,00	131.391.874.362,00	134.019.711.849,24	136.700.106.086,23	139.434.108.207,95
	Jumlah Belanja Transfer	1,96%	128.815.563.100,00	131.391.874.362,00	134.019.711.849,24	136.700.106.086,23	139.434.108.207,95
	Jumlah Belanja dan Transfer	-7,69%	913.421.980.783,00	665.768.362.350,26	679.829.244.312,60	695.955.317.390,00	710.596.831.377,64

Sumber: BKD Kabupaten Kepahiang



Gambar 2.71 Perkembangan Proyeksi Total Belanja, Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2025-2029 (dalam rupiah)



Sumber: BKD Kabupaten Kepahiang (diolah)

c. Proyeksi Pembiayaan

Dalam periode tahun 2025-2029 pemerintah Kabupaten Kepahiang memproyeksikan bahwa rata-rata pertumbuhan pembiayaan netto positif namun perkembangannya bersifat fluktuatif dengan tren perkembangan yang menurun pada akhir periode (lihat Tabel 2.61).



Tabel 2.62 Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2025-2029

No	Uraian	Pertumbuhan %	2025 (Rp)	2026 (Rp)	2027 (Rp)	2028 (Rp)	2029 (Rp)
6	Pembiayaan						
6.1	Penerimaan Pembiayaan						
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00%	28.640.111.000,00	1.500.000.000,00	1.575.000.000,00	1.638.000.000,00	1.687.140.000,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah						
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0,00%	28.640.111.000,00	1.500.000.000,00	1.575.000.000,00	1.638.000.000,00	1.687.140.000,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan						
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Pemberian Pinjaman Daerah						
6.2.0.....	Penyertaan Modal Daerah	0,00%	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00%	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	-
	Pembiayaan Netto	1352,59%	26.640.111.000,00	(500.000.000,00)	(425.000.000,00)	1.638.000.000,00	1.687.140.000,00

Sumber: BKD Kabupaten Kepahiang



d. Perhitungan Kerangka Pendanaan

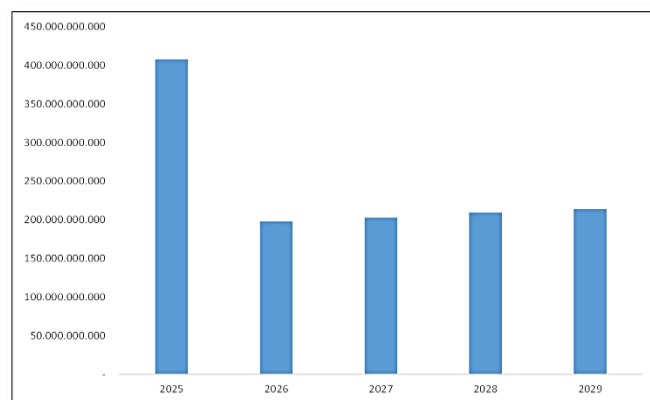
Dalam periode tahun 2025-2029 pemerintah Kabupaten Kepahiang memproyeksikan bahwa pada awal periode akan terjadi fluktuasi perkembangan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah namun setelah itu tren nya akan terus meningkat hingga pada akhir periode (lihat Gambar 2.72). Namun demikian, apabila dilihat jumlahnya secara nominal dapat disimpulkan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kepahiang masih relatif rendah untuk dapat digunakan dalam mendanai kebutuhan pembangunan dalam lima tahun kedepan (lihat Tabel 2.63).

Tabel 2.63 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2025-2029

No	Uraian	Proyeksi				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Pendapatan	886.781.869.783,00	666.268.362.350,26	680.254.244.312,60	694.317.317.390,00	708.909.691.377,64
2	Pencairan dan cadangan (sesuai perda)	-	-	-	-	-
3	Sisa lebih riil perhitungan anggaran	28.421.980.783,00	1.500.000.000,00	1.575.000.000,00	1.638.000.000,00	1.687.140.000,00
	Total penerimaan	915.421.980.783,00	667.768.362.350,26	681.829.244.312,60	695.955.317.390,00	710.596.831.377,64
4	Dikurangi	376.866.325.620,00	336.191.987.132,40	342.915.826.875,05	349.774.143.412,55	356.809.626.280,80
5	Belanja Pegawai	128.815.563.100,00	131.391.874.362,00	134.019.711.849,24	136.700.106.086,23	139.434.108.207,95
6	Belanja Transfer	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	-
	Pengeluaran pembiayaan	407.740.092.063	198.184.500.855,86	202.893.705.588,31	209.481.067.891,23	214.353.096.888,89
	Kapasitas riil kemampuan keuangan					

Sumber: BKD Kabupaten Kepahiang

Gambar 2.72 Perkembangan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2025-2029 (dalam rupiah)



Sumber: BKD Kabupaten Kepahiang (diolah)

Selanjutnya, dalam rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kepahiang periode tahun 2025-2029 akan dibagi kedalam 2 (dua) prioritas, yaitu **Prioritas 1** akan digunakan untuk mendanai Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang guna memastikan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029; dan **Prioritas 2** akan digunakan untuk mendanai Program Reguler Perangkat Daerah terutama pelayanan publik, pelayanan dasar, serta sarana dan prasarana dasar guna mencapai target RPJPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2045 tahap pertama (2025-2029) yang sinkron dengan upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).



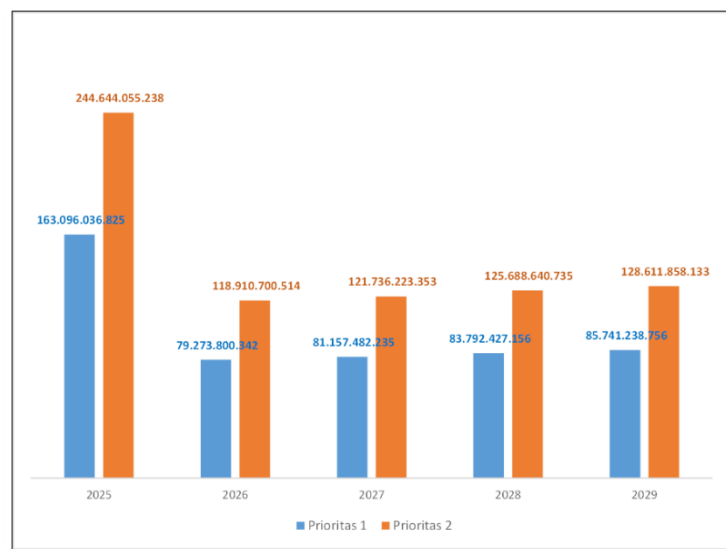
Secara proporsional, Prioritas 1 akan dialokasikan sekitar 40 persen sedangkan Prioritas 2 akan dialokasikan sekitar 60 persen (lihat Tabel 2.64). Apabila dilihat dalam perencanaannya maka perkembangan Prioritas 1 dan Prioritas 1 memiliki fluktuasi di awal periode tahun 2025-2029 dan selanjutnya memiliki tren peningkatan hingga pada akhir periode (lihat Gambar 2.73).

Tabel 2.64 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2025-2029

No	Uraian	Proyeksi				
		2025 (Rp)	2026 (Rp)	2027 (Rp)	2028 (Rp)	2029 (Rp)
1	Kapasitas riil kemampuan keuangan	407.740.092.063,00	198.184.500.855,86	202.893.705.588,31	209.481.067.891,23	214.353.096.888,89
1	Prioritas I	163.096.036.825,20	79.273.800.342,34	81.157.482.235,32	83.792.427.156,49	85.741.238.755,56
2	Prioritas II	244.644.055.237,80	118.910.700.513,52	121.736.223.352,99	125.688.640.734,74	128.611.858.133,34

Sumber: BKD Kabupaten Kepahiang

Gambar 2.73 Perkembangan Prioritas Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang Periode Tahun 2025-2029 (dalam rupiah)



Sumber: BKD Kabupaten Kepahiang (diolah)

2.6 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

2.6.1 Permasalahan Daerah

Permasalahan jangka menengah daerah Kabupaten Kepahiang dalam periode tahun 2025-2029 yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kemandirian pangan;
2. Tidak tercapainya proyeksi pertumbuhan UMKM;
3. Rendahnya pendapatan petani;
4. Masih tingginya angka pengangguran terbuka;



5. Rendahnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
6. Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat;
7. Rendahnya kualitas/Indeks Pembangunan Manusia;
8. Belum terpenuhinya layanan pendidikan dasar dan kesetaraan sesuai dengan SPM Pendidikan;
9. Masih belum optimalnya pengendalian penduduk dan kesejahteraan keluarga;
10. Masih rendahnya angka kesejahteraan sosial;
11. Rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur;
12. Menurunnya kualitas lingkungan hidup;
13. Belum optimalnya penanganan bencana;
14. Belum optimalnya pengelolaan persampahan;
15. Belum maksimalnya pelayanan publik;
16. Belum optimalnya sistem administrasi kependudukan dan pelayanan pencatatan sipil;
17. Belum optimalnya pengendalian internal pemerintah;
18. Masih belum optimalnya kinerja perangkat daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Dalam menentukan dan merumuskan 18 (delapan belas) permasalahan jangka menengah daerah diatas secara teknis dilakukan dengan metode sebagai berikut:

Penyamaan metode dan analisis identifikasi permasalahan daerah di seluruh Perangkat Daerah melalui kegiatan Bimbingan Teknis Analisis Pohon Masalah (*Problem Tree Analysis*) sehingga seluruh Perangkat Daerah memiliki metode dan alat analisis yang sama.

1. Identifikasi permasalahan Perangkat Daerah untuk mengetahui masalah pokok, masalah dan akar masalah Perangkat Daerah dengan menggunakan Analisis Pohon Masalah untuk mengisi tabel permasalahan daerah sesuai dengan ketentuan (Permendagri No. 86/2014) serta penyampaian hasil identifikasi permasalahan dari Perangkat Daerah kepada Bappeda.
2. Reviu seluruh tabel permasalahan Perangkat Daerah oleh Bappeda serta penambahan beberapa permasalahan daerah yang bersifat makro (diluar yang telah diidentifikasi Perangkat Daerah) dan permasalahan daerah dari dokumen



perencanaan pembangunan lainnya serta mengklasifikasikan permasalahan daerah kedalam rumpun menurut bidang.

3. Pelaksanaan Diskusi Kelompok Terfokus (Focused Group Discussion atau FGD) yang dikoordinasikan oleh Bappeda dan dihadiri oleh perwakilan seluruh Perangkat Daerah untuk melakukan pengukuran/pemeringkatan seluruh permasalahan daerah berdasarkan metode pemeringkatan yang telah disepakati (lihat Gambar 2.74) dengan menggunakan aplikasi google form serta mendiskusikan dan menyepakati permasalahan daerah yang final.
4. Penandatanganan Berita Acara FGD oleh seluruh perwakilan Perangkat Daerah yang berisi penetapan Permasalahan Daerah yang akan dimasukkan kedalam dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Kepahiang 2025-2029, yang selanjutnya akan digunakan sebagai permasalahan jangka menengah daerah dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029.

Gambar 2.74 Kriteria dan Pemeringkatan Permasalahan Daerah

Kriteria	Nilai Pemeringkatan Permasalahan		
	Sangat Strategis (3)	Cukup Strategis (2)	Kurang Strategis (1)
Besaran Dampak (D)	- Dampaknya mencakup sebagian besar/seluruh wilayah Kabupaten - Frekuensi permasalahan diperkirakan sering dan terus menerus	- Dampaknya mencakup lebih dari satu Kecamatan - Frekuensi permasalahan diperkirakan sedang	- Dampaknya mencakup terbatas hanya satu Kecamatan - Frekuensi permasalahan diperkirakan hanya sesaat
Derajat Urgensi (U)	- Tidak bisa ditunda penanganannya - Kedalaman pengaruhnya pada hampir semua sektor/urusan	- Bila ditunda akan menciptakan risiko/kerugian besar - Kedalaman pengaruhnya pada beberapa sektor/urusan	- Bisa ditunda karena risiko/kerugiannya termasuk kecil - Kedalaman pengaruhnya hanya pada satu sektor/urusan
Kemudahan Penanganan (K)	- Menjadi kewenangan Kabupaten tetapi biaya dan teknologi terjangkau - Tidak memerlukan kemauan politik (<i>political will</i>) Kepala Daerah dan DPRD	- Menjadi kewenangan Kabupaten tetapi biaya besar dan teknologi tinggi - Perlu sedikit kemauan politik (<i>political will</i>) Kepala Daerah dan DPRD	- Diluar kewenangan Kabupaten - Memerlukan kemauan politik (<i>political will</i>) Kepala Daerah dan DPRD yang tinggi



2.7 ISU STRATEGIS DAERAH

Upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah di Kabupaten Kepahiang pada periode tahun 2025-2029 secara substansial akan menghadapi isu dan tantangan yang dinamis, baik pada tingkat global, nasional, regional, provinsi maupun lokal. Selanjutnya, isu dan tantangan pembangunan tersebut perlu diperhitungkan secara cermat sehingga akan mampu berubah menjadi peluang untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah serta untuk menjaga trajektori pembangunan jangka panjang.

2.7.1 Isu Strategis Global

Berbagai isu strategis global yang akan dihadapi Kabupaten Kepahiang dalam pembangunan jangka menengah periode tahun 2025-2029 secara substansial masih merupakan turunan dari Megatren 2045, yaitu antara lain:

1. Demografi global. Hal ini akan ditandai dengan penduduk dunia yang diperkirakan akan mencapai 9,45 milyar dan meningkatnya proporsi penduduk lansia (Asia sekitar 55 persen).
2. Geopolitik dan geoekonomi. Hal ini akan ditandai dengan adanya eskalasi persaingan antarnegara dan kemunculan kekuatan baru serta meningkatnya kontribusi ekonomi negara berkembang hingga mencapai sekitar 71 persen.
3. Perkembangan teknologi. Hal ini akan ditandai dengan pesatnya tingkat perkembangan teknologi sehingga diperkirakan sekitar 40 persen pekerjaan yang ada saat ini akan digantikan oleh teknologi.
4. Urbanisasi dunia. Hal ini akan ditandai dengan proyeksi penduduk perkotaan akan mencapai sekitar 65 persen serta memiliki peran dalam Produk Domestik Bruto sekitar 70 persen.
5. Konstelasi perdagangan global. Hal ini akan ditandai dengan pertumbuhan perdagangan global yang akan mencapai sekitar 3,4 persen per tahunnya.
6. Tata kelola keuangan global. Hal ini akan ditandai dengan adanya pergeseran kebijakan fiskal, *Central Bank Digital Currency* dan *Fintech*.
7. Pertumbuhan kelas menengah. Hal ini akan ditandai dengan jumlah *middle* dan *upper income class* yang diperkirakan akan mencapai lebih dari sekitar 90 persen atau sebanyak 8,8 milyar.



8. Persaingan sumber daya alam. Hal ini akan ditandai dengan meningkatnya peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika yang pada akhirnya mendorong meningkatnya persaingan untuk memperebutkan sumber daya alam.
9. Perubahan iklim. Hal ini akan ditandai adanya peningkatan suhu global disertai adanya cuaca ekstrem dan bencana alam.
10. Pemanfaatan luar angkasa. Hal ini akan ditandai dengan semakin meningkatnya isu ekonomi antariksa, kelestarian antariksa dan keamanan antariksa.

2.7.2 Isu Strategis Nasional

Berdasarkan dokumen Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029, berbagai isu strategis nasional dalam jangka menengah adalah sebagai berikut:

1. Dampak hilirisasi mulai terlihat positif bagi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, hilirisasi perlu dilanjutkan untuk nilai tambah yang lebih besar.
2. Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral. Oleh karena itu, sinkronisasi kebijakan perlu didorong dengan memperhatikan kepentingan nasional.
3. Penerapan standar sustainability yang tinggi di level global. Oleh karena itu, produk Indonesia harus berorientasi ramah lingkungan agar tetap mampu bersaing di pasar global.
4. Transisi energi untuk mendorong pemerataan. Oleh karena itu, diperlukan national grid yang mampu mendistribusikan pasokan listrik ke luar pulau. Selanjutnya, juga diperlukan pembangunan PLT EBT di luar Pulau Jawa untuk meningkatkan pemerataan.
5. *Aging population* negara maju. Usia produktif negara maju akan menurun. Oleh karena itu, perlu pemanfaatan potensi Indonesia untuk mendorong penyediaan pariwisata kesehatan bagi lansia.

2.7.3 Isu Strategis Regional Sumatera

Berdasarkan dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029, berbagai isu strategis provinsi Bengkulu dalam jangka menengah adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya hilirisasi komoditas unggulan daerah seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan lain-lain.



2. Belum optimalnya kualitas SDM dimana mayoritas tenaga kerja didominasi oleh lulusan pendidikan menengah ke bawah.
3. Degradasi lingkungan karena aktivitas perkebunan kelapa sawit dan pertambangan.
4. Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan dasar seperti faskes dan pendidikan terutama di daerah 3T.
5. Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana terutama di pesisir barat Sumatera.

2.7.4 Isu Strategis Provinsi Bengkulu

Berdasarkan dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029, berbagai isu strategis provinsi Bengkulu dalam jangka menengah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing ekonomi.
2. Hilirisasi komoditas unggulan dan pengembangan pariwisata yang komprehensif dan kompetitif.
3. Pengembangan konektivitas serta pemerataan dan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.
4. Kemiskinan, kesejahteraan dan daya saing SDM.
5. Pembangunan peran perempuan pada sektor formal di provinsi Bengkulu masih relatif rendah.

2.7.5 Isu Strategis Kabupaten Kepahiang

Berdasarkan permasalahan jangka menengah daerah diatas telah dirumuskan isu strategis jangka menengah daerah Kabupaten Kepahiang dalam periode 2025-2029 sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesejahteraan sosial dan keluarga.
3. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur.
4. Kemandirian pangan, kesejahteraan petani dan kemajuan usaha UMKM.
5. Penurunan tingkat pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan.
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan resiliensi kebencanaan.
7. Kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.



Secara teknis, untuk merumuskan isu strategis daerah tersebut dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Pengolahan permasalahan daerah yang telah disepakati dalam Berita Acara (yang ditandatangani seluruh perwakilan Perangkat Daerah) oleh Bappeda menjadi usulan isu strategis daerah.
2. Pelaksanaan Diskusi Kelompok Terfokus (*Focused Group Discussion* atau FGD) yang dikoordinasikan oleh Bappeda dan dihadiri oleh perwakilan seluruh Perangkat Daerah untuk melakukan pengukuran terhadap isu strategis daerah berdasarkan metode pemeringkatan yang telah disepakati dengan menggunakan aplikasi *google form* serta mendiskusikan dan menyepakati isu strategis daerah yang final.
3. Penandatanganan Berita Acara FGD oleh seluruh perwakilan Perangkat Daerah yang berisi penetapan Isu Strategis Daerah yang akan dimasukkan kedalam dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Kepahiang 2025-2029.

Gambar 2.72 Kriteria dan Pembobotan Isu Strategis Daerah

No.	Kriteria	Bobot
1	Berdampak sangat besar (signifikan) terhadap kemajuan dan kesejahteraan daerah dalam 5 tahun kedepan	5
2	Berpengaruh sangat besar (signifikan) terhadap pencapaian target SDGs dan IPM dalam 5 tahun kedepan	4
3	Berpengaruh sangat besar (signifikan) terhadap pencapaian target SPM dalam 5 tahun kedepan	3
4	Merupakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam 5 tahun kedepan	2
5	Mudah ditangani dan diselesaikan dalam 5 tahun kedepan	1



BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH



BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyusunan RPJMD dilakukan dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN untuk menjamin konsistensi arahan pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, Visi dalam RPJMD adalah Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada saat Pemilihan Kepala Daerah. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan lima tahun.

3.1. VISI

RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan jangka panjang periode pertama dalam dokumen RPJPD Kabupaten Kepahiang 2025-2045. Tahapan pembangunan jangka panjang pada periode ini menjadi salah satu rujukan kepala daerah dalam menyusun Visi dan Misi Jangka Menengah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029 berdasarkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang terpilih adalah:

“Mewujudkan Kepahiang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”

Visi tersebut memiliki 3 (tiga) kata kunci (keywords) atau pokok-pokok visi, yaitu: Maju, Berdaya saing dan Berkelanjutan. Selanjutnya, penjelasan dari ketiga kata kunci atau pokok-pokok visi tersebut adalah sebagai berikut:

Maju, berarti bahwa Kabupaten Kepahiang yang memiliki PAD yang meningkat, kemandirian pangan, petani yang sejahtera, UMKM yang maju serta turunnya pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan.

Berdaya saing, berarti bahwa Kabupaten Kepahiang yang memiliki sumber daya manusia, kesejahteraan sosial dan keluarga yang berkualitas, infrastruktur yang memadai dan berkualitas serta tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas.

Berkelanjutan, berarti bahwa Kabupaten Kepahiang yang memiliki lingkungan hidup yang berkualitas dan resiliensi kebencanaan yang kuat.



Visi Kabupaten Kepahiang telah disinkronkan dengan visi RPJMD Provinsi Bengkulu 2025-2029 dan visi RPJMN 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Keselarasan Visi RPJMN 2025-2029, Visi RPJMD Provinsi Bengkulu 2025-2029 dan Visi RPJMD Kabupaten Kepahiang 2025-2029

Visi RPJMN 2025-2029	Visi RPJMD Provinsi Bengkulu 2025-2029	Visi RPJMD Kabupaten Kepahiang 2025-2029
“Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045” Indonesia akan menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara negara-negara maju yang disertai kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, negara yang berdaulat dan berperan penting di dunia internasional, negara yang memiliki sumber daya manusia yang unggul, serta negara yang berkomitmen menerapkan prinsip Pembangunan berkelanjutan.	“Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera dan Berkelanjutan” Maju : Provinsi Bengkulu telah mencapai tingkat pendapatan perkapita yang signifikan dalam GNI perkapita, kontribusi PDN Maritim, kontribusi PDB manufaktur dan berbagai aspek termasuk ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, inovasi dan teknologi, serta kualitas hidup masyarakat Religius: Setiap warga Bengkulu memiliki sikap dan perilaku yang taat terhadap nilai-nilai agama, toleran dan hidup rukun. Sejahtera: Terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak secara ekonomi, tingkat pendidikan yang memadai, derajat kesehatan yang baik sehingga warga Bengkulu	“Mewujudkan Kepahiang Maju, Berdaya saing dan Berkelanjutan” Maju, berarti bahwa Kabupaten Kepahiang yang memiliki PAD yang meningkat, kemandirian pangan, petani yang sejahtera, UMKM yang maju serta turunnya pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan. Berdaya saing, berarti bahwa Kabupaten Kepahiang yang memiliki sumber daya manusia, kesejahteraan sosial dan keluarga yang berkualitas, infrastruktur yang memadai dan berkualitas serta tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas. Berkelanjutan, berarti bahwa Kabupaten Kepahiang yang memiliki lingkungan hidup yang



	dapat hidup layak secara fisik maupun non fisik. Berkelanjutan: Upaya yang terencana dalam memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi untuk menciptakan warga provinsi Bengkulu yang bahagia.	berkualitas dan resiliensi kebencanaan yang kuat.

3.2. MISI

Untuk mewujudkan visi “Mewujudkan Kepahiang Maju, Berdaya saing dan Berkelanjutan” dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia dan Penguatan Kohesivitas Sosial untuk Mewujudkan Masyarakat Madani yang Berakhlak, Berbudaya dan Berdaya Saing.
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Fondasi Perekonomian Daerah dengan Memaksimalkan SDA Berbasis Potensi Unggulan dan Karakteristik Daerah.
3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Prima.
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Air dan Pangan serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.
5. Mewujudkan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis serta Penguatan Konektivitas Wilayah yang Memadai, Berkualitas dan Berkelanjutan.

Misi Kabupaten Kepahiang telah disinkronkan dengan misi RPJMD Provinsi Bengkulu 2025-2029 dan misi RPJMN 2025-2029 sebagai berikut:



Tabel 3.2 Keselarasan Misi RPJMN 2025-2029, Misi RPJMD Provinsi Bengkulu 2025-2029 dan Misi RPJMD Kabupaten Kepahiang 2025-2029

Misi RPJMN 2025-2029	Misi RPJMD Provinsi Bengkulu 2025-2029	Misi RPJMD Kabupaten Kepahiang 2025-2029
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru. (PN 2)	○ Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, akuntabel dengan membangun sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, berbudaya, profesional serta religious. (Misi 1) ○ Menciptakan keselarasan pembangunan ekonomi - Menciptakan keselarasan pembangunan ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata dan pertambangan dengan mengutamakan hilirisasi yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan. (Misi 4)	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, ketahanan air dan pangan serta resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. (Misi 4)
Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. (PN3)	Mempercepat ketersediaan infrastruktur dasar dan strategis serta konektivitas wilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Misi 2)	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui penguatan fondasi perekonomian daerah dengan memaksimalkan SDA berbasis potensi unggulan dan karakteristik daerah. (Misi 2)



Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. (PN 4)	Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial dan demokratis, dengan memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan rasa aman. (Misi 3)	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan penguatan kohesivitas sosial untuk mewujudkan masyarakat madani yang berakhlak, berbudaya dan berdaya saing. (Misi 1)
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. (PN 6)	Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial dan demokratis, dengan memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan rasa aman. (Misi 3)	○Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan fondasi perekonomian daerah dengan memaksimalkan SDA berbasis potensi unggulan dan karakteristik daerah. (Misi 2) ○Mewujudkan percepatan penyediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis serta penguatan konektivitas wilayah yang memadai, berkualitas dan berkelanjutan. (Misi 5)
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. (PN 7)	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, akuntabel dengan membangun sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, berbudaya, profesional serta religius. (Misi 1)	○Mewujudkan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik prima. (Misi 3) ○Meningkatkan kesejahteraan masyarakat



		melalui penguatan fondasi perekonomian daerah dengan memaksimalkan SDA berbasis potensi unggulan dan karakteristik daerah. (Misi 2)

3.3. TUJUAN

Untuk mencapai kelima misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kepahiang maka dirumuskan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi tersebut. Perumusan tujuan adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Secara substansial, perumusan tujuan merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki titik kritis (*critical point*) dalam penyusunan RPJMD. Apabila visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tidak dijabarkan secara teknokratis kedalam tujuan, maka program Bupati dan Wakil Bupati terpilih akan mengalami kesulitan dalam operasionalisasinya kedalam sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas. Perumusan tujuan dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih juga menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode tahun yang sama. Tujuan dari RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

3.4. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan, yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, serta dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Hasil rumusan sasaran pembangunan Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029 berdasarkan misi dan tujuan dapat dilihat pada Tabel 3.3.



Tabel 3.3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Kepahiang (Misi I)

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Visi: Mewujudkan Kepahiang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan Misi I: Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia dan Penguatan Kohesivitas Sosial untuk Mewujudkan Masyarakat Madani yang Berakhlak, Berbudaya dan Berdaya Saing	Terwujudnya peningkatan kualitas pembangunan manusia dan pembangunan keluarga		Indeks Pembangunan Manusia	72,02-72,42	72,32-72,72	72,62-73,02	72,92-73,32	73,22-73,62	73,52-73,92	
		1. Tercapainya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Indeks Pembangunan Manusia	72,02-72,42	72,32-72,72	72,62-73,02	72,92-73,32	73,22-73,62	73,52-73,92	
			2. Prevalensi Stunting	17,4-13,2	14,3-10,1	11,6-7,8	8,3-6,3	6,6-3,4	3,6-0,0	
		2. Tercapainya Peningkatan Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	63:64	63:64	64:65	64:65	65:66	65:66	



Tabel 3.4 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Kepahiang (Misi II)

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Visi: Mewujudkan Kepahiang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan Misi II: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Fondasi Perekonomian Daerah dengan Memaksimalkan SDA Berbasis Potensi Unggulan dan Karakteristik Daerah	1. Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat		1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	4,1- 4,9	4,2- 5,0	4,3- 5,5	4,4- 6,0	4,5- 6,5	4,6- 7,0	
			2. Tingkat Pengangguran Terbuka	2,36- 2,33	2,34- 2,31	2,32- 2,29	2,30- 2,27	2,28- 2,25	2,26- 2,23	
		Tercapainya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	1. PDRB Per Kapita	42,47- 45,02	44,02- 47,72	46,76- 50,59	49,59- 53,62	52,62- 56,84	55,84- 60,25	
			2. Tingkat Kemiskinan	12,90- 10,32	10,32- 9,82	9,82- 9,32	9,32- 8,82	8,82- 8,32	8,32- 7,32	
	2. Terwujudnya Penurunan Angka Pengangguran Terbuka	Turunnya Angka Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,36- 2,33	2,32- 2,30	2,29- 2,28	2,27- 2,25	2,24- 2,21	2,23- 2,21	



Tabel 3.5 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Kepahiang (Misi III)

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Visi: Mewujudkan Kepahiang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan Misi III: Mewujudkan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Prima	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1. Tercapainya Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	62,90	64,33	65,76	67,19	68,62	70,05	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	89,11	90,12	91,00	92,30	95,00	95,00	
			Indeks SPBE	2,60	2,68	2,70	2,80	2,90	2,90	
			Indeks Kategori Keterbukaan Informasi Publik	85	87	89	90	92	92	
			Level Maturitas SPIP	3	3	3	3	3	3	
			Nilai AKIP	B	B	B	BB	BB	BB	
			Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
			Nilai Kinerja SPM	100	100	100	100	100	100	
			Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)	60	78	79	80	81	82	
		2. Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,60	2,68	2,70	2,80	2,90	2,90	



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		3. Tercapainya Peningkatan Akses Layanan Keuangan Masyarakat	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	2,96	3,01	3,05	3,10	3,15	3,17	



Tabel 3.6 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Kepahiang (Misi IV)

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Visi: Mewujudkan Kepahiang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan Misi IV: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Air dan Pangan serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	1. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup		1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,32	67,53	67,74	67,95	68,17	68,17	
			2. Indeks Risiko Bencana	89,52	88,90	88,50	88,00	87,50	87,50	
		1. Tercapainya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,32	67,53	67,74	67,95	68,17	68,17	
		2. Tercapainya Peningkatan Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	66,82	68,16	69,52	70,91	72,33	72,33	
	2. Optimalnya Penanganan Bencana	1. Tercapainya Penguatan Kelembagaan Untuk Mengurangi Resiko dan Menghadapi Bencana	Indeks Kapasitas Daerah Penanggulangan Bencana (IKD-PB)	0,72	0,78	0,80	0,81	0,83	0,83	



Tabel 3.7 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Kepahiang (Misi V)

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Visi: Mewujudkan Kepahiang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan Misi V: Mewujudkan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis serta Penguatan Konektivitas Wilayah yang Memadai, Berkualitas dan Berkelanjutan	Terwujudnya Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas	Tercapainya Peningkatan Infrastruktur yang Berkualitas	Indeks Infrastruktur Daerah	70	75	80	85	90	95	



Misi tersebut memuat 16 program prioritas Bupati yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program Pembangunan daerah, dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.8 Keselarsan Misi dengan Program Prioritas Kepala dan Wakil Kepala Daerah

Visi	Misi	Program Prioritas	Program Pembangunan Daerah
Mewujudkan Kepahiang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia dan Penguatan Kohesivitas Sosial untuk Mewujudkan Masyarakat Madani yang Berakhlak, Berbudaya dan Berdaya Saing	Revitalisasi dan Penataan Kawasan Lapangan Santoso Sebagai Ikon Pusat Kota Kepahiang	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
		Program Kegiatan Penurunan Stunting Berkelanjutan dan Target Zero Stunting di Akhir RPJMD	Program Pengelolaan Pendidikan
			Program Pengembangan Kurikulum
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			Program Pemberdayaan Sosial
			Program Rehabilitasi Sosial
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
			Program Penanganan Bencana
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga
			Program Pemenuhan Hak Anak
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		Penurunan Angka Kemiskinan dan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial



Visi	Misi	Program Prioritas	Program Pembangunan Daerah
		Kemiskinan Ekstem "0" Persen	Program Penanganan Bencana
			Program Rehabilitasi Sosial
			Program Pemberdayaan Sosial
			Program Pengelolaan Pendidikan
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Program Penempatan Tenaga Kerja
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Program Penempatan Tenaga Kerja
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
			Program Penanganan Kerawanan Pangan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air
		Revitalisasi dan Pembangunan Kawasan Wisata	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya



Visi	Misi	Program Prioritas	Program Pembangunan Daerah
	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Fondasi Perekonomian Daerah dengan Memaksimalkan SDA Berbasis Potensi Unggulan dan Karakteristik Daerah	Religius Masjid Agung dan Sekitarnya	
		Intensifikasi dan Modernisasi Pengelolaan dan Pengembangan Sektor Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		Hilirisasi dan Peningkatan Mutu Produk Unggulan Daerah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
			Program Pengembangan Ekspor
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Pro Investasi Dengan Tetap Mengedepankan UMKM	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
			Program Promosi Penanaman Modal
			Program Pelayanan Penanaman Modal
			Program Pengendalian Penanaman Modal
		Pengembangan Sektor Pariwisata Andalan dan Revitalisasi Sektor Kepariwisataaan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Program Pemasaran Pariwisata
		Menggali, Memaksimalkan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah



Visi	Misi	Program Prioritas	Program Pembangunan Daerah
		Potensi dan Memanfaatkan Peluang PAD Sebagai Sumber Pendanaan Pembangunan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
			Program Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
			Program Pengelolaan Persampahan
			Program Penataan Bangunan Gedung
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Revitalisasi Pasar Rakyat Untuk Peningkatan Sarana Prasarana Pusat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		Pengembangan Ekonomi Mikro Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Program Pengembangan Bantuan Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil Mikro	Program Pengembangan UMKM
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi



Visi	Misi	Program Prioritas	Program Pembangunan Daerah
	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Prima	Penyelenggaraan Program Pelayanan Kolaboratif Menuju Layanan yang Prima, Mudah, Cepat dan Gratis	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
			Program Kepegawaian Daerah
			Program Pendaftaran Penduduk
			Program Pencatatan Sipil
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
			Program Penyelenggaraan Pengawasan
			Program Penanggulangan Bencana
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
			Program Pelayanan Penanaman Modal
	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Air dan Pangan serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan dan Optimalisasi Sektor Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
		Optimalisasi Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
	Mewujudkan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Dasar dan	Peningkatan Infrastruktur Dasar Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Program Pengelolaan Pendidikan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat



Visi	Misi	Program Prioritas	Program Pembangunan Daerah
	Infrastruktur Strategis serta Penguatan Konektivitas Wilayah yang Memadai, Berkualitas dan Berkelanjutan	Melanjutkan Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Untuk Konektivitas Wilayah Sehingga Mendukung Pertumbuhan Sektor Perekonomian	Program Penyelenggaraan Jalan

3.5. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah merupakan langkah yang penting untuk menerjemahkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD ke dalam program-program pembangunan daerah sehingga tujuan dan sasaran RPJMD dapat dicapai secara terukur selama 5 (lima) tahun ke depan.

3.5.1. Strategi

Secara substansial, strategi pembangunan jangka menengah merupakan cara untuk mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah suatu daerah. Secara keseluruhan, strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel-tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Kepahiang (Misi 1)

Visi: Mewujudkan Kepahiang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan			
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia dan Penguatan Kohesivitas Sosial untuk Mewujudkan Masyarakat Madani yang Berakhlak,	1. Terwujudnya peningkatan derajat kualitas pembangunan manusia dan pembangunan keluarga	1. Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia	1. Penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP) dan peningkatan pelayanan kesehatan siklus hidup sesuai standar; 2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan; 3. Peningkatan pemanfaatan sistem informasi kesehatan; 4. Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan; 5. Pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga medis dan tenaga kesehatan;



Visi: Mewujudkan Kepahiang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan			
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
Berbudaya dan Berdaya Saing			6. Pemenuhan sarana dan prasana sekolah; 7. Penambahan tenaga pengawas sekolah dan pemenuhan sertifikasi guru; 8. Pemberian beasiswa dan peralatan sekolah kepada peserta didik.
	2. Tercapainya peningkatan kualitas keluarga	2. Tercapainya peningkatan kualitas keluarga	1. Pencegahan pernikahan anak; 2. Peningkatan kapasitas perempuan secara politik, sosial dan budaya; 3. Peningkatan intensitas komunikasi, informasi dan edukasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 4. Peningkatan kualitas keluarga, kesetaraan gender dan perlindungan anak; 5. Pemenuhan jumlah SDM yang memiliki keahlian dalam perlindungan perempuan dan anak.

Tabel 3.10 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Kepahiang (Misi 2)

Visi: Mewujudkan Kepahiang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan			
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Fondasi Perekonomian Daerah dengan Memaksimalkan SDA Berbasis Potensi Unggulan dan Karakteristik Daerah	1. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat	1. Tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat	1. Perluasan cakupan layanan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial 2. Peningkatan pendampingan administrasi koperasi; 3. Penambahan dan peningkatan SDM penyuluh/pengawas koperasi; 4. Peningkatan kualitas pendataan UMKM; 5. Peningkatan promosi usaha, kerjasama dan kemitraan; 6. Peningkatan intensitas pembinaan dan pelatihan pelaku UMKM; 7. Peningkatan kerja sama dan kemitraan lintas pelaku; 8. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana pertanian; 9. Pelaksanaan re-planting komoditas kopi;



Visi: Mewujudkan Kepahiang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan			
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
			10. Pengembangan tanaman hortikultura (bawang merah dan cabe); 11. Penerapan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) dan teknologi perikanan ramah lingkungan; 12. Peningkatan kapasitas pembudidaya Ikan dengan penerbitan sertifikat CBIB; 13. Penyiapan mitigasi dalam budidaya perikanan; 14. Pengadaan dan pemberian obat-obatan kesehatan perikanan; 15. Pengembangan varietas ikan yang tahan terhadap perubahan suhu; 16. Peningkatan kolaborasi dan perluasan jaringan; 17. Pengembangan inovasi produk, penciptaan <i>branding</i> dan layanan pemasaran; 18. Pembangunan gedung dekranasda secara kolaboratif; 19. Penambahan jumlah penyuluh.
	2.Terwujudnya penurunan angka pengangguran terbuka	2.Turunnya angka pengangguran terbuka	1. Peningkatan kualitas regulasi pekerjaan dan akses permodalan; 2. Peningkatan jumlah investasi dan kerjasama dengan lembaga pelatihan; 3. Peningkatan keterampilan tenaga kerja.

Tabel 3.11 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Kepahiang (Misi 3)

Visi: Mewujudkan Kepahiang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan			
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kualitas Tata	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1. Tercapainya Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	1. Peningkatan jumlah dan kualitas SDM; 2. Pemenuhan sarana dan prasarana; 3. Percepatan penyusunan dan penguatan regulasi dan kebijakan SPBE; 4. Penguatan, pemerataan dan pengembangan infrastruktur TIK;



Visi: Mewujudkan Kepahiang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan			
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Prima			5. Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengembangan platform informasi publik; 6. Peningkatan kerjasama dengan KIM; 7. Peningkatan keamanan siber; 8. Penyempurnaan SOTK; 9. Peningkatan intensitas diseminasi kepada perangkat daerah;
		2. Tercapainya peningkatan kualitas pelaksanaan data statistik sektoral	1. Peningkatan literasi statistik para pemangku kepentingan; 2. Peningkatan ketersediaan Statistik Sektoral; 3. Peningkatan kualitas instrumen pengolahan data yang baik; 4. Pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan data serta pemerataan akses data; 5. Peningkatan keamanan sistem data dengan penerapan standar perlindungan data modern; 6. Peningkatan intensitas kerjasama antar lembaga.
		3. Tercapainya peningkatan Akses Layanan Keuangan Masyarakat	1. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung; 2. Penyempurnaan SOTK; 3. Peningkatan jumlah dan kualitas SDM; 4. Peningkatan dukungan penggunaan teknologi informasi;

Tabel 3.12 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Kepahiang (Misi 4)

Visi: Mewujudkan Kepahiang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan			
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Air dan Pangan	1. Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup	1. Tercapainya peningkatan kualitas lingkungan hidup	1. Penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis dan dokumen terkait lainnya; 2. Peningkatan edukasi masyarakat tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan; 3. Peningkatan kualitas SDM; 4. Pemenuhan sarana;



Visi: Mewujudkan Kepahiang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan			
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			5. Peningkatan kualitas taman keanekaragaman hayati; 6. Peningkatan pengawasan terhadap perizinan yang diterbitkan.
		2. Tercapainya Peningkatan Ketahanan pangan	1. Perwujudan diversifikasi produksi jenis tanaman pangan; 2. Penerapan teknologi tepat guna dalam meningkatkan produksi pangan; 3. Penguatan kelembagaan petani dan kelompok tani; 4. Perbaikan dan pengembangan infrastruktur pangan; 5. Peningkatan kerjasama dengan karantina pertanian dan perikanan; 6. Perwujudan gerakan pangan murah di masyarakat menjelang hari-hari besar; 7. Peningkatan kemudahan akses pangan.
	2. Optimalnya penanganan bencana	1. Tercapainya peningkatan kelembagaan untuk mengurangi resiko dan menghadapi bencana	1. Pemenuhan jumlah dan peningkatan kompetensi SDM; 2. Pemenuhan sarana dan prasarana; 3. Peningkatan intensitas desiminasi dan pelatihan mitigasi bencana; 4. Penyusunan peta daerah rawan bencana; 5. Penyusunan kajian dan regulasi.

Tabel 3.13 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Kepahiang (Misi 5)

Visi: Mewujudkan Kepahiang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan			
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
Mewujudkan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis serta Penguatan Konektivitas Wilayah yang	Terwujudnya peningkatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas	Tercapainya peningkatan infrastruktur yang berkualitas	1. Peningkatan kualitas SDM; 2. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi; 3. Pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan; 4. Penyiapan mitigasi perubahan iklim dan bencana alam; 5. Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi;

**Visi: Mewujudkan Kepahiang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan**

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
Memadai, Berkualitas dan Berkelanjutan			6. Pemeliharaan bendung, sarana, dan prasarana irigasi; 7. Rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak akibat bencana alam; 8. Peningkatan kolaborasi antar lembaga dan antar sektor; 9. Pemanfaatan tenaga ahli untuk pengoptimalan aplikasi SIMBG dan rumah tahan bencana; 10. Peningkatan pemanfaatan bantuan pusat untuk pembangunan gedung dan rumah layak huni; 11. Peningkatan pengetahuan masyarakat dalam penggunaan aplikasi SIMBG; 12. Pemanfaatan teknologi konstruksi untuk meminimalkan dampak bencana alam; 13. Peningkatan kolaborasi untuk pemenuhan rumah layak huni; 14. Pembangunan daerah tangkapan air baku yang baru; 15. Pembangunan SPALD di daerah yang masih melakukan DABS; 16. Pemenuhan jumlah rumah yang di layani SPALD; 17. Peningkatan unit rumah yang dibangun IPLT; 18. Penyediaan sumber air baku yang dapat diakses dengan mudah; 19. Pemeliharaan jaringan perpipaan; 20. Penyediaan sistem informasi dan pendataan perusahaan jasa konstruksi; 21. Peningkatan pelatihan dan pengawasan teknis terhadap pelaku jasa konstruksi; 22. Penyusunan regulasi pengendalian tata ruang dan turunan Perda RTRW; 23. Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR).



3.5.2. Penahapan Pembangunan RPJMD

Tabel 3.14 Penahapan Pembangunan RPJMD Tahun 2026-2030

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Membangun fondasi dan struktur transformasi pembangunan	Memperkokoh fondasi dan struktur transformasi pembangunan	Mengakselerasi fondasi dan struktur transformasi pembangunan	Mewujudkan transformasi pembangunan menuju Kabupaten Kepahiang yang maju, berdayasaing dan berkelanjutan	Kabupaten Kepahiang yang maju, berdayasaing, dan berkelanjutan

3.5.3. Program Prioritas RPJMD

Secara substansial, untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah diperlukan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program-program prioritas RPJMD. Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah menetapkan beberapa program unggulan yang menjadi prioritas dan wajib dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang sebagai berikut:



Tabel 3.15 Teknik Merumuskan Program Prioritas RPJMD

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
20252029 Visi: Mewujudkan Kepahiang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan Misi: 1. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia dan Penguatan Kohesivitas Sosial untuk Mewujudkan Masyarakat Madani yang Berakhlak, Berbudaya dan Berdaya Saing; 2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Fondasi	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pembangu n Manusia dan Pembangu n Keluarga	Tercapainya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)		
				Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)		
				Prevalensi Stunting (%)		
			Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya Efektivitas Program Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Pemerintah Daerah pada Dinas Kesehatan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dari Lintas Sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Persentase Penerbitan dan Pemenuhan Komitmen SPP- IRT Sesuai Standar (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Persentase Pangan Industri Rumah Tangga Aman dan Bermutu (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Persentase Sarana IRT yang Memenuhi Ketentuan (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Persentase Apotek dan Toko Obat yang Mampu Memelihara Persyaratan Perizinan (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
Perekonomian Daerah dengan Memaksimalkan SDA Berbasis Potensi Unggulan dan Karakteristik Daerah; 3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Prima; 4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Air dan Pangan serta Resiliensi terhadap Bencana dan			Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Atlet Berprestasi Tingkat Daerah dan Nasional (%)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif (%)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
			Meningkatnya keselarasan program perangkat daerah pengampu bidang manusia terhadap prioritas daerah	Persentase Keselarasan Program Perangkat Daerah Pengampu Bidang Pembangunan Manusia terhadap Prioritas Daerah (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Konsumsi Ikan oleh Masyarakat	Persentase Pemberdayaan Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Terfasilitasi (%)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
			Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
Perubahan Iklim; 5. Mewujudkan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis serta Penguatan Konektivitas Wilayah yang Memadai, Berkualitas dan Berkelanjutan.			Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Tertib Administrasi Pemerintah Desa (%)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	Persentase Pengendalian Izin Usaha Industri (%)	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
			Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Indeks Iklim Kebhinekaan SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Peningkatan Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Rata-Rata Kemampuan Numerasi Sekolah Dasar (SD) Berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Sekolah Pendidikan SD Kondisi Bangunan Baik (Angka)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Kelulusan (AL) SMP/MTS/Paket B (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Rata-Rata Kemampuan Literasi Sekolah Dasar (SD) Berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Rata-Rata Kemampuan Numerasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Rata-Rata Kemampuan Literasi Sekolah Dasar (SD) Berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Sekolah Pendidikan SMP Kondisi Bangunan Baik (Angka)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Indeks Iklim Kebhinekaan SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Peningkatan Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Jumlah Anak Usia 7 (Tujuh) Tahun Sampai Dengan 15 (Lima Belas) Tahun yang Berpartisipasi Pada Pendidikan Dasar (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Indeks Iklim Inklusivitas SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Jumlah Anak Usia 5 (Lima) Tahun Sampai dengan 6 (Enam) Tahun yang Berpartisipasi pada	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Persentase)		
				Indeks Iklim Kebhinekaan SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Melanjutkan (AM) SD/MI/Paket A (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Jumlah Anak Usia 5 (Lima) Tahun Sampai dengan 6 (Enam) Tahun yang Berpartisipasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Persentase)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Rata-Rata Kemampuan Literasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Indeks Iklim Kebhinekaan SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Jumlah Anak Usia 7 (Tujuh) Tahun Sampai Dengan 15 (Lima Belas) Tahun yang Berpartisipasi Pada Pendidikan Dasar (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Indeks Iklim Inklusivitas SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Jumlah Warga Negara 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan (%)		
				Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTS/Paket B (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Rata-Rata Kemampuan Numerasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Indeks Iklim Keamanan SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Indeks Iklim Inklusivitas SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Indeks Iklim Keamanan SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Rata-Rata Kemampuan Numerasi Sekolah Dasar (SD) Berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTS/Paket B (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Indeks Iklim Inklusivitas SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Indeks Iklim Keamanan SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Jumlah Warga Negara 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Rata-Rata Kemampuan Literasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Indeks Iklim Keamanan SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
			Meningkatnya pemberdayaan dan	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana	(Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR (%))		
			Meningkatnya Pembudayaan Gaya Hidup Sehat pada Masyarakat melalui Penguatan Kesadaran, Pengetahuan, dan Penerapan untuk Hidup Sehat pada Dinas Kesehatan	Persentase Posyandu Siklus Hidup yang Aktif (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya pengelolaan perikanan budidaya	Persentase Pembudidaya Ikan/Pokdakkan yang Terpenuhi Kebutuhan Pakan Ikan Sesuai Standar (%)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
				Persentase Pembudidaya Ikan/Pokdakkan yang Menggunakan Bibit Ikan Unggul (%)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
			Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pembinaan Pemuda Pada Tingkat Kabupaten (%)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
			Meningkatnya Penyediaan dan Penyebaran Informasi Publik	Persentase Penyebaran Informasi Pemerintah Daerah Melalui Media Masa (%)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase berita Pemerintah Daerah yang Terdokumentasi serta dipublikasi (%)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
			Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Persentase PPKS yang Mendapatkan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
			Meningkatnya Rumah tangga Yang Terlayani Sistem Pengolahan Air Limbah	Persentase Rumah tinggal yang Terlayani Sistem Pengolahan Air Limbah (Persentase)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
			Tercapainya Masyarakat yang Sehat Sesuai Siklus Hidup dan Layanan Kesehatan yang Berkualitas Baik, Adil dan Terjangkau pada Dinas Kesehatan.	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Fasyankes yang Melakukan Respons KLB / Wabah (PE, Pemeriksaan Laboratorium, Tatalaksana Kasus) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan Layanan Upaya Kesehatan Jiwa Masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Menyelenggarakan Skrining kolesterol Pada 80% Puskesmas (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Calon Jemaah Haji yang Mendapatkan Rekomendasi Istitohah Haji (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi Stunting (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Kepatuhan Rumah Sakit terhadap Standar Akreditasi (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Kualitas Kesehatan Lingkungan Memenuhi Syarat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Integrasi Layanan Primer (ILP) Minimal 86,67% dari Kriteria ILP (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Hipertensi dalam Pengendalian (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan Penyakit Menular Langsung (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Jumlah Komplikasi pada Ibu Bersalin (Orang)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Insiden HIV (Angka)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				DM dalam Pengendalian (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Proporsi Penduduk Dengan Aktivitas Fisik Cukup (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Penemuan Kasus TBC (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Jumlah Kematian Bayi (Orang)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Jumlah Kematian Neonatal (Orang)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tular Vektor dan Zoonotik (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) Per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19) (%)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Tercapainya Peningkatan Kualitas Keluarga		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks)		
			Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Persentase Fasilitasi Pencegahan Konflik Di Bidang Politik Dalam Negeri (%)	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif (%)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
			Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pelaksanaan Nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Fasilitasi Pencegahan Konflik Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa (%)	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
			Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat	Persentase Fasilitasi Pencegahan Konflik Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama (%)	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
			Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Fasilitasi Pencegahan Konflik Bidang Organisasi Kemasyarakatan (%)	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
			Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Tertib Administrasi Pemerintah Desa (%)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Indeks Iklim Kebhinekaan SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Peningkatan Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Rata-Rata Kemampuan Numerasi Sekolah Dasar (SD) Berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Sekolah Pendidikan SD Kondisi Bangunan Baik (Angka)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Kelulusan (AL) SMP/MTS/Paket B (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Rata-Rata Kemampuan Literasi Sekolah Dasar (SD) Berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Rata-Rata Kemampuan Numerasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Rata-Rata Kemampuan Literasi Sekolah Dasar (SD) Berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Sekolah Pendidikan SMP Kondisi Bangunan Baik (Angka)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Indeks Iklim Kebhinekaan SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Peningkatan Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Jumlah Anak Usia 7 (Tujuh) Tahun Sampai Dengan 15 (Lima Belas) Tahun yang Berpartisipasi Pada Pendidikan Dasar (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Indeks Iklim Inklusivitas SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Jumlah Anak Usia 5 (Lima) Tahun Sampai dengan 6 (Enam) Tahun yang Berpartisipasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Persentase)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Indeks Iklim Kebhinekaan SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Melanjutkan (AM) SD/MI/Paket A (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Jumlah Anak Usia 5 (Lima) Tahun Sampai dengan 6 (Enam) Tahun yang Berpartisipasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Persentase)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Rata-Rata Kemampuan Literasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Indeks Iklim Kebhinekaan SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Jumlah Anak Usia 7 (Tujuh) Tahun Sampai Dengan 15 (Lima Belas) Tahun yang Berpartisipasi Pada Pendidikan Dasar (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Indeks Iklim Inklusivitas SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Jumlah Warga Negara 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTS/Paket B (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Rata-Rata Kemampuan Numerasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Indeks Iklim Keamanan SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Indeks Iklim Inklusivitas SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Indeks Iklim Keamanan SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Rata-Rata Kemampuan Numerasi Sekolah Dasar (SD) Berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTS/Paket B (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Indeks Iklim Inklusivitas SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Indeks Iklim Keamanan SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Jumlah Warga Negara 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesenjangan (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Rata-Rata Kemampuan Literasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Indeks Iklim Keamanan SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Kapasitas Transmigran dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR (%))	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
			Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase PPKS yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
			Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang diselesaikan	Persentase Fasilitasi Pencegahan Konflik di Bidang Kwasdin dan Penanganan Konflik (%)	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
			Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang ditangani (Persentase)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Tercapainya Masyarakat yang Sehat Sesuai Siklus Hidup dan Layanan Kesehatan yang Berkualitas Baik, Adil dan Terjangkau pada Dinas Kesehatan.	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Fasyankes yang Melakukan Respons KLB / Wabah (PE, Pemeriksaan Laboratorium, Tatalaksana Kasus) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan Layanan Upaya Kesehatan Jiwa Masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Menyelenggarakan Skrining kolesterol Pada 80% Puskesmas (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Calon Jemaah Haji yang Mendapatkan Rekomendasi Istitohah Haji (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Prevalensi Stunting (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Kepatuhan Rumah Sakit terhadap Standar Akreditasi (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Kualitas Kesehatan Lingkungan Memenuhi Syarat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Integrasi Layanan Primer (ILP) Minimal 86,67% dari Kriteria ILP (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Hipertensi dalam Pengendalian (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan Penyakit Menular Langsung (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Jumlah Komplikasi pada Ibu Bersalin (Orang)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Insiden HIV (Angka)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				DM dalam Pengendalian (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Proporsi Penduduk Dengan Aktivitas Fisik Cukup (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Penemuan Kasus TBC (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Jumlah Kematian Bayi (Orang)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Jumlah Kematian Neonatal (Orang)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tular Vektor dan Zoonotik (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
			Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) Per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19) (%)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
	Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Tercapainya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat		Laju Pertumbuhan Ekonomi(%)		
				PDRB per Kapita (Rp. Juta Per Tahun)		
				Tingkat Kemiskinan (%)		



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkanya Kemudahan Berinvestasi	Persentase Tersedianya Informasi Pemberian Insentif/ Fasilitas Bidang Penanaman Modal dan Informasi Peluang Usaha Sektor Unggulan (%)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
			Meningkatkan Kualitas Hidup Dan Aksesibilitas Masyarakat	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Persentase)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
			Meningkatkan Rumah Tangga Berakses Air Bersih	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih (Persentase)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
			Meningkatkan Rumah Tangga Yang Terlayani Fasilitas Sarana Dan Prasarana Persampahan	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Fasilitas Sarana dan Prasarana Persampahan (Persentase)	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
			Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Lokasi Wisata Unggulan (%)	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
			Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (%)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Terselenggaranya Promosi Penanaman Modal (%)	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
			Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Usaha Ekraf yang Terbina (%)	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
			Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
			Meningkatnya keselarasan program perangkat daerah pengampu bidang pemerintahan terhadap prioritas daerah	Persentase Keselarasan Program Perangkat Daerah Pengampu Bidang Pemerintahan terhadap Prioritas Daerah (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya Konsumsi Ikan oleh Masyarakat	Persentase Pemberdayaan Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Terfasilitasi (%)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
			Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Tertib Administrasi Pemerintah Desa (%)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan Distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
			Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Indeks Iklim Kebhinekaan SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Peningkatan Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Rata-Rata Kemampuan Numerasi Sekolah Dasar (SD) Berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Sekolah Pendidikan SD Kondisi Bangunan Baik (Angka)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Kelulusan (AL) SMP/MTS/Paket B (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Rata-Rata Kemampuan Literasi Sekolah Dasar (SD) Berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Rata-Rata Kemampuan Numerasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Rata-Rata Kemampuan Literasi Sekolah Dasar (SD) Berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Sekolah Pendidikan SMP Kondisi Bangunan Baik (Angka)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Indeks Iklim Kebhinekaan SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Peningkatan Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Jumlah Anak Usia 7 (Tujuh) Tahun Sampai Dengan 15 (Lima Belas) Tahun yang Berpartisipasi Pada Pendidikan Dasar (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Indeks Iklim Inklusivitas SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Jumlah Anak Usia 5 (Lima) Tahun Sampai dengan 6 (Enam) Tahun yang Berpartisipasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Persentase)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Indeks Iklim Kebhinekaan SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Melanjutkan (AM) SD/MI/Paket A (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Jumlah Anak Usia 5 (Lima) Tahun Sampai dengan 6 (Enam) Tahun yang Berpartisipasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Persentase)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Rata-Rata Kemampuan Literasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Indeks Iklim Kebhinekaan SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Jumlah Anak Usia 7 (Tujuh) Tahun Sampai Dengan 15 (Lima Belas) Tahun yang Berpartisipasi Pada Pendidikan Dasar (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Indeks Iklim Inklusivitas SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Jumlah Warga Negara 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesenjangan (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTS/Paket B (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Rata-Rata Kemampuan Numerasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Indeks Iklim Keamanan SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Indeks Iklim Inklusivitas SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Indeks Iklim Keamanan SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Rata-Rata Kemampuan Numerasi Sekolah Dasar (SD) Berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTS/Paket B (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Indeks Iklim Inklusivitas SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Indeks Iklim Keamanan SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Jumlah Warga Negara 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Rata-Rata Kemampuan Literasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Indeks Iklim Keamanan SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (%)	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR (%))	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
			Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase PPKS yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
			Meningkatnya pengelolaan perikanan budidaya	Persentase Pembudidaya Ikan/Pokdakkan yang Terpenuhi Kebutuhan Pakan Ikan Sesuai Standar (%)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
				Persentase Pembudidaya Ikan/Pokdakkan yang Menggunakan Bibit Ikan Unggul (%)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
			Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (%)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
			Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (%)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
			Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Persentase PPKS yang Mendapatkan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
			Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
			Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Universal Coverage Jamsostek (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
				Persentase Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
			Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Perencanaan dan Pembangunan Industri (%)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
			Meningkatnya Rumah Tangga Yang Terlayani Drainase	Persentase Rumah tangga yang terlayani drainase (Persentase)	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
			Meningkatnya Rumah tangga Yang Terlayani Sistem Pengolahan Air Limbah	Persentase Rumah tinggal yang Terlayani Sistem Pengolahan Air Limbah (Persentase)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
			Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
			Meningkatnya Tingkat Kunjungan Wisatawan	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang ditangani (Persentase)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
			Tercapainya Masyarakat yang Sehat Sesuai Siklus Hidup dan Layanan Kesehatan yang Berkualitas Baik, Adil dan Terjangkau pada Dinas Kesehatan.	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Fasyankes yang Melakukan Respons KLB / Wabah (PE, Pemeriksaan Laboratorium, Tatalaksana Kasus) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan Layanan Upaya Kesehatan Jiwa Masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Menyelenggarakan Skrining kolesterol Pada 80% Puskesmas (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Calon Jemaah Haji yang Mendapatkan Rekomendasi Istitohah Haji (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Prevalensi Stunting (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Kepatuhan Rumah Sakit terhadap Standar Akreditasi (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Kualitas Kesehatan Lingkungan Memenuhi Syarat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Integrasi Layanan Primer (ILP) Minimal 86,67% dari Kriteria ILP (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Hipertensi dalam Pengendalian (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan Penyakit Menular Langsung (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Jumlah Komplikasi pada Ibu Bersalin (Orang)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Insiden HIV (Angka)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				DM dalam Pengendalian (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Proporsi Penduduk Dengan Aktivitas Fisik Cukup (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Penemuan Kasus TBC (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Jumlah Kematian Bayi (Orang)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Jumlah Kematian Neonatal (Orang)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tular Vektor dan Zoonotik (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (%)	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
	Terwujudnya Penurunan Angka Pengangguran Terbuka	Turunnya Angka Pengangguran Terbuka		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
				Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
			Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
			Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Universal Coverage Jamsostek (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
				Persentase Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)		
		Tercapainya Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah		Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)		
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Angka)		
				Indeks Kategori Keterbukaan Informasi Publik (Angka)		
				Nilai Indeks Standar Pelayanan Minimal (Nilai)		
				Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)		
				Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)		
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)		
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai)		
				Meningatnya keselarasan program perangkat daerah pengampu bidang sumber daya dalam terhadap prioritas daerah	Persentase Keselarasan Program Perangkat Daerah Pengampu Bidang SDA Terhadap Prioritas Daerah (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatkan komitmen OPD dan perangkat pemerintah dalam memperkuat pengendalian internal	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Perangkat Daerah (Nilai)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
			Meningkatkan komitmen OPD dan perangkat pemerintah dalam memperkuat pengendalian internal	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Eksternal yang Ditindaklanjuti (%)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
			Meningkatkan komitmen OPD dan perangkat pemerintah dalam memperkuat pengendalian internal	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti (%)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
			Meningkatkan komitmen OPD dan perangkat pemerintah dalam memperkuat pengendalian internal	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
			Meningkatkan pengawasan dan pendampingan OPD dan perangkat pemerintah daerah	Nilai Sakip OPD yang Dinilai Inspektorat Daerah (Nilai)	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatkan peran dan pelayanan APIP terhadap pengawasan atas ketaatan OPD	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti (%)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
				Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Eksternal yang Ditindaklanjuti (%)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatkan peran dan pelayanan APIP terhadap pengawasan atas kinerja OPD	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
			Meningkatkan peran dan pelayanan APIP terhadap pengawasan atas kinerja OPD	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti (%)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
				Nilai Evaluasi SAKIP Rata-Rata Organisasi Perangkat Daerah (Nilai)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
				Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Eksternal yang Ditindaklanjuti (%)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
			Meningkatkan peran dan pelayanan APIP terhadap pengawasan atas kinerja OPD	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Perangkat Daerah (Nilai)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
			Meningkatkan Sumber Daya manusia (SDM).	Nilai Sakip OPD yang Dinilai Inspektorat Daerah (Nilai)	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Administrasi Tata Kelola Bagian Hukum	Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya Administrasi Tata Kelola Bagian Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Tepat Waktu (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya Administrasi Tata Kelola Bagian Pemerintahan	Nilai LPPD (Nilai)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Nilai SPM (Nilai)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya aksesibilitas dan transparansi data	Nilai Sakip OPD yang Dinilai Inspektorat Daerah (Nilai)	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Berbasis Sumber Daya Lokal (%)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
				Persentase Ketersediaan Pangan Utama (Beras) (%)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya keselarasan indikator sasaran prioritas daerah (RKPD) terhadap indikator kinerja utama(IKU) perangkat daerah dalam pelaksanaannya di tahun berjalan (tahun n)	Persentase Keselarasan Indikator Sasaran Prioritas Daerah (RKPD) terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dalam Pelaksanaannya di Tahun Berjalan (Tahun n) (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya keselarasan kerangka ekosistem riset inovasi daerah terhadap potensi dan isu strategi daerah	Persentase Keselarasan Kerangka Ekosistem Riset Inovasi Daerah terhadap Potensi dan Isu Strategis Daerah (%)	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Meningkatnya keselarasan program perangkat daerah pengampu bidang kewilayahan terhadap prioritas daerah	Persentase Keselarasan Program Perangkat Daerah Pengampu Bidang Kewilayahan terhadap Prioritas Daerah (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya keselarasan program perangkat daerah pengampu bidang manusia terhadap prioritas daerah	Persentase Keselarasan Program Perangkat Daerah Pengampu Bidang Pembangunan Manusia terhadap Prioritas Daerah (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya keselarasan program perangkat daerah pengampu bidang pemerintahan terhadap prioritas daerah	Persentase Keselarasan Program Perangkat Daerah Pengampu Bidang Pemerintahan terhadap Prioritas Daerah (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya keselarasan program perangkat daerah pengampu bidang pengampu infrastuktur	Persentase Keselarasan Program Perangkat Daerah Pengampu Bidang Infrastruktur terhadap Prioritas Daerah (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			terhadap prioritas daerah			
			Meningkatnya keselarasan program perangkat daerah pengampu bidang perekonomian terhadap prioritas daerah	Persentase Keselarasan Program Perangkat Daerah Pengampu Bidang Perekonomian terhadap Prioritas Daerah (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Ketersediaan Kebijakan Internal Tertakit Tata Kelola SPBE, serta Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
			Meningkatnya Kompetensi dan Kualifikasi ASN	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
				Persentase Keterisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Pengawas sesuai Kualifikasi dan Kompetensi (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Tertib Administrasi Pemerintah Desa (%)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Bagian Pembangunan	Persentase Program yang Selesai Tepat Waktu dan Tepat Mutu (%)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Jumlah Pengadaan Barang/Jasa yang Terealisasi (%)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan di Bagian Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Pembinaan BUMD, BLUD serta Sumber Daya Alam (%)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
				Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) (Indeks)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Terpenuhinya Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola SPBE serta Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (%)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
				Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama (%)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
			Meningkatnya pengelolaan perikanan budidaya	Persentase Pembudidaya Ikan/Pokdakkan yang Terpenuhi Kebutuhan Pakan Ikan Sesuai Standar (%)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
				Persentase Pembudidaya Ikan/Pokdakkan yang Menggunakan Bibit Ikan Unggul (%)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
			Meningkatnya Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah dengan Predikat Baik dan Sangat Baik (Permendagri No. 86 Tahun 2017) (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Penyediaan dan Penyebaran Informasi Publik	Persentase Penyebaran Informasi Pemerintah Daerah Melalui Media Masa (%)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
				Persentase berita Pemerintah Daerah yang Terdokumentasi serta dipublikasi (%)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Mendukung Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Persentase Tingkat Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi	Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Inovasi (%)	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan Sesuai SOP (%)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya rekomendasi yang disampaikan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan (n+)	Persentase Rekomendasi yang disampaikan sebagai Dasar dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan (n+) (%)	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Meningkatnya Tata Kelola Anggaran, Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Persentase Arsip OPD, Lembaga Pendidikan, ORMAS, ORPOL, dan	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Lembaga Pemerintah Lainnya yang Terkelola (%)		
			Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Tingkat Akurasi Data Barang Milik Daerah (%)	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Badan Keuangan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terlaksana dengan Baik (%)	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Anggaran dan Kinerja (%)	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Nilai Sakip OPD (Nilai)	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaannya Penunjang Urusan Pemerintahan pada BAPPEDA (%)	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Nilai Sakip OPD (Nilai)	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Bagian Organisasi	Nilai Sakip OPD (Nilai)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Bagian Protokol	Persentase Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan (%)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Bagian Umum	Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Fasilitasi Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (%)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Sakip OPD (Nilai)	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan pada Dinas Kesehatan	Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase Kelengkapan Dokumen Kepegawaian, Keuangan dan Administrasi Umum (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Daerah Kabupaten/Kota (%)	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Dinas Lingkungan Hidup	Persentase Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Nilai Sakip OPD (Nilai)	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Dokumen Perencanaan Anggaran dan Kinerja (%)	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terlaksana dengan Baik (%)	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase Dokumen Anggaran dan Kinerja Pegawai (%)	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase Dokumen Anggaran dan Kinerja Pegawai (%)	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	Nilai Sakip OPD (Nilai)	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Daerah Kabupaten/Kota (%)	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Dinas Perhubungan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai)	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Nilai Sakip OPD (Nilai)	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Nilai Sakip OPD (Nilai)	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Dinas Pertanian	Nilai Sakip OPD (Nilai)	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Dinas Sosial	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terlaksana dengan Baik (%)	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terlaksana dengan Baik (%)	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Nilai Sakip OPD (Nilai)	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Daerah Kabupaten/Kota (%)	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Sekretariat Daerah	Persentase Kelengkapan Dokumen Kepegawaian, Keuangan dan Administrasi Umum (%)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Sekretariat DPRD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Urusan Pemerintahan Daerah (%)		
			Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Nilai Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terlaksana dengan Baik (%)	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Nilai Sakip OPD (Nilai)	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Tercapainya Masyarakat yang Sehat Sesuai Siklus Hidup dan Layanan Kesehatan yang Berkualitas Baik, Adil dan Terjangkau pada Dinas Kesehatan.	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Fasyankes yang Melakukan Respons KLB / Wabah (PE, Pemeriksaan Laboratorium, Tatalaksana Kasus) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan Layanan Upaya Kesehatan Jiwa Masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Menyelenggarakan Skrining kolesterol Pada 80% Puskesmas (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Calon Jemaah Haji yang Mendapatkan Rekomendasi Istitohah Haji (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi Stunting (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Kepatuhan Rumah Sakit terhadap Standar Akreditasi (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Kualitas Kesehatan Lingkungan Memenuhi Syarat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Integrasi Layanan Primer (ILP) Minimal 86,67% dari Kriteria ILP (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Hipertensi dalam Pengendalian (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan Penyakit Menular Langsung (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Jumlah Komplikasi pada Ibu Bersalin (Orang)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Insiden HIV (Angka)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				DM dalam Pengendalian (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Proporsi Penduduk Dengan Aktivitas Fisik Cukup (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Penemuan Kasus TBC (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Jumlah Kematian Bayi (Orang)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Jumlah Kematian Neonatal (Orang)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tular Vektor dan Zoonotik (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Tercapainya Nilai Evaluasi Sakip dengan Kategori BB (70-80)	Nilai Sakip OPD (Indeks)	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Terjaminnya penunjang urusan satuan kerja perangkat daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Data Statistik Sektoral		Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)		
			Meningkatnya Kompetensi dan Kualifikasi ASN	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
				Persentase Keterisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Pengawas sesuai Kualifikasi dan Kompetensi (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Terpenuhinya Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola SPBE serta Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (%)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
				Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama (%)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
			Meningkatnya pengelolaan perikanan budidaya	Persentase Pembudidaya Ikan/Pokdakkan yang Terpenuhi Kebutuhan Pakan Ikan Sesuai Standar (%)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
				Persentase Pembudidaya Ikan/Pokdakkan yang Menggunakan Bibit Ikan Unggul (%)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
			Meningkatnya Pengembangan Kompetensi Manajerial ASN	Persentase ASN yang Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Manajerial (%)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Meningkatnya Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah dengan Predikat Baik dan Sangat Baik (Permendagri No. 86 Tahun 2017) (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Tingkat Akurasi Data Barang Milik Daerah (%)	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan pada Badan	Persentase Ketersediaannya Penunjang Urusan	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Pemerintahan pada BAPPEDA (%)		
				Nilai Sakip OPD (Nilai)	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan pada Dinas Kesehatan	Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase Kelengkapan Dokumen Kepegawaian, Keuangan dan Administrasi Umum (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase Dokumen Anggaran dan Kinerja Pegawai (%)	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase Dokumen Anggaran dan Kinerja Pegawai (%)	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Dinas Perhubungan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai)	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Dinas Pertanian	Nilai Sakip OPD (Nilai)	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya Tingkat Kunjungan Wisatawan	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
			Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Terjaminnya penunjang urusan satuan kerja perangkat daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral Sesuai Standar Data	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral Sesuai Standar (%)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
		Tercapainya Peningkatan Akses Layanan Keuangan Masyarakat		Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)		
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
			Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Lokasi Wisata Unggulan (%)	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
			Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya Kapasitas SDM	Persentase Peningkatan Usaha Ekraf yang Terbina (%)	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
			Meningkatnya keselarasan program perangkat daerah pengampu bidang perekonomian terhadap prioritas daerah	Persentase Keselarasan Program Perangkat Daerah Pengampu Bidang Perekonomian terhadap Prioritas Daerah (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase KSP/USP yang Sehat (%)	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
			Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
				Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
				Perekaman KTP elektronik (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Tertib Administrasi Pemerintah Desa (%)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
			Meningkatnya Pekerja Indonesia yang Terlindungi	Persentase Hubungan Industrial (%)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
			Meningkatnya pengelolaan perikanan budidaya	Persentase Pembudidaya Ikan/Pokdakkan yang Terpenuhi Kebutuhan Pakan Ikan Sesuai Standar (%)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
				Persentase Pembudidaya Ikan/Pokdakkan yang	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Menggunakan Bibit Ikan Unggul (%)		
			Meningkatnya Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah dengan Predikat Baik dan Sangat Baik (Permendagri No. 86 Tahun 2017) (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Pemberdayaan UKM (%)	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
			Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Persentase Arsip OPD, Lembaga Pendidikan, ORMAS, ORPOL, dan Lembaga Pemerintah Lainnya yang Terkelola (%)	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase Dokumen Anggaran dan Kinerja Pegawai (%)	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase Dokumen Anggaran dan Kinerja Pegawai (%)	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
	Terwujudnya Peningkatan			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)(poin)		



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
	Kualitas Lingkungan Hidup	Tercapainya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Angka)		
			Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan Untuk Memitigasi Dampak KRP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup (%)	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Sekolah, Organisasi dan/atau Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan (%)	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan Hidup (%)	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
			Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Desa/Kelurahan yang Menerima Penghargaan Lingkungan Hidup (%)	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Terkelolanya Ruang Terbuka Hijau (%)	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Indeks Iklim Kebhinekaan SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Peningkatan Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Rata-Rata Kemampuan Numerasi Sekolah Dasar (SD) Berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Sekolah Pendidikan SD Kondisi Bangunan Baik (Angka)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Kelulusan (AL) SMP/MTS/Paket B (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Rata-Rata Kemampuan Literasi Sekolah Dasar (SD) Berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Rata-Rata Kemampuan Numerasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Rata-Rata Kemampuan Literasi Sekolah Dasar (SD) Berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Sekolah Pendidikan SMP Kondisi Bangunan Baik (Angka)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Indeks Iklim Kebhinekaan SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Peningkatan Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Jumlah Anak Usia 7 (Tujuh) Tahun Sampai Dengan 15 (Lima Belas) Tahun yang Berpartisipasi Pada Pendidikan Dasar (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Indeks Iklim Inklusivitas SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Jumlah Anak Usia 5 (Lima) Tahun Sampai dengan 6 (Enam) Tahun yang Berpartisipasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Persentase)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Indeks Iklim Kebhinekaan SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Melanjutkan (AM) SD/MI/Paket A (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Jumlah Anak Usia 5 (Lima) Tahun Sampai dengan 6 (Enam) Tahun yang Berpartisipasi pada	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Persentase)		
				Rata-Rata Kemampuan Literasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Indeks Iklim Kebhinekaan SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Jumlah Anak Usia 7 (Tujuh) Tahun Sampai Dengan 15 (Lima Belas) Tahun yang Berpartisipasi Pada Pendidikan Dasar (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Indeks Iklim Inklusivitas SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Jumlah Warga Negara 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesenjangan (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTS/Paket B (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Rata-Rata Kemampuan Numerasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Indeks Iklim Keamanan SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Indeks Iklim Inklusivitas SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Indeks Iklim Keamanan SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Rata-Rata Kemampuan Numerasi Sekolah Dasar (SD) Berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTS/Paket B (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Indeks Iklim Inklusivitas SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Indeks Iklim Keamanan SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Jumlah Warga Negara 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesenjangan (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Rata-Rata Kemampuan Literasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Indeks Iklim Keamanan SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Kegiatan/Usaha yang Mendapatkan Rekomendasi Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (%)	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
			Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana	Persentase Sengketa Lingkungan yang terselesaikan (%)	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Persentase Jumlah Sampah yang Terkelola (%)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
			Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (%)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Tercapainya Peningkatan Ketahanan Pangan		Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)		
			Meningkatkan Kinerja Dan Keberlanjutan Pengelolaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase Penambahan Luas Area yang Terlayani Infrastruktur Sumber Daya Air (Persentase)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
			Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Berbasis Sumber Daya Lokal (%)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
				Persentase Ketersediaan Pangan Utama (Beras) (%)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Efektivitas Program Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Pemerintah Daerah pada Dinas Kesehatan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dari Lintas Sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Persentase Penerbitan dan Pemenuhan Komitmen SPP-IRT Sesuai Standar (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Persentase Pangan Industri Rumah Tangga Aman dan Bermutu (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase Sarana IRTTP yang Memenuhi Ketentuan (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Persentase Apotek dan Toko Obat yang Mampu Memelihara Persyaratan Perizinan (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
			Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Persentase PPKS yang Mendapatkan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Indeks Risiko Bencana (Indeks)		
	Optimalnya Penanganan Bencana	Tercapainya Penguatan Kelembagaan untuk Mengurangi Resiko dan Menghadapi Bencana		Indeks Kapasitas Daerah (Angka)		
			Meningkatnya Indeks Kapasitas Daerah	Persentase Keterpenuhan Capaian Penguatan Kapasitas Daerah (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			MENINGKATNYA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
				Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (Menit)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
			Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
				Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
	Terwujudnya Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas	Tercapainya Peningkatan Infrastruktur yang Berkualitas		Indeks Infrastruktur Daerah (Indeks)		
				Indeks Infrastruktur Daerah (Indeks)		
			Meningkatkan Kinerja Dan Keberlanjutan Pengelolaan	Persentase Penambahan Luas Area yang Terlayani Infrastruktur Sumber Daya Air (Persentase)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Infrastruktur Sumber Daya Air			
			Meningkatkan Rumah Tangga Berakses Air Bersih	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih (Persentase)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
			Meningkatkan Rumah Tangga Yang Terlayani Fasilitas Sarana Dan Prasarana Persampahan	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Fasilitas Sarana dan Prasarana Persampahan (Persentase)	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	
			Meningkatnya Akses Dan Kualitas Infrastruktur Jalan	Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap (Persentase)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
			Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (%)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya Fasilitas Perkantoran Dan Gedung Daerah	Persentase Ketercukupan Bangunan Gedung Kantor (Persentase)	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota (Nilai)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten/Kota (Persentase)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Rasio konektivitas kabupaten/kota (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Indeks Iklim Kebhinekaan SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Peningkatan Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Rata-Rata Kemampuan Numerasi Sekolah Dasar (SD) Berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Sekolah Pendidikan SD Kondisi Bangunan Baik (Angka)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Kelulusan (AL) SMP/MTS/Paket B (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Rata-Rata Kemampuan Literasi Sekolah Dasar (SD) Berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Rata-Rata Kemampuan Numerasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Rata-Rata Kemampuan Literasi Sekolah Dasar (SD) Berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Sekolah Pendidikan SMP Kondisi Bangunan Baik (Angka)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Indeks Iklim Kebhinekaan SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Peningkatan Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Jumlah Anak Usia 7 (Tujuh) Tahun Sampai Dengan 15 (Lima Belas) Tahun yang Berpartisipasi Pada Pendidikan Dasar (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Indeks Iklim Inklusivitas SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Jumlah Anak Usia 5 (Lima) Tahun Sampai dengan 6 (Enam) Tahun yang Berpartisipasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Persentase)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Indeks Iklim Kebhinekaan SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Melanjutkan (AM) SD/MI/Paket A (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Jumlah Anak Usia 5 (Lima) Tahun Sampai dengan 6 (Enam) Tahun yang Berpartisipasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Persentase)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Rata-Rata Kemampuan Literasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Indeks Iklim Kebhinekaan SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Jumlah Anak Usia 7 (Tujuh) Tahun Sampai Dengan 15 (Lima Belas) Tahun yang Berpartisipasi Pada Pendidikan Dasar (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Indeks Iklim Inklusivitas SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Jumlah Warga Negara 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTS/Paket B (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Rata-Rata Kemampuan Numerasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Indeks Iklim Keamanan SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Indeks Iklim Inklusivitas SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Indeks Iklim Keamanan SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Rata-Rata Kemampuan Numerasi Sekolah Dasar (SD) Berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTS/Paket B (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Indeks Iklim Inklusivitas SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Indeks Iklim Keamanan SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Jumlah Warga Negara 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesenjangan (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Rata-Rata Kemampuan Literasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Indeks Iklim Keamanan SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya Rumah Tangga Yang Terlayani Drainase	Persentase Rumah tangga yang terlayani drainase (Persentase)	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
			Meningkatnya Rumah tangga Yang Terlayani Sistem Pengolahan Air Limbah	Persentase Rumah tinggal yang Terlayani Sistem Pengolahan Air Limbah (Persentase)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Dinas	Nilai Sakip OPD (Nilai)	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Perdagangan Koperasi dan UKM	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Daerah Kabupaten/Kota (%)	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Tercapainya Masyarakat yang Sehat Sesuai Siklus Hidup dan Layanan Kesehatan yang Berkualitas Baik, Adil dan Terjangkau pada Dinas Kesehatan.	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Fasyankes yang Melakukan Respons KLB / Wabah (PE, Pemeriksaan Laboratorium, Tatalaksana Kasus) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan Layanan Upaya Kesehatan Jiwa Masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Menyelenggarakan Skrining kolesterol Pada 80% Puskesmas (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Calon Jemaah Haji yang Mendapatkan Rekomendasi Istitohah Haji (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Prevalensi Stunting (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Kepatuhan Rumah Sakit terhadap Standar Akreditasi (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Kualitas Kesehatan Lingkungan Memenuhi Syarat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Integrasi Layanan Primer (ILP) Minimal 86,67% dari Kriteria ILP (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Hipertensi dalam Pengendalian (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan Penyakit Menular Langsung (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Jumlah Komplikasi pada Ibu Bersalin (Orang)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Insiden HIV (Angka)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				DM dalam Pengendalian (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Proporsi Penduduk Dengan Aktivitas Fisik Cukup (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Penemuan Kasus TBC (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Jumlah Kematian Bayi (Orang)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Jumlah Kematian Neonatal (Orang)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tular Vektor dan Zoonotik (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Terlaksananya Pengembangan Perumahan Di Lokasi Rawan Bencana Dan Relokasi Akibat Program Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang dibangun dan direhabilitasi (Persentase)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	



3.5.4. Arah Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan, perlu ditetapkan arah kebijakan yang menjadi acuan perencanaan pembangunan tahunan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki sistem serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam RPJMD diperlukan penyusunan arah kebijakan tahunan untuk memandu penerjemahan rencana pembangunan jangka menengah kedalam pelaksanaan per tahunnya. Oleh karena itu, arah kebijakan tahunan ini merupakan tahapan yang akan diwujudkan per tahunnya selama 5 (lima) tahun periode RPJMD. Arah kebijakan tahunan pembangunan Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029:
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Kepahiang (Misi 1)

Visi: Mewujudkan Kepahiang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan				
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia dan Penguatan Kohesivitas Sosial untuk Mewujudkan Masyarakat Madani yang Berakhlak, Berbudaya dan Berdaya Saing	1. Terwujudnya peningkatan derajat kualitas pembangunan manusia dan pembangunan keluarga	1. Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia	1. Penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP) dan peningkatan pelayanan kesehatan siklus hidup sesuai standar; 2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan; 3. Peningkatan pemanfaatan sistem informasi kesehatan; 4. Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan; 5. Pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga medis dan tenaga kesehatan;	1. Peningkatan penyebaran informasi kesehatan; 2. Peningkatan pengetahuan tentang gizi seimbang dan sosial ekonomi masyarakat yang rendah; 3. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap penyakit menular dan tidak menular; 4. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana kesehatan;



Visi: Mewujudkan Kepahiang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan				
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			6. Pemenuhan sarana dan prasana sekolah; 7. Penambahan tenaga pengawas sekolah dan pemenuhan sertifikasi guru; 8. Pemberian beasiswa dan peralatan sekolah kepada peserta didik.	5. Peningkatan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan; 6. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana pendidikan; 7. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan;
		2. Tercapainya peningkatan kualitas keluarga	1. Pencegahan pernikahan anak; 2. Peningkatan kapasitas perempuan secara politik, sosial dan budaya; 3. Peningkatan intensitas komunikasi, informasi dan edukasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 4. Peningkatan kualitas keluarga, kesetaraan gender dan perlindungan anak; 5. Pemenuhan jumlah SDM yang memiliki keahlian dalam	1. Peningkatan promosi dan informasi tentang manfaat pembinaan keluarga berencana ; 2. Optimalisasi kegiatan peningkatan kemandirian ekonomi keluarga.



Visi: Mewujudkan Kepahiang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan				
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			perlindungan perempuan dan anak.	

Tabel 3.17 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Kepahiang (Misi 2)

Visi: Mewujudkan Kepahiang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan				
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Fondasi Perekonomian Daerah dengan Memaksimalkan SDA Berbasis Potensi Unggulan dan Karakteristik Daerah	1. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat	1. Tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat	1. Perluasan cakupan layanan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial	1. Peningkatan layanan dan rujukan rehabilitasi serta pemberdayaan sosial untuk PMKS;
			2. Peningkatan pendampingan administrasi koperasi;	2. Optimalisasi layanan perlindungan dan jaminan
			3. Penambahan dan peningkatan SDM penyuluh/ pengawas koperasi;	3. Penyusunan regulasi perizinan pembentukan koperasi;
			4. Peningkatan kualitas pendataan UMKM;	4. Peningkatan jumlah dan kompetensi tenaga penyuluh koperasi;
			5. Peningkatan promosi usaha, kerjasama dan kemitraan;	
			6. Peningkatan intensitas pembinaan dan	5. Peningkatan kualitas sarana dan



Visi: Mewujudkan Kepahiang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan				
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			pelatihan pelaku UMKM; 7. Peningkatan kerja sama dan kemitraan lintas pelaku;	prasarana UMKM; 6. Pemenuhan tenaga panera; 7. Pembentukan holding UMKM;
			8. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana pertanian; 9. Pelaksanaan re-planting komoditas kopi; 10. Pengembangan tanaman hortikultura (bawang merah dan cabe);	8. Pembangunan jalan usaha tani dan jaringan irigasi; 9. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana pertanian;
			11. Penerapan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) dan teknologi perikanan ramah lingkungan; 12. Peningkatan kapasitas pembudidaya Ikan dengan penerbitan sertifikat CBIB; 13. Penyiapan mitigasi dalam budidaya perikanan; 14. Pengadaan dan pemberian obat-obatan kesehatan perikanan; 15. Pengembangan varietas ikan yang	10. Peningkatan ketersediaan benih ikan unggul dan pakan ikan; 11. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana perikanan dan pengolahan hasil perikanan; 12. Peningkatan pengolahan hasil perikanan dan



Visi: Mewujudkan Kepahiang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan				
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			tahan terhadap perubahan suhu;	pemasarannya;
			16. Peningkatan kolaborasi dan perluasan jaringan; 17. Pengembangan inovasi produk, penciptaan branding dan layanan pemasaran; 18. Pembangunan gedung dekranasda secara kolaboratif; 19. Penambahan jumlah penyuluh.	13. Peningkatan kualitas SDM IKM; 14. Peningkatan desiminasi kepada pelaku IKM; 15. Peningkatan daya saing produk IKM; 16. Peningkatan pemasaran produk IKM.
	2.Terwujudnya penurunan angka pengangguran terbuka	Turunnya angka pengangguran terbuka	1. Peningkatan kualitas regulasi pekerjaan dan akses permodalan; 2. Peningkatan jumlah investasi dan kerjasama dengan lembaga pelatihan; 3. Peningkatan keterampilan tenaga kerja.	1.Peningkatan kualitas Pendidikan dan pelatihan vokasi pencari kerja; 2.Peningkatan desiminasi kepada pencari kerja dan jaminan sosial pekerja; 3.Peningkatan jumlah sarana dan prasaran lembaga pelatihan kerja.



Tabel 3.18 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Kepahiang (Misi 3)

Visi: Mewujudkan Kepahiang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan				
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Prima	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1.Tercapainya Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	1. Peningkatan jumlah dan kualitas SDM;	1. Peningkatan desiminasi perizinan dan pengaduan perizinan;
			2. Penambahan jumlah sarana dan prasarana;	2. Percepatan rekomendasi tim teknis.
			3. Percepatan penyusunan dan penguatan regulasi dan kebijakan SPBE;	1. Pemenuhan regulasi SPBE dan optimalisasi pemanfaatan;
			4. Penguatan dan pemerataan infrastruktur TIK;	2. Peningkatan jumlah sarana prasarana teknologi informasi SPBE.
			5. Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengembangan platform informasi publik;	1. Peningkatan ketersediaan penyediaan dan penyebaran data;
			6.Peningkatan kerjasama dengan KIM;	
			7.Peningkatan keamanan siber;	



Visi: Mewujudkan Kepahiang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan				
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			8. Penyempurnaan SOTK; 9. Peningkatan intensitas diseminasi kepada perangkat daerah;	1. Pelaksanaan SOP pengendalian internal secara intensif 2. Penyusunan kebijakan mengenai pelaksanaan AKIP daerah
		2. Tercapainya peningkatan kualitas pelaksanaan data statistik sektoral	1. Peningkatan literasi statistik para pemangku kepentingan; 2. Peningkatan ketersediaan Statistik Sektoral; 3. Peningkatan kualitas instrumen pengolahan data yang baik; 4. Pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan data serta pemerataan akses data; 5. Peningkatan keamanan sistem data dengan penerapan standar perlindungan data modern;	1. Penyusunan kebijakan mengenai statistik sektoral dan optimalisasi pemanfaatan; 2. Peningkatan jumlah SDM bisang statistik.



Visi: Mewujudkan Kepahiang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan				
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			6. Peningkatan intensitas kerjasama antar lembaga.	
		3. Tercapainya peningkatan Akses Layanan Keuangan Masyarakat	1. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung; 2. Penyempurnaan SOTK; 3. Peningkatan jumlah dan kualitas SDM; 4. Peningkatan dukungan penggunaan teknologi informasi.	1. Peningkatan penggunaan teknologi informasi di OPD.

Tabel 3.19 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Kepahiang (Misi 4)

Visi: Mewujudkan Kepahiang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan				
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Air dan Pangan serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1. Tercapainya peningkatan kualitas lingkungan hidup	1. Penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis dan dokumen terkait lainnya; 2. Peningkatan edukasi masyarakat tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan;	1. Peningkatan intensitas pemantauan dan uji kualitas lingkungan; 2. Peningkatan ketersediaan data dan informasi status lingkungan hidup;



Visi: Mewujudkan Kepahiang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan				
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			3. Peningkatan kualitas SDM; 4. Pemenuhan sarana; 5. Peningkatan kualitas tamankeanakarag aman hayati; 6. Peningkatan pengawasan terhadap perizinan yang diterbitkan.	3. Peningkatan diseminasi kepada masyarakat tentang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; 4. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH).
		2. Tercapaiannya Peningkatan Ketahanan Pangan	1. Perwujudan diversifikasi produksi jenis tanaman pangan; 2. Penerapan teknologi tepat guna dalam meningkatkan produksi pangan; 3. Penguatan kelembagaan petani dan kelompok tani; 4. Perbaikan dan pengembangan infrastruktur pangan; 5. Peningkatan kerjasama dengan karantina pertanian dan perikanan;	1. Peningkatan jumlah infrastruktur kemandirian pangan; 2. Peningkatan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan; 3. Peningkatan pemberdayaa n masyarakat dalam penganekara gaman konsumsi pangan



Visi: Mewujudkan Kepahiang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan				
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			6. Perwujudan gerakan pangan murah di masyarakat menjelang hari-hari besar; 7. Peningkatan kemudahan akses pangan	berbasis sumber daya lokal; 4. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan rumah masyarakat; 5. Penyediaan insentif untuk peningkatan jumlah lembaga usaha pangan masyarakat dan toko tani; 6. Peningkatan jumlah cadangan pangan.
	2. Optimalnya penanganan bencana	Tercapainya peningkatan kelembagaan untuk mengurangi resiko dan menghadapi bencana	1. Pemenuhan jumlah dan peningkatan kompetensi SDM 2. Pemenuhan sarana dan prasarana; 3. Peningkatan intensitas desiminasi dan pelatihan mitigasi bencana; 4. Penyusunan peta daerah rawan bencana;	1. Penyediaan layanan informasi rawan bencana; 2. Peningkatan intensitas koordinasi lintas sektor penanganan kondisi darurat; 3. Validasi data penduduk rentan dengan data



Visi: Mewujudkan Kepahiang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan				
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			5. Penyusunan kajian dan regulasi.	cadangan logistik; 4. Peningkatan intensitas koordinasi tim JUTUPASNA.

Tabel 3.20 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Kepahiang (Misi 5)

Visi: Mewujudkan Kepahiang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan				
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis serta Penguatan Konektivitas Wilayah yang Memadai, Berkualitas dan Berkelanjutan	Terwujudnya peningkatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas	Tercapainya peningkatan infrastruktur yang berkualitas	1. Peningkatan kualitas SDM; 2. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi; 3. Pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan; 4. Penyiapan mitigasi perubahan iklim dan bencana alam; 5. Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi; 6. Pemeliharaan bendung, sarana, dan prasarana irigasi; 7. Rehabilitasi jaringan irigasi	1. Peningkatan kualitas jalan dan koneksi antar wilayah; 2. Peningkatan layanan pengairan terhadap daerah fungsional; 3. Penguatan kelembagaan petani pengelola air irigasi; 4. Peningkatan ketersediaan data daerah irigasi; 5. Pembangunan gedung kantor; 6. Optimalisasi penerbitan



Visi: Mewujudkan Kepahiang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan				
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			yang rusak akibat bencana alam; 8. Peningkatan kolaborasi antar lembaga dan antar sector 9. Pemanfaatan tenaga ahli untuk pengoptimalan aplikasi SIMBG dan rumah tahan bencana; 10. Peningkatan pemanfaatan bantuan pusat untuk pembangunan gedung dan rumah layak huni; 11. Peningkatan pengetahuan masyarakat dalam penggunaan aplikasi SIMBG; 12. Pemanfaatan teknologi konstruksi untuk meminimalkan dampak bencana alam; 13. Peningkatan kolaborasi untuk pemenuhan	sertifikat layak fungsi bangunan; 7. Peningkatan jumlah fasilitas umum dan kualitas hidup (rumah layak huni); 8. Peningkatan capaian layanan air minum dan sanitasi 9. Penyediaan fasilitasi terhadap penyedia jasa konstruksi baru; 10. Peningkatan intensitas pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan konstruksi; 11. Peningkatan intensitas pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.



Visi: Mewujudkan Kepahiang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan				
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			rumah layak huni; 14. Pembangunan daerah tangkapan air baku yang baru; 15. Pembangunan SPALD di daerah yang masih melakukan DABS; 16. Pemenuhan jumlah rumah yang di layani SPLD; 17. Peningkatan unit rumah yang dibangun IPLT; 18. Penyediaan sumber air baku yang dapat diakses dengan mudah; 19. Pemeliharaan jaringan perpipaan; 20. Penyediaan sistem informasi penyelenggara n jasa konstruksi; 21. Peningkatan pelatihan dan pengawasan teknis terhadap pelaku jasa konstruksi;	



Visi: Mewujudkan Kepahiang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan				
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			22. Penyusunan regulasi turunan Perda RTRW; 23. Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR);	

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH





BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini program perangkat daerah yang memuat indikasi program serta pagu indikatif program untuk mencapai visi dan misi RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029 serta sebagai acuan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang memuat target Indikasi Program dan Pagu indikatif sesuai periode RPJMD.

Selanjutnya, indikasi program merupakan program-program dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahun 2025-2029 sedangkan Pagu Indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Bab ini juga menyajikan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari: 1) indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, dan 2) indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

**4.1 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG 2026-2030**

Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					240.302.632.701,000		264.320.457.501,000		290.752.503.252,000		319.827.753.576,000		342.994.107.816,000	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					174.019.555.917,000		191.409.073.039,000		210.549.980.343,000		231.604.978.376,000		254.765.476.216,000	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase Dokumen Anggaran dan Kinerja Pegawai (%)	100	100	100	174.019.555.917,000	100	191.409.073.039,000	100	210.549.980.343,000	100	231.604.978.376,000	100	254.765.476.216,000	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					66.239.076.784,000		72.862.984.462,000		80.149.282.909,000		88.164.211.200,000		88.164.211.200,000	
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia 5 (Lima) Tahun Sampai dengan 6 (Enam) Tahun yang Berpartisipasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Persentase)	66,92	70,12	73,16	66.239.076.784,000	76,2	72.862.984.462,000	79,24	80.149.282.909,000	82,28	88.164.211.200,000	85,25	88.164.211.200,000	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%)	36,11	62,15	80,36		100		100		100		100		1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Peningkatan Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 (%)	58,98	57,06	57,81		58,56		59,31		60,06		60,81		1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Jumlah Warga Negara 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan (%)	20,84	23,27	25,69		28,11		30,53		32,95		35,37		1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Indeks Iklim Keamanan SD (Nilai)	73,18	74,08	74,98		75,88		76,78		77,68		78,58		1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Indeks Iklim Kebhinekaan SD (Nilai)	69,85	70,85	71,85		72,85		73,85		74,85		75,85		1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Iklim Inklusivitas SD (Nilai)	56,15	58,65	61,15		63,65		66,15		68,65		71,15		1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rata-Rata Kemampuan Numerasi Sekolah Dasar (SD) Berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	50,32	53,22	56,12		59,02		61,92		64,82		67,72		1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rata-Rata Kemampuan Literasi Sekolah Dasar (SD) Berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	57,89	60,39	62,89		65,39		67,89		70,39		72,89		1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Jumlah Anak Usia 7 (Tujuh) Tahun Sampai Dengan 15 (Lima Belas) Tahun yang Berpartisipasi Pada Pendidikan Dasar (%)	98,77	99,03	99,28		99,53		99,78		100		100		1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Indeks Iklim Keamanan SMP (Nilai)	66,40	67,90	69,40		70,90		72,40		73,90		75,40		1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Indeks Iklim Kebhinekaan SMP (Nilai)	68,03	69,03	70,03		71,03		72,03		73,03		74,04		1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Indeks Iklim Inklusivitas SMP (Nilai)	54,00	56,40	58,80		61,20		63,60		66,00		68,40		1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rata-Rata Kemampuan Numerasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	58,64	60,14	61,64		63,14		64,64		66,14		67,64		1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rata-Rata Kemampuan Literasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	65,18	66,28	67,38		68,48		69,58		70,68		71,78		1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%)	147	85	75		68		55		40		40		1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTS/Paket B (%)	73	58	46	37	25	10	10	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTS/Paket B (%)	100	100	100		100		100		100		1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI/Paket A (%)	92,58	95,63	96,55		98,75		99,85		100		100		1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTS/Paket B (%)	96,96	97,83	98,73		99,25		100		100		100		1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Sekolah Pendidikan SD Kondisi Bangunan Baik (Angka)	74:104	75:104	80:104		82:104		83:104		84:104		85:104		1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Sekolah Pendidikan SMP Kondisi Bangunan Baik (Angka)	23:30	24:30	23:30		24:30		25:30		26:30		27:30		1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					44.000.000,000		48.400.000,000		53.240.000,000		58.564.000,000		64.420.400,000	
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Persentase Terpenuhinya Kualitas dan Kuantitas Pendidik dan Tenaga Pendidik (%)	80,00	85,00	87,00	44.000.000,000	90,00	48.400.000,000	93,00	53.240.000,000	95,00	58.564.000,000	100,00	64.420.400,000	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					310.553.568.740,000		319.541.198.817,500		346.075.777.658,550		395.305.937.942,210		1.114.233.664.108,420	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					166.633.366.412,000		181.577.655.887,000		197.877.404.154,900		215.768.847.220,890		680.045.006.266,380	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan pada Dinas Kesehatan	Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100	112.672.139.731,000	100	124.892.855.704,000	100	137.382.141.275,000	100	151.120.355.402,000	100	614.148.104.082,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Kelengkapan Dokumen Kepegawaian, Keuangan dan Administrasi Umum (%)	80	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Gudang Farmasi	Persentase Dokumen Perencanaan Anggaran dan Kinerja (%)	100	100	100	24.998.900,000	100	27.498.790,000	100	29.998.680,000	100	32.498.570,000	100	34.998.460,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Dokumen Kepegawaian, Keuangan, dan Umum (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
														1.02.0.00.0.00.01.0001 - UPTD GUDANG FARMASI
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Puskesmas Batu Bandung	Persentase Dokumen Perencanaan Anggaran dan Kinerja (%)	100	100	100	802.806.795,000	100	883.087.745,000	100	971.396.222,000	100	1.068.535.844,000	100	1.175.389.429,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Dokumen Kepegawaian, Keuangan, dan Umum (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
														1.02.0.00.0.00.01.0006 - PUSKESMAS BATU BANDUNG
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Puskesmas Bukit Sari	Persentase Dokumen Perencanaan Anggaran dan Kinerja (%)	100	100	100	480.711.000,000	100	528.782.100,000	100	581.660.310,000	100	639.826.341,000	100	703.808.975,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Dokumen Kepegawaian, Keuangan, dan Umum (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
														1.02.0.00.0.00.01.0014 - PUSKESMAS BUKIT SARI
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan pada Puskesmas Cugung Lalang	Persentase Dokumen Perencanaan Anggaran dan Kinerja (%)	100	100	100	599.693.027,000	100	599.693.027,000	100	599.693.027,000	100	659.662.330,000	100	725.628.563,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Dokumen Kepegawaian, Keuangan, dan Umum (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
														1.02.0.00.0.00.01.0012 - PUSKESMAS CUGUNG LALANG



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Puskesmas Durian Depun	Persentase Dokumen Perencanaan Anggaran dan Kinerja (%)	100	100	100	760.000.000,000	100	836.000.000,000	100	919.600.000,000	100	1.011.560.000,000	100	1.112.716.000,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Dokumen Kepegawaian, Keuangan, dan Umum (%)	100	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
												1.02.0.00.0.00.01.0009 - PUSKESMAS DURIAN DEPUN		
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Puskesmas Embong Ijuk	Persentase Dokumen Perencanaan Anggaran dan Kinerja (%)	100	100	100	400.204.104,000	100	440.224.514,000	100	484.246.966,000	100	532.671.662,000	100	585.938.829,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Dokumen Kepegawaian, Keuangan, dan Umum (%)	100	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
												1.02.0.00.0.00.01.0003 - PUSKESMAS EMBONG IJUK		
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Puskesmas Kabawetan	Persentase Dokumen Perencanaan Anggaran dan Kinerja (%)	100	100	100	450.222.190,000	100	495.244.409,000	100	544.768.849,900	100	599.245.734,890	100	659.170.308,380	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Dokumen Kepegawaian, Keuangan, dan Umum (%)	100	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
												1.02.0.00.0.00.01.0011 - PUSKESMAS KABAWETAN		
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Puskesmas Keban Agung	Persentase Dokumen Perencanaan Anggaran dan Kinerja (%)	100	100	100	483.000.000,000	100	531.300.000,000	100	584.430.000,000	100	642.873.000,000	100	707.160.300,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Dokumen Kepegawaian, Keuangan, dan Umum (%)	100	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
												1.02.0.00.0.00.01.0015 - PUSKESMAS KEBAN AGUNG		



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Puskesmas Kelobak	Persentase Dokumen Perencanaan Anggaran dan Kinerja (%)	100	100	100	867.515.000,000	100	954.266.500,000	100	1.049.693.150,000	100	1.154.662.465,000	100	1.270.128.712,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Dokumen Kepegawaian, Keuangan, dan Umum (%)	100	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
												1.02.0.00.0.00.01.0005 - PUSKESMAS KELOBAK		
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Puskesmas Muara Langkap	Persentase Dokumen Perencanaan Anggaran dan Kinerja (%)	100	100	100	385.678.508,000	100	424.246.359,000	100	466.670.995,000	100	513.338.094,000	100	564.671.904,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Dokumen Kepegawaian, Keuangan, dan Umum (%)	100	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
												1.02.0.00.0.00.01.0007 - PUSKESMAS MUARA LANGKAP		
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Puskesmas Nanti Agung	Persentase Dokumen Perencanaan Anggaran dan Kinerja (%)	100	100	100	597.925.617,000	100	657.718.179,000	100	723.489.997,000	100	795.838.996,000	100	875.422.896,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Dokumen Kepegawaian, Keuangan, dan Umum (%)	100	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
												1.02.0.00.0.00.01.0008 - PUSKESMAS NANTI AGUNG		
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Puskesmas Pasar Kepahiang	Persentase Dokumen Perencanaan Anggaran dan Kinerja (%)	100	100	100	1.541.631.944,000	100	1.695.795.138,000	100	1.865.374.652,000	100	2.051.912.117,000	100	2.257.103.329,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Dokumen Kepegawaian, Keuangan, dan Umum (%)	100	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
												1.02.0.00.0.00.01.0004 - PUSKESMAS PASAR KEPAHIANG		



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Puskesmas Talang Babatan Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Puskesmas Tebat Karai	Persentase Dokumen Perencanaan Anggaran dan Kinerja (%)	100	100	100	509.120.414,000	100	560.032.455,000	100	560.032.455,000	100	560.032.455,000	100	560.032.455,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Dokumen Kepegawaian, Keuangan, dan Umum (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
												1.02.0.00.0.00.01.0013 - PUSKESMAS TALANG BABATAN		
	Persentase Dokumen Kepegawaian, Keuangan, dan Umum (%)	100	100	100	681.463.273,000	100	749.609.600,000	100	824.570.560,000	100	907.027.616,000	100	997.730.378,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Dokumen Perencanaan Anggaran dan Kinerja (%)	100	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
												1.02.0.00.0.00.01.0010 - PUSKESMAS TEBAT KARAI		
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Puskesmas Ujan Mas	Persentase Dokumen Perencanaan Anggaran dan Kinerja (%)	100	100	100	1.288.937.281,000	100	1.417.831.009,000	100	1.559.614.110,000	100	1.715.575.521,000	100	1.887.133.073,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Kelengkapan Dokumen Kepegawaian, Keuangan dan Administrasi Umum (%)	100	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
												1.02.0.00.0.00.01.0016 - PUSKESMAS UJAN MAS		
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Rumah Sakit Umum Daerah	Persentase Kelengkapan Dokumen Penilaian Dinas Kesehatan (%)	100	100	100	43.962.318.628,000	100	45.745.970.358,000	100	48.578.772.906,000	100	51.596.856.073,000	100	51.596.856.073,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
														1.02.0.00.0.00.01.0017 - Rumah Sakit Umum Daerah
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada UPT Laboratorium Kesehatan Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian, Keuangan, dan Umum (%)	76	76	82	125.000.000,000	84	137.500.000,000	86	151.250.000,000	88	166.375.000,000	100	183.012.500,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														1.02.0.00.0.00.01.0002 - UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					141.712.422.878,000		135.394.646.512,500		145.424.618.943,650		176.536.004.803,320		425.925.848.648,840	
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah	Nilai Standar Pelayanan (SPM) Rumah Sakit (Angka)	70	75	76	74.925.000.000,000	77	53.952.000.000,000	78	54.987.000.000,000	79	66.036.000.000,000	79	66.036.000.000,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
														1.02.0.00.0.00.01.0017 - Rumah Sakit Umum Daerah
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Dinas Kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	100	100	100	75.000.000,000	100	130.000.000,000	100	145.000.000,000	100	161.000.000,000	100	178.100.000,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang Sehat Sesuai Siklus Hidup dan Layanan Kesehatan Yang Berkualitas , baik, adil dan terjangkau di Puskesmas Batu Bandung	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil (%)	59,37	100	100	783.884.390,000	100	862.272.829,000	100	948.500.112,000	100	1.043.350.123,000	100	1.147.685.135,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Bersalin (%)	60,75	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi Baru Lahir (%)	76,54	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Balita (%)	60,6	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Pendidikan Dasar (%)	90,44	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Terpenuhinya Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola SPBE serta Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Produktif (%)	98,08	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Lanjut Usia (%)	97,14	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Penderita Hipertensi (%)	98,24	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Diabetes Melitus (%)	100	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (%)	95	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Terduga Tuberculosis (%)	93,6	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV (%)	100	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Integrasi Layanan Primer (ILP) (%)	98	98	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) (%)	87,5	89	90		91		92		93		93		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
														1.02.0.00.0.00.01.0006 - PUSKESMAS BATU BANDUNG
Tercapainya Masyarakat Yang Sehat Sesuai Siklus Hidup dan Layanan Kesehatan yang Berkualitas Baik, Adil dan Terjangkau di Puskesmas Kelobak	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) (%)	87	89,97	90	750.003.322,000	91	825.003.654,000	92	907.504.020,000	93	998.254.422,000	93	1.098.079.864,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Dokumen Sistem Infomasi Kesehatan (%)	93	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Balita (%)	92	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi Baru Lahir (%)	77	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Diabetes Melitus (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil (%)	78	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Usia Pendidikan Dasar (%)	94	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Laniut Usia (%)	79	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Penderita Hipertensi (%)	85	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Terduga Tuberculosis (%)	76	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Produktif (%)	96	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
	Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Integrasi Layanan Primer (ILP) (%)	88	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Bersalin (%)	78	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
															1.02.0.00.0.00.01.0005 - PUSKESMAS KELOBAK
	Tercapainya Masyarakat yang Sehat Sesuai Siklus Hidup dan Layanan Kesehatan yang Berkualitas Baik, Adil dan Terjangkau pada Dinas Kesehatan.	Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) (%)	12,82	12,50		12		54.683.775.311,000		11,8		68.093.030.790,000		11,50	75.751.376.808,000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Integrasi Layanan Primer (ILP) Minimal 86,67% dari Kriteria ILP (%)	N/A	-	86		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	36	46		55		61		70		70		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan (%)	89,97	89,97	90		91		92		93		93		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ((%))	73	73	80		85		90		95		98		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin (%)	0	80	85		90		95		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Hipertensi dalam Pengendalian (%)	38,07	80	80		80		80		80		80		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	DM dalam Pengendalian (%)	39,36	80	80		80		80		80		80		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	0	1,73	1,73		1,73		1,73		1,73		1,73		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	0	5,52	5,52		5,52		5,52		5,52		5,52		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Menyelenggarakan Skrining kolesterol Pada 80% Puskesmas (%)	0	79	79		86		86		86		86		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Insiden HIV (Angka)	0	0,02	0,02		0,02		0		0		0		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	4,27	7,69	11,11		14,53		17,95		21,37		21,37		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Jumlah Komplikasi pada Ibu Bersalin (Orang)	47	45	42		40		36		36		36		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
Persentase Kualitas Kesehatan Lingkungan Memenuhi Syarat (%)	0	100	100	100	100	100	100	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan						



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Kematian Bayi (Orang)	25	24	23		22		21		20		20		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
	Jumlah Kematian Neonatal (Orang)	23	22	21		20		19		18		18		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
	Persentase Kepatuhan Rumah Sakit terhadap Standar Akreditasi (%)	0	80	82		85		90		90		90		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
	Cakupan Penyakit Menular Langsung (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
	Persentase Fasyankes yang Melakukan Respons KLB / Wabah (PE, Pemeriksaan Laboratorium, Tatalaksana Kasus) (%)	67,8	71,42	78,57		85,7		92,9		100		100		100	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tular Vektor dan Zoonotik (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Calon Jemaah Haji yang Mendapatkan Rekomendasi Istitohah Haji (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	81,5	80,0	85,0		90,0		93,0		95,0		95,0		95,0	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Cakupan Layanan Upaya Kesehatan Jiwa Masyarakat (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Proporsi Penduduk Dengan Aktivitas Fisik Cukup (%)	-	64,30	66,10		67,90		69,70		72		72		72	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%)	50	73,33	80		86,67		93,33		100		100		100	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	77	80	80		80		80		80		80		80	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna (%)	73	80	80		80		80		80		100		100	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	91,35	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)	81,4	81,5	81,6		81,7		81,8		81,9		82		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar (%)	-	80	87		87		93		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Prevalensi Stunting (%)	17	17.4-13.2	14.3-10.1		11.6-7.8		8.3-6.3		6.6-3.4		3.6-0.0		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	84	85	86		87		88		89		90		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	0,014	0,014	0,014		0,014		0,014		0,014		0,014		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	75	90	90		90		90		90		90		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Penemuan Kasus TBC (%)	42,82	42,82	73		80		80		90		90		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat (%)	83	84	85		86,7		87		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
Tercapainya Masyarakat Yang Sehat Sesuai Siklus Hidup Dan Layanan Kesehatan Yang Berkualitas, Baik, Adil dan Terjangkau Pada Puskesmas Bukit Sari	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil (%)	58,20	100	100	892.252.000,000	100	980.277.200,000	100	1.077.104.920,000	100	1.183.615.412,000	100	1.300.776.953,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Bersalin (%)	58,68	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi Baru Lahir (%)	62,18	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Balita (%)	99,46	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Usia Pendidikan Dasar (%)	108,75	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Produktif (%)	98,63	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Lanjut Usia (%)	96,88	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Penderita Hipertensi (%)	98,11	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Diabetes Melitus (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Terduga Tuberculosis (%)	92,35	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Dokumen Sistem	100	100	100		100		100		100		100		100



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Infomasi Kesehatan (%)															
	Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Integrasi Layanan Primer (ILP) (%)	98	100	100				100				100				100
	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) (%)	88,10	89,97	90				91				92				93
Tercapainya Masyarakat yang Sehat Sesuai Siklus Hidup dan Layanan Kesehatan yang Berkualitas Baik, Adil dan Terjangkau pada Puskesmas Cugung Lalang	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil (%)	63,10	100	100	1.021.086.650,000	100	1.121.995.315,000	100	1.232.994.847,000	100	1.355.094.331,000	100	1.489.403.764,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Bersalin (%)	63,10	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi Baru Lahir (%)	53,99	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Balita (%)	87,97	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Usia Pendidikan Dasar (%)	82,05	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Produktif (%)	98,54	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Laniut Usia (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Penderita Hipertensi (%)	72,53	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Diabetes Melitus (%)	100	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (%)	92,30	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Terduga Tuberculosis (%)	75,48	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV (%)	100	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase Dokumen Sistem Infomasi Kesehatan (%)	100	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Integrasi Layanan Primer (ILP) (%)	100	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) (%)	87,51	89,97	90		91		92		93		93		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
														1.02.0.00.0.00.01.0012 - PUSKESMAS CUGUNG LALANG
	Tercapainya Masyarakat yang Sehat Sesuai Siklus Hidup dan Layanan Kesehatan yang Berkualitas Baik, Adil dan Terianekau pada	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil (%)	49,5	100		100		973.010.048,000		100		1.070.311.052,000		100



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Puskesmas Durian Depun														
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Bersalin (%)	50,7	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi Baru Lahir (%)	43,6	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Balita (%)	63,2	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Usia Pendidikan Dasar (%)	75	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Produktif (%)	80,2	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Penderita Hipertensi (%)	80,1	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Lanjut Usia (%)	99,7	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Diabetes Melitus (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Terduga Tuberculosis (%)	103	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV (%)	99,6	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Dokumen Sistem Infomasi Kesehatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Integrasi Layanan Primer (ILP) (%)	90,7	98	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) (%)	87,5	89,97	90		91		92		93		93		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
														1.02.0.00.0.00.01.0009 - PUSKESMAS DURIAN DEPUN
Tercapainya Masyarakat yang Sehat Sesuai Siklus Hidup dan Layanan Kesehatan yang Berkualitas Baik, Adil dan Terjangkau pada Puskesmas Embong Ijuk	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil (%)	72,7	100	100	830.595.240,000	100	913.654.764,000	100	1.005.020.240,000	100	1.105.522.264,000	100	1.216.074.491,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Bersalin (%)	72,7	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi Baru Lahir (%)	77,1	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Balita (%)	86,2	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Usia Pendidikan Dasar (%)	101,1	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Produktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Lanjut Usia (%)	68,5	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Penderita Hipertensi (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Diabetes Melitus (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Terduga Tuberculosis (%)	94,5	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		100



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
				2026		2027		2028		2029		2030					
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
	Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Integrasi Layanan Primer (ILP) (%)	90,7	98	100	1.006.564.865,000	100	1.107.221.351,500	100	1.217.943.486,650	100	1.339.737.835,320	100	1.473.711.618,840	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan			
	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) (%)	96,74	89,97	90		91		92		93		93		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan			
														1.02.0.00.0.00.01.0003 - PUSKESMAS EMBONG IJUK			
Tercapainya Masyarakat yang Sehat Sesuai Siklus Hidup dan Layanan Kesehatan yang Berkualitas Baik, Adil dan Terjangkau pada Puskesmas Kabawetan	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil (%)	66	100	100		100		100		100		100		100	100	100	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Bersalin (%)	66	100	100		100		100		100		100		100	100	100	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi Baru Lahir (%)	78	100	100		100		100		100		100		100	100	100	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Balita (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	100	100	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Usia Pendidikan Dasar (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	100	100	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Produktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	100	100	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Lanjut Usia (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	100	100	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan					



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Penderita Hipertensi (%)													1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Diabetes Melitus (%)	100	100	100				100				100				100
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (%)	100	100	100				100				100				100
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Terduga Tuberculosis (%)	95	100	100				100				100				100
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV (%)	100	100	100				100				100				100
	Persentase Dokumen Sistem Infomasi Kesehatan (%)	100	100	100				100				100				100
	Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Integrasi Layanan Primer (ILP) (%)	96,76	98	100				100				100				100
	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) (%)	88,73	89,97	90				91				92				93
Tercapainya Masyarakat yang Sehat Sesuai Siklus Hidup dan Layanan Kesehatan yang Berkualitas Baik, Adil dan Terjangkau pada Puskesmas Keban Agung	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil (%)	47,06	100	100	742.668.400,000	100	815.735.240,000	100	896.068.764,000	100	984.519.640,000	100	1.081.771.604,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Bersalin (%)	51,96	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi Baru Lahir (%)	50,50	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Balita (%)	94,53	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Usia Pendidikan Dasar (%)	100	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Produktif (%)	94,28	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Lanjut Usia (%)	100	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Penderita Hipertensi (%)	100	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Diabetes Melitus (%)	100	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (%)	100	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Terduga Tuberculosis (%)	89,20	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV (%)	96,85	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Dokumen Sistem Infomasi Kesehatan (%)	100	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Integrasi Layanan Primer (ILP) (%)	98	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) (%)	87,5	89,97	90		91		92		93		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
												1.02.0.00.0.00.01.0015 - PUSKESMAS KEBAN AGUNG		
Tercapainya Masyarakat yang Sehat Sesuai Siklus Hidup dan Layanan Kesehatan yang Berkualitas Baik, Adil dan Terjangkau pada Puskesmas Muara Langkap	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil (%)	84,78	100	100	872.066.000,000	100	959.272.600,000	100	1.055.199.860,000	100	1.160.719.846,000	100	1.276.791.831,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Bersalin (%)	77,94	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi Baru Lahir (%)	93,60	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Balita (%)	100	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Usia Pendidikan Dasar (%)	96,35	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Produktif (%)	96,35	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Lanjut Usia (%)	100	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Penderita Hipertensi (%)	77,72	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Diabetes Melitus (%)	98,33	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (%)	95	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Terduga Tuberculosis (%)	92,04	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV (%)	100	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase Dokumen Sistem Infomasi Kesehatan (%)	100	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Integrasi Layanan Primer (ILP) (%)	95	98	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) (%)	88,52	89,97	90		91		92		93		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														1.02.0.00.0.00.01.0007 - PUSKESMAS MUARA LANGKAP
Tercapainya Masyarakat yang Sehat Sesuai Siklus Hidup dan Layanan Kesehatan yang Berkualitas Baik, Adil dan Terjangkau pada puskesmas Nanti Agung	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil (%)	7.222	100	100	621.199.924,000	100	683.319.916,000	100	751.651.907,000	100	826.817.098,000	100	909.498.808,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Bersalin (%)	52	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi Baru Lahir (%)	72,22	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Balita (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Usia Pendidikan Dasar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Produktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Lanjut Usia (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Penderita Hipertensi (%)	90	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Diabetes Melitus (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Terduga Tuberculosis (%)	97	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV (%)	100	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase Dokumen Sistem Infomasi Kesehatan (%)	100	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Integrasi Layanan Primer (ILP) (%)	98	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) (%)	91,76	89,97	90		91		92		93		93		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
														1.02.0.00.0.00.01.0008 - PUSKESMAS NANTI AGUNG
Tercapainya Masyarakat yang Sehat Sesuai Siklus Hidup dan Layanan Kesehatan yang Berkualitas Baik, Adil dan Terjangkau pada Puskesmas Pasar Kepahiang	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil (%)	90	100	100	988.606.000,000	100	1.087.466.600,000	100	1.196.213.260,000	100	1.315.834.586,000	100	1.447.418.045,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Bersalin (%)	96	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi Baru Lahir (%)	98	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Balita (%)	89	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Usia Pendidikan Dasar (%)	98	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Lanjut Usia (%)	98	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Produktif (%)	95	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Penderita Hipertensi (%)	99	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Diabetes Melitus (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (%)	96	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Terduga Tuberculosis (%)	95	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Dokumen Sistem	100	100	100		100		100		100		100		100



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Infomasi Kesehatan (%)													
	Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Integrasi Layanan Primer (ILP) (%)	96,7	98	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) (%)	87,85	89,97	90		91		92		93		93		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
												1.02.0.00.0.00.01.0004 - PUSKESMAS PASAR KEPAHIANG		
Tercapainya Masyarakat yang Sehat Sesuai Siklus Hidup dan Layanan Kesehatan yang Berkualitas Baik, Adil dan Terjangkau pada Puskesmas Talang Babatan	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil (%)	94,81	100	100	627.000.000,000	100	681.903.400,000	100	756.921.550,000	100	829.867.005,000	100	909.342.744,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Bersalin (%)	91	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi Baru Lahir (%)	90	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Balita (%)	94	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Usia Pendidikan Dasar (%)	95	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Produktif (%)	94	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Lanjut Usia (%)	95	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Penderita Hipertensi (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Diabetes Melitus (%)	100	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (%)	100	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Terduga Tuberculosis (%)	100	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV (%)	100	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase Dokumen Sistem Infomasi Kesehatan (%)	100	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Integrasi Layanan Primer (ILP) (%)	98	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) (%)	87,5	89,97	90		91		92		93		93		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
Tercapainya Masyarakat yang Sehat Sesuai Siklus Hidup dan Layanan Kesehatan yang Berkualitas Baik, Adil	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil (%)	65	100	100	710.485.178,000	100	781.533.696,000	100	859.687.066,000	100	945.655.773,000	100	1.040.221.251,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
dan Terjangkau pada Puskesmas Tebat Karai														
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Bersalin (%)	66	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi Baru Lahir (%)	66	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Balita (%)	85	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Usia Pendidikan Dasar (%)	99	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Produktif (%)	98	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Lanjut Usia (%)	98	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Penderita Hipertensi (%)	89	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Diabetes Melitus (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Terduga Tuberculosis (%)	97	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV (%)	100	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase Dokumen Sistem Infomasi Kesehatan (%)	100	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Integrasi Layanan Primer (ILP) (%)	98	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) (%)	87,5	89,97	90		91		92		93		93		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
														1.02.0.00.0.00.01.0010 - PUSKESMAS TEBAT KARAI
Tercapainya Masyarakat yang Sehat Sesuai Siklus Hidup dan Layanan Kesehatan yang Berkualitas Baik, Adil dan Terjangkau pada Puskesmas Ujan Mas	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil (%)	74,9	100	100	1.083.428.550,000	100	1.191.771.405,000	100	1.309.133.546,000	100	1.488.244.640,000	100	1.488.426.140,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Bersalin (%)	75,8	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi Baru Lahir (%)	79,9	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Balita (%)	78,1	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Pendidikan Dasar (%)	98	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Produktif (%)	95,3	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Lanjut Usia (%)	70,8	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Penderita Hipertensi (%)	100	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Diabetes Melitus (%)	100	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (%)	100	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Terduga Tuberculosis (%)	97,4	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV (%)	100	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase Dokumen Sistem Infomasi Kesehatan (%)	100	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
	Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan	92,7	98	100		100				100				100



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
				2026		2027		2028		2029		2030						
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU					
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
	Integrasi Layanan Primer (ILP) (%)																	
	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) (%)	87,5	89,90	90				91				92				93		93
Tercapainya Masyarakat yang Sehat Sesuai Siklus Hidup dan Layanan Kesehatan yang Berkualitas Baik, Adil dan Terjangkau pada UPTD Gudang Farmasi	Persentase Fasilitas Kesehatan yang Memiliki Obat, Vaksin, dan BMHP Sesuai Standar ()	100	100	100	110.797.000,000	100	121.876.700,000	100	132.956.400,000	100	144.036.100,000	100	155.115.800,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan				
														1.02.0.00.0.00.01.0001 - UPTD GUDANG FARMASI				
Tercapainya Masyarakat yang Sehat Sesuai Siklus Hidup dan Layanan Kesehatan yang Berkualitas Baik, Adil dan Terjangkau pada UPT Laboratorium Kesehatan Daerah	Persentase Pelayanan Kesehatan Dasar Sesuai Standar (%)	75	75	82	15.000.000,000	84	16.000.000,000	86	17.000.000,000	88	18.000.000,000	100	19.000.000,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan				
														1.02.0.00.0.00.01.0002 - UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH				
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					1.611.447.500,000		1.752.692.250,000		1.853.361.475,000		1.962.297.623,000		4.868.061.348,000					
Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pemerataan SDM Kesehatan pada Puskesmas Cugung Lalang	Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki SIP Aktif (Persentase)	43	55	60	0,000	62,16	0,000	89,19	0,000	100	0,000	100	0,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan				
														1.02.0.00.0.00.01.0012 - PUSKESMAS CUGUNG LALANG				
Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pemerataan SDM Kesehatan pada Puskesmas Durian Denun	Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki SIP Aktif (Persentase)	43	55	60	0,000	63,93	0,000	80,33	0,000	100	0,000	100	0,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan				



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	1.02.0.00.0.00.01.0009 - PUSKESMAS DURIAN DEPUN	
Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pemerataan SDM Kesehatan pada Puskesmas Embong Ijuk	Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki SIP Aktif (Persentase)	43	55	60		89,29		107,14		100		100		0,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
															1.02.0.00.0.00.01.0003 - PUSKESMAS EMBONG IJUK
Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pemerataan SDM Kesehatan pada Puskesmas Kabawetan	Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki SIP Aktif (Persentase)	43	55	60	0,000	76,47	0,000	91,18	0,000	100	0,000	100	0,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
															1.02.0.00.0.00.01.0011 - PUSKESMAS KABAWETAN
Meningkatkan Kuantitas,Kualitas dan Pemerataan SDM Kesehatan pada Puskesmas Nanti Agung	Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki SIP Aktif (Persentase)	43	55	60	0,000	48,15	0,000	85,19	0,000	100	0,000	100	0,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
															1.02.0.00.0.00.01.0008 - PUSKESMAS NANTI AGUNG
Meningkatkan kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM Kesehatan pada Dinas Kesehatan	Rasio Dokter Gigi Per Satuan Penduduk (Angka)	0,06	0,08	0,08	642.447.500,000	0,09	726.692.250,000	0,09	799.361.475,000	0,09	879.297.623,000	0,09	3.785.061.348,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
	Rasio Dokter per Satuan Penduduk (%)	0,28	0,27	0,27		0,27		0,27		0,26		0,26		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
	Rasio Dokter Spesialis Per Satuan Penduduk (Angka)	0,12	0,13	0,13		0,14		0,14		0,14		0,14		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
	Rasio Perawat Per Satuan Penduduk (Angka)	2,71	2,68	2,65		2,62		2,62		2,58		2,58		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar (%)	50	50	57		71		79		86		86		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
	Rasio Bidan Per Satuan Penduduk (Angka)	2,65	0,42	0,42		0,42		0,42		0,42		0,42		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	
	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis	100	100	100		100		100		100		100		100	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	sesuai standar (Persentase)													
Meningkatkan Kuantitas, Kualitas dan Pemerataan SDM Kesehatan pada Puskesmas Batu Bandung	Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki SIP Aktif (Persentase)	43	55	60	0,000	48,84	0,000	72,09	0,000	100	0,000	100	0,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
														1.02.0.00.0.00.01.0006 - PUSKESMAS BATU BANDUNG
Meningkatkan Kuantitas, Kualitas Dan Pemerataan SDM Kesehatan Pada Puskesmas Bukit Sari	Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki SIP Aktif (Persentase)	100	100	100	0,000	100	0,000	100	0,000	100	0,000	100	0,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
														1.02.0.00.0.00.01.0014 - PUSKESMAS BUKIT SARI
Meningkatkan Kuantitas, Kualitas dan Pemerataan SDM Kesehatan Pada Puskesmas Keban Agung	Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki SIP Aktif (Persentase)	43	55	60	0,000	87,1	0,000	119,35	0,000	100	0,000	100	0,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
														1.02.0.00.0.00.01.0015 - PUSKESMAS KEBAN AGUNG
Meningkatkan Kuantitas, Kualitas dan Pemerataan SDM Kesehatan Pada Puskesmas Kelobak	Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki SIP Aktif (Persentase)	55,26	81,58	0	0,000	55,26	0,000	81,58	0,000	100	0,000	0	0,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
														1.02.0.00.0.00.01.0005 - PUSKESMAS KELOBAK
Meningkatkan Kuantitas, Kualitas dan Pemerataan SDM Kesehatan Pada Puskesmas Muara Langkap	Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki SIP Aktif (Persentase)	43	55	60	0,000	47,37	0,000	73,68	0,000	100	0,000	100	0,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
														1.02.0.00.0.00.01.0007 - PUSKESMAS MUARA LANGKAP
Meningkatkan kuantitas, Kualitas dan Pemerataan SDM Kesehatan Pada Puskesmas Talang Babatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki SIP Aktif (Persentase)	43	55	60	0,000	81,82	0,000	96,97	0,000	100	0,000	100	0,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														1.02.0.00.0.00.01.0013 - PUSKESMAS TALANG BABATAN
Meningkatkan Kuantitas, Kualitas dan Pemerataan SDM Kesehatan pada Puskesmas Tebat Karai	Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki SIP Aktif (Persentase)	43	55	60	0,000	76,47	0,000	91,18	0,000	100	0,000	100	0,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
														1.02.0.00.0.00.01.0010 - PUSKESMAS TEBAT KARAI
Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan pemerataan SDM Kesehatan pada Puskesmas Ujan Mas	Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki SIP Aktif (Persentase)	43	55	60	0,000	79,07	0,000	90,7	0,000	100	0,000	100	0,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
														1.02.0.00.0.00.01.0016 - PUSKESMAS UJAN MAS
Meningkatkan Kuantitas , Kualitas, dan Pemerataan SDM Kesehatan pada Puskesmas Pasar Kepahiang	Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki SIP Aktif (Persentase)	43	55	60	0,000	62,16	0,000	89,19	0,000	100	0,000	100	0,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
														1.02.0.00.0.00.01.0004 - PUSKESMAS PASAR KEPAHIANG
Meningkatkan Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah	Persentase Faskes yang Terpenuhi Named dan Nakes Sesuai Standar (%)	30	35	48	969.000.000,000	61	1.026.000.000,000	74	1.054.000.000,000	87	1.083.000.000,000	87	1.083.000.000,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
														1.02.0.00.0.00.01.0017 - Rumah Sakit Umum Daerah
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					442.730.450,000		509.140.018,000		585.511.020,000		673.337.673,000		2.595.702.160,000	
Meningkatnya Efektivitas Program Sedian Farmasi dan Pangan Olahan di Pemerintah Daerah pada Dinas Kesehatan	Persentase Penerbitan dan Pemenuhan Komitmen SPP-IRT Sesuai Standar (%)	-	30	40	442.730.450,000	50	509.140.018,000	60	585.511.020,000	70	673.337.673,000	80	2.595.702.160,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Pangan Industri Rumah Tangga Aman dan Bermutu (%)	-	70	72		75		80		82		82		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Sarana IRTP yang	-	54	58		62		66		70		70		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Memenuhi Ketentuan (%)															
	Persentase Apotek dan Toko Obat yang Mampu Memelihara Persyaratan Perizinan (%)	-	100	100				100				100				100
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dari Lintas Sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (%)	-	50	60				70				80				90
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					153.601.500,000		307.064.150,000		334.882.065,000		365.450.622,000		799.045.685,200			
Meningkatnya Pembudayaan Gaya Hidup Sehat pada Masyarakat melalui Penguatan Kesadaran, Pengetahuan, dan Penerapan untuk Hidup Sehat pada Dinas Kesehatan	Persentase Posyandu Siklus Hidup yang Aktif (%)	75	75	75	8.525.000,000	80	150.000.000,000	80	165.000.000,000	85	181.500.000,000	85	599.805.000,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
Meningkatnya Pembudayaan Gaya Hidup Sehat pada Masyarakat melalui Penguatan Kesadaran, Pengetahuan, dan Penerapan untuk Hidup Sehat pada Puskesmas Batu Bandung	Persentase Posyandu Siklus Hidup yang Aktif (%)	100	100	100	5.080.000,000	100	5.588.000,000	100	6.146.800,000	100	6.761.480,000	100	7.437.628,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
														1.02.0.00.0.00.01.0006 - PUSKESMAS BATU BANDUNG		
Meningkatnya Pembudayaan Gaya Hidup Sehat Pada Masyarakat Melalui Penguatan Kesadaran, Pengetahuan, dan Penerapan Untuk Hidup Sehat Pada Puskesmas Bukit Sari	Persentase Posyandu Siklus Hidup yang Aktif (%)	43	55	60	18.865.000,000	33,33	20.751.500,000	66,67	22.826.650,000	100	25.109.315,000	100	27.620.247,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan		
														1.02.0.00.0.00.01.0014 - PUSKESMAS BUKIT SARI		



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pembudayaan Gaya Hidup Sehat pada Masyarakat melalui Penguatan Kesadaran, Pengetahuan, dan Penerapan untuk Hidup Sehat pada Puskesmas Cugung Lalang	Persentase Posyandu Siklus Hidup yang Aktif (%)	100	100	100	36.879.500,000	100	40.567.450,000	100	44.624.195,000	100	49.086.615,000	100	53.995.276,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
														1.02.0.00.0.00.01.0012 - PUSKESMAS CUGUNG LALANG
Meningkatnya Pembudayaan Gaya Hidup Sehat pada Masyarakat melalui Penguatan Kesadaran, Pengetahuan, dan Penerapan untuk Hidup Sehat pada Puskesmas Durian Depun	Persentase Posyandu Siklus Hidup yang Aktif (%)	100	100	100	3.380.000,000	100	3.718.000,000	100	4.089.800,000	100	4.498.780,000	100	4.948.658,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
														1.02.0.00.0.00.01.0009 - PUSKESMAS DURIAN DEPUN
Meningkatnya Pembudayaan Gaya Hidup Sehat pada Masyarakat melalui Penguatan Kesadaran, Pengetahuan, dan Penerapan untuk Hidup Sehat pada Puskesmas Embong Ijuk	Persentase Posyandu Siklus Hidup yang Aktif (%)	100	100	100	4.288.000,000	100	4.716.800,000	100	5.188.480,000	100	5.707.328,000	100	6.278.061,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
														1.02.0.00.0.00.01.0003 - PUSKESMAS EMBONG IJUK
Meningkatnya Pembudayaan Gaya Hidup Sehat pada Masyarakat melalui Penguatan Kesadaran, Pengetahuan, dan Penerapan untuk Hidup Sehat pada Puskesmas Kabawetan	Persentase Posyandu Siklus Hidup yang Aktif (%)	100	100	100	3.912.000,000	100	4.303.200,000	100	4.733.520,000	100	5.206.872,000	100	5.727.559,200	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
														1.02.0.00.0.00.01.0011 - PUSKESMAS KABAWETAN



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pembudayaan Gaya Hidup Sehat pada Masyarakat melalui Penguatan Kesadaran, Pengetahuan, dan Penerapan untuk Hidup Sehat pada Puskesmas Keban Agung	Persentase Posyandu Siklus Hidup yang Aktif (%)	100	100	100	3.321.600,000	100	3.653.760,000	100	4.019.136,000	100	4.421.050,000	100	4.863.155,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
														1.02.0.00.0.00.01.0015 - PUSKESMAS KEBAN AGUNG
Meningkatnya Pembudayaan Gaya Hidup Sehat pada Masyarakat melalui Penguatan Kesadaran, Pengetahuan, dan Penerapan untuk Hidup Sehat pada Puskesmas Kelobak	Persentase Posyandu aktif (%)	100	100	100	6.842.000,000	100	7.526.200,000	100	8.278.820,000	100	9.106.702,000	100	10.017.372,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
														1.02.0.00.0.00.01.0005 - PUSKESMAS KELOBAK
Meningkatnya Pembudayaan Gaya Hidup Sehat pada Masyarakat melalui Penguatan Kesadaran, Pengetahuan, dan Penerapan untuk Hidup Sehat pada Puskesmas Muara Langkap	Persentase Posyandu Siklus Hidup yang Aktif (%)	100	100	100	17.252.400,000	100	18.977.640,000	100	20.875.404,000	100	22.962.944,000	100	25.259.239,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
														1.02.0.00.0.00.01.0007 - PUSKESMAS MUARA LANGKAP
Meningkatnya Pembudayaan Gaya Hidup Sehat pada Masyarakat melalui Penguatan Kesadaran, Pengetahuan, dan Penerapan untuk Hidup Sehat pada Puskesmas Nanti Agung	Persentase Posyandu Siklus Hidup yang Aktif (%)	100	100	100	600.000,000	100	660.000,000	100	726.000,000	100	798.600,000	100	878.460,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
														1.02.0.00.0.00.01.0008 - PUSKESMAS NANTI AGUNG



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pembudayaan Gaya Hidup Sehat pada Masyarakat melalui Penguatan Kesadaran, Pengetahuan, dan Penerapan untuk Hidup Sehat pada Puskesmas Pasar Kepahiang	Persentase Posyandu Siklus Hidup yang Aktif (%)	100	100	100	2.296.000,000	100	2.525.600,000	100	2.778.160,000	100	3.055.976,000	100	3.361.574,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
														1.02.0.00.0.00.01.0004 - PUSKESMAS PASAR KEPAHIANG
Meningkatnya Pembudayaan Gaya Hidup Sehat pada Masyarakat melalui Penguatan Kesadaran, Pengetahuan, dan Penerapan untuk Hidup Sehat pada Puskesmas Talang Babatan	Persentase Posyandu Siklus Hidup yang Aktif (%)	100	100	100	28.050.000,000	100	28.050.000,000	100	28.050.000,000	100	28.050.000,000	100	28.050.000,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
														1.02.0.00.0.00.01.0013 - PUSKESMAS TALANG BABATAN
Meningkatnya Pembudayaan Gaya Hidup Sehat pada Masyarakat melalui Penguatan Kesadaran, Pengetahuan, dan Penerapan untuk Hidup Sehat pada Puskesmas Tebat Karai	Persentase Posyandu Siklus Hidup yang Aktif (%)	100	100	100	12.160.000,000	100	13.376.000,000	100	14.713.600,000	100	16.184.960,000	100	17.803.456,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
														1.02.0.00.0.00.01.0010 - PUSKESMAS TEBAT KARAI
Meningkatnya Pembudayaan Gaya Hidup Sehat pada Masyarakat melalui Penguatan Kesadaran, Pengetahuan, dan Penerapan untuk Hidup Sehat pada Puskesmas Ujan Mas	Persentase Posyandu Siklus Hidup yang Aktif (%)	100	100	100	2.150.000,000	100	2.650.000,000	100	2.831.500,000	100	3.000.000,000	100	3.000.000,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
														1.02.0.00.0.00.01.0016 - PUSKESMAS UJAN MAS
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					182.017.937.916,000		200.508.437.916,000		198.801.972.916,000		227.395.477.916,000		227.395.477.916,000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.277.937.916,000		9.302.937.916,000		9.567.937.916,000		9.497.937.916,000		9.497.937.916,000	
Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Mendukung Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Persentase Tingkat Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	90	92	94	9.277.937.916,000	96	9.302.937.916,000	98	9.567.937.916,000	100	9.497.937.916,000	100	9.497.937.916,000	1.03.1.04.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					26.650.000.000,000		27.595.000.000,000		26.353.000.000,000		29.077.000.000,000		29.077.000.000,000	
Meningkatkan Kinerja Dan Keberlanjutan Pengelolaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase Penambahan Luas Area yang Terlayani Infrastruktur Sumber Daya Air (Persentase)	34,38	37	40	26.650.000.000,000	43,5	27.595.000.000,000	46,5	26.353.000.000,000	50	29.077.000.000,000	50	29.077.000.000,000	1.03.1.04.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					25.100.000.000,000		26.715.000.000,000		28.775.000.000,000		33.450.000.000,000		33.450.000.000,000	
Meningkatkan Rumah Tangga Berakses Air Bersih	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih (Persentase)	91,8	93,3	94,5	25.100.000.000,000	95,7	26.715.000.000,000	97	28.775.000.000,000	98,3	33.450.000.000,000	98,3	33.450.000.000,000	1.03.1.04.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					4.845.000.000,000		5.445.000.000,000		5.895.000.000,000		8.555.000.000,000		8.555.000.000,000	
Meningkatkan Rumah Tangga Yang Terlayani Fasilitas Sarana Dan Prasarana Persampahan	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Fasilitas Sarana dan Prasarana Persampahan (Persentase)	50	57,5	65	4.845.000.000,000	72,5	5.445.000.000,000	80	5.895.000.000,000	87,5	8.555.000.000,000	87,5	8.555.000.000,000	1.03.1.04.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					8.250.000.000,000		17.516.000.000,000		20.639.000.000,000		17.968.000.000,000		17.968.000.000,000	
Meningkatnya Rumah tangga Yang Terlayani Sistem Pengolahan Air Limbah	Persentase Rumah tinggal yang Terlayani Sistem Pengolahan Air Limbah (Persentase)	66,15	67,5	69	8.250.000.000,000	70,5	17.516.000.000,000	72	20.639.000.000,000	73,5	17.968.000.000,000	73,5	17.968.000.000,000	1.03.1.04.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					15.900.000.000,000		14.850.000.000,000		14.300.000.000,000		14.660.000.000,000		14.660.000.000,000	
Meningkatnya Rumah Tangga Yang Terlayani Drainase	Presentase Rumah tangga yang terlayani drainase (Persentase)	70	75	79	15.900.000.000,000	82	14.850.000.000,000	85	14.300.000.000,000	88	14.660.000.000,000	88	14.660.000.000,000	1.03.1.04.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					15.900.000.000,000		18.900.000.000,000		22.600.000.000,000		24.500.000.000,000		24.500.000.000,000	
Meningkatnya Fasilitas Perkantoran Dan Gedung Daerah	Peresentase Ketercukupan Bangunan Gedung Kantor (Persentase)	70	75	80	15.900.000.000,000	85	18.900.000.000,000	90	22.600.000.000,000	95	24.500.000.000,000	95	24.500.000.000,000	1.03.1.04.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					10.400.000.000,000		11.000.000.000,000		12.500.000.000,000		13.000.000.000,000		13.000.000.000,000	
Terwujudnya Lingkungan Permukiman Yang Layak Huni Melalui Peningkatan Kualitas Bangunan Gedung Serta Prasarana Dan Sarana Lingkungan	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	50	52	54	10.400.000.000,000	56	11.000.000.000,000	58	12.500.000.000,000	60	13.000.000.000,000	60	13.000.000.000,000	1.03.1.04.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					62.750.000.000,000		65.744.500.000,000		54.547.035.000,000		72.237.540.000,000		72.237.540.000,000	
Meningkatnya Akses Dan Kualitas Infrastruktur Jalan	Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap (Persentase)	43,47	45	47,5	62.750.000.000,000	50	65.744.500.000,000	52	54.547.035.000,000	55	72.237.540.000,000	55	72.237.540.000,000	1.03.1.04.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					995.000.000,000		995.000.000,000		975.000.000,000		1.215.000.000,000		1.215.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas Pekerja Kontruksi Di Kabupaten Kepahiang	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi yang Memiliki Sertifikat Kompetensi (%)	55	60	65	995.000.000,000	70	995.000.000,000	75	975.000.000,000	80	1.215.000.000,000	80	1.215.000.000,000	1.03.1.04.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					1.950.000.000,000		2.445.000.000,000		2.650.000.000,000		3.235.000.000,000		3.235.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	50	55	60	1.950.000.000,000	65	2.445.000.000,000	70	2.650.000.000,000	75	3.235.000.000,000	75	3.235.000.000,000	1.03.1.04.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					4.915.000.000,000		6.765.000.000,000		6.920.000.000,000		7.780.000.000,000		7.780.000.000,000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					1.725.000.000,000		2.395.000.000,000		2.185.000.000,000		2.595.000.000,000		2.595.000.000,000	
Terlaksananya Pengembangan Perumahan Di Lokasi Rawan Bencana Dan Relokasi Akibat Program Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang dibangun dan direhabilitasi (Persentase)	50	50	52	1.725.000.000,000	55	2.395.000.000,000	57	2.185.000.000,000	60	2.595.000.000,000	60	2.595.000.000,000	1.03.1.04.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					280.000.000,000		1.060.000.000,000		910.000.000,000		1.060.000.000,000		1.060.000.000,000	
Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang ditangani (Persentase)	2	2	2	280.000.000,000	2	1.060.000.000,000	2	910.000.000,000	2	1.060.000.000,000	2	1.060.000.000,000	1.03.1.04.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					2.910.000.000,000		3.310.000.000,000		3.825.000.000,000		4.125.000.000,000		4.125.000.000,000	
Meningkatkan Kualitas Hidup Dan Aksesibilitas Masyarakat	Presentase Rumah Tangga yang Terlayani Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Persentase)	50	50	55	2.910.000.000,000	60	3.310.000.000,000	65	3.825.000.000,000	70	4.125.000.000,000	70	4.125.000.000,000	1.03.1.04.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					13.914.159.700,000		14.712.144.200,000		15.394.144.200,000		16.449.644.200,000		16.609.644.200,000	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.315.784.700,000		8.815.744.200,000		9.387.744.200,000		9.077.244.200,000		9.342.244.200,000	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai Sakip OPD (Nilai)	65,20	65,80	66	4.559.269.700,000	66,15	4.708.744.200,000	66,18	4.978.744.200,000	66,20	4.880.244.200,000	66,22	4.880.244.200,000	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase Dokumen Perencanaan Anggaran dan Kinerja (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Daerah Kabupaten/Kota (%)	95	95	95	3.756.515.000,000	95	4.107.000.000,000	95	4.409.000.000,000	95	4.197.000.000,000	95	4.462.000.000,000	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					1.351.975.000,000		810.000.000,000		875.000.000,000		1.106.000.000,000		1.251.000.000,000	
MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	55	55	55	1.351.975.000,000	65	810.000.000,000	75	875.000.000,000	85	1.106.000.000,000	95	1.251.000.000,000	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					4.000.000.000,000		4.800.000.000,000		4.825.000.000,000		5.960.000.000,000		5.710.000.000,000	
Meningkatnya Indeks Kapasitas Daerah	Persentase Keterpenuhan Capaian Penguatan Kapasitas Daerah (%)	5	10	10	4.000.000.000,000	10	4.800.000.000,000	15	4.825.000.000,000	15	5.960.000.000,000	15	5.710.000.000,000	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					246.400.000,000		286.400.000,000		306.400.000,000		306.400.000,000		306.400.000,000	
Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	100	100	100	246.400.000,000	100	286.400.000,000	100	306.400.000,000	100	306.400.000,000	100	306.400.000,000	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (Menit)	15	15	15		15		10		10		5		1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					4.417.033.163,000		4.838.860.493,000		5.066.557.776,000		5.312.904.234,000		5.316.503.234,000	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.643.351.363,000		3.987.810.513,000		4.130.402.798,000		4.283.133.758,000		4.286.732.758,000	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Dinas Sosial	Nilai Sakip OPD (Nilai)	76,05	70,10	76,50	3.643.351.363,000	77	3.987.810.513,000	78	4.130.402.798,000	79	4.283.133.758,000	80	4.286.732.758,000	1.06.1.06.0.00.01.0000 - Dinas Sosial



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terlaksana dengan Baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.1.06.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	97,26	78,63	100		100		100		100		100		1.06.1.06.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					65.000.000,000		71.500.000,000		78.650.000,000		86.515.000,000		86.515.000,000	
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (Persentase)	100	0	100	65.000.000,000	100	71.500.000,000	100	78.650.000,000	100	86.515.000,000	100	86.515.000,000	1.06.1.06.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					473.712.800,000		521.084.080,000		573.192.488,000		630.511.737,000		630.511.737,000	
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial (%)	80	80	80	473.712.800,000	82	521.084.080,000	82	573.192.488,000	82	630.511.737,000	85	630.511.737,000	1.06.1.06.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial (%)	75	75	76		76		77		77		77		1.06.1.06.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					119.979.000,000		131.976.900,000		145.174.590,000		159.692.049,000		159.692.049,000	
Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)	100	86	100	119.979.000,000	100	131.976.900,000	100	145.174.590,000	100	159.692.049,000	100	159.692.049,000	1.06.1.06.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					114.990.000,000		126.489.000,000		139.137.900,000		153.051.690,000		153.051.690,000	
Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap	75	75	76	114.990.000,000	76	126.489.000,000	77	139.137.900,000	77	153.051.690,000	77	153.051.690,000	1.06.1.06.0.00.01.0000 - Dinas Sosial



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Darurat Lengkap (%)													
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					4.415.000.000,000		4.485.000.000,000		4.915.000.000,000		5.115.000.000,000		5.115.000.000,000	
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					250.000.000,000		0,000		250.000.000,000		250.000.000,000		250.000.000,000	
Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja	Persentase Perencanaan Tenaga Kerja (%)	100	0	100	250.000.000,000	0	0,000	100	250.000.000,000	100	250.000.000,000	100	250.000.000,000	3.31.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					795.000.000,000		940.000.000,000		995.000.000,000		1.020.000.000,000		1.020.000.000,000	
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (%)	50	50	60	795.000.000,000	70	940.000.000,000	80	995.000.000,000	90	1.020.000.000,000	90	1.020.000.000,000	3.31.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Universal Coverage Jamsostek (%)	14	24	34		45		65		75		80		3.31.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					1.135.000.000,000		1.260.000.000,000		1.335.000.000,000		1.410.000.000,000		1.410.000.000,000	
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)	75	75	75	1.135.000.000,000	75	1.260.000.000,000	85	1.335.000.000,000	95	1.410.000.000,000	95	1.410.000.000,000	3.31.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					2.235.000.000,000		2.285.000.000,000		2.335.000.000,000		2.435.000.000,000		2.435.000.000,000	
Meningkatnya Pekerja Indonesia yang Terlindungi	Persentase Hubungan Industrial (%)	50	65	75	2.235.000.000,000	75	2.285.000.000,000	75	2.335.000.000,000	85	2.435.000.000,000	85	2.435.000.000,000	3.31.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					1.750.000.000,000		1.780.500.000,000		1.794.500.000,000		1.835.000.000,000		1.835.000.000,000	
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					700.000.000,000		700.000.000,000		700.000.000,000		700.000.000,000		700.000.000,000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	50	51	52	700.000.000,000	53	700.000.000,000	54	700.000.000,000	55	700.000.000,000	55	700.000.000,000	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					230.000.000,000		240.000.000,000		250.000.000,000		260.000.000,000		260.000.000,000	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	230.000.000,000	100	240.000.000,000	100	250.000.000,000	100	260.000.000,000	100	260.000.000,000	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					365.000.000,000		375.000.000,000		385.000.000,000		395.000.000,000		395.000.000,000	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	50	50	52	365.000.000,000	53	375.000.000,000	54	385.000.000,000	55	395.000.000,000	55	395.000.000,000	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					455.000.000,000		465.500.000,000		459.500.000,000		480.000.000,000		480.000.000,000	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	100	100	100	455.000.000,000	100	465.500.000,000	100	459.500.000,000	100	480.000.000,000	100	480.000.000,000	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					3.616.735.444,000		3.966.304.913,000		4.350.126.405,000		4.769.438.920,000		5.197.344.018,000	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.089.540.194,000		3.377.079.413,000		3.688.337.355,000		4.024.841.090,000		4.388.525.199,000	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	3.089.540.194,000	100	3.377.079.413,000	100	3.688.337.355,000	100	4.024.841.090,000	100	4.388.525.199,000	3.25.2.09.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					435.945.250,000		488.850.500,000		546.876.550,000		617.198.455,000		678.818.819,000	
Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (Beras) (%)	128,18	129,4 6	130,75	435.945.250,000	132,06	488.850.500,000	133,38	546.876.550,000	134,71	617.198.455,000	134,71	678.818.819,000	3.25.2.09.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
	Persentase Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Berbasis Sumber Daya Lokal (%)	2,4	2,4	4		5,6		7,2		8		8		3.25.2.09.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					41.250.000,000		45.375.000,000		49.912.500,000		57.399.375,000		60.000.000,000	
Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Ketersediaan Informasi Kerawanan Pangan (%)	100	100	100	41.250.000,000	100	45.375.000,000	100	49.912.500,000	100	57.399.375,000	100	60.000.000,000	3.25.2.09.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					50.000.000,000		55.000.000,000		65.000.000,000		70.000.000,000		70.000.000,000	
Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	63,52	63,60	63,65	50.000.000,000	63,68	55.000.000,000	63,70	65.000.000,000	63,73	70.000.000,000	63,73	70.000.000,000	3.25.2.09.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					15.097.216.039,000		15.731.268.682,000		16.287.226.588,000		18.947.980.286,000		18.947.980.286,000	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.246.816.039,000		4.426.868.682,000		4.488.926.588,000		4.503.690.286,000		4.503.690.286,000	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Dinas Lingkungan Hidup	Persentase Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	67	67	82	4.246.816.039,000	88	4.426.868.682,000	92	4.488.926.588,000	100	4.503.690.286,000	100	4.503.690.286,000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					100.000.000,000		0,000		100.000.000,000		300.000.000,000		300.000.000,000	
Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan Untuk Memitigasi Dampak KRP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup (%)	50	50	0	100.000.000,000	50	0,000	50	100.000.000,000	100	300.000.000,000	100	300.000.000,000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					690.000.000,000		743.000.000,000		796.800.000,000		851.480.000,000		851.480.000,000	
Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (%)	85	85	100	690.000.000,000	100	743.000.000,000	100	796.800.000,000	100	851.480.000,000	100	851.480.000,000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					350.000.000,000		500.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Terkelolanya Ruang Terbuka Hijau (%)	5	25	25	350.000.000,000	25	500.000.000,000	25	200.000.000,000	30	200.000.000,000	30	200.000.000,000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					220.000.000,000		270.000.000,000		320.000.000,000		370.000.000,000		370.000.000,000	
Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Kegiatan/Usaha yang Mendapatkan Rekomendasi Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (%)	2	11	29	220.000.000,000	52	270.000.000,000	76	320.000.000,000	89	370.000.000,000	89	370.000.000,000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					360.400.000,000		380.400.000,000		400.400.000,000		430.400.000,000		430.400.000,000	
Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan Hidup (%)	25	40	40	360.400.000,000	40	380.400.000,000	40	400.400.000,000	40	430.400.000,000	40	430.400.000,000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					100.000.000,000		110.000.000,000		120.000.000,000		120.000.000,000		120.000.000,000	
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Sekolah, Organisasi dan/atau Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan (%)	0	13	25	100.000.000,000	50	110.000.000,000	75	120.000.000,000	88	120.000.000,000	88	120.000.000,000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					150.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000	
Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Desa/Kelurahan yang Menerima Penghargaan Lingkungan Hidup (%)	0	20	40	150.000.000,000	60	200.000.000,000	80	200.000.000,000	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					60.000.000,000		70.000.000,000		80.000.000,000		90.000.000,000		90.000.000,000	
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana	Persentase Sengketa Lingkungan yang Terselesaikan (%)	5	100	100	60.000.000,000	100	70.000.000,000	100	80.000.000,000	100	90.000.000,000	100	90.000.000,000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					8.820.000.000,000		9.031.000.000,000		9.581.100.000,000		11.882.410.000,000		11.882.410.000,000	
Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Persentase Jumlah Sampah yang Terkelola (%)	46	58	64	8.820.000.000,000	69	9.031.000.000,000	75	9.581.100.000,000	83	11.882.410.000,000	83	11.882.410.000,000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					4.374.905.912,000		4.682.650.000,000		4.834.085.000,000		4.957.176.980,000		4.986.799.492,000	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.516.105.912,000		3.776.900.000,000		3.875.320.000,000		3.975.611.110,000		3.975.611.110,000	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Sakip OPD (Nilai)	72	73	74	3.516.105.912,000	75	3.776.900.000,000	76	3.875.320.000,000	77	3.975.611.110,000	78	3.975.611.110,000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					338.800.000,000		360.000.000,000		374.000.000,000		385.800.000,000		385.800.000,000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan (%)	50,5	60	65	338.800.000,000	75	360.000.000,000	78	374.000.000,000	80	385.800.000,000	80	385.800.000,000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	25	30	35		40		45		50		50		2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Perekaman KTP elektronik (%)	96,2	98	99		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					250.000.000,000		265.750.000,000		289.765.000,000		290.765.870,000		305.388.382,000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran (%)	97,71	99	100	250.000.000,000	100	265.750.000,000	100	289.765.000,000	100	290.765.870,000	100	305.388.382,000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun (%)	98,08	99	99,5		99,08		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran (Persentase)	95	96	97		98		99		99,8		99,8		2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					180.000.000,000		185.000.000,000		195.000.000,000		200.000.000,000		210.000.000,000	
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	89,44	90	90,5	180.000.000,000	91	185.000.000,000	92	195.000.000,000	92,5	200.000.000,000	93	210.000.000,000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sma (%)	6	4	4		5		4		4		4		2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Terpenuhinya Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola SPBE serta Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					90.000.000,000		95.000.000,000		100.000.000,000		105.000.000,000		110.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Jumlah data profil kependudukan yang disusun (Dokumen)	1	1	1	90.000.000,000	1	95.000.000,000	1	100.000.000,000	1	105.000.000,000	1	110.000.000,000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyajian Data Kependudukan dalam Skala Satu Provinsi Tahun (Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					8.274.637.960,000		8.951.991.956,000		9.684.691.152,000		10.022.895.317,000		10.022.895.317,000	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.751.307.960,000		5.266.328.956,000		5.820.461.652,000		5.962.241.317,000		5.962.241.317,000	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Dokumen Perencanaan Anggaran dan Kinerja (%)	91,00	100	100	4.751.307.960,000	100	5.266.328.956,000	100	5.820.461.652,000	100	5.962.241.317,000	100	5.962.241.317,000	2.13.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					2.462.650.000,000		2.518.915.000,000		2.580.806.500,000		2.648.889.000,000		2.648.889.000,000	
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Tertib Administrasi Pemerintah Desa (%)	35,95	39,54	43,49	2.462.650.000,000	47,85	2.518.915.000,000	52,63	2.580.806.500,000	57,89	2.648.889.000,000	57,89	2.648.889.000,000	2.13.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					1.060.680.000,000		1.166.748.000,000		1.283.423.000,000		1.411.765.000,000		1.411.765.000,000	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif (%)	72,00	79,20	87,12	1.060.680.000,000	95,83	1.166.748.000,000	97,00	1.283.423.000,000	100	1.411.765.000,000	100	1.411.765.000,000	2.13.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Adat dalam Pembangunan														
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					7.711.000.000,000		7.948.000.000,000		7.985.000.000,000		7.737.000.000,000		7.737.000.000,000	
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.539.000.000,000		3.761.000.000,000		3.783.000.000,000		4.000.000.000,000		4.000.000.000,000	
Terjaminnya penunjang urusan satuan kerja perangkat daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	3.539.000.000,000	Wajar Tanpa Pengecualian	3.761.000.000,000	Wajar Tanpa Pengecualian	3.783.000.000,000	Wajar Tanpa Pengecualian	4.000.000.000,000	Wajar Tanpa Pengecualian	4.000.000.000,000	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					250.000.000,000		250.000.000,000		250.000.000,000		250.000.000,000		250.000.000,000	
Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15â€™19) Per 1.000 Perempuan Usia 15â€™19 Tahun (ASFR 15â€™19) (%)	34,1	33,1	32,1	250.000.000,000	31,1	250.000.000,000	30,1	250.000.000,000	29,1	250.000.000,000	29,1	250.000.000,000	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					3.447.000.000,000		3.457.000.000,000		3.467.000.000,000		2.997.000.000,000		2.997.000.000,000	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR (%))	65,1	65,9	66	3.447.000.000,000	66,1	3.457.000.000,000	66,2	3.467.000.000,000	66,3	2.997.000.000,000	66,3	2.997.000.000,000	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					475.000.000,000		480.000.000,000		485.000.000,000		490.000.000,000		490.000.000,000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	70	71	72	475.000.000,000	73	480.000.000,000	74	485.000.000,000	75	490.000.000,000	75	490.000.000,000	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					7.494.432.453,000		8.629.432.453,000		9.024.432.453,000		8.974.432.453,000		8.974.432.453,000	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.404.432.453,000		4.504.432.453,000		4.604.432.453,000		4.704.432.453,000		4.704.432.453,000	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Dinas Perhubungan	Nilai Sakip OPD (Nilai)	65	66	67	4.404.432.453,000	68	4.504.432.453,000	69	4.604.432.453,000	BB	4.704.432.453,000	71	4.704.432.453,000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					3.090.000.000,000		4.125.000.000,000		4.420.000.000,000		4.270.000.000,000		4.270.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten/Kota (Persentase)	4,24	4,10	4	3.090.000.000,000	3,9	4.125.000.000,000	3,8	4.420.000.000,000	3,7	4.270.000.000,000	3,6	4.270.000.000,000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
	Rasio konektivitas kabupaten/kota (%)	60	62,5	65		67,5		70		72,5		75		2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota (Nilai)	0,4	0,8	0,8		0,8		0,8		0,8		0,8		2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					8.827.735.147,000		9.987.487.161,000		10.941.235.877,000		11.625.359.465,000		12.183.109.465,000	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.243.170.147,000		4.667.487.161,000		5.134.235.877,000		5.647.659.465,000		5.647.659.465,000	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	4.243.170.147,000	100	4.667.487.161,000	100	5.134.235.877,000	100	5.647.659.465,000	100	5.647.659.465,000	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					2.334.565.000,000		2.970.000.000,000		3.352.000.000,000		3.762.200.000,000		4.203.420.000,000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Penyediaan dan Penyebaran Informasi Publik	Persentase berita Pemerintah Daerah yang Terdokumentasi serta dipublikasi (%)	94	95	96	2.334.565.000,000	97	2.970.000.000,000	98	3.352.000.000,000	99	3.762.200.000,000	100	4.203.420.000,000	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
	Persentase Penyebaran Informasi Pemerintah Daerah Melalui Media Masa (%)	99,7	98	98		98		100		100		100		2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					2.250.000.000,000		2.350.000.000,000		2.455.000.000,000		2.215.500.000,000		2.332.030.000,000	
Meningkatnya Ketersediaan Kebijakan Internal Tertakit Tata Kelola SPBE, serta Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berkbasis Elektronik (Indeks)	2,28	2,6	2,68	2.250.000.000,000	2,7	2.350.000.000,000	2,8	2.455.000.000,000	2,9	2.215.500.000,000	2,9	2.332.030.000,000	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					3.503.824.460,000		3.563.824.460,000		3.618.824.460,000		3.678.824.460,000		3.698.824.460,000	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.183.824.460,000		3.218.824.460,000		3.248.824.460,000		3.278.824.460,000		3.288.824.460,000	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Daerah Kabupaten/Kota (%)	95	95	95	3.183.824.460,000	95	3.218.824.460,000	95	3.248.824.460,000	95	3.278.824.460,000	95	3.288.824.460,000	2.17.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
	Nilai Sakip OPD (Nilai)	75,6	75,8	76		76,6		76,8		77		78		2.17.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					25.000.000,000		25.000.000,000		25.000.000,000		25.000.000,000		25.000.000,000	
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	10	10	10	25.000.000,000	10	25.000.000,000	10	25.000.000,000	10	25.000.000,000	10	25.000.000,000	2.17.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					25.000.000,000		25.000.000,000		25.000.000,000		25.000.000,000		25.000.000,000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase KSP/USP yang Sehat (%)	5	10	15	25.000.000,000	20	25.000.000,000	25	25.000.000,000	30	25.000.000,000	35	25.000.000,000	2.17.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					35.000.000,000		35.000.000,000		35.000.000,000		35.000.000,000		35.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (Persentase)	23,8	28,57	33,33	35.000.000,000	38,08	35.000.000,000	42,85	35.000.000,000	42,85	35.000.000,000	43,5	35.000.000,000	2.17.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					30.000.000,000		30.000.000,000		30.000.000,000		30.000.000,000		30.000.000,000	
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Presentase Pemberdayaan UKM (%)	14,2	14,2	19,4	30.000.000,000	23,8	30.000.000,000	28,5	30.000.000,000	33,3	30.000.000,000	33,3	30.000.000,000	2.17.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					165.000.000,000		185.000.000,000		205.000.000,000		230.000.000,000		235.000.000,000	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	8	8,58	8,87	165.000.000,000	9,05	185.000.000,000	9,13	205.000.000,000	9,89	230.000.000,000	9,89	235.000.000,000	2.17.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					40.000.000,000		45.000.000,000		50.000.000,000		55.000.000,000		60.000.000,000	
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalini Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	1,21	1,21	1,4	40.000.000,000	1,6	45.000.000,000	1,86	50.000.000,000	2,05	55.000.000,000	2,05	60.000.000,000	2.17.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					6.402.984.664,000		6.217.099.664,000		6.401.599.664,000		6.566.599.664,000		6.741.599.664,000	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.649.099.664,000		5.382.099.664,000		5.491.599.664,000		5.581.599.664,000		5.641.599.664,000	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terlaksana dengan Baik (%)	100	100	100	5.649.099.664,000	100	5.382.099.664,000	100	5.491.599.664,000	100	5.581.599.664,000	100	5.641.599.664,000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN					390.000.000,000		420.000.000,000		455.000.000,000		480.000.000,000		510.000.000,000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
IKLIM PENANAMAN MODAL														
Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Persentase Tersedianya Informasi Pemberian Insentif/ Fasilitas Bidang Penanaman Modal dan Informasi Peluang Usaha Sektor Unggulan (%)	100	100	100	390.000.000,000	100	420.000.000,000	100	455.000.000,000	100	480.000.000,000	100	510.000.000,000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					75.000.000,000		85.000.000,000		90.000.000,000		90.000.000,000		120.000.000,000	
Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Terselenggaranya Promosi Penanaman Modal (%)	100	100	100	75.000.000,000	100	85.000.000,000	100	90.000.000,000	100	90.000.000,000	100	120.000.000,000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					193.885.000,000		215.000.000,000		225.000.000,000		230.000.000,000		240.000.000,000	
Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan Sesuai SOP (%)	95	95	95	193.885.000,000	96	215.000.000,000	96	225.000.000,000	96	230.000.000,000	96	240.000.000,000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					80.000.000,000		95.000.000,000		110.000.000,000		145.000.000,000		180.000.000,000	
Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (%)	60	70	80	80.000.000,000	85	95.000.000,000	85	110.000.000,000	90	145.000.000,000	90	180.000.000,000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					15.000.000,000		20.000.000,000		30.000.000,000		40.000.000,000		50.000.000,000	
Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (%)	0	10	10	15.000.000,000	20	20.000.000,000	30	30.000.000,000	40	40.000.000,000	60	50.000.000,000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAHRAGA					3.190.000.000,000		3.470.000.000,000		4.430.000.000,000		4.535.000.000,000		4.535.000.000,000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					380.000.000,000		435.000.000,000		390.000.000,000		445.000.000,000		445.000.000,000	
Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pembinaan Pemuda Pada Tingkat Kabupaten (%)	1,78	2,1	2,15	380.000.000,000	2,15	435.000.000,000	2,15	390.000.000,000	2,25	445.000.000,000	3,8	445.000.000,000	2.19.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata Pemuda dan olah Raga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					2.720.000.000,000		2.945.000.000,000		3.950.000.000,000		4.000.000.000,000		4.000.000.000,000	
Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Atlet Berprestasi Tingkat Daerah dan Nasional (%)	0	60	60	2.720.000.000,000	70	2.945.000.000,000	70	3.950.000.000,000	70	4.000.000.000,000	70	4.000.000.000,000	2.19.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata Pemuda dan olah Raga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					90.000.000,000		90.000.000,000		90.000.000,000		90.000.000,000		90.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	2,54	2,6	2,65	90.000.000,000	2,7	90.000.000,000	2,75	90.000.000,000	2,8	90.000.000,000	2,8	90.000.000,000	2.19.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata Pemuda dan olah Raga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					470.000.000,000		312.000.000,000		336.200.000,000		362.820.000,000		392.102.000,000	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					470.000.000,000		312.000.000,000		336.200.000,000		362.820.000,000		392.102.000,000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral Sesuai Standar Data	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral Sesuai Standar (%)	50	50	53	470.000.000,000	56	312.000.000,000	59	336.200.000,000	62	362.820.000,000	65	392.102.000,000	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					220.000.000,000		242.000.000,000		266.200.000,000		292.820.000,000		322.102.000,000	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					220.000.000,000		242.000.000,000		266.200.000,000		292.820.000,000		322.102.000,000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah (%)	0	0,77	1,55	220.000.000,000	2,32	242.000.000,000	3,10	266.200.000,000	3,87	292.820.000,000	4,65	322.102.000,000	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					1.756.219.740,000		1.931.841.714,000		2.125.025.885,000		2.337.528.474,000		2.571.281.322,000	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					693.061.600,000		762.367.760,000		838.604.536,000		922.464.990,000		1.014.711.489,000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pengembangan Kebudayaan (%)	70,00	70,00	75,00	693.061.600,000	81,00	762.367.760,000	83,00	838.604.536,000	85,00	922.464.990,000	85,00	1.014.711.489,000	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					345.848.140,000		380.432.954,000		418.476.249,000		460.323.874,000		506.356.262,000	
Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kelompok Kesenian yang Mendapat Pembinaan (%)	75,00	78,00	80,00	345.848.140,000	85,00	380.432.954,000	90,00	418.476.249,000	95,00	460.323.874,000	95,00	506.356.262,000	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					515.697.600,000		567.267.360,000		623.994.096,000		686.393.506,000		755.032.856,000	
Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Informasi Sejarah	Persentase Kelompok Lembaga Adat yang Dibina (%)	78,00	80,00	82,00	515.697.600,000	84,00	567.267.360,000	86,00	623.994.096,000	87,00	686.393.506,000	87,00	755.032.856,000	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					201.612.400,000		221.773.640,000		243.951.004,000		268.346.104,000		295.180.715,000	
Meningkatnya Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persentase Cagar Budaya yang Telah Terdaftar dan Dilindungi (%)	78	80	82	201.612.400,000	85	221.773.640,000	88	243.951.004,000	90	268.346.104,000	90	295.180.715,000	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					4.263.281.854,000		4.476.445.947,000		4.700.268.244,000		4.935.281.656,000		5.182.045.738,000	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.285.971.854,000		3.450.270.447,000		3.622.783.969,000		3.803.923.167,000		3.994.119.325,000	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Nilai Sakip OPD (Nilai)	73,2	74	75	3.285.971.854,000	76	3.450.270.447,000	78	3.622.783.969,000	79	3.803.923.167,000	79	3.994.119.325,000	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					977.310.000,000		1.026.175.500,000		1.077.484.275,000		1.131.358.489,000		1.187.926.413,000	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	68,87	70	71	977.310.000,000	72	1.026.175.500,000	73	1.077.484.275,000	74	1.131.358.489,000	74	1.187.926.413,000	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					146.165.300,000		273.973.565,000		283.072.243,000		293.475.855,000		304.699.647,000	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					116.165.300,000		211.973.565,000		218.072.243,000		224.475.855,000		235.699.647,000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Persentase Arsip OPD, Lembaga Pendidikan, ORMAS, ORPOL,dan Lembaga Pemerintah Lainnya yang Terkelola (%)	40	44,6	53,5	116.165.300,000	62,5	211.973.565,000	71,4	218.072.243,000	80,3	224.475.855,000	100	235.699.647,000	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					30.000.000,000		62.000.000,000		65.000.000,000		69.000.000,000		69.000.000,000	
Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Sesuai NSPK	Jumlah Arsip yang dilakukan Perlindungan dan Penyelamatan (Angka)	0	1.000	2.000	30.000.000,000	2.500	62.000.000,000	3.000	65.000.000,000	3.000	69.000.000,000	3.000	69.000.000,000	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					1.744.474.922,000		1.862.435.014,000		1.986.597.255,000		2.127.575.325,000		2.127.575.325,000	
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					1.619.474.922,000		1.707.435.014,000		1.811.597.255,000		1.922.575.325,000		1.922.575.325,000	
Meningkatnya pengelolaan perikanan budidaya	Persentase Pembudidaya Ikan/Pokdakkan yang Menggunakan Bibit Ikan Unggul (%)	35	40	45	1.619.474.922,000	50	1.707.435.014,000	55	1.811.597.255,000	60	1.922.575.325,000	65	1.922.575.325,000	3.25.2.09.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
	Persentase Pembudidaya Ikan/Pokdakkan yang Terpenuhi Kebutuhan Pakan Ikan Sesuai Standar (%)	20	25	30		35		40		45		50		3.25.2.09.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					125.000.000,000		155.000.000,000		175.000.000,000		205.000.000,000		205.000.000,000	
Meningkatnya Konsumsi Ikan oleh Masyarakat	Persentase Pemberdayaan Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Terfasilitasi (%)	41	50	55	125.000.000,000	60	155.000.000,000	70	175.000.000,000	75	205.000.000,000	75	205.000.000,000	3.25.2.09.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					7.825.000.000,000		8.845.000.000,000		10.025.000.000,000		10.325.000.000,000		10.325.000.000,000	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					4.255.000.000,000		4.555.000.000,000		4.755.000.000,000		4.905.000.000,000		4.905.000.000,000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Nilai Sakip OPD (Nilai)	73,65	75	77	4.255.000.000,000	80	4.555.000.000,000	85	4.755.000.000,000	90	4.905.000.000,000	90	4.905.000.000,000	2.19.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata Pemuda dan olah Raga
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					2.220.000.000,000		2.710.000.000,000		3.430.000.000,000		3.580.000.000,000		3.580.000.000,000	
Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Lokasi Wisata Unggulan (%)	0	10	19	2.220.000.000,000	26	2.710.000.000,000	33	3.430.000.000,000	36	3.580.000.000,000	36	3.580.000.000,000	2.19.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata Pemuda dan olah Raga
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					810.000.000,000		850.000.000,000		1.000.000.000,000		1.000.000.000,000		1.000.000.000,000	
Meningkatnya Tingkat Kunjungan Wisatawan	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	-84	1,68	1,96	810.000.000,000	3,77	850.000.000,000	3,99	1.000.000.000,000	4,83	1.000.000.000,000	4,83	1.000.000.000,000	2.19.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata Pemuda dan olah Raga
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					80.000.000,000		80.000.000,000		120.000.000,000		120.000.000,000		120.000.000,000	
Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	0	1,25	2,5	80.000.000,000	2,5	80.000.000,000	3,75	120.000.000,000	3,75	120.000.000,000	3,75	120.000.000,000	2.19.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata Pemuda dan olah Raga
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					460.000.000,000		650.000.000,000		720.000.000,000		720.000.000,000		720.000.000,000	
Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Usaha Ekraf yang Terbina (%)	0	33	41	460.000.000,000	61	650.000.000,000	61	720.000.000,000	61	720.000.000,000	61	720.000.000,000	2.19.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata Pemuda dan olah Raga
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					12.882.156.267,000		15.996.979.707,000		18.396.526.663,000		21.156.005.653,000		21.150.646.037,000	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.108.466.267,000		12.789.736.207,000		14.708.196.638,000		16.914.426.123,000		16.909.066.507,000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Dinas Pertanian	Nilai Sakip OPD (Nilai)	76,5	77	78	10.863.803.767,000	79	12.508.374.332,000	80	14.384.630.482,000	81	16.542.325.045,000	81	16.536.965.429,000	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada UPTD Balai Benih Holtikultura	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan (Persentase)	100	100	100	46.287.500,000	100	53.230.625,000	100	61.215.219,000	100	70.397.502,000	100	70.397.502,000	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
														3.27.0.00.0.00.01.0005 - UPTD Balai Benih Holtikultura
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada UPTD Balai Pembibitan Ternak	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan (Persentase)	100	100	100	33.062.500,000	100	38.021.875,000	100	43.725.156,000	100	50.283.929,000	100	50.283.929,000	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
														3.27.0.00.0.00.01.0002 - UPTD Balai Pembibitan Ternak
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada UPTD Balai Penyuluhan Pertanian	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan (Persentase)	100	100	100	99.187.500,000	100	114.065.625,000	100	131.175.469,000	100	150.851.789,000	100	150.851.789,000	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
														3.27.0.00.0.00.01.0004 - UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada UPTD Pusat Kesehatan Hewan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan (Persentase)	100	100	100	33.062.500,000	100	38.021.875,000	100	43.725.156,000	100	50.283.929,000	100	50.283.929,000	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
														3.27.0.00.0.00.01.0001 - UPTD Pusat Kesehatan Hewan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada UPTD Rumah Potong Hewan dan Rumah Potong Unggas	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan (Persentase)	100	100	100	33.062.500,000	100	38.021.875,000	100	43.725.156,000	100	50.283.929,000	100	50.283.929,000	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
														3.27.0.00.0.00.01.0003 - UPTD Rumah Potong Hewan dan Rumah Potong Unggas
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					437.020.000,000		825.073.000,000		948.833.950,000		1.091.159.043,000		1.091.159.043,000	
Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (%)	62,9	65	70	437.020.000,000	80	825.073.000,000	90	948.833.950,000	92	1.091.159.043,000	95	1.091.159.043,000	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN					802.250.000,000		1.352.587.500,000		1.555.475.625,000		1.788.796.969,000		1.788.796.969,000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PRASARANA PERTANIAN														
Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (%)	93,2	95	96	802.250.000,000	98	1.352.587.500,000	98,5	1.555.475.625,000	99	1.788.796.969,000	99,8	1.788.796.969,000	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					180.730.000,000		257.839.500,000		296.515.425,000		340.992.739,000		340.992.739,000	
Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (%)	97,09	98	99	180.730.000,000	100	257.839.500,000	100	296.515.425,000	100	340.992.739,000	100	340.992.739,000	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					78.690.000,000		140.493.500,000		161.567.525,000		185.802.654,000		185.802.654,000	
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (%)	100	100	100	78.690.000,000	100	140.493.500,000	100	161.567.525,000	100	185.802.654,000	100	185.802.654,000	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					275.000.000,000		631.250.000,000		725.937.500,000		834.828.125,000		834.828.125,000	
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	95,9	95,9	96	275.000.000,000	97	631.250.000,000	98	725.937.500,000	99	834.828.125,000	99,8	834.828.125,000	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					1.440.000.000,000		1.465.000.000,000		1.880.000.000,000		1.895.000.000,000		1.895.000.000,000	
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					850.000.000,000		850.000.000,000		1.250.000.000,000		1.250.000.000,000		1.250.000.000,000	
Meningkatnyan kualitas sarana perdagangan dan Distribusi barang yang efisien, merata dan terintergrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	12	12	12	850.000.000,000	12	850.000.000,000	12	1.250.000.000,000	12	1.250.000.000,000	12	1.250.000.000,000	2.17.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					80.000.000,000		80.000.000,000		80.000.000,000		80.000.000,000		80.000.000,000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	67,21	68,21	69,44	80.000.000,000	70	80.000.000,000	70,83	80.000.000,000	71,11	80.000.000,000	71,11	80.000.000,000	2.17.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					375.000.000,000		375.000.000,000		375.000.000,000		375.000.000,000		375.000.000,000	
Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	20	20	20	375.000.000,000	20	375.000.000,000	20	375.000.000,000	20	375.000.000,000	20	375.000.000,000	2.17.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					135.000.000,000		160.000.000,000		175.000.000,000		190.000.000,000		190.000.000,000	
Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	8	12,5	14	135.000.000,000	16	160.000.000,000	18	175.000.000,000	20	190.000.000,000	20	190.000.000,000	2.17.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					6.555.000.000,000		7.444.000.000,000		8.151.000.000,000		9.039.000.000,000		9.039.000.000,000	
3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.475.000.000,000		5.314.000.000,000		6.151.000.000,000		6.639.000.000,000		6.639.000.000,000	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Nilai Sakip OPD (Nilai)	77,9	78,25	78,60	4.475.000.000,000	79,20	5.314.000.000,000	79,50	6.151.000.000,000	79,65	6.639.000.000,000	79,65	6.639.000.000,000	3.31.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					1.580.000.000,000		1.630.000.000,000		1.500.000.000,000		1.900.000.000,000		1.900.000.000,000	
Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Perencanaan dan Pembangunan Industri (%)	65	70	70	1.580.000.000,000	75	1.630.000.000,000	75	1.500.000.000,000	85	1.900.000.000,000	85	1.900.000.000,000	3.31.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	Persentase Pengendalian Izin Usaha Industri (%)	50	50	60	200.000.000,000	75	200.000.000,000	75	200.000.000,000	95	200.000.000,000	95	200.000.000,000	3.31.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					300.000.000,000		300.000.000,000		300.000.000,000		300.000.000,000		300.000.000,000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (%)	55	65	65	300.000.000,000	75	300.000.000,000	75	300.000.000,000	95	300.000.000,000	95	300.000.000,000	3.31.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					22.000.000,000		24.200.000,000		26.620.000,000		29.282.000,000		29.282.000,000	
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					22.000.000,000		24.200.000,000		26.620.000,000		29.282.000,000		29.282.000,000	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Kapasitas Transmigran dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	20	20	20	22.000.000,000	20	24.200.000,000	20	26.620.000,000	20	29.282.000,000	20	29.282.000,000	2.13.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					33.206.512.888,000		37.131.067.172,000		40.834.223.889,000		44.917.646.278,120		44.917.646.278,120	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					26.399.411.892,000		29.377.127.812,000		32.304.890.593,000		35.535.379.652,520		35.535.379.652,520	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Sekretariat Daerah	Persentase Kelengkapan Dokumen Kepegawaian, Keuangan dan Administrasi Umum (%)	100	100	100	15.169.371.932,000	100	17.127.941.132,000	100	18.830.785.245,000	100	20.713.863.769,720	100	20.713.863.769,720	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Bagian Umum	Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Fasilitasi Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (%)	100	100	100	10.312.081.960,000	100	11.051.832.880,000	100	12.157.016.168,000	100	13.372.717.784,800	100	13.372.717.784,800	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Bagian Protokol	Persentase Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan (%)	100	100	100	433.958.000,000	100	597.353.800,000	100	657.089.180,000	100	722.798.098,000	100	722.798.098,000	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Bagian Organisasi	Nilai Indeks Kepuasan	88,04	89,11	90,12	484.000.000,000	91,00	600.000.000,000	92,30	660.000.000,000	95,00	726.000.000,000	96,00	726.000.000,000	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Masyarakat (IKM) (%)													4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
	Nilai Sakip OPD (Nilai)	74,05	75	76		77		78		79		80		
	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	3,85	3,86	3,87		3,88		3,89		3,9		3,92		
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					5.580.205.000,000		6.240.257.360,000		6.864.283.096,000		7.550.711.405,600		7.550.711.405,600	
Meningkatnya Administrasi Tata Kelola Bagian Pemerintahan	Nilai LPPD (Nilai)	2,9	3,1	3,15	3.033.996.400,000	3,25	3.277.827.900,000	3,3	3.605.610.690,000	3,5	3.966.171.759,000	3,55	3.966.171.759,000	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
	Nilai SPM (Nilai)	61,70	65,80	68,50		72,80		76,60		80,20		86,00		4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
														4.01.0.00.0.00.01.0001 - Bagian Pemerintahan
Meningkatnya Administrasi Tata Kelola Bagian Hukum	Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	77,3	89,1	89,2	534.000.000,000	89,5	749.000.000,000	89,6	823.900.000,000	89,7	906.290.000,000	90,2	906.290.000,000	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
														4.01.0.00.0.00.01.0003 - Bagian Hukum
Meningkatnya Administrasi Tata Kelola Bagian Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Tepat Waktu (%)	100	100	100	2.012.208.600,000	100	2.213.429.460,000	100	2.434.772.406,000	100	2.678.249.646,600	100	2.678.249.646,600	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
														4.01.0.00.0.00.01.0002 - Bagian Kesejahteraan Rakyat
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					1.226.895.996,000		1.513.682.000,000		1.665.050.200,000		1.831.555.220,000		1.831.555.220,000	
Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan di Bagian Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Pembinaan BUMD, BLUD serta Sumber Daya Alam (%)	100	100	100	458.905.996,000	100	670.233.000,000	100	737.256.300,000	100	810.981.930,000	100	810.981.930,000	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) (Indeks)	2,86	2,96	3,01		3,05		3,10		3,15		3,17		4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														4.01.0.00.0.00.01.0004 - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Bagian Pembangunan	Persentase Program yang Selesai Tepat Waktu dan Tepat Mutu (%)	100	100	100	434.000.000,000	100	476.060.000,000	100	523.666.000,000	100	576.032.600,000	100	576.032.600,000	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
														4.01.0.00.0.00.01.0005 - Bagian Administrasi Pembangunan
Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Jumlah Pengadaan Barang/Jasa yang Terealisasi (%)	100	100	100	333.990.000,000	100	367.389.000,000	100	404.127.900,000	100	444.540.690,000	100	444.540.690,000	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
														4.01.0.00.0.00.01.0006 - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					43.713.896.244,000		46.174.390.644,000		47.575.315.644,000		49.834.815.150,000		50.001.468.150,000	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					27.430.161.244,000		28.889.655.644,000		30.285.580.644,000		31.550.080.150,000		31.711.733.150,000	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Sekretariat DPRD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	27.430.161.244,000	100	28.889.655.644,000	100	30.285.580.644,000	100	31.550.080.150,000	100	31.711.733.150,000	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					16.283.735.000,000		17.284.735.000,000		17.289.735.000,000		18.284.735.000,000		18.289.735.000,000	
Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Perundang- Undangan serta Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Penyediaan Fasilitas dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (%)	100	100	100	16.283.735.000,000	100	17.284.735.000,000	100	17.289.735.000,000	100	18.284.735.000,000	100	18.289.735.000,000	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					10.157.500.000,000		10.758.000.000,000		11.193.500.000,000		11.586.500.000,000		11.941.500.000,000	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.737.500.000,000		6.316.000.000,000		6.727.500.000,000		7.096.500.000,000		7.421.500.000,000	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Nilai Sakip OPD (Nilai)	78,45	78,50	78,75	5.737.500.000,000	79,00	6.316.000.000,000	79,25	6.727.500.000,000	79,50	7.096.500.000,000	79,75	7.421.500.000,000	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Ketersediaannya Penunjang Urusan Pemerintahan pada BAPPEDA (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					2.720.000.000,000		2.742.000.000,000		2.766.000.000,000		2.790.000.000,000		2.820.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (%)	100	100	100	2.520.000.000,000	100	2.542.000.000,000	100	2.566.000.000,000	100	2.590.000.000,000	100	2.620.000.000,000	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah dengan Predikat Baik dan Sangat Baik (Permendagri No. 86 Tahun 2017) (%)	100	100	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					1.700.000.000,000		1.700.000.000,000		1.700.000.000,000		1.700.000.000,000		1.700.000.000,000	
Meningatnya keselarasan program perangkat daerah pengampu bidang sumber daya dalam terhadap prioritas daerah	Persentase Keselarasan Program Perangkat Daerah Pengampu Bidang SDA Terhadap Prioritas Daerah (%)	100	100	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya keselarasan indikator sasaran prioritas daerah (RKPD) terhadap indikator kinerja utama(IKU) perangkat daerah dalam pelaksanaannya di tahun berjalan (tahun n)	Persentase Keselarasan Indikator Sasaran Prioritas Daerah (RKPD) terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dalam Pelaksanaannya di Tahun Berjalan (Tahun n) (%)	0	0	100	300.000.000,000	100	300.000.000,000	100	300.000.000,000	100	300.000.000,000	100	300.000.000,000	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya keselarasan program perangkat daerah pengampu bidang kewilayahan terhadap prioritas daerah	Persentase Keselarasan Program Perangkat Daerah Pengampuh Bidang Kewilayahan terhadap Prioritas Daerah (%)	100	100	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya keselarasan program perangkat daerah pengampu bidang manusia terhadap prioritas daerah	Persentase Keselarasan Program Perangkat Daerah Pengampuh Bidang Pembangunan Manusia terhadap Prioritas Daerah (%)	100	100	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya keselarasan program perangkat daerah pengampu bidang pemerintah terhadap prioritas daerah	Persentase Keselarasan Program Perangkat Daerah Pengampuh Bidang Pemerintahan terhadap Prioritas Daerah (%)	100	100	100	300.000.000,000	100	300.000.000,000	100	300.000.000,000	100	300.000.000,000	100	300.000.000,000	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya keselarasan program perangkat daerah pengampu bidang pengampu infrastruktur terhadap prioritas daerah	Persentase Keselarasan Program Perangkat Daerah Pengampuh Bidang Infrastruktur terhadap Prioritas Daerah (%)	100	100	100	300.000.000,000	100	300.000.000,000	100	300.000.000,000	100	300.000.000,000	100	300.000.000,000	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya keselarasan program perangkat daerah pengampu bidang perekonomian terhadap prioritas daerah	Persentase Keselarasan Program Perangkat Daerah Pengampuh Bidang Perekonomian terhadap Prioritas Daerah (%)	100	100	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.02 - KEUANGAN					171.416.874.689,100		188.558.561.718,010		207.414.417.889,210		228.155.859.670,030		250.971.445.635,720	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					23.095.229.829,100		25.404.752.812,010		27.945.228.093,210		30.739.750.902,030		33.813.725.991,720	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Badan Keuangan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terlaksana dengan Baik (%)	96,48	100	100	23.095.229.829,100	100	25.404.752.812,010	100	27.945.228.093,210	100	30.739.750.902,030	100	33.813.725.991,720	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Keuangan Daerah



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					145.874.582.810,000		160.462.041.091,000		176.508.245.200,000		194.159.069.714,000		213.574.976.686,000	
Meningkatnya Tata Kelola Anggaran, Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah (%)	99,19	100	100	145.874.582.810,000	100	160.462.041.091,000	100	176.508.245.200,000	100	194.159.069.714,000	100	213.574.976.686,000	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Keuangan Daerah
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					1.348.659.180,000		1.483.525.098,000		1.631.877.607,000		1.795.065.366,000		1.974.571.901,000	
Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Tingkat Akurasi Data Barang Milik Daerah (%)	93,54	100	100	1.348.659.180,000	100	1.483.525.098,000	100	1.631.877.607,000	100	1.795.065.366,000	100	1.974.571.901,000	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Keuangan Daerah
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					1.098.402.870,000		1.208.242.717,000		1.329.066.989,000		1.461.973.688,000		1.608.171.057,000	
Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	96,44	100	100	1.098.402.870,000	100	1.208.242.717,000	100	1.329.066.989,000	100	1.461.973.688,000	100	1.608.171.057,000	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Keuangan Daerah
5.03 - KEPEGAWAIAN					5.371.590.763,000		5.659.590.763,000		6.017.590.763,000		6.356.590.763,000		6.643.590.763,000	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.601.590.763,000		3.709.590.763,000		3.842.590.763,000		3.991.590.763,000		4.143.590.763,000	
Tercapainya Nilai Evaluasi Sakip dengan Kategori BB (70-80)	Nilai Sakip OPD (Indeks)	76,2	70-80	70-80	3.601.590.763,000	70-80	3.709.590.763,000	70-80	3.842.590.763,000	70-80	3.991.590.763,000	70-80	4.143.590.763,000	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					1.770.000.000,000		1.950.000.000,000		2.175.000.000,000		2.365.000.000,000		2.500.000.000,000	
Meningkatnya Kompetensi dan Kualifikasi ASN	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (%)	33,9	34,5	35,1	1.770.000.000,000	35,7	1.950.000.000,000	36,3	2.175.000.000,000	36,9	2.365.000.000,000	37,6	2.500.000.000,000	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Persentase Keterisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Pengawas sesuai Kualifikasi dan Kompetensi (%)	85,91	90	92		94		96		98		98		5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					129.863.000,000		160.000.000,000		190.000.000,000		220.000.000,000		220.000.000,000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					129.863.000,000		160.000.000,000		190.000.000,000		220.000.000,000		220.000.000,000	
Meningkatnya Pengembangan Kompetensi Manajerial ASN	Persentase ASN yang Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Manajerial (%)	19,84	38	39	129.863.000,000	40	160.000.000,000	41	190.000.000,000	41	220.000.000,000	41	220.000.000,000	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					1.273.388.000,000		1.360.726.000,000		1.456.798.000,000		1.562.519.000,000		1.678.769.000,000	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					1.273.388.000,000		1.360.726.000,000		1.456.798.000,000		1.562.519.000,000		1.678.769.000,000	
Meningkatnya keselarasan kerangka ekosistem riset inovasi daerah terhadap potensi dan isu strategi daerah	Persentase Keselarasan Kerangka Ekosistem Riset Inovasi Daerah terhadap Potensi dan Isu Strategis Daerah (%)	100	100	100	219.984.000,000	100	241.982.000,000	100	266.180.000,000	100	292.798.000,000	100	322.077.000,000	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi	Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasik an Inovasi (%)	19	20	30	400.000.000,000	35	400.000.000,000	40	400.000.000,000	45	400.000.000,000	50	400.000.000,000	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya rekomendasi yang disampaikan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan (n+)	Persentase Rekomendasi yang disampaikan sebagai Dasar dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan (n+) (%)	0	100	100	653.404.000,000	100	718.744.000,000	100	790.618.000,000	100	869.721.000,000	100	956.692.000,000	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					10.327.038.800,000		12.331.802.055,000		13.642.953.331,000		14.941.178.258,000		16.288.206.186,000	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.174.000.000,000		7.646.500.000,000		8.341.250.000,000		9.148.475.000,000		9.991.322.500,000	
Meningkatkan pengawasan dan pendampingan OPD dan perangkat pemerintah daerah	Nilai Sakip OPD yang Dinilai Inspektorat Daerah (Nilai)	60,23	60-70	60-70	90.000.000,000	60-70	95.000.000,000	60-70	110.000.000,000	60-70	110.000.000,000	60-70	121.000.000,000	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Meningkatkan Sumber Daya manusia (SDM).	Nilai Sakip OPD yang Dinilai Inspektorat Daerah (Nilai)	60,23	60-70	60-70	340.000.000,000	60-70	450.000.000,000	60-70	450.000.000,000	60-70	500.000.000,000	60-70	550.000.000,000	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Meningkatnya aksesibilitas dan transparansi data	Nilai Sakip OPD yang Dinilai	60,23	60-70	60-70	50.000.000,000	60-70	150.000.000,000	60-70	150.000.000,000	60-70	150.000.000,000	60-70	150.000.000,000	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Inspektorat Daerah (Nilai)													
Terlaksananya Operasional Rutin Kantor OPD	Nilai Sakip OPD yang Dinilai Inspektorat Daerah (Nilai)	60,23	60-70	60-70	5.694.000.000,000	60-70	6.951.500.000,000	60-70	7.631.250.000,000	60-70	8.388.475.000,000	60-70	9.170.322.500,000	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					3.101.758.800,000		3.492.230.055,000		3.897.310.531,000		4.217.670.538,000		4.564.347.694,000	
Meningkatkan komitmen OPD dan perangkat pemerintah dalam memperkuat pengendalian internal	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Eksternal yang Ditindaklanjuti (%)	81,69	82	82	293.306.000,000	82	307.971.300,000	85	338.768.430,000	85	355.706.852,000	85	391.277.537,000	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti (%)	0	82	82		82		85		85		85		6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Meningkatkan pengawasan dan pendampingan OPD dan perangkat pemerintah daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti (%)	0	82	82	910.343.650,000	82	1.054.002.890,000	85	1.225.371.529,000	85	1.324.959.059,000	85	1.457.454.965,000	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Eksternal yang Ditindaklanjuti (%)	81,69	82	82		82		85		85		85		6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Meningkatkan peran dan pelayananan APIP terhadap pengawasan atas ketaatan OPD	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti (%)	0	82	82	830.007.150,000	82	940.502.565,000	85	1.036.518.222,000	85	1.129.125.463,000	85	1.204.493.061,000	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Eksternal yang Ditindaklanjuti (%)	81,69	82	82		82		85		85		85		6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Meningkatkan peran dan pelayananan APIP terhadap pengawasan atas kinerja OPD	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti (%)	0	82	82	905.558.000,000	82	1.010.954.900,000	85	1.154.974.110,000	85	1.246.033.100,000	85	1.333.091.461,000	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Eksternal yang Ditindaklanjuti (%)	8.169	82	82		82		85		85		85		6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
	Nilai Evaluasi SAKIP Rata-Rata Organisasi Perangkat Daerah (Nilai)	0	60-70	60-70		60-70		60-70		60-70		60-70		6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksanannya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti (%)	0	82	82	162.544.000,000	82	178.798.400,000	82	141.678.240,000	85	161.846.064,000	85	178.030.670,000	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Eksternal yang Ditindaklanjuti (%)	81,69	82	82		82		82		85		85		6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					1.051.280.000,000		1.193.072.000,000		1.404.392.800,000		1.575.032.720,000		1.732.535.992,000	
Meningkatkan komitmen OPD dan perangkat pemerintah dalam memperkuat pengendalian internal	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Perangkat Daerah (Nilai)	3,148	3,148	3,200	140.000.000,000	3,300	149.000.000,000	3,400	208.000.000,000	3,500	203.900.000,000	3,500	224.290.000,000	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)		Terintegrasi (Integrated)		Terintegrasi (Integrated)		Terintegrasi (Integrated)		Terintegrasi (Integrated)		6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Meningkatkan pengawasan dan pendampingan OPD dan perangkat pemerintah daerah	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Perangkat Daerah (Nilai)	3.148	3.148	3,200	494.640.000,000	3,300	564.936.000,000	3,400	645.386.400,000	3,500	737.475.360,000	3,500	811.222.896,000	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)		Terintegrasi (Integrated)		Terintegrasi (Integrated)		Terintegrasi (Integrated)		Terintegrasi (Integrated)		6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Meningkatkan peran dan pelayanan APIP terhadap pengawasan atas kinerja OPD	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Perangkat Daerah (Nilai)	3.148	3.148	3,200	416.640.000,000	3,300	479.136.000,000	3,400	551.006.400,000	3,500	633.657.360,000	3,500	697.023.096,000	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)		Terintegrasi (Integrated)		Terintegrasi (Integrated)		Terintegrasi (Integrated)		Terintegrasi (Integrated)		6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
7.01 - KECAMATAN					28.750.661.649,000		31.111.035.077,000		33.489.895.172,000		35.895.973.937,000		38.564.951.898,000	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					22.309.961.249,000		24.145.018.637,000		25.868.301.088,000		27.741.874.446,000		29.798.472.430,000	
Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	1.213.609.399,000	100	1.213.609.399,000	100	1.213.609.399,000	100	1.213.609.399,000	100	1.213.609.399,000	7.01.7.01.0.00.06.0000 - Kecamatan Muara Kemumu



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatkan Tata Kelola Kecamatan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	7.427.645.570,000	100	8.170.410.126,000	100	8.987.451.139,000	100	9.904.871.513,000	100	10.895.358.764,000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Kepahiang
Meningkatkan Tata Kelola Kecamatan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan (Persentase)	100	100	100	2.700.000.000,000	100	2.700.000.000,000	100	2.700.000.000,000	100	2.700.000.000,000	100	2.700.000.000,000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Kabawetan
Meningkatkan Tata Kelola Kecamatan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	2.115.060.000,000	100	2.327.726.000,000	100	2.558.798.600,000	100	2.642.392.789,000	100	2.836.788.406,000	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Seberang Musi
Meningkatkan Tata Kelola Kecamatan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan (Persentase)	100	100	100	2.946.915.448,000	100	3.326.166.093,000	100	3.626.041.102,000	100	3.988.232.212,000	100	4.386.947.334,000	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Tebat Karai
Meningkatkan Tata Kelola Kecamatan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan (Persentase)	100	100	100	1.928.941.060,000	100	1.928.941.060,000	100	1.928.941.060,000	100	1.928.941.060,000	100	1.928.941.060,000	7.01.7.01.0.00.05.0000 - Kecamatan Bermani Ilir
Meningkatkan Tata Kelola Kelurahan Dusun Kepahiang	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan (Persentase)	100	100	100	79.309.780,000	100	87.240.758,000	100	95.964.833,000	100	105.561.315,000	100	116.117.447,000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Kepahiang
														7.01.0.00.0.00.01.0004 - Kelurahan Dusun Kepahiang
Meningkatkan Tata Kelola Kelurahan Kampung Pensiunan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan (Persentase)	100	100	100	74.073.501,000	100	81.480.851,000	100	89.628.935,000	100	98.591.528,000	100	108.450.681,000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Kepahiang
														7.01.0.00.0.00.01.0005 - kelurahan Kampung Pensiunan
Meningkatkan Tata Kelola Kelurahan Keban Agung					75.029.900,000		75.029.900,000		75.029.900,000		75.029.900,000		75.029.900,000	7.01.0.00.0.00.05.0001 - Kelurahan Keban Agung
	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.7.01.0.00.05.0000 - Kecamatan Bermani Ilir
Meningkatkan Tata Kelola Kelurahan Padang Lekat	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan (Persentase)	100	100	100	80.520.000,000	100	88.572.000,000	100	97.429.200,000	100	107.172.120,000	100	117.889.331,000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Kepahiang
														7.01.0.00.0.00.01.0006 - Kelurahan Padang Lekat



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatkan Tata Kelola Kelurahan Pasar Kepahiang	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan (Persentase)	100	100	100	83.160.000,000	100	91.476.000,000	100	100.623.600,000	100	110.685.959,000	100	121.754.555,000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Kepahiang
														7.01.0.00.0.00.01.0002 - Kelurahan Pasar Kepahiang
Meningkatkan Tata Kelola Kelurahan Pasar Sejahtung	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan (Persentase)	100	100	100	80.519.945,000	100	88.571.939,000	100	93.808.939,000	100	135.771.569,000	100	149.348.724,000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Kepahiang
														7.01.0.00.0.00.01.0007 - Kelurahan Pasar Sejahtung
Meningkatkan Tata Kelola Kelurahan Pasar Ujung	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan (Persentase)	100	100	100	80.520.000,000	100	88.572.000,000	100	97.429.199,000	100	107.172.118,000	100	117.889.331,000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Kepahiang
														7.01.0.00.0.00.01.0001 - Kelurahan Pasar Ujung
Meningkatkan Tata Kelola Kelurahan Pensiunan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan (Persentase)	100	100	100	80.670.781,000	100	88.737.859,000	100	97.611.644,000	100	107.375.808,000	100	118.110.087,000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Kepahiang
														7.01.0.00.0.00.01.0003 - Kelurahan Pensiunan
Meningkatkan Tata Kelola Kelurahan Tangsi Baru	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan (Persentase)	100	100	100	80.520.000,000	100	88.572.000,000	100	97.429.199,000	100	107.172.118,000	100	117.889.331,000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Kabawetan
														7.01.0.00.0.00.02.0001 - Kelurahan Tangsi Baru
Meningkatkan Tata Kelola Kelurahan Tebat karai	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan (%)	100	100	100	49.000.000,000	100	54.000.000,000	100	58.500.000,000	100	64.300.000,000	100	64.300.000,000	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Tebat Karai
														7.01.0.00.0.00.04.0001 - Kelurahan Tebat Karai
Meningkatkan Tatakelola Kelurahan Ujan Mas Atas (Kelurahan Ujan Mas Atas)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	63.070.590,000	100	69.377.649,000	100	76.315.414,000	100	83.946.955,000	100	92.341.651,000	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Ujan Mas
														7.01.0.00.0.00.07.0001 - Kelurahan Ujan Mas Atas
Meningkatnya Persentase pelaksanaan Penunjang Urusan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan	100	100	100	2.455.185.855,000	100	2.755.704.441,000	100	2.970.774.885,000	100	3.267.852.373,000	100	3.594.637.611,000	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Ujan Mas



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemerintah Daerah Yang Baik	Pemerintahan Daerah (%)													
Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	656.958.670,000	100	777.654.937,000	100	855.420.632,000	100	940.952.994,000	100	985.601.855,000	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Merigi
Meningkatnya Tata Kelola Kelurahan Durian Depun	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan (Persentase)	100	100	100	39.250.750,000	100	43.175.625,000	100	47.493.408,000	100	52.242.716,000	100	57.466.963,000	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Merigi
														7.01.0.00.0.00.08.0001 - Kelurahan Durian Depun
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					221.829.300,000		243.012.230,000		265.793.453,000		290.372.798,000		286.719.639,000	
Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Ujan Mas Atas)	Persentase Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik (%)	100	100	100	12.829.300,000	100	14.112.230,000	100	15.523.453,000	100	17.075.798,000	100	18.783.378,000	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Ujan Mas
Meningkatkan Terselenggaraanya Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik (%)	100	100	100	25.000.000,000	100	27.500.000,000	100	30.250.000,000	100	33.275.000,000	100	14.662.061,000	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Merigi
MeningkatkanTerselen ggaranya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik (%)	100	100	100	62.000.000,000	100	68.200.000,000	100	75.000.000,000	100	82.500.000,000	100	82.500.000,000	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Tebat Karai
Mingkatnya Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan	Persentase Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik (%)	100	100	100	62.000.000,000	100	68.200.000,000	100	75.020.000,000	100	82.522.000,000	100	90.774.200,000	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Ujan Mas
MMENINGKATKAN TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik (%)	100	100	100	60.000.000,000	100	65.000.000,000	100	70.000.000,000	100	75.000.000,000	100	80.000.000,000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Kabawetan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.974.643.500,000		3.211.713.850,000		3.550.891.235,000		3.735.986.358,000		3.999.717.460,000	
Meningkatkan Masyarakat di Desa dan Kelurahan Yang di Berdayakan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	94.662.000,000	100	103.428.200,000	100	113.771.020,000	100	125.148.122,000	100	134.847.100,000	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Ujan Mas



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	14.041.500,000	100	15.445.650,000	100	16.990.215,000	100	18.689.236,000	100	20.558.160,000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Kepahiang
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	12.000.000,000	100	13.000.000,000	100	14.000.000,000	100	15.000.000,000	100	16.000.000,000	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Seberang Musi
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	12.000.000,000	100	13.200.000,000	100	14.520.000,000	100	16.072.000,000	100	17.669.200,000	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Merigi
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	77.000.000,000	100	84.700.000,000	100	92.070.000,000	100	101.277.000,000	100	101.277.000,000	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Tebat Karai
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Durian Depun	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	200.000.000,000	100	220.000.000,000	100	321.000.000,000	100	243.100.000,000	100	256.410.000,000	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Merigi
Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Dusun Kepahiang	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	220.000.000,000	100	242.000.000,000	100	266.200.000,000	100	292.820.000,000	100	322.102.000,000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Kepahiang
Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Padang Lekat	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	220.000.000,000	100	242.000.000,000	100	266.200.000,000	100	292.820.000,000	100	322.102.000,000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Kepahiang
Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Pasar Kepahiang	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	220.000.000,000	100	242.000.000,000	100	266.200.000,000	100	292.820.000,000	100	322.102.000,000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Kepahiang
Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Pasar Sejahtung	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	220.000.000,000	100	242.000.000,000	100	266.200.000,000	100	292.820.000,000	100	322.102.000,000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Kepahiang
Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Pensiunan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	220.000.000,000	100	242.000.000,000	100	266.200.000,000	100	292.820.000,000	100	322.102.000,000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Kepahiang
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelurahan Tebat Karai	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	200.000.000,000	100	220.000.000,000	100	242.000.000,000	100	266.200.000,000	100	266.200.000,000	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Tebat Karai
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarkat Kelurahan Kampung Pensiunan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	220.000.000,000	100	242.000.000,000	100	266.200.000,000	100	292.820.000,000	100	322.102.000,000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Kepahiang
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarkat Kelurahan Pasar Ujung	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	220.000.000,000	100	242.000.000,000	100	266.200.000,000	100	292.820.000,000	100	322.102.000,000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Kepahiang
Meningkatkan Tata Kelola Kelurahan Keban Agung	Persentase Pemberdayaan	100	100	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	7.01.7.01.0.00.05.0000 - Kecamatan Bermani Ilir



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)													
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	14.000.000,000	100	14.000.000,000	100	14.000.000,000	100	14.000.000,000	100	14.000.000,000	7.01.7.01.0.00.06.0000 - Kecamatan Muara Kemumu
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musrenbang	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	12.740.000,000	100	12.740.000,000	100	12.740.000,000	100	12.740.000,000	100	12.740.000,000	7.01.7.01.0.00.05.0000 - Kecamatan Bermani Ilir
Meningkatnya Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	220.000.000,000	100	242.000.000,000	100	266.200.000,000	100	292.820.000,000	100	322.102.000,000	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Ujan Mas
Terealisasinya PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	163.200.000,000	100	163.200.000,000	100	163.200.000,000	100	163.200.000,000	100	163.200.000,000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Kabawetan
Terlaksananya Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	15.000.000,000	100	16.000.000,000	100	17.000.000,000	100	18.000.000,000	100	20.000.000,000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Kabawetan
Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Di Kelurahan Tangsi Baru	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Kabawetan
														7.01.0.00.0.00.02.0001 - Kelurahan Tangsi Baru
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					30.000.000,000		33.000.000,000		36.300.000,000		39.930.000,000		41.261.000,000	
Meningkatkan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pemenuhan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	10.000.000,000	100	11.000.000,000	100	12.100.000,000	100	13.310.000,000	100	13.310.000,000	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Merigi
Meningkat koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Pemenuhan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	10.000.000,000	100	11.000.000,000	100	12.100.000,000	100	13.310.000,000	100	13.310.000,000	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Tebat Karai
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pemenuhan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	10.000.000,000	100	11.000.000,000	100	12.100.000,000	100	13.310.000,000	100	14.641.000,000	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Ujan Mas



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					3.214.227.600,000		3.478.290.360,000		3.768.609.396,000		4.087.810.335,000		4.438.781.369,000	
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kelurahan	Persentase Tingkat Pembinaan dan Pengawasan Desa (%)	100	100	100	192.600.000,000	100	192.600.000,000	100	192.600.000,000	100	192.600.000,000	100	192.600.000,000	7.01.7.01.0.00.05.0000 - Kecamatan Bermani Ilir
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Tingkat Pembinaan dan Pengawasan Desa (%)	100	100	100	1.910.409.600,000	100	2.101.450.560,000	100	2.311.595.616,000	100	2.542.755.177,000	100	2.797.030.695,000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Kepahiang
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Tingkat Pembinaan dan Pengawasan Desa (%)	100	100	100	15.000.000,000	100	15.000.000,000	100	15.000.000,000	100	15.000.000,000	100	15.000.000,000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Kabawetan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Tingkat Pembinaan dan Pengawasan Desa (%)	100	100	100	9.000.000,000	100	10.000.000,000	100	11.000.000,000	100	12.000.000,000	100	13.000.000,000	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Seberang Musi
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Tingkat Pembinaan dan Pengawasan Desa (%)	100	100	100	186.000.000,000	100	186.500.000,000	100	187.000.000,000	100	187.500.000,000	100	188.000.000,000	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Tebat Karai
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Tingkat Pembinaan dan Pengawasan Desa (%)	100	100	100	420.618.000,000	100	462.679.800,000	100	508.947.780,000	100	559.842.558,000	100	615.826.814,000	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Merigi
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Tingkat Pembinaan dan Pengawasan Desa (%)	100	100	100	186.000.000,000	100	186.000.000,000	100	186.000.000,000	100	186.000.000,000	100	186.000.000,000	7.01.7.01.0.00.06.0000 - Kecamatan Muara Kemumu
Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Tingkat Pembinaan dan Pengawasan Desa (%)	100	100	100	90.000.000,000	100	99.000.000,000	100	108.900.000,000	100	119.790.000,000	100	131.769.000,000	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Ujan Mas
														7.01.0.00.0.00.07.0001 - Kelurahan Ujan Mas Atas
Terpenuhinya Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Tingkat Pembinaan dan Pengawasan Desa (%)	100	100	100	204.600.000,000	100	225.060.000,000	100	247.566.000,000	100	272.322.600,000	100	299.554.860,000	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Ujan Mas
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					8.698.244.031,000		9.821.638.497,000		10.592.702.204,000		11.084.871.975,000		12.856.907.047,000	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.380.444.031,000		3.714.138.397,000		3.781.202.204,000		4.154.871.975,000		4.565.709.047,000	
Nilai Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	3.380.444.031,000	100	3.714.138.397,000	100	3.781.202.204,000	100	4.154.871.975,000	100	4.565.709.047,000	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Terlaksana dengan Baik (%)													8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Nilai Sakip OPD (Nilai)	73,2	75,80	80				80				80		
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					2.600.000.000,000		2.860.000.000,000		3.146.000.000,000		3.460.600.000,000		3.806.660.000,000	
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pelaksanaan Nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Fasilitasi Pencegahan Konflik Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa (%)	80	80	82	2.600.000.000,000	85	2.860.000.000,000	87,5	3.146.000.000,000	90	3.460.600.000,000	92,5	3.806.660.000,000	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					1.497.800.000,000		1.647.500.000,000		1.812.500.000,000		1.993.600.000,000		2.192.928.000,000	
Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Persentase Fasilitasi Pencegahan Konflik Di Bidang Politik Dalam Negeri (%)	80	80	85	1.497.800.000,000	87	1.647.500.000,000	89	1.812.500.000,000	90	1.993.600.000,000	90	2.192.928.000,000	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					100.000.000,000		110.000.000,000		121.000.000,000		133.100.000,000		146.410.000,000	
Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Fasilitasi Pencegahan Konflik Bidang Organisasi Kemasyarakatan (%)	0	0	40	100.000.000,000	45	110.000.000,000	50	121.000.000,000	55	133.100.000,000	60	146.410.000,000	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					120.000.000,000		390.000.100,000		522.000.000,000		557.200.000,000		695.200.000,000	
Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat	Persentase Fasilitasi Pencegahan Konflik Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama (%)	70	75	78	120.000.000,000	80	390.000.100,000	83	522.000.000,000	85	557.200.000,000	87	695.200.000,000	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					1.000.000.000,000		1.100.000.000,000		1.210.000.000,000		785.500.000,000		1.450.000.000,000	
Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang diselesaikan	Persentase Fasilitasi Pencegahan Konflik di Bidang Kwasdin dan Penanganan Konflik (%)	80	90	90	1.000.000.000,000	90	1.100.000.000,000	93	1.210.000.000,000	95	785.500.000,000	95	1.450.000.000,000	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					1.181.148.672.446,100		1.276.040.346.089,510		1.367.861.584.583,760		1.518.186.169.407,360		2.291.727.601.456,260	



4.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam RPJMD Kabupaten Kepahiang tahun 2025-2029 telah ditetapkan sebanyak 7 (Tujuh) Indikator Kinerja Utama (lihat Tabel 4.2)

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,02-72,42	72,32-72,72	72,62-73,02	72,92-73,32	73,22-73,62	73,52-73,92	
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	4,1-4,9	4,2-5,0	4,3-5,5	4,4-6,0	4,5-6,5	4,6-7,0	
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,36-2,23	2,34-2,31	2,32-2,29	2,30-2,27	2,28-2,25	2,26-2,23	
4.	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	62,90	64,33	65,76	67,19	68,62	70,05	
5.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	67,32	67,53	67,74	67,95	68,17	68,17	
6.	Indeks Risiko Bencana	Angka	89,52	88,90	88,50	88,00	87,50	87,50	
7.	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	70	75	80	85	90	95	
8.	Tingkat Kemiskinan	%	12,90-10,32	10,32-9,82	9,82-9,32	9,32-8,82	8,82-8,32	8,32-7,32	
9.	Indeks Gini	%	0,31-0,307	0,308-0,305	0,306-0,302	0,303-0,299	0,30-0,297	0,298-0,297	
10.	Indeks SPBE	Indeks	2,60	2,68	2,70	2,80	2,90	2,90	



4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi 4 (empat) aspek, yaitu: 1) daya saing daerah, 2) kesejahteraan masyarakat; 3) geografi dan demografi, dan 4) pelayanan umum (lihat Tabel 4.3).

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	2,96	3,01	3,05	3,1	3,15	3,17	
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	77,01	78,57	79,23	80,05	81,25	81,25	
3	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Angka	500 Miliar	500 Miliar	500 Miliar	500 Miliar	600 Miliar	600 Miliar	
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	%	4,1-4,9	4,2-5,0	4,3-5,5	4,4-6,0	4,5-6,5	4,6-7,0	
5	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Poin	0,43	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	
II	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,33	1,32	1,31	1,3	1,29	1,28	
2	Indeks Risiko Bencana	Indeks	89,30	88,90	88,50	88,00	87,50	87,50	
3	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	66,82	68,16	69,52	70,91	72,33	72,33	
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	67,32	67,53	67,74	67,95	68,17	68,17	
III	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Rasio Penduduk Yang Bekerja	%	74,80	74,85	74,89	74,9	74,92	74,92	
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,1-4,9	4,2-5,0	4,3-5,5	4,4-6,0	4,5-6,5	4,6-7,0	
3	Indeks Gini	Angka	0,31-0,307	0,308-0,305	0,306-0,302	0,303-0,299	0,30-0,297	0,298-0,297	
4	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,65	8,75	9,00	9,50	10,00	10,00	
5	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,02-72,42	72,32-72,72	72,62-73,02	72,92-73,32	73,22-73,62	73,52-73,92	
6	PDRB per Kapita	Rp. Juta Per Tahun	42,47-45,02	44,02-47,72	46,72-50,59	49,59-53,62	52,62-56,84	55,84-60,25	



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,36-2,23	2,34-2,31	2,32-2,29	2,30-2,27	2,28-2,25	2,26-2,23	
8	Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja	%	80,59	80,58	80,57	80,56	80,55	80,55	
9	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	6,75	6,85	6,95	7,05	7,15	7,15	
10	Tingkat Kemiskinan	%	12,90-10,32	10,32-9,82	9,82-9,32	9,32-8,82	8,82-8,32	8,32-7,32	
11	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	%	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	
12	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
13	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	72,91	73,41	73,91	74,41	74,91	74,91	
14	Kontribusi Sektor Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB Sektor Industri	%	1,15	1,2	1,25	1,3	1,35	1,35	
15	Prevalensi Stunting (pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	%	17,4-13,2	14,3-10,1	11,6-7,8	8,3-6,3	6,6-3,4	3,6-0,0	
16	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	Persentase	2,42	2,45	2,48	2,5	2,52	2,52	
17	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	%	2,07	2,09	2,11	2,13	2,15	2,15	
18	Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 tahun Ke Atas	%	76,7	76,73	76,75	76,77	76,79	76,79	
19	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	(%)	41	42	43	45	46	46	



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,33	3,44	3,53	3,66	3,85	4,18	
Layanan Urusan Wajib Dasar									
	Pendidikan								
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	99,98	100	100	100	100	100	
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Paket B	%	83,22	90,75	95,85	98,75	100	100	
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	100	100	100	100	100	100	
4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTS/Paket B	%	97,58	97,87	98,96	99,65	100	100	
5	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	85	75	68	55	40	40	
6	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTS/Paket B	%	58	46	37	25	10	10	
7	Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A	%	100	100	100	100	100	100	
8	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTS/Paket B	%	100	100	100	100	100	100	
9	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI/Paket A	%	95,63	96,55	98,75	99,85	100	100	
10	Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTS/Paket B	%	97,83	98,73	99,25	100	100	100	
11	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	Angka	75:104	80:104	82:104	83:104	84:104	85:104	
12	Sekolah Pendidikan SMP/MTS dan SMA/ SMK/MA Kondisi Bangunan Baik	Angka	24:30	23:30	24:30	25:30	26:30	27:30	
	Kesehatan								
1	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran	Orang	11,69	10,76	10,31	9,51	9,15	9,15	
3	Angka Kematian Neonatal (AKN)	Orang	8,99	8,18	7,84	7,13	6,86	6,86	



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	per 1.000 kelahiran hidup.								
4	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	89,93	86,06	82,51	79,24	76,22	76,22	
5	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk (satuan penduduk)	Angka	0,025	0,026	0,027	0,028	0,03	0,03	
6	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk	Angka	1	1	1	1	1	1	
7	Rasio Dokter per Satuan Penduduk	Angka	0,27	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	
8	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	%	68	69	70	71	72	72	
9	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	100	100	100	100	100	100	
10	Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	80	80	80	80	80	80	
11	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak	%	80	85	90	93	95	95	
13	Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani	%	100	100	100	100	100	100	
14	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis	per 100.000 penduduk	386	348	347	282	253	253	
15	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis	per 100.000 penduduk	0	0	0	0	0	0	
16	Proporsi Jumlah Kasus	Angka	386	348	347	282	253	253	



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS								
17	Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS	%	100	100	100	100	100	100	
18	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100	
19	Penderita Diare yang Ditangani	%	100	100	100	100	100	100	
20	Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari Total Populasi	%	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	
21	Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS	%	100	100	100	100	100	100	
22	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	80	85	90	95	100	100	
23	Cakupan Kunjungan Bayi	%	86	87	88	89	90	90	
24	Cakupan Pembantu Puskesmas	%	31,62	32,48	33,33	34,19	38,46	38,46	
25	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	100	100	100	100	100	100	
26	Cakupan Pelayanan Nifas	%	74	75	76	77	78	78	
27	Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani	%	44	45	46	47	48	48	
28	Cakupan Pelayanan Anak Balita	%	100	100	100	100	100	100	
29	Cakupan Pemberian Makanan	%	65	70	72	75	80	90	



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin								
30	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	100	100	100	100	100	100	
31	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)	%	100	100	100	100	100	100	
32	Cakupan Desa/ Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam	%	100	100	100	100	100	100	
33	Persentase Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	36	46	55	61	70	70	
34	Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	80,0	85,0	90,0	93,0	95,0	95,0	
35	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)	%	81,5	81,6	81,7	81,8	81,9	82	
37	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
38	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%	64,30	66,10	67,90	69,70	72,00	72,00	
39	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (<i>Treatment Success Rate</i>)	%	90	90	90	90	90	90	
40	Jumlah Kematian Ibu	Orang	2	2	2	2	2	2	



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
41	Rasio Tenaga Kesehatan (Nakes) dan Tenaga Medis (Named) terhadap Populasi	Per 1000	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	
42	Jumlah Kematian Balita	Orang	25	24	23	22	21	21	
43	Persentase Puskesmas dengan SDMK Sesuai Standar	%	50	57	71	79	86	86	
44	Jumlah Kematian Bayi	Orang	24	23	22	21	20	20	
45	Jumlah Kematian Neonatal	Orang	22	21	20	19	18	18	
46	Persentase Jumlah Puskesmas	%	175	175	175	175	175	188	
47	Insidensi Tuberkulosis	Per 100.000 Penduduk	254	228	203	181	161	161	
48	Insiden HIV	Angka	0,02	0,02	0,02	0	0	0	
49	Angka Kematian Balita	Per 1000 Kelahiran	13,49	12,48	11,96	11,09	10,67	10,67	
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	Angka	0,175	0,173	0,173	0,174	0,174	0,174	
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat									
1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	75	85	85	85	85	90	
2	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	15	15	15	15	10	10	
Sosial									
4	Persentase PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	80	81	81	82	82	82	
5	Persentase PPKS yang Tertangani	%	75	76	76	77	77	77	
6	Persentase PPKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	75	76	76	77	77	77	



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar								
7	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	85	85	90	90	95	95	
8	Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	%	75	76	76	77	77	77	
9	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial	%	75	76	76	77	77	77	
Layanan Urusan Wajib Non Dasar									
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
1	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	59,3	60,1	60,1	60,56	60,56	60,56	
2	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR	Angka	1	1	1	1	1	1	
3	Rasio KDRT	Angka	0,019	0,021	0,027	0,015	0,014	0,014	
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	63,3	63,1	63,5	63,6	63,7	63,7	
5	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	35	35	35	35	35	35	



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Lingkungan Hidup									
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Nilai	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
2	Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota	Nilai	Tidak	Tidak	Iya	Iya	Iya	Iya	
3	Terselenggaranya KLHS Untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi	Nilai	Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	
4	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH d yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Angka	45	45	45	45	45	45	
5	Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	Orang	0	2	2	2	2	2	
6	Terfasilitasi Penyediaan Sarana/ Prasarana	%	13	25	50	75	88	88	
7	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1	1	
8	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Entitas	2	4	6	8	10	10	
9	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	Angka	15	15	15	15	15	15	



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	yang di Terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/ Kota								
10	Indeks Kualitas Air	Indeks	65,93	66,13	66,33	66,53	66,73	66,73	
11	Indeks Kualitas Udara	Indeks	72,62	72,92	73,22	73,52	73,82	73,82	
12	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	65,93	66,13	66,33	66,53	66,73	66,73	
13	Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan	Orang	0	5	5	5	5	5	
14	Timbunan Sampah yang ditangani	Ton	8.500	8.700	9.000	9.500	9.700	9.700	
15	Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R	Ton	200	300	500	1.000	2.000	2.000	
16	Persentase Cakupan Area Pelayanan	%	46	52	60	65	70	70	
17	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota	Angka	1	1	1	1	1	1	
18	Persentase Pengelolaan Sampah Oleh Swasta yang Taat Terhadap Peraturan Perundang Undangan	%	0	15	28	57	85	85	
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
1	Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk	%	98	99	100	100	100	100	
2	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	%	99	100	100	100	100	100	
3	Rasio Pasangan Berakte Nikah	%	62	65	70	72	75	75	
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Persentase	100	100	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Persentase	100	100	100	100	100	100	
6	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	98	99	100	100	100	100	
7	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	%	99	100	100	100	100	100	
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
1	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Kelompok	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Posyandu aktif	%	100	100	100	100	100	100	
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1	Total Fertility Rate (TFR)	Orang	2,17	2,16	2,15	2,14	2,14	2,14	
2	Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan	Kerja Sama	2	3	3	3	3	3	
3	Ratio Akseptor KB	%	79,5	79,6	79,7	79,8	79,9	80	
4	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49	%	65,9	66	66,1	66,2	66,3	66,4	
5	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) Per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19)	%	34	33,9	33,8	33,7	33,6	33,5	
6	Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	9,3	9,2	9,1	9	8,9	8,8	
7	Persentase Penggunaan Kontrasepsi	%	25,42	25,43	25,44	25,45	25,46	25,47	



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Jangka Panjang (MKJP)								
8	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	%	79,14	79,16	79,18	79,2	79,22	79,24	
9	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	51,8	51,81	51,82	51,83	51,84	51,85	
10	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	46,57	46,58	46,59	46,6	46,61	46,62	
11	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	17,08	17,09	17,1	17,11	17,12	17,13	
12	Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	%	100	100	100	100	100	100	
13	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	
14	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	
15	Persentase Faskes dan Jejaringnya (di Seluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerjasama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai dengan	%	100	100	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Standarisasi Pelayanan								
16	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa	%	100	100	100	100	100	100	
17	Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	%	97,51	97,52	97,53	97,54	97,55	97,56	
18	Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	%	56,37	56,38	56,39	56,4	56,41	56,42	
19	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita	Tahun	20,92	20,93	20,94	20,95	20,96	20,97	
Perhubungan									
1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	Kali	63.000	63.500	64.000	64.500	65.000	65.500	
2	Persentase Layanan Angkutan Darat	%	43	43	44	45,5	45,5	45,5	
3	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum	Angka	63.000	63.500	64.000	64.500	65.000	65.500	
4	Pemasangan Rambu-Rambu	Unit	0	0	50	50	150	150	
5	Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara /Terminal Per Tahun	Angka	63.000	63.500	64.000	64.500	65.000	65.500	
Komunikasi dan Informatika									
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,6	2,68	2,7	2,8	2,9	2,9	



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah								
1	Persentase koperasi sehat	%	5	10	15	20	25	25	
	Penanam Modal								
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Orang	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
2	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Angka	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
3	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	%	10	10	10	10	10	10	
	Kepemudaan dan Olahraga								
4	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	2,83	3,03	3,23	3,43	3,63	3,83	
5	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	2	3	3	4	4	4	
6	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	%	51	55	58	60	63	63	
7	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	340	350	360	370	380	390	
8	Jumlah Atlet Berprestasi	Orang	80	85	85	90	90	90	
9	Jumlah Prestasi Olahraga	Angka	55	58	58	60	60	60	
	Perpustakaan								
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Orang	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300	
2	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Buku	24.000	25.000	26.000	27.000	28.000	28.000	
3	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	Angka	200	210	220	230	240	250	
4	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Orang	575	583	592	600	608	608	
5	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Buku	8.100	8.200	8.300	8.400	8.500	8.500	
6	Jumlah Pustakawan,	Orang	10	15	25	30	35	45	



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat								
7	Persentase Peningkatan Pemustaka	%	2,45	2,51	2,58	2,60	2,70	2,77	
Kearsipan									
1	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	44,6	53,5	62,5	71,4	80,3	100	
2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Angka	63	71	80	92	100	115	
Layanan Urusan Pilihan									
Pariwisata									
1	Kunjungan Wisata	Orang	25.000	2.6000	26.500	27.000	27.500	27.500	
2	Lama Kunjungan Wisata	Hari	1,42	1,62	1,82	2,02	2,22	2,22	
3	PAD Sektor Pariwisata	Angka	1.130.00 0.000	1.182.50 0.000	1.235.00 0.000	1.287.50 0.000	1.340.00 0.000	1.340.00 0.000	
Penunjang Urusan									
Perencanaan Pembangunan									
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
4	Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan									
1	Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan	Angka	28,8	29,6	30,3	31,1	31,9	32,6	

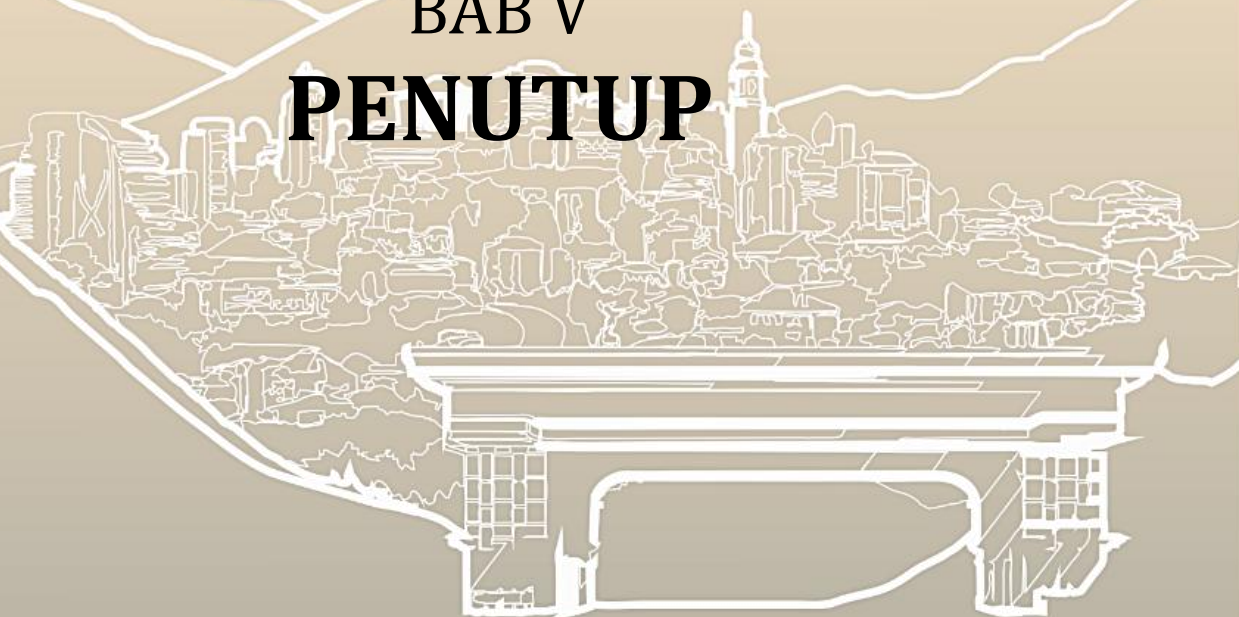


NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pendidikan dan Pelatihan								
2	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	%	34,5	35,1	35,7	36,3	36,9	37,6	
3	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	%	49,7	52,3	55	57,6	60,2	60,2	
4	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	Angka	28	28	28	28	28	28	
5	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	Angka	353	353	353	353	353	353	
6	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah	Angka	1.657	1.667	1.677	1.687	1.697	1.697	
Pengawasan									
1	Persentase tindak lanjut temuan	%	82	82	82	85	85	85	
2	Jumlah Temuan BPK	Angka	16	15	14	12	10	10	
Sekretariat Dewan									
1	Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Dokumen/Laporan	1	1	1	1	1	1	



BAB V

PENUTUP



BAB V

PENUTUP

5.1 PEDOMAN TRANSISI

RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029 disusun dengan mempertimbangkan 2 (dua) momentum besar yang terjadi pada tahun 2024, yaitu: 1) penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak; dan 2) penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 sebagai dokumen yang menggantikan dokumen yang sebelumnya.

Dengan kedua momentum tersebut maka akan terjadi kesamaan antara periode pemerintahan (baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota) dan periode perencanaan pembangunan secara keseluruhan. Dengan demikian akan terjadi konsistensi dan sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan di semua tingkatan pemerintahan. Secara transisional, untuk menjaga kesinambungan pembangunan tahunan daerah sebelum RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029 ditetapkan secara definitif maka Rancangan RKPD dan APBD Tahun 2025 yang disusun pada tahun 2024 berpedoman pada dokumen rencana pembangunan jangka menengah transisi, yaitu dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan dokumen RPJPD pada periode sebelumnya.

Hal ini sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RKPD masa transisi tersebut antara lain bertujuan untuk menyelesaikan target-target dan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang belum tertangani seluruhnya serta permasalahan-permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis yang dihadapi pada tahun pertama masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru. Selanjutnya, RKPD masa transisi tersebut merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilukada pada periode berikutnya. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

hasil Pilkada Tahun 2024 tetap mempunyai ruang gerak untuk menyempurnakan RKPD dan APBD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025 yang telah disusun untuk meningkatkan kinerja pembangunan daerah yang lebih baik.

5.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah pelaksanaan merupakan aturan atau norma yang wajib dipatuhi dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029 yang bertujuan untuk menjamin terwujudnya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang yang dijabarkan kedalam Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029 perlu ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang dan para pemangku kepentingan agar sungguh-sungguh melaksanakan program- program pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029.
- 2) Setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029.
- 3) RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029 agar dijabarkan setiap tahun kedalam RKPD Kabupaten Kepahiang yang memuat antara lain kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah selama satu tahun kedepannya termasuk pagu indikatifnya.
- 4) Penyusunan RKPD Kabupaten Kepahiang dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten.
- 5) RKPD Kabupaten Kepahiang harus menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang memuat antara lain kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya selama satu tahun kedepannya termasuk pagu indikatifnya.
- 6) Renja PD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

- 7) Dalam upaya untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah, RKPD Kabupaten Kepahiang merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD.
- 8) Dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029, setiap Perangkat Daerah perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029 ini serta melakukan diseminasi baik kepada aparat yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang, Instansi vertikal terkait maupun masyarakat luas.
- 9) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029 perlu dilakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD tersebut sebagai berikut:
 - a. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing masing pimpinan Perangkat Daerah.
 - b. Kepala Bappeda Kabupaten Kepahiang menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan di masing-masing pimpinan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
 - c. Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Perangkat Daerah periode sebelumnya.
 - d. Kepala Bappeda Kabupaten Kepahiang menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Perangkat Daerah.
 - e. Hasil evaluasi tersebut menjadi bahan penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.